

Dr. MUKTI FAJAR ND.



UMKM & GLOBALISASI EKONOMI





UMKM dan Globalisasi Ekonomi

Dr. Mukti Fajar ND.

LP3M UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | 2015

UMKM dan Globalisasi Ekonomi

Penulis : Dr. Mukti Fajar ND.

Desain : Djoko Supriyanto

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau

Seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Juni 2015

Diterbitkan oleh Lembaga Penelitian, Publikasi & Pengabdian

Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Lingkar Selatan Bantul Yogyakarta.

Telp : 0274-387656 pesawat 159

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

UMKM dan Globalisasi Ekonomi / Mukti Fajar ND, __ Yogyakarta

LP3M UMY Yogyakarta

XXX; 17 x 24 cm.

Kata Pengantar

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu aktor ekonomi yang penting di Indonesia. Karena jumlahnya yang signifikan dan menyerap tenaga kerja yang luar biasa banyaknya. Keberadaannya menarik untuk dikaji disetiap tahap perjalanan pembangunan ekonomi bangsa. Sejak kelahirannya yang menjadi konsep pemikiran para *founding fathers*, hingga peranannya dalam penciptaan kesejahteraan bangsa.

Secara naratif buku ini akan mengkaji dari prespektif hukum ekonomi. Berawal dari kelahiran UMKM sebagai aktivitas kehidupan manusia dalam mencukupi kebutuhannya, keberadaannya dalam globalisasi ekonomi, kemampuan bertahan dalam krisis hingga masa depan UMKM di Indonesia. Baik secara filosofis, teoritis sampai pada dataran praktis. Dalam satu bagian buku ini, penulis akan mengkaji khusus mengenai perlindungan hukum UMKM di Indonesia, baik secara konstitusional, maupun kebijakan ketika harus masuk era pasar bebas.

Disadari oleh penulis, bahwa buku ini bukan karya yang sempurna. Banyak kekurangan dan berbagai kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan waktu

dan literature. Tetapi penulis tetap berharap, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum ekonomi.

Pada akhirnya penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Sri Widodo SH yang telah membantu mengumpulkan bahan. Tak lupa Kepada Drs Budi Mustopo dan teman-teman di Departemen UMKM dan Koperasi yang telah memasok data sebagai bahan penulisan.

“Sekali aku hidup, sekali aku mati, harus ada yang kupersembahkan bagi ibu pertiwi — meskipun hanya buku kecil ini”.

Yogyakarta, 12 Juni 2015

Mukti Fajar ND.

Daftar Isi

1. Belajar dari sejarah - 12

1. UMKM Bagian Aktivitas Hidup Masyarakat Dalam Mencukupi Kebutuhan Ekonomi - 12
2. Dari Kepentingan Agama Dan Negara, Hingga Mencari Keuntungan - 14
3. Kisah Sukses UMKM di Berbagai Perusahaan dan Negara - 19
 - a. Kisah Sukses Beberapa UMKM - 19
 - b. Kisah Sukses UMKM di Berbagai Negara - 26
4. Dari Semut Berubah Menjadi Gajah: Yang Besar Tetap Harus Menang - 33

2. UMKM dan Globalisasi Ekonomi - 45

1. Pengertian Globalisasi - 45
2. Kapitalisme Sebagai Kendaraan Globalisasi: Siapa Supirnya? - 49
3. Perusahaan Sebagai Aktor Globalisasi: Kisah Dari Jaman Ke Jaman - 56
4. Eksistensi UMKM Dalam Globalisasi Ekonomi: Peluang atau Ancaman - 63

3. Perlindungan UMKM di Indonesia - 81

1. Karakteristik UMKM di Indonesia: Manifestasi Ajaran Marheanisme Sukarno dan Konsep Co-Operation Hatta - 81
2. Pengertian dan Berbagai Bentuk Perusahaan UMKM di Indonesia - 93
 - a. Pengertian UMKM - 93
 - b. Berbagai Bentuk Perusahaan UMKM - 96
3. Mengapa UMKM perlu dilindungi? - 99
 - a. Besarnya Jumlah Pengusaha UMKM di Indonesia - 99
 - b. Berbagai Tekanan Dalam Sistem Persaingan Pasar Bebas bagi UMKM - 104
4. Regulasi UMKM Dipersimpangan Jalan - 106

4. Krisis Ekonomi Global dan Eksistensi UMKM - 114

1. Krisis Ekonomi Global: Siklus Penyakit dalam Kapitalisme - 114
2. Sistem Ekonomi Pasar Bebas dan Kekuatan Modal - 139
 - a. *Invisible Hand* Mengatur Pasar Bebas - 139
 - b. Akumulasi Modal adalah Kekuatan Kapitalisme Pasar Bebas - 143
 - c. UMKM dan Permodalan: Sebuah Persoalan Klasik - 148
3. Ketahanan UMKM Menghadapi Krisis Ekonomi - 163
4. Penguatan UMKM dalam Gempuran Krisis Global - 169
 - a. Strategi Pemberdayaan UMKM - 170
 - b. Keunikan Budaya Sebagai Kekuatan UMKM - 176

5. UMKM dan Penciptaan Kesejahteraan Bangsa - 189

1. UMKM Bagian Dari Pilar Ekonomi Bangsa - 189
2. UMKM Menciptakan Lapangan Kerja dan Kesejahteraan Sosial - 195
3. Paradigma Baru Kebijakan UMKM: Telaah Kritis

Undang-undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah - 202

4. Masa Depan UMKM Di Indonesia - 206
 - a. Dukungan Fasilitas Dan Proteksi Pemerintah - 210
 - b. Dukungan Dan Kemudahan Akses Finansial - 213

Belajar dari Sejarah

1. UMKM BAGIAN AKTIVITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT

Tidak ada yang tahu persis sejak kapan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya ditulis UMKM) ada dimuka bumi ini. Tetapi jika dilihat dari aktivitasnya, maka UMKM adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhannya yaitu kegiatan ekonomi dan perdagangn.

Sejak jaman awal pra sejarah hingga jaman modern ini, manusia berkumpul dan membentuk masyarakat, dimana hal ini dilakukan untuk saling bahu memahu dalam mencukupi kebutuhan hidupnya.

Diawali dengan cara berburu pada masyaraat nomaden, kemudian mulai menetap untuk bercocok tanam dan berternak. Kebutuhan hidup selain makan juga mulai dibuat, seperti; kelengkapan masak, alat-alat rumah tangga, persenjataan untuk berburu, pakaian hingga tenda atau rumah tinggal.

Namun tidak ada sebuah masyarakat yang mampu mencukupi kebutuhan mereka sendiri, seperti dikatakan O. M. Powers;

“No civilized community produces all the things which it consumes. A portion of its needs must be supplied by an interchange of products with other communities or nations and this is the beginning of commerce, either domestic or foreign”¹.

Oleh karena adanya kelebihan produksi dan kekurangan produk disuatu masyarakat, sementara ada kekurangan produk dan kelebihan di masyarakat lainnya maka antar kelompok masyarakat tersebut kemudian melakukan tukar menukar (barter) dan atau perdagangan.

Perdagangan sendiri menurut catatan Wade Starr yang mengutip “*Sumerian scripts*”, sudah berlangsung 4000 tahun sebelum masehi². Dilanjutkan dengan dokumen dari jaman Babylonia pada 2000 tahun sebelum masehi yang menceritakan bahwa Kerajaan Babylonia sudah mempunyai sistem perdagangan yang kompleks dan diatur oleh hukum. Dikisahkan Wade Starr bahwa:

They had a system of Commerce that included coined money (banks), receipts, titles, seals, signing and merchant law which evolved into Roman Law, then into Civil Law and later became Maritime Law.³

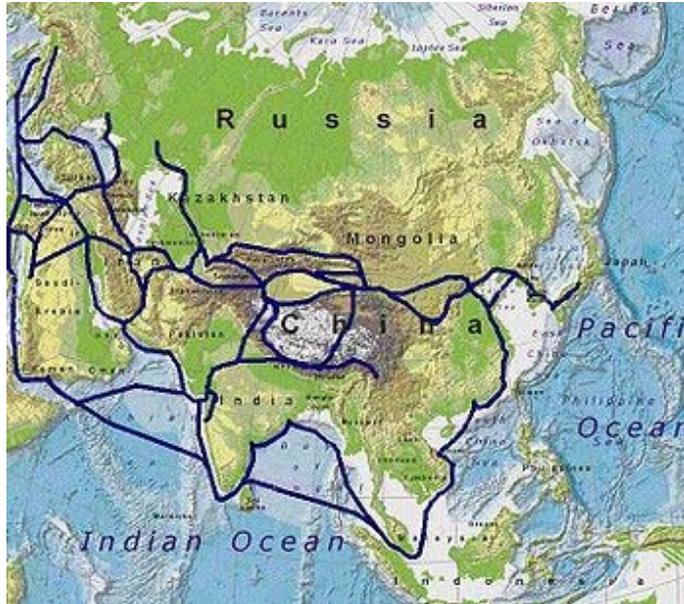
Ada pula catatan sejarah yang mengatakan bahwa, perdagangan sudah dilakukan 2500 tahun yang lalu melalui jalur sutera yang melintas dari daratan China hingga Eropa. Kejayaan jalur sutera berlangsung pada masa dinasti Yuan di Tiongkok dan kekaisaran Byzantium (Romawi)⁴.

Jalur sutera juga membentang melalui Asia Selatan yang dilalui oleh karavan dan kapal laut, dan menghubungkan Chang’an, Republik Rakyat Cina, dengan Antiokia, Suriah, dan juga tempat lainnya. Pengaruhnya terbawa sampai ke Korea dan Jepang, yang dimulai sejak 2000 tahun yang lalu⁵.

Jalur tersebut digunakan oleh para pedagang untuk melakukan pertukaran barang-barang. Kisah ini menjadi sangat penting tak hanya untuk pengembangan perdagangan tetapi juga pengembangan kebudayaan Cina, India dan Roma yang merupakan awal dari peradaban modern. Jalur perdagangan tersebut oleh geografer Jerman Ferdinand von Richthofen pada abad ke-19 diberikan nama *Silk Road* (Jalur sutera). Hingga saat ini jalur sutera masih menjadi jalan yang penting sebagai penghubung antar negara dan benua dalam perdagangan, bahkan dibuatkan jalur rel kereta api⁶.

Moment yang paling penting mengenai perdagangan yang tidak boleh dilewatkan adalah jaman Revolusi Industri di Eropa. Awal mulai Revolusi Industri menurut T.S. Ashton diperkirakan pada tahun 1760-1850, ketika

ditemukannya mesin uap untuk menggerakkan kapal, mesin bakar dan pembangkit tenaga listrik. Istilah “Revolusi Industri” diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis-Auguste Blanqui di pertengahan abad ke-19⁷.



Gambar Jalur Sutera

Revolusi Industri sendiri adalah perubahan teknologi, sosioekonomi, dan budaya pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 yang terjadi dengan penggantian ekonomi yang berdasarkan pekerja menjadi yang didominasi oleh industri dan diproduksi mesin. Revolusi ini dimulai di Inggris dengan perkenalan mesin uap (dengan menggunakan batu bara sebagai bahan bakar) dan ditenagai oleh mesin (terutama dalam produksi tekstil). Perkembangan peralatan mesin logam-keseluruhan pada dua dekade pertama dari abad ke-19 membuat produk mesin produksi untuk digunakan di industri lainnya⁸.

Efek budayanya menyebar ke seluruh Eropa Barat dan Amerika Utara, kemudian mempengaruhi seluruh dunia. Efek dari perubahan ini di masyarakat sangat besar dan seringkali dibandingkan dengan revolusi kebudayaan pada masa Neolitikum ketika pertanian mulai dilakukan dan membentuk peradaban, menggantikan kehidupan nomadik menuju masyarakat modern.⁹

Kisah seperti diatas tidak hanya ada di lura negeri. Bangsa Indonesia, sepanjang sejarahnya telah melalui berbagai pembabakan. Mulai dari era kejayaan Nusantara lama (Sriwijaya dan Majapahit), yang tak lama setelah keruntuhannya segera disambut oleh era kolonialisme yang menyakitkan, sampai dengan era kemerdekaan yang di dalamnya juga telah terisi dengan lembaran-lembaran sejarah perekonomian yang pasang surut.

Menurut keterangan WS Rendra yang merujuk buku Negarakertagama, bahwa kehebatan Prabu Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada tidak saja pada ilmu perang, tetapi kemampuan *leadership* dalam mengatur perdagangan antara kerajaan yang ada dibawah kekuasaan federasi kerajaan majapahit.

Prabu Hayam Wuruk membuat berbagai regulasi perdagangan bagi awuku-awuku (kerajaan jajahan majapahit) diseluruh nusantara dan tugas Gajah Mada untuk memastikan perdagangan berjalan lancar dan tidak diganggu oleh intervensi asing. Kesuksesan dua Hayam Wuruk dan Gajah Mada dikarenakan mereka menghormati demokrasi dan menempatkan hak-hak setiap manusia disetiap kerajaaan yang bergabung dibawah Majapahit. Rendra menegaskan¹⁰:

“Memberikan hak bagi setiap manusia berarti menghargai “daulat manusia”, dengan itu maka akan menimbulkan “daya hidup” dari setiap manusia untuk bekerja dan berproduksi secara optimal. Itulah salah satu sebab kejayaan kerajaan majapahit, baik secara ekonomi maupun politik”.

2. TUJUAN PERUSAHAAN: DARI KEPENTINGAN AGAMA DAN NEGARA HINGGA Mencari KEUNTUNGAN.

Para pedagang jaman dahulu yang sekedar bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai berkembang dan semakin banyak urusannya. Untuk itu mereka mulai membuat perusahaan sebagai kendaraan bisnisnya. Tetapi perlu ujuga kiranya bahwa tujuan pembiasaan perusahaan tersebut dari masa ke masa mempunyai maksud yang berbeda.

Tetapi tidak ada yang tahu persis tentang kelahiran perusahaan sebagai institusi sosial di dunia ini. Pembentukan perusahaan pada awal mulanya tidak begitu jelas maksudnya dan tujuannya. Apakah untuk kepentingan agama,

untuk kepentingan kejahatan, memberikan pelayanan publik, atau sebagai alat kekuasaan¹¹.

Beberapa catatan mengatakan bahwa awal kelahiran perusahaan terkait erat dengan kepentingan kekuasaan dan agama. Kisah ini dimulai ketika Gothic's King Totula mengepung Roma di awal tahun 547. Dia mengatakan bahwa St Benedict, kepala biara Monte Casino Roma sebagai penemu perusahaan modern (*corporation*). Sebutan ini muncul karena St Benedict membuat aturan tentang kelompok pekerja untuk para pekerja ketrampilan dan para pedagang yang diatur dengan *Benedictine Rules*¹².

Dalam Esai yang ditulis Max Weber; *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme* (*Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus*). Weber menitik beratkan penelitiannya tentang interaksi antara berbagai gagasan agama dan perilaku ekonomi.

Bakti keagamaan biasanya disertai dengan penolakan terhadap urusan duniawi, termasuk pengejaran ekonomi, tetapi hal tersebut tidak terjadi dalam Protestanisme. Weber menunjukkan bahwa tipe-tipe Protestanisme tertentu mendukung pengejaran rasional akan keuntungan ekonomi dan aktivitas duniawi yang telah diberikan arti rohani dan moral yang positif. Ini bukanlah tujuan dari ide-ide keagamaan, melainkan lebih merupakan sebuah produk sampingan, logika turunan dari doktrin-doktrin tersebut dan saran yang didasarkan pada pemikiran mereka yang secara langsung dan tidak langsung mendorong perencanaan dan penyangkalan-diri dalam pengejaran keuntungan ekonomi¹³.

Ia mendefinisikan “semangat kapitalisme” sebagai gagasan dan kebiasaan yang mendukung pengejaran yang rasional terhadap keuntungan ekonomi. Weber menulis,

“Agar suatu cara hidup yang teradaptasi dengan baik dengan ciri-ciri khusus kapitalisme, dapat mendominasi yang lainnya, hidup itu harus dimulai di suatu tempat, dan bukan dalam diri individu yang terisolasi semata, melainkan sebagai suatu cara hidup yang lazim bagi keseluruhan kelompok manusia.”¹⁴

Disini Weber ingin menegaskan bahwa proses ritual beragama dalam Protestan sejalan justru mendorong masyarakat untuk meningkatkan semangat dalam menjalankan aktifitas ekonomi¹⁵.

Begitu pula di Jazirah Arab, pada abad ke 5 - 6 Masehi, pada masa pra Islam maupun pada jaman kenabian Muhammad SAW, telah ada perusahaan dalam bentuknya yang sederhana, yang disebut *Al Shirkah*¹⁶. Tujuan dari *Al Sharikah* selain untuk perdagangan juga untuk meyebarkan agama Islam ke benua Asia dan kawasan Mediterania.

Hal ini karena dalam ajaran Islam menganjurkan manusia untuk berdagang, seperti yang tersurat dalam surat Al Baqoroh ayat 275; “Allah Menghalalkan Jual beli dan mengharamkan Riba “

Artinya perdagangan harus dilakukan dengan cara benar dan tidak licik atau mengambil *riba*. Sebab Islam Melarang adanya Riba seperti Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 130;

“Hei Orang orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”

Sebagai contoh konkret, Rosullullah Muhammad SAW sendiri adalah seorang pedagang. Dengan berdagang tersebut Nabi melakukan dakwah dan hasil keuntungannya digunakan untuk kepentingan agama Islam

Pada konteks sosial Islam juga mengatur proses untuk pemenuhan ekonomi dalam masyarakat agar tercipta kesejahteraan, menghilangkan ketimpangan-ketimpangan sosial. Umat Islam diwajibkan untuk saling tolong menolong dalam konteks sosial ekonomi. Rosullullah pernah bersabda: “*orang mumkmin bagi orang mumkmin yang lain adalah seperti bangunan yang sebagian menguatkan sebagian yang lain*”¹⁷.

Kembali pada persoalan tujuan perusahaan Frank Rene Lopes memberikan beberapa catatan dan contoh berikut ini¹⁸:

The first corporations were created to serve the public. Corporations were created as an extension of either the church or the state. “Ecclesiastical” corporations, for example, were created as a device for the church to hold property. Most early corporations, however, were created to serve the sovereignty of kings and queens. For example, the Dutch West India Company’s charter authorized the corporation to “make contracts, engagements and alliances with princes and natives of the countries... to appoint and discharge Governors, people for war, and officers of justice, and other public officers, for the preservation of the places, keeping good

order, police and justice.”

Pada waktu itu konsep perusahaan sangat berbeda dengan konsep yang dikenal pada saat ini. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan kecil yang mungkin identik dengan istilah UMKM pada hari ini. Konsep perusahaan pada waktu itu juga mengalami pergeseran. Dari perusahaan kecil mereka digabungkan untuk menjadi perusahaan besar dan digunakan sebagai alat kolonialisme, Frank René López menjelaskan: ¹⁹

Corporations were small, quasi-government institutions chartered by the crown for a specific purpose. The idea was to bring together investors interested in financing large projects, such as exploration in colonies.

Banyak perusahaan modern yang dibuat oleh kerajaan Inggris. Beberapa diantaranya adalah; East Indian Trading Company didirikan pada tahun 1600 oleh Queen Elizabeth; The African Company didirikan tahun 1619; The South Sea Company didirikan tahun 1711; The Virginia Company didirikan tahun 1609; The Massachusetts Bay Company didirikan tahun 1629²⁰.

Di koloni Amerika, *British East India Company* menggarap berbagai proyek perkebunan seperti perkebunan teh dan kapas. Setelah revolusi Amerika 1776, perusahaan mulai mengerjakan berbagai proyek pertambangan dan perkeretaapian²¹.

Di benua Asia, *East India Company* mendapatkan hak monopoli untuk semua perdagangan dari Kaisar Jahangir, Raja kerajaan Mughal. *East India Company* yang dipimpin Sir Thomas Roe sebagai utusan King James I pada tahun 1615 mendirikan perusahaan di kota Surat²².

Pada tahun 1602, di kerajaan Belanda berdiri *Verenigde Oostindische Compagnie* (*The Dutch East Indian Company* as VOC). Perusahaan ini mempunyai konsep tanggung jawab terbatas dari pemegang saham (*limited liability*) dengan bentuk *Naamlozen Vennootschap* (NV)²³.

VOC melakukan ekspansi perdagangan yang luas di Asia dan Afrika. Mereka mengawali bisnisnya di Tanjung Pengharapan Arfika Selatan. Membeli sutra dan teh dari Cina dan menjualnya ke Jepang dan Eropa. Di India mereka membeli tekstil untuk dijual kembali di kawasan Asia Timur. VOC mengambil rempah-rempah, kopi dan gula dari Jawa serta tembakau dari Perkebunan Deli Serdang Sumatra Utara (Indonesia)²⁴ untuk dijual ke Eropa

dan Amerika. Karena luas dan besarnya perdagangan serta kemampuan untuk memonopoli, VOC mendapat hak istimewa dari kerajaan Belanda untuk mencetak uang emas dan perak sebagai alat pembayarannya²⁵.

Ketika masa industrialisasi Amerika, perusahaan yang tadinya hanya perusahaan kecil atau perusahaan keluarga/ perseorangan telah melakukan akumulasi modal dengan cara merger. Pada akhir 1920an ditandai dengan merger besar-besaran yang dilakukan oleh 1800 perusahaan, menjadi 137 perusahaan mega. Oleh karenanya perusahaan telah mengalami transformasi dari *a quasi-public, state-controlled organization limited in size to.. a gigantic unlimited private organization with limited responsibility and limited accountability*.²⁶.

Di Amerika, perusahaan mulai tumbuh menjadi institusi raksasa. Perusahaan mempekerjakan ratusan bahkan ribuan pekerja, menguasai lahan yang luas dan mengakumulasi kekayaan yang sangat besar. Kondisi ini membuat perilaku mereka berubah. Perusahaan mulai mengabaikan kepentingan masyarakat. Perilakunya di arahkan oleh mentalitas untuk mengeruk keuntungan semata²⁷.

Seperti yang dikatakan Milton Friedman²⁸, yang provokatif di *The New York Times Magazine* pada tanggal 13 September 1970. Dalam tulisan tersebut Friedman menuliskan kesimpulan bahwa bisnis adalah:

*“..... to use its resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game, which is to say, engages in open and free competition without deception or fraud.”*²⁹

Milton Friedman hanya menitik beratkan, bahwa bisnis hanya untuk mencari keuntungan, sepanjang dilakukan dengan cara cara yang tidak melanggar hukum dan menjauhi cara cara penipuan.

Namun, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh perusahaan, dengan membuat produk yang aman dan tidak berbahaya, menjaga kelestarian lingkungan sesuai aturan, memberikan produk berkualitas dengan harga yang kompetitif, semuanya dilakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan (*increasing profit*). Dan bukan untuk meningkatkan kesejahteraan social.

Ini memperjelas bahwa Friedman adalah penganut fanatik dari ajaran pasar bebas Adam Smith. Sifat ramah dan memberikan pelayanan dari para

pebisnis selalu disertai niatan pamrih atas keuntungan yang mereka harapkan dari para pelanggan. Seperti yang disampaikan oleh Adam Smith³⁰

It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interest. We address ourselves, not to their humanity but to their self-love, and never talk to them of our own necessities but of their advantages.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang dahulu didirikan untuk kepentingan agama dan Negara telah berubah bermetamorfosis dengan berkiblat dan berorientasi untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Sampai hari ini telah dikonstruksikan oleh hukum perusahaan di seluruh sistem hukum di dunia. Artinya, *profit oriented* adalah sesuai dengan *nature* perusahaan yang dilahirkan oleh hukum perusahaan.³¹

3. KISAH SUKSES UMKM DI BERBAGAI PERUSAHAAN DAN NEGARA

Mungkin kita tidak begitu memperhatikan bahwa perusahaan-perusahaan besar yang eksis pada saat ini dahulunya hanya perusahaan kecil yang dilakukan oleh perseorangan atau keluarga. Dalam tulisan dibawah ini akan menceritakan beberapa kisah sukses orang-orang yang mengawali bisnisnya dari UMKM menjadi perusahaan besar.

a. Kisah Sukses UMKM di Berbagai Perusahaan

1) Henry Ford

Suatu hari di pertengahan tahun 1875, Henry dibawa ayahnya naik kereta kuda ke arah Detroit. Pada waktu itu Henry yang baru berusia 12 tahun menyaksikan sesuatu yang aneh di jalan raya. Ada kereta yang dapat berjalan sendiri tanpa ditarik kuda.

“Kereta yang jalan sendiri itu tiba-tiba berhenti, mempersilahkan kami yang di atas kereta kuda untuk lewat,” kata Henry dalam biografinya. Sang ayah yang melihat anaknya takjub langsung menghentikan kereta kudanya. Mereka kemudian turun dan berkenalan dengan orang yang berada di atas kereta yang dapat berjalan sendiri itu.

Ternyata kejadian itu menghilangkan minat dan perhatian Henry ke bidang pertanian. Pikirannya dipenuhi oleh kereta yang dapat berjalan sendiri. Henry yang sebelumnya bergelut dengan tanah dan bibit-bibit

tanaman mulai mengalihkan perhatiannya pada benda-benda logam. Selepas membantu ayahnya di perkebunan Henry menghabiskan seluruh waktu luangnya di bengkel kecil di sebuah gudang pertanian milik keluarga. Untuk memperdalam ilmu mesin Henry memutuskan magang di Drydock Engine Works.³²

Henry Ford yang dilahirkan pada tanggal 30 Juli 1863 berasal dari keluarga petani miskin. Ketiadaan biaya membuatnya tidak bisa melanjutkan pendidikan ke bangku SLTP. Setelah lulus SD ia membantu ayahnya di pertanian keluarga. Henry mengawali kisah suksesnya ini dari bengkel kecil di Detroit Amerika Serikat. Dia kerja siang malam dengan biaya dan peralatan seadanya. Tipikal pengusaha UMKM yang mempunyai semangat besar.

Di tahun 1892, atau persis 17 tahun setelah pertama kali menyaksikan kereta yang jalan sendiri tanpa ditarik kuda, Henry Ford menggemparkan penduduk Detroit. Ia keluar dari bengkelnya menunggang kuda besi yang mesinnya digerakkan oleh uap minyak bumi. Sesuatu yang menurut pakar-pakar mesin sangat mustahil, berhasil diwujudkan Henry Ford menjadi kenyataan. Ia berhasil membuat mobil pertama dalam peradaban manusia, yang mesinnya digerakkan uap minyak bumi.³³

Di mata pemilik Detroit Edison Company mobil ciptaan itu sangat istimewa, sehingga Henry Ford langsung ditawarkan jabatan tinggi, dan penghasilan yang berlipat ganda. Tetapi Henry malah mengundurkan diri dari Detroit Edison Company, dengan alasan jika jabatan itu diterima maka waktu dan seluruh tenaganya akan tersita habis pada perusahaan sehingga tidak punya waktu luang lagi untuk melanjutkan penelitian dan percobaan di bengkel pribadinya.

Lepas dari Detroit Edison Company, Henry Ford berhasil membujuk beberapa usahawan untuk mendirikan Detroit Auto mobil Company. Di sana ia diangkat sebagai kepala ahli mesin. Ternyata banyak ketidakcocokan antara Henry dan pemilik modal. Henry minta disediakan sejumlah dana untuk penelitian dan pengembangan tetapi usul ini tidak disetujui. Pemilik modal menginginkan mobil ciptaan Henry yang pertama saja yang diproduksi. Hasilnya, penjualan Detroit Automotif dalam waktu satu tahun tidak lebih dari 5 dan 6 unit mobil.

Henry terus berupaya meningkatkan mutu produksinya, antara lain dengan menciptakan Ford Model T yang sangat terkenal. Henry juga berusaha meningkatkan kinerja pabriknya. Dialah orang pertama yang menciptakan system perakitan mobil secara berurutan dan serba mekanis.

Pabrik Ford Motor terus diperluas ke berbagai negara. Tahun 1947, ketika Henry Ford meninggal dalam usia 84 tahun, pabrik Ford Motor di seluruh dunia telah mampu memproduksi mobil Ford sebanyak 4000 unit setiap hari. Tahun 1960, Ford Motor Company merupakan perusahaan terbesar kedua di dunia³⁴.

Pada tahun 2003 Ford Motor Company (FMC) merayakan hari jadinya yang ke-100 tahun, tepatnya tanggal 13 Juni. Ford Motor Company (FMC) merupakan perusahaan otomotif yang kendaraan roda empatnya merambah ke seluruh dunia. Disaat ini Ford Motor Company merupakan bagian dari "The Big Three" industri otomotif di Amerika selain dari, General Motors Corporation (GMC), dan Chrysler Corporation

2) Soichiro Honda

Kisah Soichiro Honda tidak jauh beda dengan Henry Ford. Honda hanya seorang biasa yang takjub melihat mobil buatan Amerika yang berseliweran di Jepang.

Dengan bengkel kecil dia mencoba mempelajari konstruksi dan mesin mobil. Selanjutnya dia merancang mobil sendiri yang *chasing* nya dibuat dengan kayu. Karena perjuangannya yang gigih akhirnya Soichiro Honda mampu mendirikan usaha kecil dengan mendirikan perusahaan Honda pada 24 September 1948.³⁵

Selanjutnya bisa kita saksikan pada hari ini, bahwa lebih dari 14 juta mobil dengan mesin pembakaran dibuat setiap tahun. Perusahaan honda yang merupakan UMKM telah menjelma menjadi Honda Motor Co., Ltd dan merupakan produsen mesin terbesar di dunia. Pada 2004, perusahaan ini mulai memproduksi motor diesel, yang sangat tenang dan tidak membutuhkan penyaring untuk dapat melewati standar polusi.

Honda Motor Co., Ltd. (*Honda Giken Kōgyō Kabushiki Kaisha*) adalah produsen mobil, truk, sepeda motor dan skuter asal Jepang. Mereka juga

membuat kendaraan segala medan (ATV), generator listrik, mesin kelautan, dan peralatan taman.

Honda Motor Co., Ltd telah menjadi *Big Corporation* yang sahamnya merupakan salah satu yang banyak di incar oleh investor di bursa efek dunia. Honda bermarkas di Tokyo. Saham mereka diperdagangkan di Bursa Saham Tokyo, Bursa Saham New York, dan juga perdagangan di Osaka, Nagoya, Sapporo, Kyoto, Fukuoka, London, Paris dan Swiss. American Honda Motor Co., bermarkas di Torrance, California³⁶

3) *Mark & Spencer*

Tak pernah ada yang menyangka bahwa Michael Mark adalah anak Polandia miskin yan terpaksa merantau ke Inggris karena kemelaratan yang diderita keluarganya.

Di Inggris di menjadi pedagang asongan barang-barang kelontong seperti pakaian, mainan anak-anak, peralatan rumah tangga dan barang-barang sepele yang bisa dia jual, sekedar untuk bertahan hidup di perantauan.

Karena berdagang keliling membuat sakit punggungnya, maka Mark memutuskan untuk menggelar dagangannya disuatu tempat yang ramai dilewati orang. Layaknya pedagang kaki lima di Pasar Tanah Abang yang sering kita lihat. Karena keuletan dan rajin menabung Michael Mark akhirnya bisa memiliki satu petak los di pasar.

Kisah selanjutnya Mark bertemu dengan Thomas Spencer yang ahli dibidang management dan keuangan. Duet ini akhirnya mendirikan perusahaan kecil dengan menggabungkan kedua nama mereka: Mark & Spencer.

Tidak lebih dari 10 tahun kerjasama itu terjadi, mereka telah memiliki belasan toko di berbagai wilayah di Inggris. Tokonya sangat laris dan digemari pelanggannya karena mereka menjual barang yang berkualitas disertai layanan yang baik dari para pegawainya.

Hari ini kita bisa saksikan outlet-outlet Mark & Spencer disetiap kota besar di dunia. Mark & Spencer adalah *brand* yang berkelas dunia dengan kualitas yang tidak diragukan. Ini semua adalah hasil jerih payah dan kerja keras duo Michael Mark dan Thomas Spencer. Karena suka bekerja keras maka keduanya tidak panjang umur tetapi perusahaannya dilanjutkan oleh

keluarga mereka hingga sekarang menjadi perusahaan yang mendunia.³⁷

4) *Mc. Donald's*

McDonald's Corporation adalah salah satu perusahaan restoran makanan cepat saji yang terbesar di dunia. Melayani hampir 47 juta pelanggan setiap harinya. Produk makanan utama McDonald adalah menjual *hamburgers, cheese-burgers, chicken products, French fries, breakfast items, soft drinks, milkshakes and desserts*. Ditambah juga dengan *salads, wraps and fruit*.

Mungkin kita tidak perhatikan, bahwa ketika bisnis ini dimulai pada tahun 1940, oleh Dick and Mac McDonald di San Bernardino, California dengan membuka restoran kecil, kategori pengusaha UMKM. Mereka memperkenalkan "Speedee Service System" pada tahun 1948 sebagai prinsip restoran *modern fast-food*.

Secara resmi perusahaan Mc Donald didirikan oleh Ray Kroc, di Des Plaines, Illinois pada 15 April, tahun 1955. Kroc kemudian menjual McDonald dengan cara *franchise* untuk berekspansi keseluruh pojok dunia. Perusahaan McDonald mulai masuk ke bursa saham pada tahun 1965 dan menjelma menjadi *fast food industry*.

Pendapatan perusahaan diambil dari royalti dan pembayaran fee yang dibayar oleh *franchisees*. McDonald's menagguik keuntungan pada tahun 2007 sebesar 22,8 Milyard Dollar Amerika billion dengan tingkat pertumbuhan pendapatan 9% setiap tahunnya, atau sekitar US \$ 3.9 billion.

Hari ini Mc Donald terdapat di 119 negara dengan 31.000 restoran dan memberi lapangan kerja bagi 1,5 juta orang tenaga kerja. Namun yang perlu dicatat oleh kita bersama bukan sekedar keuntungan yang luar biasa besar tersebut, tetapi perjuangan mereka sebagai pedagang makanan cepat saji yang menjadi symbol globalisasi dan penyebaran gaya hidup ala American.

Lalu pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah; "*mengapa gado-gado, lontong sayur, ayam goreng Mbok Berek dan seabreg makanan cepat saji ala Indonesia tidak bisa mendunia seperti halnya Mc Donald?*".

5) *Grameen Bank (Muhammad Yunus)*

Muhammad Yunus seorang ekonom dari Bangladesh yang mendirikan

bank yang memberikan kredit mikro bagi rakyat miskin. Kepedulianya dengan kondisi sekelilingnya dan tindakan nyata yang dilakukannya dalam rangka merubah hidup dan memandirikan rakyat miskin perlu menjadi catatan.³⁸

Muhammad Yunus yang lahir tahun 1940 adalah seorang doktor ilmu ekonomi dari Bangladesh yang menggagas konsep 'kredit mikro'. Sebuah konsep pengembangan pinjaman skala kecil untuk usahawan miskin yang tidak mampu meminjam dari bank umum.

Yunus mengimplementasikan gagasan ini dengan mendirikan Grameen Bank Pada tahun 1983, yang memberikan pinjaman kepada rakyat miskin. Kiat-kiatnya dalam mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan perempuan banyak direplikasikan oleh berbagai Lembaga Keuangan Mikro di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Grameen Bank yang mulai merintis pelayanan keuangan pada rakyat miskin itu, terutama kepada para perempuan miskin, kini kliennya mencapai 3,2 juta keluarga miskin. Dari penelitian yang dilakukan pada tahun 2001, dilaporkan 42% keluarga yang dilayani telah keluar dari kemiskinan. Tetapi ternyata Bank ini sukses besar tidak hanya dalam kontribusinya mengurangi kemiskinan di Bangladesh, tetapi juga dalam meraih keuntungan dari kredit yang disalurkan.

Hingga saat ini, Grameen Bank telah menyalurkan pinjaman lebih dari 3 billion dollar kepada sekitar 2,4 juta peminjam. Untuk menjamin pembayaran hutang, Grameen Bank menggunakan sistem 'kelompok solidaritas'. Kelompok-kelompok ini mengajukan pinjaman bersama-sama dan setiap anggotanya berfungsi sebagai penjamin bagi anggota yang lainnya sehingga mereka dapat berkembang bersama-sama. Prinsipnya adalah kepercayaan dan solidaritas.

Saat ini di Bangladesh, Grameen telah memiliki 1.084 cabang dengan 12.500 karyawan yang melayani 2,1 juta peminjam di 37.000 desa. Tingkat pengembalian pinjaman sebesar 98% merupakan rate tertinggi dibanding sistem perbankan manapun. Metode Grameen diterapkan dalam proyek-proyek di 58 negara termasuk AS, Kanada, Perancis dan Norwegia.

Dari usaha simpan pinjam untuk usaha mikro tersebut Muhammad dapat

mengembangkan Grameen Bank. Dari keuntungan yang didapat, Yunus mengembangkan ke usaha lain seperti Grameen Phone, Grameen Cybernet, Grameen Communications, Grameen Software company, Grameen Information Technology Park, Grameen Fund, Grameen Capital Management company, Grameen Textile company, Grameen Knitwear company, Grameen Renewable Energy company, Grameen Health company, Grameen Education company, Grameen Agriculture company, Grameen Fisheries and Live-stock company, Grameen Business Promotion company.³⁹

Yunus memiliki keahlian teknis dan konsep untuk membangun ekonomi rakyat miskin dengan memandirikan mereka melalui pemberian pinjaman untuk modal. Interaksinya dengan rakyat miskinlah yang menjadi pemicu dirinya untuk mendirikan Grameen Bank. Mulanya ia menanyai orang-orang miskin namun masih mau berusaha itu, hingga ia mendapat simpulan bahwa mereka membutuhkan modal. Dan lebih dari itu modal yang mereka butuhkan tidak besar, iapun mampu membantunya. Itulah awalnya Muhammad Yunus mendirikan Grameen Bank, yaitu bank yang memberikan pinjaman kepada kaum miskin Bangladesh tanpa jaminan.

Sebagai seorang pemimpin yang visioner, Yunus memiliki impian:

'Kita mampu mewujudkan apa yang ingin kita wujudkan. Bila kita gagal mencapai sesuatu, kecurigaan saya yang pertama adalah keseriusan dan intensitas kita dalam mewujudkan keinginan tersebut. Saya sangat percaya bahwa kita mampu menciptakan sebuah dunia yang bebas dari kemiskinan, kalau kita mau....Dalam dunia semacam itu, satu-satu tempat dimana kita akan dapat menyaksikan kemiskinan adalah di museum. Pada suatu hari nanti, ketika anak-anak sekolah berkunjung ke museum kemiskinan, mereka akan terkejut menyaksikan kesengsaraan dan penderitaan umat manusia pada masa lalu.'

Itulah keyakinan dan mimpi yang dimiliki oleh seorang Muhammad Yunus. Visinya adalah mengurangi sebisanya kemiskinan di dunia. *'Can we really create a poverty free world?'* Ya, ujar Muhammad Yunus dan dia yakin dia memiliki kuncinya, yaitu kredit (pinjaman). Misinya adalah mengurangi kemiskinan di Bangladesh dengan mendirikan Bank untuk rakyat miskin. Lalu beliau turun ke lapangan, terlibat dan mencoba memahami karakteristik masyarakat.

Walaupun bisnisnya diilhami oleh keinginan mengentaskan kemiskinan, bukan berarti bank yang dikelolanya tersebut beroperasi tanpa profesionalisme. Sebaliknya, profesionalisme diterapkan dengan disiplin tinggi, sehingga Grameen menjadi bank yang secara komersial menguntungkan bagi pemiliknya, karyawannya, dan yang terlebih lagi adalah bagi para nasabahnya (yang pada umumnya adalah nasabah peminjam). Nasabah di Grameen tidak sekedar diberikan pinjaman saja, tetapi juga dibimbing dalam mengembangkan bisnis mereka dan dalam menyusun rencana strategis untuk meraih sukses dalam bisnis. Yunus menganjurkan para peminjam untuk membentuk tim yang terdiri dari lima pelaku bisnis yang secara rutin bertemu. Lima orang dalam tim ini menjadi mitra bisnis yang saling memberikan masukan, berbagi pengalaman, dan menentukan jumlah dana yang bisa digalang sendiri dan dana yang harus dipinjam dari bank, serta kapan pinjaman bisa dikembalikan. Cara ini terbukti efektif untuk membantu para pelaku bisnis untuk melewati garis kemiskinan dalam waktu sepuluh tahun setelah pinjaman pertama mereka.

Tujuan bisnis yang mulia serta pinjaman yang disertai solusi bisnis bagi para nasabah telah membawa Grameen, bank dengan 12.000 karyawan yang didirikan dan dipimpin oleh M. Yunus menjadi bank yang berperan penting dalam perekonomian rakyat Bangladesh, dan Bank dengan prestasi komersial yang baik.⁴⁰

b. Kisah Sukses UMKM di Berbagai Negara

Selain kisah sukses perjuangan orang-orang yang berawal dari membuka Usaha Kecil kemudian menjadi *big corporation*, kita juga akan perhatikan kisah sukses pengembangan UMKM di berbagai negara berikut ini.

1) UMKM di Amerika dan Eropa

Usaha Kecil Menengah (UMKM) memiliki potensi cukup baik di Negara Amerika dan Eropa dalam meningkatkan nilai eksportnya. Misalnya, perusahaan dengan karyawan kurang dari 20 orang dapat memberikan sumbangan ekspor yang cukup baik. UMKM di Negara Eropa tidak mengeksport produknya secara menyeluruh keluar negeri akan tetapi kebutuhan dalam negeri menjadi prioritas utama.

Sebagai gambaran yang terjadi di Amerika, jika ekspor dari UMKM pada sector manufaktur meningkat sekitar 5 % maka nilai ekspor tersebut akan meningkatkan pendapatan sekitar \$35 miliar.⁴¹ Jika dibandingkan dengan perusahaan besar maka rasio penjualan dan ekspornya untuk sekitar \$55 miliar.⁴²

National Enterprise's Strategy Amerika memfokuskan diri untuk membantu UMKM yang ada, guna meningkatkan nilai ekspornya. Hal ini berbanding terbalik dengan keadaan yang ada di negara-negara yang tergabung dalam Uni-Eropa yang memiliki cara berbeda untuk dalam mengembangkan UMKMinya.⁴³

Di Eropa, kebijakan terhadap UMKM, secara spesifik adalah dengan mencanangkan Europeanisasi dan internasionalisasi UMKM. Secara umum tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memperkuat sector UMKM yang ada di Eropa dengan memasarkan produk-produknya di dalam kawasan eropa dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja.

Di Amerika sendiri kebijakan ekspor untuk produk UMKM melibatkan kebijakan promosi untuk segala sector bisnis. Sedangkan kebijakan ekspor di negara eropa secara umum memfokuskan diri dengan meningkatkan mutu dari produk UMKM.

Mayoritas UMKM di Eropa masih mempertimbangkan pasar dalam negeri sebagai tujuan utama dari produk-produknya dan mengandalkan pada penggunaan matauang yang sama dalam bertransaksi. Ini sebagai faktor internal yang penting bagi pasar eropa. Ada sekitar 26% dari jumlah UMKM yang mempertimbang kesamaan mata uang sebagai alasan penting, dan 15% menyatakan lebih penting. Tetapi nilai ini tidak signifikan lebih tinggi di zona eropa (26% menyatakan penting dan 18% kurang penting), artinya baik di dalam maupun diluar eropa pasar UMKM sama.

Bisnis yang lebih besar yang patut dipertimbangkan adalah kesempatan yang sama bagi setiap UMKM yang ada di eropa karena hal ini menyumbang sekitar 35% dari pendapatan eropa. (sebagai bahan tambahan katakanlah 22% lebih sedikit), dan hanya 25% dari bisnis mikro yang berkaitan langsung dengan mata uang eropa yang dianggap kurang penting.⁴⁴

UMKM di Eropa setidaknya-tidaknya memprioritaskan untuk menjalankan

bisnisnya dalam pasar dalam negeri. Hal ini yang juga perlu diketahui adalah adanya standarisasi bagi produk mereka karena dengan standarisasi tersebut adanya jaminan atas produk-produk UMKM.

Pada hakikatnya, seluruh standar yang diterapkan pada semua perusahaan atas produk-produknya, tidak hanya kepada mereka dalam keseragaman pasar Eropa terhadap fasilitas bisnis yang ada tetapi juga kepada hampir semua UMKM yang ada di Eropa dan dari UMKM yang ada menjawab bahwa mereka tidak mendapatkan keuntungan bagi perusahaannya atas standard yang diterapkan oleh Eropa.

Sekitar 52% dan hanya kurang dari sepertiga atau 29% menyatakan proses ini sangat menguntungkan bagi mereka. Hasilnya menunjukkan perbedaan yang signifikan antara UMKM (30% terlihat lebih menguntungkan di Eropa dengan menggunakan standar nasional, 53 yang lain tidak) dan perusahaan besar (38%) tidak memberikan jawaban yang negative pada sektor industri.⁴⁵

Ini sangat memungkinkan untuk membuat perbandingan secara lepas antara pasar Amerika dengan Eropa terutama dalam kebijakan ekspor dalam hal mempromosikan produk-produk ekspor dari hasil UMKM. Dalam menjalankan hal tersebut, satu hal yang harus selalu diingat bahwa perbedaan budaya dan system structural. Hal ini tampak semakin jelas bahwa pasar internal UMKM di Eropa merupakan anugrah sekaligus makian karena 2 alasan; mereka memaksa pihak UMKM untuk mengeksport produk-produknya, dan ini adalah rahmat karena hari ini dunia dimana ekspor sangat dibutuhkan pada semua tingkat dan Eropa memiliki fondasi yang bagus dalam hal ekspor dan program pengembangannya. Tetapi dikatakan sebagai makian karena mereka tidak memiliki pasar yang cukup besar di dalam negerinya yang mengakibatkan mereka tergantung dengan pasar luar negeri. Namun demikian Amerika membuat promosi yang baik terkait dengan produk-produk UMKM.⁴⁶ Dengan membandingkan kedua pasar tersebut ini terlihat bahwa baik Amerika maupun Eropa mempunyai kebijakan yang pro terhadap proses pengembangan UMKM.

2) *UMKM di China*

Hari ini, banyak produk-produk China dapat kita jumpai dalam kehidupan

sehari hari. Dari peniti, sajadah, mainan anak-anak, peralatan rumah tangga, barang electronic, pakain, *Information Technology* dan kendaraan. Ini semua menunjukkan betapa hebatnya produksi China menyerbu pasar pasar dunia. Bahkan dalam beberapa kasus, pemerintah dan pengusaha China mempunyai “keberanian” untuk melakukan *bergaining* dengan perusahaan-perusahaan barat. Seperti contoh; ketika Mc Donald memasuki pasar dalam negeri China, maka pengusaha dan pemerintah China meminta produk-produk pendukung seperti mainan, merchandis harus dibuat oleh pengusaha lokal China dierdagangkan keseluruhan outlet Mc Donald di dunia. Ketika Perusahaan Handphone Nokia dari Finlandia mencoba menjual produknya ke China, maka pelaku usaha usaha China “memaksa” untuk battery dan bebebrpa suku cadang dari Handphone Nokia harus diproduksi oleh perusahaan China.

Hal inilah yang mencetak surplus perdagangan China pada Mei 2007 mencapai 22,45 miliar dolar AS, atau naik 73 persen dibanding tahun sebelumnya dan tertinggi kedua setelah surplus pada Februari 2007 yang mencapai 23,7 miliar dolar AS.

Menurut *China Securities Journal* Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) China mencapai 10,8 persen pada 2007 sedikit lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya 10,7 persen, atau empat tahun berturut-turut pertumbuhan dua digit,

Saat ini cina memiliki UMKM lebih dari 8 juta, yang jumlahnya mewakili 60% dari pendapatan Negara dari sector perusahaan dan merupakan 40 %dari keuntungan bukan pajak. Pemerintah cina selalu meningkatkan atmosfir yang memungkinkan untuk UMKM. UMKM yang fleksibel menempatkan China untuk mendapatkan keuntungan dengan masuk disebagai anggota WTO.⁴⁷

Mengelolah usaha kecil di Cina sangat mengesankan. Lokalisasi dirancang sedemikian rupa, sehingga sekaligus menjadi tempat tujuan wisata. Jenis-jenis pekerjaan dibuat sedimikian rupa sehingga kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, mendapat kesempatan bekerja dengan baik, termasuk masyarakat yang diasable (cacat). Di China (dan Jepang), UMKM pada umumnya terkait dengan usaha besar, sehingga UMKM menjadi supplier utama pada usaha-usaha raksasa. UMKM dan home industry, menjadi benar-

benar tulang punggung perekonomian bangsa. Di China, kekuasaan sistem politik pemerintah, semakin dirasakan sebagai iklim yang kondusif bagi investasi, pengembangan usaha dan termasuk peluang usaha baru bagi UMKM.⁴⁸

Bahkan sedikitnya 400 unit perusahaan UMKM China memenuhi kualifikasi dan tercatat di papan bursa efek di Shenzhen Stock Exchange (SSE). Menurut China Business News Daily, setidaknya saat ini ada 3.328 unit UMKM China yang menunggu untuk bisa *go-public*.

Dukungan dari kebijakan pemerintah China juga sangat nyata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Cina berusaha menempatkan diri sebagai pelayan dengan menyediakan segala kebutuhan yang diperlukan oleh industri dalam berbagai skala. Mulai dari hal yang paling esensial dalam memulai sebuah usaha yaitu birokrasi perizinan yang mudah dan cepat. Untuk memulai usaha di China hanya membutuhkan waktu tunggu selama 40 hari, dibandingkan dengan Indonesia yang membutuhkan waktu 151 hari untuk mengurus perizinan usaha⁴⁹

Tidak ketinggalan infrastruktur penunjang untuk memacu ekspor yang disiapkan oleh pemerintah Cina secara serius. Bila pada tahun 1978 total panjang jalan raya di Cina hanya 89.200 km, maka pada tahun 2002 meningkat tajam menjadi 170.000 km. Untuk pelabuhan, setidaknya saat ini Cina memiliki 3.800 pelabuhan angkut, 300 di antaranya dapat menerima kapal berkapasitas 10.000 MT. Sementara untuk keperluan tenaga listrik pada tahun 2001 saja Cina telah mampu menyediakan sebesar 14,78 triliun kwh, dan saat ini telah dilakukan persiapan untuk membangun PLTA terbesar di dunia yang direncanakan sudah dapat digunakan pada tahun 2009

Dalam hal SDM untuk dunia usaha Cina juga tidak tanggung-tanggung dalam mengarahkan orang-orang terbaiknya untuk menjadi pengusaha yang handal. Sejak tahun 1990-an, Cina telah mengirimkan ribuan tenaga mudanya yang terbaik untuk belajar ke beberapa universitas terbaik di Amerika Serikat, seperti Harvard, Stanford, dan MIT.

Di Harvard saja, Cina telah mengirimkan ribuan mahasiswanya untuk mempelajari sistem ekonomi terbuka dan kebijakan pemerintahan barat, walaupun Cina masih menerapkan sistem ekonomi yang relatif tertutup.

Sebagai hasilnya, Cina saat ini telah memiliki jaringan perdagangan yang sangat mantap dengan Amerika, bahkan memperoleh status sebagai The Most Preferred Trading Partner⁵⁰

Fenomena ini menunjukkan komitmen pemerintah China dan semua pihak yang terkait, UMKM harus terus diupayakan menjadi bagian yang penting dalam menopang pertumbuhan perekonomian bangsanya. Kebijakan mutakhir dari pemerintah China setelah masuk menjadi anggota WTO adalah menginternasionalisasikan UMKM mereka, keseleuruh penjuru dunia. Dari sini pemerintah Indonesia perlu banyak belajar dari China dalam memajukan UMKM.

3) UMKM Di India

Di India, UMKM memainkan peranan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi di Negara tersebut. UMKM memiliki nilai 40%, memproduksi sekitar 8000 produk. Mereka memberikan kontribusi hamper 35% dari seluruh jumlah ekspor langsung dan 45% dari seluruh ekspor yang dilakukan oleh india. UMKM merupakan sector terbesar dalam menyediakan lapangan pekerjaan setelah pertanian, yang menyediakan sekitar 28.8 juta pekerja⁵¹.

Di India terdapat hampir 3 juta UMKM, yang menghasilkan berbagai macam produk dari produk yang paling dasar hingga produk yang sangat diharapkan. Selain ketangguhannya, UMKM menghadapi skenario baru liberalisasi dan globalisasi. UMKM india sulit untuk menjual produknya baik di dalam negeri maupun manca negara dikarenakan meningkatnya persaingan. Untuk membuat produknya secara global lebih kompetitif maka UMKM india membutuhkan pembaharuan teknologi dan menekankan pada inovasi baru.

Menurut Drucker “ *inovasi berarti sebuah usaha baik menciptakan sesuatu yang baru atau memberdayakan yang sudah ada dengan meningkatkan kualitas yang tinggi atas temuan yang kaya.* Sedangkan Arthur D. Little mengklasifikasikan Proses inovasi penemuan adalah *cara pengembangan dengan menggunakan cara baru dalam jasa pembuatan dan mengirim dengan ongkos yang efisien serta pengiriman yang cepat.* Sedangkan Inovasi dalam arti organisasional adalah: *pengembangan proses bisnis baru dan cara baru dalam mengadakan bisnis,*

serta menyediakan keuntungan yang kompetitif⁵².

UMKM selalu mewakili model kebijakan ekonomi social oleh pemerintah India yang menekankan pada ketidakteraturan pertukaran antara luar negeri atas impor barang-barang modal, Penyediaan tenaga kerja; dan kelanjutan pekerjaan;⁵³

UMKM di India sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintahnya, UMKM dikembangkan dalam beberapa hal yang memungkinkan bagi mereka untuk mencapai tujuan tersebut, diantaranya:

- a) Memberikan kontribusi yang tinggi bagi produksi dalam negeri.
- b) Pendapatan atas nilai ekspor yang tinggi
- c) Rendah dalam persyaratan investasi.
- d) Operasional yang fleksibel
- e) Lokasi yang dapat berpindah-pindah
- f) Rendah dalam intensif impornya
- g) Memiliki kapasitas untuk mengembangkan teknologi yang pas bagi masyarakatnya.
- h) Pengganti impor
- i) Memberikan kontribusi terhadap ketahanan produksi
- j) Berorientasi ke arah industrialisasi

4) UMKM di Vietnam

Sejak penerapan atas perubahan ekonomi yang dimulai dengan DOI MOI di tahun 1986, yang didukung lebih lanjut dengan perubahan dari tahun 1989, pengalaman ekonomi dalam pertumbuhannya yang begitu cepat selama periode 1990an hingga 1997. sejak saat itu pertumbuhan GDP terlihat jelas melambat, sebagian disebabkan terjadinya krisis ditahun 1997-1998. di samping terdapat berita buruk tersebut ada transformasi yang cukup menajubkan pada aspek ekonomi, dengan beralihnya system orientasi secara global, dan hal ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat cepat baik dalam ekspor maupun impor dan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap investasi asing.

54

Bagi Vietnam sekali lagi pembangunan kembali dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan mensyaratkan usaha mereformasi dan

menyusun kembali. Khususnya permintaan ini akan terus berlanjut. Pembangunan kembali kerangka lembaga sangat diperlukan bagi pasar ekonomi. Reformasi kepemilikan, mendorong investasi langsung luar negeri; Mengizinkan sector-sektor privat yang lebih besar dapat mengatur dan saat ini adalah BUMN.

Kebijakan kompetisi untuk mendorong pemeliharaan, pertumbuhan, dan perkembangan, khususnya sector UMKM. UMKM di Vietnam dapat memainkan peranan penting dalam hal perubahan pada ekonomi orang bawah. Bottom of Form

4. Dari Semut Berubah Menjadi Gajah: Yang Besar Tetap Harus Menang

Para pengusaha kelas UMKM yang dahulunya berjuang hingga kering keringatnya dilanjutkan oleh anak-anak atau keluarga mereka. Perjuangan itu menampakan hasil yang luar biasa seperti kisah kisah sukses diatas. Perusahaan-perusahaan tersebut telah berubah menjadi raksasa ekonomi. Ibarat semut berubah menjadi gajah.

Setelah berakhirnya perang dunia ke II, banyak perusahaan-perusahaan UMKM di Negara barat seperti Amerika atau Eropa yang melakukan ekspansi ke luar negeri melalui penetrasi damai dengan mekanisme investasi asing di berbagai negara.

Untuk memperlancar ekspansi tersebut, mereka melakukan akumulasi modal dengan cara merger, akuisisi atau menjalin kerjasama melalui *joint venture agreement*.

Dalam globalisasi ekonomi, aktivitas perusahaan semakin hari semakin luas. Mereka memproduksi berbagai kebutuhan sehari-hari, menguasai jasa untuk hajat hidup orang banyak seperti listik, air minum, pengangkutan dan mengatur keuangan masyarakat. Perusahaan bahkan telah merubah dan menguasai lembaga-lambaga yang seharusnya *non profit oriented* menjadi *profit oriented*, dengan komersialisasi lembaga sekolahan dan rumah sakit. Perusahaan telah menjadi intitusi sosial yang mendominasi kehidupan masyarakat⁵⁵.

Mereka telah merubah bentuk menjadi Multi National Corporation

(MNC), yaitu perusahaan yang dimiliki oleh orang dari berbagai negara dan beroperasi di seluruh wilayah dunia⁵⁶. Kegiatan yang dilakukan oleh MNC tidak saja melakukan aktivitas bisnis, namun juga masuk dalam wilayah hukum, ekonomi dan politik, sehingga mempengaruhi proses pembangunan di negara tempat mereka beroperasi⁵⁷.

Namun demikian ada sisi negaif dari kisah sukses UMKM yang menjadi MNC tersebut. *Big corporation* telah mendikte keputusan yang harus diambil oleh pihak pemerintah yang seharusnya mengawasi perusahaan itu sendiri serta mulai mengendalikan sektor-sektor publik.

Di Amerika misalnya, perusahaan telah menyalurkan dananya hingga 1,2 milyar dollar untuk mendanai proses pemilihan presiden. Gerakan ini adalah upaya untuk ikut mempengaruhi keputusan keputusan politik melalui lobi-lobi dalam perumusan kebijakan pajak dan peraturan perusahaan lainnya⁵⁸.

Peningkatan peran perusahaan ini merupakan salah satu peristiwa luar biasa dalam sejarah kehidupan manusia di muka bumi. Mereka telah melupakan kisah sedihnya diawal membuka usaha sebagai UMKM.

Dari beberapa literatur menceritakan bahwa UMKM yang dahulu dibentuk dengan pola-pola humanisme dan komunalisme kemudian berubah menjadi *big corporation*, juga telah merubah perilakunya menjadi tamak dan mementingkan dirinya sendiri. Ini semua karena korporasi hanya mementingkan tujuan utamanya yaitu *making profit*.⁵⁹

Demi mencari keuntungan, seringkali korporasi melakukan tindakan-tindakan “*ngawur*” yang merusak lingkungan hidup, mengexploitasi buruh, menyuap birokrat untuk mempermudah bisnis, menggusur tanah-tanah rakyat, menggunduli hutan, melanggar hak asasi masyarakat adat, dan bahkan mempengaruhi militer dan keputusan politik.

Segala cara dihalalkan demi keuntungan adalah lahir dari wataka kerakusan korporasi atau pelaku bisnis. Perihal ini sesungguhnya telah diperingatkan oleh seorang bijak 400 tahun sebelum masehi. Plato memberikan peringatan bagi setiap bangsa, apabila akan mendirikan ibukota maka sebaiknya dijauhkan dari pantai. Maksudnya supaya jauh dari aktivitas perdagangan. Dijelaskan lebih lanjut oleh Plato⁶⁰:

“Laut adalah kawan keseharian yang menyenangkan, namun memiliki rasa yang payau dan pahit”. “Dekatnya ibukota dengan laut akan mengakibatkan kota dibanjiri oleh para pedagang serta pemilik toko, dan akan menanamkan dalam setiap jiwa masyarakat kebiasaan seperti ketidaksetiaan dan penipuan”

Disini dengan sangat jelas Plato mengatakan bahwa para pedagang mempunyai sifat suka menipu dan tidak setia. Aristoteles menyebut sifat para pedagang adalah *krematistik* (*Khremata* = kekayaan), yaitu cara melakukan pertukaran barang dengan uang yang bermaksud menambah kekayaan⁶¹. Cara pertukaran seperti ini dianggap “tidak wajar” dan bertentangan dengan kodrat alamiah. Uang telah dipakai tidak hanya sebagai alat tukar, namun uang telah menjadi tujuan tersendiri⁶². Logika seperti ini menurut terminologi Islam disebut dengan *riba* atau bunga. Lebih lanjut Aristoteles mengatakan:

Penghasilan demi penghasilan memperlihatkan sisi terburuknya di dalam riba, yang membuta logam tak berguna (uang) berkembang biak⁶³... Mata uang ada hanya sebagai alat pertukaran; Riba (usury) mencoba membuatnya bertambah.... mata uang dari anak mata uang.. dan ini adalah suatu kondisi yang tidak alamiah”⁶⁴.

Melawan kodrat alamiah dari aktifitas korporasi telah melahirkan ketidakadilan sosial. Ini semua karena bisnis korporasi dijalankan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral dan aspek etika bisnis.

Etika bisnis adalah pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Moralitas berarti aspek baik atau buruk, terpuji atau tercela, dan karenanya diperbolehkan atau tidak dari perilaku manusia⁶⁵. Moralitas selalu berkaitan dengan apa yang dilakukan manusia, dan kegiatan ekonomis merupakan suatu bidang perilaku manusia yang penting. Etika dalam bidang aktivitas ekonomi (bisnis) sudah sejak jaman dahulu telah dibicarakan. Pada awal sejarah filsafat, ketika Plato, Aristoteles dan filsuf Yunani lainnya menyelidiki bagaimana sebaiknya mengatur kehidupan manusia dalam konteks negara (*polis*), termasuk didalamnya membahas tentang bagaimana kegiatan ekonomi dan kegiatan niaga harus diatur⁶⁶.

Niai moral dan Etika dalam bisnis telah lama ditinggalkan, namun kembali menjadi bahan kajian hangat ketika terjadi bencana *collapses* di Enron, WorldCom, Adhelfia, Tyco dan lainnya. Dunia bisnis baru tersadar bahwa

selama ini ada satu aspek bisnis yang kurang mendapatkan perhatian, yaitu masalah etika.⁶⁷ Jika maksimalisasi keuntungan menjadi satu satunya tujuan bisnis, maka kecenderungannya akan melakukan bisnis secara tidak etis. Bisnis akan dilakukan dengan cara penindasan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.⁶⁸

Selain itu, karena ideologi pembangunan (*developmentalism*) yang dikibarkan oleh negara maju telah mempengaruhi hasrat dari negar-negara berkembang⁶⁹. Untuk mencapai status negara maju dan sejahtera nagara memberi “kesempatan” bagi perusahaan-perusahaan sebagai motor penggerak utama proses industrialisasi. Berbagai regulasi yang memberikan fasilitas dan kemudahan bagi dunia usaha di buat sebagai landasan pacu.

Sejak keruntuhan Uni Soviet, negara barat mengklaim bahwa kapitalisme pasar bebas adalah satu-satunya ideologi ekonomi politik yang paling manjur dan tidak ada lagi tandingannya⁷⁰. Knsep ini menghendaki minimalisasi peran negara dalam mengaur perekonomian, atau lebih dikenal dengan istilah paham *laissez faire* (biarkan saja). Negara cukup menjadi *Watchdog*, tak perlu ikut campur dan biarkan pasar bebas yang akan mensejahterakan bangsa⁷¹.

Korporasi atau perusahaan telah menjadi agen pembangunan yang mendominasi kehidupan sosial ekonomi. Pasang surutnya korporasi akan menentukan stabilitas system ekonomi sebuah bangsa, karena penguasaan berbagai sumber daya dunia dan monopoli produksi adala dalam genggamannya korporasi.

Indonesia sebagai negara berkembang, setidaknya sejak pemerintahan orde baru, secara serta merta melibatkan diri dalam proses ini. *Developmentalism* di import satu paket dengan demokrasi dan neoliberalisme ekonomi. Sebuah bangsa modern - kata mereka - harus melakukan pembangunan dengan meningkatkan produksi melalui industrialisasi. “*Kalau tidak punya mesin maka dapat dibeli dari negara maju, kalau tidak punya uang maka hutang pada negara maju, kalau tidak tahu caranya maka belajar dari negara maju.*”

Keikutsertaan dalam *World Trade Organization* sebagai lambang kapitalisme global menjadi ukuran kemajuan dan kemodernan bangsa. Melibatkan diri dalam program bantuan *World Bank*, *Inter Government Group on Indonesia* (IGGI), IMF dan ADB menegaskan sikap pro neo liberalisme. Sumber daya

manusia didesain untuk belajar ekonomi, hukum dan berbagai ilmu untuk menjadi penstudi di negeri kapitalis. Lulusan yang pernah terkenal dari padanya adalah kelompok Mafia Barkley, yang selanjutnya digunakan sebagai *think thank* pembangunan ekonomi pemerintahan ordebaru ⁷².

Pergantian rejim pada masa reformasi, tak sedikitpun merubah model ekonomi Indonesia. Ekonomi pasar bebas menjadi paradigma disetiap keputusan yang dibuat. Keberpihakan para birokrat pengambil kebijakan lebih cenderung melayani para kapitalsime global ketimbang anak bangsa sendiri. Ini bisa dipahami karena sebagian penentu kebijakan ekonomi negeri ini adalah para saudagar besar yang berfikir dari prespektif bisnis.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa catatan hasil kebijakan yang mereka keluarkan:

Pertama, pencabutan subsidi BBM dan memberikan ijin masuk perusahaan minyak asing pada industri hilir, adalah wajar untuk penciptaan *free competition* yang *fair*. *Kedua*, kebijakan masuknya beras asing yang menggulung nasib petani dianggap lazim sebagai bentuk keterbukaan pasar dengan menghilangkan segala macam hambatan perdagangan (*trade barrier*) bagi produk asing. *Ketiga*, program privatisasi BUMN kepada Multi National Corporation, dilegalkan atas nama efisiensi dan efektifitas kinerja dan, *Keempat*, pengembangan nilai rupiah terhadap dollar (*floating rate*) pada mekanisme pasar⁷³.

Out put dari kebijakan itu bisa dilihat dengan jelas seperti; keidakadilan sosial, kemiskinan ekstrem; busung lapar dipinggiran kota besar; usaha kecil menengah gulung tikar; pengganguran melonjak dan sederet kisah kekalahan anak bangsa dalam persaingan.

Bagi mereka yang menang, (pemilik modal besar), ikwal ini bukanlah sesuatu yang perlu disesali, sebab sudah sepatutnya yang kalah harus mati. Seperti yang dikatakan penganut faham Darwinisme Sosial: “*survival for the fittest*, yang menang adalah yang mampu bertahan, yang kalah tak perlu ditangisi sebab sudah menjadi takdir dari seleksi alam (*natural selection*)⁷⁴.”

Secara tidak sadar ideologi ini telah masuk kedalam nalar pikir setiap insan. Segala tindakan didasarkan pada pertimbangan *cost and benefit*, prinsip efisiensi, peningkatan keuntungan, yang sudah merasuk jauh kedalam rute

rute kehidupan. Ritus-ritus sosial yang sakral tanpa pamrih telah mengalami pergeseran mejadi kehidupan kalkulatif materialistik. Keyakinan dan kepercayaan disimbulkan dalam istitusi dan bangunan duniawi.

Orang tua menyekolahkan anaknya dengan pertimbangan investasi yang harus kembali modal saat kerja nanti, serta kejahatan pencurian dan korupsi harus diberantas bukan karena kejahatan hukum, tetapi karena mengganggu sistem pasar Pembangunanisme yang didasarkan pada ideologi liberalisme dan pasar bebas telah mengendap jauh di *mind set* logika nalar setiap insan. Mengaroma disetiap nafas, mengarahkan disetiap langkah dan mengindah-kan disetiap mimpi-mimpi yang absurd ⁷⁵.

Pertanyaanya, *“Apakah pilihan ideologi ekonomi kita telah salah? atau tidak adakah pilihan lain yang lebih baik dari pada liberalisme dan pasar bebas?”*.

Pertanyaan diatas tentunya memerlukan jawaban yang panjang, sebab dalam perekonomian yang berjalan berdasarkan prinsip pasar dimana “bisnis adalah bisnis”, kebebasan berusaha adalah yang utama.

Namun kebebasan untuk mengejar tujuan dan sasaran bisnis juga mengadung kewajiban untuk memastikan bahwa kebebasan itu diperoleh secara bertanggungjawab. Adanya praktek etika berusaha dan kejujuran dalam berusaha akan menciptakan aset yang langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan nilai perusahaan dan kesejahteraan sosial ⁷⁶.

“Tetapi apakah hal ini terjadi?”. Fakta bertutur lain. Menurut data Bank Dunia, hampir sepertiga penghuni dunia yang berjumlah kurang lebih 6 milyar manusia, hari ini harus hidup dengan kurang dari 2 dolar sehari. 1,3 miliar manusia dari padanya masih hidup di bawah satu dolar per orang per hari dan tidak punya akses pada air bersih.

Saat ini, 1 miliar manusia di negara maju menguasai 80% sumber daya dan produk dunia, 5 miliar lainnya yang kebanyakan berada di negara miskin harus saling memperebutkan 20% sisanya. (UNDP, 2002). Mereka menikmati 85% pengeluaran dunia untuk konsumsi, menikmati 45 % daging yang dikonsumsi, 65% listrik, menggunakan 84% kertas, menggunakan 85% logam dan bahan kimia namun menghasilkan 70% emisi gas karbondioksida di seluruh dunia⁷⁷

Disisi lain, pada awal millenium ini kekayaan dunia, 51 % dikuasai Multi

National Corporation (MNC) sedangkan 49 % dikuasai negara, termasuk negara-negara besar. Jika sepuluh negara besar dikeluarkan dari daftar ini maka kekayaan 200 perusahaan besar dunia melebihi kekayaan semua negara lain di dunia ini. Bisnis dalam rupa korporasi menjelma menjadi institusi yang sangat dominan, yang kekuasaan dan pengaruhnya melebihi negara dan komunitas sipil⁷⁸.

Korporasi di Indonesia punya kisah lain yang tak kalah seru. Dari total produksi batu bara sebesar 100,625 juta ton, 96,6 % diproduksi oleh penambang swasta, Pada bidang perminyakan sebagian besar dikuasai oleh Multi National Corporation dan sebagian yang lain oleh Pertamina, Medco dan Humpuss. Dari hutan yang tersisa, 10,5 juta hektar dikelola oleh korporasi pemegang HPH dengan keuntungan 17 % masuk kas negara dan 83 % masuk ke swasta. Jumlah Kekayaan para konglomerat 83% APBN dan penjualan 40 % saham PT SHM Sampoerna Tbk pada Philip Morris. Putera Sampoerna menerima 18,6 trilyun rupiah⁷⁹.

Sementara di Indonesia, data BPS bulan Maret 2007 berjumlah 37,17 Juta sedangkan ditahun 2009 diperkirakan melonjak ke angka 33,714 Juta, lebih tinggi dari yang diperkirakan yang berjumlah 32,38 Juta, dengan ukuran konsumsi penduduk sebesar Rp. 152.847,- per kapita per bulan. Kekurangan gizi anak mencapai 24% dari seluruh anak balita dan akses terhadap sumber air bersih hanya dinikmati oleh 74% penduduk.⁸⁰

Data diatas memberikan gambaran nyata tentang mimpi buruk ketidakadilan sosial telah hadir kenyataan hidup. Kemenangan dan kenikmatan hidup menjadi hak untuk dimiliki oleh mereka yang mempunyai kekayaan, sementara yang miskin harus menyingkir dan menjadi tumbal pembangunan peradaban.

Tak ubahnya nasib UMKM yang “hampir selalu sial” ketika berhadapan dengan “*big corporation*”. Walau dalam beberapa regulasi pemerintah mencoba memberikan perlindungan, namun pada prakteknya nasib sial itu selalu melekat pada eksistensi UMKM.

Ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan kita mengenai fenomena tersebut, yaitu:

a. Kekuatan modal dari *big corporation* tak mungkin ditandingi oleh UMKM.

Padahal dalam persaingan bebas, modal menjadi unsur yang signifikan untuk menentukan keberlanjutan bisnis

- b. Adanya doktrin *National Treatment* dalam sistem pasar bebas, yang tidak boleh membedakan antara investor asing dan investor lokal. Hasil implementasi doktrin ini dapat kita saksikan disetiap pojok jalan. Mc Donald, KFC, Pizza Hut yang megah dan bersih bersanding dengan pedagang nasi uduk di kaki lima atau Warung Tegal yang kumuh dan redup. Kondisi ini jelas mempengaruhi minat konsumen untuk memilih yang lebih baik.
- c. Banyak kerjasama yang dilakukan antara perusahaan dengan perusahaan UMKM didasarkan prinsip kesetaraan dan *simbiosis mutualisme*. Tetapi pada prakteknya pihak yang lebih kuatlah yang menentukan harga, kualitas, serta kuantitas secara sepihak. Dan hampir dapat dipastikan *big corporation* akan mengambil keuntungan yang lebih besar dari perusahaan UMKM rekanannya. Artinya, UMKM hanya menjadi subordinate dari perusahaan besar yang harus tunduk dan patuh, walaupun kaki tangan mereka mulai melepuh.
- d. Dalam transaksi internasional (ekspor import), perusahaan UMKM kadang tidak diperkenankan menjual barang jadi atau diberi merek. Setelah sampai di negara tujuan, produk tadi di finishing dan diberi label merk dagang mereka yang telah mempunyai reputasi dunia. Alhasil, pengusaha UMKM kita hanya mendapatkan keuntungan ala kadarnya, sedangkan perusahaan asing yang ternama meraup untung berpuluh kali lipat.

Selain beberapa kasus diatas masih banyak kisah yang memilukan yang harus di sandang oleh pelaku usaha UMKM ketika berhadapan dengan perusahaan besar. Hal ini tidak hanya berlaku di Indonesia saja, tetapi juga terjadi di negara berkembang lainnya.

Jadi... tidak seperti dongeng pengantar tidur dketika kita masih kecil, tentang pertarungan antara semut dan gajah yang dimenangkan oleh semut karena mampu menjatuhkan gajah, Sang semut memenangkan pertarungan dengan masuk lewat kuping gajah yang lebar.

Pada konteks persaingan pasar bebas, UMKM sebagai sang semut tidak

bisa berbuat banyak melawan perusahaan besar sebagai sang gajah. Karena Gajah yang satu ini tidak punya kuping, tetapi memiliki kaki yang besar dan lebar yang setiap saat dengan mudahnya menginjak ribuan semut sekaligus.

Dari sini kita harus mengambil hikmah. Sesungguhnya, sejarah telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Jika suatu bangsa dengan sengaja berani melupakan sejarah, maka bangsa itu tidak akan pernah mencapai kemakmuran dan kecerdasan. Fakta fakta diatas harus direnungkan dan dipahami agar tidak terulang kisah kekalahan yang sama..... Bukankah seekor keledai yang bodoh sekalipun tidak pernah terantuk batu yang sama?

CATATAN AKHIR

- ¹ O. M. Powers, "History Of Commerce. Chapter I. Ancient Commerce. Origin Of Commerce; Egyptians; Phoenicians; Greeks", <http://chestofbooks.com/finance/economics/Commerce-and-Finance/History-Of-Commerce-Chapter-I-Ancient-Commerce-Origin-Of.html>
- ² Wade Starr, "A History of Commerce: A Practical Course in Miracles" http://www.the7thfire.com/Politics%20and%20History/a_new_beginning/a_history_of_commerce.htm, Hlm 2
- ³ Ibid, Hlm 5
- ⁴ The SiLk Road, Wikipedia, Ensiklopedia
- ⁵ Kisah Jalur Sutra, Ensiklopedia Wikipedia bahasa Indonesia, http://id.wikipedia.org/wiki/Jalur_Sutra
- ⁶ Ibid
- ⁷ Revolusi Industri, Ensiklopedia Wikipedia Indonesia http://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi_Industri
- ⁸ Ibid
- ⁹ Ibid
- ¹⁰ WS Rendra, "Demokrasi Mensyaratkan adanya Daulat Manusia", Jurnal Media Inovasi No 1 Th.X Tahun, 2000, hlm 47-49
- ¹¹ Bruce Brown, 2003, History of Corporation; What is the corporation?, http://www.astonisher.com/archives/corporation_intro.html / hlm 3
- ¹² Ibid, hlm 8
- ¹³ Ibid. hlm.11
- ¹⁴ Max Weber, Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006), hlm.19
- ¹⁵ Kwik Kian Gie, 1994. Analisis Ekonomi Politik Indonesia, (Jakarta, Penerbit Gramedia), Hal. 11
- ¹⁶ Abdullah Alwi Haji Hassan, 1997, Sales and Contracts in Early Islamic Commercial Law, Kitab Bhavan, New Delhi, hlm 86
- ¹⁷ Jaribah bin Ahmad Al Haritsi, 2006, Fikih Ekonomi Umar bin Al Khathab, Penerbit Khalifah, hlm 285
- ¹⁸ Frank René López, Winter 2004, Corporate Social Responsibility In A Global Economy After September 11: Profits, Freedom, And Human Rights, Mercer Law Review, hlm.3
- ¹⁹ Lee Drutman, Tanpa tahun, The History

- of The Corporation, Citizen Work Corporate Power Discussion Group, hlm 1
- ²⁰ Ibid
- ²¹ Lee Drutman, op cit
- ²² Ibid
- ²³ Ella Gapken Jager, 2005, *Verenigde Oostindische Compagnie (VOC), The Dutch East Indian Company*, Kluwer Legal Publisher, hlm 43
- ²⁴ Lihat lebih lengkap dalam Keizerina Devi, 2004, *Poenale Sanctie: Studi Tentang Globalisasi Ekonomi dan Perubahan Hukum di Sumatera Timur (1870-1950)*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara., hlm 3-23. diceritakan bahkan VOC memobilisasi tenaga kerja murah di kawasan asia tenggara dengan kontrak kerja yang sangat merugikan para buruh perkebunan yang dikenal dengan Koeli Ordonantie 1880 atau Poenali Sanctie,
- ²⁵ Ella Gapken Jager, 2005, *Verenigde Oostindische Compagnie...* op cit hlm 48-49.
- ²⁶ Lee Drutman, op cit, hlm 2
- ²⁷ ... a corporation with thousands of employees and millions of customers, a corporation that was receiving public subsidies and encroaching on communities, a more extensive reporting system that measured the impact of the corporation on people's lives might have made sense. This never developed, however, and the profit-generating mentality remained the dominant driving force behind corporations. Lee Drutman, Tanpa tahun, *The History of The Corporation* Ibid, hlm 2
- ²⁸ Milton Friedman adalah Pemenang Nobel Bidang Ekonomi tahun 1976. Statemen beliau yang kontroversial mengatakan bahwa "there is one and only one social responsibility of business –to use its resources and engage in activities designed to increase its profits.
- ²⁹ Ibid.
- ³⁰ Adam Smith, 1965, *An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nation* (the Edwin Cannan Edititon), The Modern Library, NewYork, hlm
- ³¹ Tetapi seharusnya disisi lain, kesejahteraan sosial tidak dapat dimaksimalkan jika perusahaan hanya mencari keuntungan sendiri. Untuk mencari keuntungan dan mencapai efisiensi ekonomi, perusahaan harus memperhitungkan dampak aktivitas mereka terhadap karyawan, lingkungan dan masyarakat ditempat mereka beroperasi, Joseph Stiglitz,, *Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia Yang Lebih Adi*, (PT Mizan Pustaka 2006), hlm 279
- ³² <http://redeyedevil.wordpress.com/2007/10/23/sejarah-henry-ford-pendiri-ford/>
- ³³ G. Wu, *Biografi Orang Sukses: Henry Ford*, (Grasindo, 2006)
- ³⁴ *Sejarah Henry Ford (Pendiri Ford)* <http://redeyedevil.wordpress.com/2007/10/23/sejarah-henry-ford-pendiri-ford/>
- ³⁵ G. Wu, *Biografi Orang Sukses: Soichiro Honda*, (Grasindo, 2006)
- ³⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/Honda> Sunday, October 28, 2007
- ³⁷ G. Wu, *Biografi Orang Sukses: Mark & Spencer*, (Grasindo, 2006)
- ³⁸ <http://ekawati-nurfadilah.blogspot.com/2007/11/grameen-bank-nya-muhammad-yunus.html> "Grameen Bank-nya Muhammad Yunus"
- ³⁹ <http://ekawati-nurfadilah.blogspot.com/2007/11/grameen-bank-nya-muhammad-yunus.html> Grameen Bank-nya

- Muhammad Yunus
- ⁴⁰ <http://ekawati-nurfadilah.blogspot.com/2007/11/grameen-bank-nya-muhammad-yunus.html> Grameen Bank-nya Muhammad Yunus
- ⁴¹ Trade Promotion Coordinating Comm., *Toward The Next American Century: A U.S. Strategic Response to Foreign Competitive Practices* 8 (1996), hal.23
- ⁴² U.S. Dept. of Commerce, *A Profile of U.S. Exporting Companies, 1992* (last modified Aug. 22, 1997) <<http://www.census.gov/foreign-trade/miscedrel.html>>
- ⁴³ Trade Promotion Coordinating Comm., *Toward a National Export Strategy* 47 (1993) [hereinafter TPCC 1993]. For an overview of the NES, see generally Juan P. Morillo, *The Clinton Administration's New National Export Strategy*, 25 *Law & Pol'y Int'l Bus.* 1113, 1113 (1994); Vickery, *supra* note 3.
- ⁴⁴ Student, Northwestern School of Law of Lewis & Clark College, J.D. expected 1998; B.S. 1995 (Scientific & Technical Communications), Michigan Technological University.
- ⁴⁵ *Ibid.*
- ⁴⁶ Student, Northwestern School of Law of Lewis & Clark College, J.D. expected 1998; B.S. 1995 (Scientific & Technical Communications), Michigan Technological University.
- ⁴⁷ <http://www.usembassy-china.org.cn/econ/smes2002.html>, "China's Small And Medium Enterprises: Room To Grow With WTO"
- ⁴⁸ Ali Syaief, *UMKM-Pembinaan Usaha Kecil Semrawut Pembinaan Usaha Kecil Semrawut, dimuat dalam HUPBacan Rakyat, edisi serin 12 Juli 2004 Republished at <http://www.forumUMKM.com/a3.htm#>*
- ⁴⁹ (www.suaramerdeka.com/harian/0503/01/eko07.htm).
- ⁵⁰ Muhammad Subair "Rahasia Dibalik Kesuksesan Produk Cina Menguasai Pasar Dunia" http://bair.web.ugm.ac.id/Rahasia_Dibalik_Kesuksesan_Produk_Cina.htm
- ⁵¹ C. Richard Hatch. 2000 *Overcoming the limitations of size: Network Strategies for SME in Asia* (Paper for the ABD/OECD workshop on SME Financing in Asia).
- ⁵² India Global Summit on SMEs, Conference Proceedings, *Emerging Challenges and Opportunities*, 23-24 Nov. 2004, New Delhi
- ⁵³ India Global Summit on SMEs, Conference Proceedings, *Emerging Challenges and Opportunities*, 23-24 Nov. 2004, New Delhi
- ⁵⁴ <http://ideas.repec.org/p/uow/depec1/wp01-10.html> "Competition Policy and SMEs in Vietnam"
- ⁵⁵ Program on Corporations, Law and Democracy, "Our Hidden History of Corporations in the United States", 2000, http://www.reclaimdemocracy.org/corporate_accountability/history_corporations_us.html, lihat juga Lee Drutman, *op cit* hlm 4
- ⁵⁶ Sumantoro, 1987, *Kegiatan Perusahaan Multi Nasional: Problema Politik, Hukum dan Ekonomi Dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Gramedia, hlm 1-2.... Istilah MNC sering pula disebut juga dengan istilah Trans National Corporation (TNC)
- ⁵⁷ Sumantoro, 1987, *Kegiatan Perusahaan Multi Nasional: Problema Politik, Hukum dan Ekonomi Dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Gramedia, hlm 12-13
- ⁵⁸ Lee Drutman, *op cit*, hlm 3.

- ⁵⁹ Westlaw Jurnal, increasing Profit.....
- ⁶⁰ K Bartens, 2000, Etika Bisnis, Penerbit Kanisius, Ibid, hlm 46
- ⁶¹ K Bartens, 2000, Etika Bisnis, Penerbit Kanisius, Ibid, hlm 47
- ⁶² Aristoteles, 2004, Republik, Bentang Budaya hlm 19-30.
- ⁶³ Ibid, hlm 28
- ⁶⁴ Ibid, hlm 30
- ⁶⁵ K Bartens, 2000, Etika Bisnis, Penerbit Kanisius, hlm 33
- ⁶⁶ K Bartens, 2000, Etika Bisnis, Penerbit Kanisius, Ibid, hlm 37
- ⁶⁷ Steven R Barth, Corporate Ethics: The Business Code of Conduct for Ethical Employees, (Aspatore Publisher 2003), hlm 7
- ⁶⁸ K Bertens, op cit, hlm 149
- ⁶⁹ Saiful Arif, Menolak Pembangunanisme.
- ⁷⁰ Francis Fukuyama, The End of History: Capitalism And Democration.
- ⁷¹ Pembahasan mengenai pasar bebas akan dikupas lebih rinci dalam bab selanjutnya
- ⁷² Mukti Fajar, "Hukum dan Pembangunan: Kemiskinan Bangsa: Tanggung Jawab Siapa?", Jurnal Media Inovasi No 1 Th XV/2006, hlm,49-56
- ⁷³ Mukti Fajar Ibid
- ⁷⁴ Mukti Fajar, Ibid
- ⁷⁵ Ibid
- ⁷⁶ F. Antonius Alijoyo, tanpa tahun, Corporate Code of Conduct, Forum for Corporate Governance in Indonesia, www.fcgi.or.id
- ⁷⁷ (Tony Djogo, 2004).
- ⁷⁸ (Yanuar Nugroho: 2005).
- ⁷⁹ (Dwi Condro: 2005)
- ⁸⁰ Data BPS tahun 2004

UMKM dan Globalisasi Ekonomi

1. PENGERTIAN GLOBALISASI EKONOMI

Saat ini globalisasi ekonomi tidak ubahnya seperti sebuah diterminasi sejarah yang tidak bisa dihindari sehingga setiap negara bangsa, mau tidak mau, siap atau tidak siap harus mengikuti arus globalisasi itu sendiri. Kebangkitan dan kemajuan ekonomi merupakan contoh mutlak dari arus globalisasi yang tidak dapat dihindari. Menurut Albrow:

“Globalisasi merupakan keseluruhan proses dimana manusia di muka bumi ini diinkorporasikan ke dalam masyarakat dunia tunggal yaitu masyarakat global. Proses ini bersifat majemuk maka manusia dapat memandang globalisasi daam kemajemukan”.¹

Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias. Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan internasionalisasi sehingga kedua istilah ini sering dipertukarkan. Sebagian pihak sering menggunakan istilah globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran negara atau batas-batas negara²

Banyak sejarawan yang menyebut globalisasi sebagai fenomena di abad

ke-20 ini yang dihubungkan dengan bangkitnya ekonomi internasional. Padahal interaksi dan globalisasi dalam hubungan antarbangsa di dunia telah ada sejak berabad-abad yang lalu.

Bila ditelusuri, fase pertama, benih-benih globalisasi telah tumbuh ketika manusia mulai mengenal perdagangan antarnegeri sekitar tahun 1000 dan 1500 M. Saat itu, para pedagang dari Tiongkok dan India mulai menelusuri negeri lain baik melalui jalan darat (seperti misalnya jalur sutera) maupun jalan laut untuk berdagang.

Fase kedua ditandai dengan dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika. Kaum muslim membentuk jaringan perdagangan yang antara lain meliputi Jepang, Tiongkok, Vietnam, Indonesia, Malaka, India, Persia, pantai Afrika Timur, Laut Tengah, Venesia, dan Genoa. Di samping membentuk jaringan dagang, kaum pedagang muslim juga menyebarkan nilai-nilai agamanya, nama-nama, abjad, arsitek, nilai sosial dan budaya Arab ke warga dunia.

Fase ketiga ditandai dengan eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa. Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda adalah pelopor-pelopor eksplorasi ini. Hal ini didukung pula dengan terjadinya revolusi industri yang meningkatkan keterkaitan antarbangsa dunia. Berbagai teknologi mulai ditemukan dan menjadi dasar perkembangan teknologi saat ini, seperti komputer dan internet.

Pada saat itu, berkembang pula kolonialisasi di dunia yang membawa pengaruh besar terhadap difusi kebudayaan di dunia. Semakin berkembangnya industri dan kebutuhan akan bahan baku serta pasar juga memunculkan berbagai perusahaan multinasional di dunia. Di Indonesia misalnya, sejak politik pintu terbuka, perusahaan-perusahaan Eropa membuka berbagai cabangnya di Indonesia. Freeport dan Exxon dari Amerika Serikat, Unilever dari Belanda, British Petroleum dari Inggris adalah beberapa contohnya. Perusahaan multinasional seperti ini tetap menjadi ikon globalisasi hingga saat ini.

Fase keempat, globalisasi terus berjalan dan mendapat momentumnya ketika perang dingin berakhir dan komunisme di dunia runtuh. Runtuhnya komunisme seakan memberi pembenaran bahwa kapitalisme adalah jalan

terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan dunia. Implikasinya, negara negara di dunia mulai menyediakan diri sebagai pasar yang bebas. Hal ini didukung pula dengan perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi³.

Globalisasi merupakan suatu fenomena yang dalam pandangan orang awam isinya berupa kemajuan tetapi apa yang terjadi sesungguhnya tidaklah seindah yang dibayangkan. Globalisasi adalah suatu gerakan yang di dalamnya berisi tantangan sekaligus ajakan untuk menciptakan sistem perdagangan yang bebas hambatan. Sebagai suatu fenomena, globalisasi bukan sesuatu yang ada begitu saja jatuh dari langit (*taken for granted*), tetapi ia merupakan suatu proses yang dalam perjalanan waktu menimbulkan pro dan kontra sampai saat ini mengenai keberadaannya.

Globalisasi merupakan serangkaian proses yang kompleks, bukan proses tunggal dan semua ini berlangsung dalam wujud yang kontradiktif atau bertentangan satu sama lain. Kebanyakan orang memandang globalisasi hanya sebagai pengaruh atau daya “yang bergerak meninggalkan” bangsa dan komunitas lokal memasuki arena global, dan inilah salah satu konsekuensinya. Bangsa-bangsa terlihat kehilangan sebagian kekuatan ekonominya, namun demikian globalisasi juga mempunyai dampak yang sebaliknya. Globalisasi tidak hanya menarik ke atas, melainkan juga mendorong ke bawah, menciptakan tekanan-tekanan baru bagi otonomi lokal⁴

Sementara Robertson merumuskan globalisasi sebagai “*the compression of the world and the intensification of conciousness of the world as whole*”⁵. Definisi ini mengandung tiga hal. *Pertama*, globalisasi lebih merupakan sebuah proses daripada kondisi akhir. *Kedua*, terjadinya divergensi apakah sruktur integrasi dipadang dari perspektif global dan dari perspektif local. Faktanya, institusi-institusi sosial berada di bawah tekanan globalisasi. *Ketiga*, setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia berada dalam ruang tertentu.⁶

Tetapi, globalisasi merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakan oleh karena merupakan gejala ini didekte oleh kemajuan-kemajuan teknologi khususnya dibidang telekomunikasi dan transportasi. Kemauan dan kebutuhan berhubungan satu dengan yang lainnya yang selalu ada di dalam masyarakat. Perkembangan teknologi ini memberi kemungkinan bagi realisasi peningkatan hubungan antar negara. Bagi indonesia hal ini merupakan

pilihan terbuka bagaimana menempatkan diri atau membuat pilihan-pilihan yang setepat-tepatnya dalam rangka mengupayakan tercapainya sasaran nasional dalam persaingan dunia.⁷

Dalam perjalanan globalisasi maka hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah pengembanan dan kearipan visi global untuk menjawab dan merumuskan kebijakan-kebijakan nasional yang mampu bersaing dengan ikut berlaga dalam kanca pasar bebas sehingga kekuatan-kekuatan sektoral dan lokal ikut terangkat dan bahkan dapat menopang kekuatan-kekuatan nasional.⁸

Dengan kemajuan teknologi, informasi, komputasi dan transportasi maka sekat-sekat fisik yang di masa lalu membatasi interaksi antar orang, antar Negara dan bangsa makin berkurang signifikasinya. Kemajuan teknologi telah membuat interaksi tersebut diatas semakin intensif dengan keepatan yang dratis dan biaya yang jauh semakin ekonomis.⁹

Perkembangan ini jelas mempunyai implikasi politik, social dan terlebih lagi ekonomi yang luar biasa, baik pada tingkat global, regional, maupun nasional. Khusus dibidang ekonomi, kemajuan teknologi di atas menyebabkan barang dan jasa bias diproduksi dibagian mana pun didunia asalkan terpenuhi kelayakan teknis dan ekonomisnya serta bias dijual kemanapun yang membutuhkan.

Transaksi keuangan antar berbagai belahan dunia uga semakin terintegrasi dan berkecepatan tinggi, hal ini mengakibatkan lalulintas dana bisa bergerak antar Negara dalam hitungan detik. Orang bisa dengan mudah bertransaksi dipasar valuta asing dan pasar modal di berbagai bursa belahan dunia, tanpa secara fisik berada di sana. Manfred B. Steger menulis:¹⁰

“Kajian-kajian ekonomi mengenai globalisasi menyampaikan pandangan bahwa esensi dari fenomena tersebut meliputi meningkatnya keterkaitan ekonomi nasional melalui perdagangan, aliran keuangan dan envestasi asing langsung (foreign direct investment) melalui perusahaan-perusahaan multinasional”. Hal ini menyebabkan kegiatan ekonomi yang ekspansif di indentifikasi baik sebagai aspek utama dari globalisasi maupun sebagai mesin di balik lajunya perkembangan globalisasi.

Kajian mengenai globalisasi ekonomi biasanya tertancap kuat dalam narasi

historis yang melacak tahapan kemunculan ekonomi dunia pasca perang hingga konferensi Bretton Woods 1944, di bawah kepemimpinan Amerika Serikat dan Inggris, kekuatan utama ekonomi barat memutuskan untuk mengubah kebijakan proteksionis masa antar-perang (1918-1939) dengan berkomitmen untuk memperluas perdagangan internasional.

Hasil dari konferensi tersebut meliputi liberalisasi terbatas atas perdagangan dan penciptaan aturan-aturan yang mengikat kegiatan ekonomi internasional.

Mayoritas ahli globalisasi ekonomi melacak kaitan kecenderungan integrasionis dalam ekonomi global yang kian laju dengan kejatuhan sistem Bretton Woods di awal tahun 1970-an. Salama tahun 1980-an dan 1990-an segala usaha dilakukan oleh Anglo-Amerika untuk mendirikan pasar global tunggal semakin diperkuat melalui persetujuan liberalisasi perdagangan dalam berbagai bidang yang semakin meningkatkan perputaran sumberdaya ekonomi melintas batas-batas negara.¹¹

Jadi globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias¹².

Banyak pakar berpendapat bahwa globalisasi sebagai suatu proses bukanlah terjadi secara alamiah globalisasi adalah proses yang di *arrange* oleh kekuatan kapitalisme dari negara -negara barat¹³.

2. KAPITALISME SEBAGAI KENDARAAN GLOBALISASI: SIAPA SUPIRNYA?

Hari ini, sistem kapitalisme dijadikan kendaraan dalam gelombang globalisasi ekonomi. Walau sistem ini mempunyai berbagai kelemahan namun dianggap sistem yang paling baik yang pernah ada. Roh utama dari kapitalisme adalah kekuatan modal.

Kapitalisme tidak memiliki suatu definisi universal yang bisa diterima secara luas, namun secara umum adalah sebuah sistem ekonomi di mana sekelompok individu maupun kelompok dapat bertindak sebagai suatu badan tertentu yang dapat memiliki maupun melakukan perdagangan benda milik

pribadi, terutama barang modal, pada sebuah pasar bebas di mana harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran, demi menghasilkan keuntungan Negara melindungi hak pemilikan secara absolut.

Kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi yang filsafat sosial dan politiknya didasarkan kepada azas pengembangan hak milik pribadi dan pemeliharaannya serta perluasan faham kebebasan. Sistem ini telah banyak melahirkan malapetaka terhadap dunia. Tetapi ia terus melakukan tekanan-tekanannya dan campur tangan politis, sosial dan kultural terhadap bangsa-bangsa di dunia.

Sejarah mencatat setidaknya terdapat dua periode pertumbuhan kapitalisme sejak terjadinya revolusi industri. Pertama, periode kapitalisme liberal, antara abad ke-16 dan 18, yang dibangun melalui perdagangan dan kolonialisme/imperialisme.

“Pada periode ini, baik perdagangan bebas maupun proteksi dapat digunakan oleh pemerintah yang disesuaikan dengan kepentingan ekonomi jangka pendek atau menengah. Kedua, periode kapitalisme institusional. Akibat berbagai krisis besar kapitalisme (1929), muncul kelompok kekuatan ekonom lain dan pergerakan sosial yang menolak kapitalisme. Adu kekuatan tersebutlah yang menghasilkan konsensus yang dikenal dengan kapitalisme institusional yaitu diberesapa bagian dunia, negara ikut mengontrol dan melakukan regulasi di bidang ekonomi, politik, dan sosial”.¹⁴

Sejak tahun-tahun 1980-1990, penyatuan dan unifikasi dunia akan model tunggal pembangunan, melalui kemajuan komunikasi, transportasi dan lomba-lomba memasukkan investasi dan hutang ke dunia ketiga, telah mengakibatkan makin eratnya nasib warga dunia terjerat dalam rantai sistem ekonomi kapitalis global.

Sebagai konsekwensinya: tingginya rentabilitas untuk investor asing dan partner domestiknya, rendahnya gaji kaum buruh dan rendahnya harga bahan-bahan mentah. Agar lebih jelas, dapat digambarkan secara ringkas bagaimana “sistem ekonomi dunia” yang sebenarnya merupakan organisasi hubungan eksploitasi negara-negara selatan oleh negara-negara utara.

Sistem tersebut, adalah hasil dari pengorganisasian ekonomi yang di bentuk di Eropa barat, beberapa waktu setelah revolusi industri dan disebarkan sedikit

demis sedikit hingga ke seluruh dunia. Maka, bila dikotomi Utara-Selatan dipakai dalam demitosisasi sistem perekonomian dunia maka hendaknya dicamkan betul, bahwa sistem ini adalah hasil atau cetak biru dari sistem yang dibangun oleh kombinasi: kekuatan negara-negara & kekuatan-kekuatan akumulasi kapital belahan bumi Utara, demi kepentingannya.

Sebelum melakukan identifikasi ciri-ciri dari “sistem perekonomian dunia”, yang menerangkan hubungan eksplotasi antara negara-negara utara atas negara-negara selatan yang kita kenal masa kini, saya ingin mengingatkan bahwa ciri-ciri sistem tadi adalah original dan belum pernah ada pada sistem-sistem yang eksis sebelumnya. Dengan demikian, kita hendaknya memahami sistem tersebut sebagai benar-benar khusus untuk masa sekarang, dengan keterbatasan historis.

Karena itu, kendati pun sistem ini bukan berarti sebagai sesuatu yang mutlak perlu, namun kehadirannya sebagai satu-satunya organisasi rasional yang dapat dipahami, menyebabkan (nyaris) semua lapisan masyarakat dunia menobatkannya sebagai kenyataan modern yang terpenting. Sepintas pada awalnya, terlihat kesan yang baik tentang ciri-ciri sistem tersebut, misalnya, pada keseluruhan hubungan yang meliputi hubungan tukar-menukar antara berbagai negara di benua-benua di muka bumi, antara lain: hubungan perdagangan, arus modal, migrasi atau perpindahan tenaga kerja, transfer atau pertukaran teknologi, pertukaran/kerjasama ilmu pengetahuan dan kebudayaan, perkumpulan, organisasi bersama dan penyertaan dalam aturan main.

Namun ada yang perlu dicatat bahwa globalisasi merupakan proses universalisasi atau penyatuan dunia yang terjadi dengan penetrasi damai yang dilakukan dengan perdagangan. Proses ini tidak menimbulkan kekerasan fisik seperti halnya kolonialisme dan imperialisme. Namun sadar tidak sadar globalisasi akan menimbulkan saling ketergantungan diantara negara dan bangsa -bangsa di dunia.

Tetapi kemudian, muncul beberapa ciri sangat baru dan sungguh berbeda dari ciri sebelumnya yaitu, bukan lagi menata bagaimana saling berhubungan, melainkan bagaimana intensifikasi dan perluasannya pada bidang-bidang yang makin beragam, beserta kemajuan generalisasinya (dalam artian, proses makin berkurangnya aktivitas ekonomi yang berada di luar jaringan perda-

gangan). Secara garis besar, “sistem ekonomi dunia” mungkin dapat dipahami sebagai satu jaringan yang makin penuh sesak bukan hanya oleh perdagangan, tetapi juga oleh institusi, dan tentu saja oleh hubungan kekuasaan antara berbagai aktor-aktor yang aktif dalam semua arena pergumulan/adu kekuatan di dalam ekonomi dunia.¹⁵

Ciri-ciri “sistem ekonomi dunia” tersebut dapat diringkas dalam 4 hal, yaitu;

Pertama, prométhéen (dimaksudkan, menuju suatu penguasaan tanpa batas atas kekuatan-kekuatan materiel dari alam semesta untuk manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan manusia), yang juga merupakan simbol penaklukan teknologi, dan ambisi tak bertepi, menuju suatu progres materiel tanpa akhir. Kemudian, ide progres materiel tanpa akhir, bergabung dengan keyakinan akan adanya kemungkinan sebuah kemajuan sosial, dan mereka lalu bermetamorphose menjadi satu ide baru yang kemudian benar-benar akan merubah dunia, ciri ini dimulai sejak abad *aufklârung* (pencerahan) pada revolusi industri.

Ciri *kedua*, “sistem ekonomi dunia” yang dinamakan *productiviste*, bukan hanya karena sistem ini memproduksi barang dan jasa untuk kepentingan manusia saja, tetapi ia juga meletakkan progres teknologi tanpa batas, guna melayani pertambahan terus-menerus dari berbagai jumlah barang. Ciri tersebut mengandung arti, penggunaan jumlah yang selalu bertambah atas barang-barang dan jasa-jasa, ke arah bertambahnya keragaman yang diperuntukkan bagi jumlah konsumen yang terus menerus pula meningkat. Masyarakat seolah-olah dihukum untuk selalu memproduksi dan mengkonsumsikannya, melalui kenaikan jumlah produksi dan konsumsi yang tak habis-habisnya.

Ciri *ketiga*, adalah *expansioniste*, yaitu bergabungnya *prométhéen* dengan *productiviste*, yang secara mutlak menuntut keuntungan pada *resources*, memobilisasi tanpa batas keuntungan-keuntungan faktor-faktor produksi. Konsekwensi dari *expansioniste* tadi, melahirkan rasa tidak puas kepada organisasi yang statis selama ini, padahal pemobilisasian faktor-faktor produksi mengharuskannya menembus dan merambah seluruh daerah geografi dan daerah aktivitas, terutama melalui kolonialisme dan imperialisme. Akibatnya,

penaklukan kemudian dilihat sebagai hal yang lumrah dan absah, suatu penjajahan dengan menggunakan kekuatan-kekuatan industri, militer atau promosi/iklan untuk konsumen.¹⁶

Ciri keempat adalah *marchand* yaitu merupakan “sistem ekonomi dunia”, yang mendasarkan aktivitasnya melalui dua cara, pertama (bagian terbesar), pada perdagangan internasional, dan kedua, pada pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam pelaksanaannya, ciri yang keempat ini memerlukan dua bentuk aturan main; pemilikan privat dan solvabilitas.

Dengan begitu, apabila pemilikan bersama/publik dikebiri, dan mereka yang memiliki harta dan kemampuan lebih mantap diistimewakan dari mereka lainnya yang kurang solvable, maka akan terjadi mekanisme pengucilan. Mekanisme tersebut berjalan melalui proses perniagaan di dalam satu masyarakat yang diatur oleh market mechanism, di dalam masyarakat yang mempunyai sifat-sifat dasar rivalitas (rasa bersaing) di antara para anggotanya.

Keempat ciri “sistem ekonomi dunia” itu, pada hakekatnya merupakan dan sepadan (compatible) dengan proses akumulasi kapital dalam skala mondial, yaitu dasar utama dari eksploitasi model lama mau pun model mutakhir. Lebih tepatnya, ciri-ciri tadi berfungsi sebagai alat untuk mendorong sistem kolonialisme ke tingkat yang lebih canggih dan sempurna: melalui penetrasi damai.

Dalam rangka mempertahankan dominasi yang telah berlangsung selama berabad-abad, negara-negara utara juga butuh penyebarluasan model industrialisasi, berupa konsepsi tunggal *developmentalism* (paham pembangunan) yang diperkenalkan sebagai model lebih unggul dibanding model-model yang ada bahkan sebagai satu-satunya model rasional yang mungkin).

Hal mana telah diterima secara aklamasi oleh elit dan cendekiawan Negara untuk kepetingan pribadinya. Pada intinya, model industrialisasi ini tidak akan menjawab kebutuhan/tujuan yang beragam, apalagi kepentingan warga negara negara-negara selatan. Model tersebut justru adalah satu proses akumulasi, sekaligus upaya pengucilan yang berlangsung tanpa batas waktu. Meminjam kata lain, “sistem ekonomi dunia” dengan model tunggal pembangunannya, tentu saja telah membayangkan konsepsi kuantitatif dari kemajuan materiel yang lebih tinggi, atau dapat diterjemahkan melalui

peningkatan keragaman jumlah barang niaga yang ditawarkan melalui pasar individu konsumen, tanpa peran Negara dalam merealisasikan kesejahteraan umum.

Keadaan ini, lantas mengakibatkan transformasi cara memproduksi, dengan tujuan agar pertumbuhan tanpa batas dapat dimungkinkan melalui cara mobilisasi intensif berbagai bahan mentah, pembagian kerja/spesialisasi, kemajuan teknologi dan akumulasi kapital yang semuanya kemudian tersohor sebagai industrialisasi atau modernisasi. Metode ini, seiring dengan pelbagai peristiwa di dunia selama lebih dari 200 tahun, telah menyebar ke seluruh dunia dan secara bertahap warga masyarakat dunia tiba pada sikap penerimaan total, pada suatu kondisi sine qua non. Sebagai hasilnya, nasib negara-negara selatan seakan telah digariskan, untuk mengikuti arah tunggal menuju satu “sistem ekonomi dunia”, terutama dengan diterimanya mekanisme modernisasi yang bercirikan *prométhéen*, *productiviste*, *expansion* dan *marchand*. Ibarat dua sisi sebuah mata uang, maka “sistem ekonomi dunia” pada satu sisinya, telah tampil beserta peradaban materialistik (*civilisation matérielle*), yang secara luas diakui telah sukses mengantarkan masyarakat negara-negara utara ke tingkat hidup yang tinggi, namun di sisi lain, sistem ini justru menambah parah kemiskinan di negara-negara selatan. Sistem ini mengantarkan tugas Negara berkembang untuk mendukung kepentingan modal raksasa, melalui rite-rute investasi.¹⁷

Globalisasi bukan tanpa eksese negatif. Banyak bukti telah menggambarkan dominasi ekonomi atas kehidupan politik, sosial dan budaya masa kini. Misalnya ciri-ciri kehidupan sosial sehari-hari pada hubungan penggajian, spesialisasi, kelas dominan dan konsentrasi kekayaan, pada kehidupan politik dan pada kehidupan kulturil di mana kekayaan sebagai simbol prestise, konsumerisme.

Ibarat kendaraan, globalisasi tidak berjalan sendiri. Globalisasi ekonomi bukan suatu yang natural, tetapi suatu sistem yang di disain oleh kelompok dominan; negara-negara maju.

Beberapa cara dominasi kapitalisme global tersebut dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

Pertama, memaksakan faham pembangunan yang dibangun berdasar sistem

ekonomi kapitalis kepada negara-negara berkembang (*developing dan under developing countries*) sebagai satu satunya pilihan yang “menjanjikan” mimpi-mimpi kesejahteraan umat manusia diseluruh jagad.

Kedua, membuat organisasi perdagangan dunia seperti World Trade Organization, dan menekan setiap negara untuk ikut serta dengan “menjejalkan” sistem pasar bebas untuk menghilangkan berbagai rintangan perdagangan (*trade barriers*)

Ketiga, menciptakan ketergantungan melalui berbagai bantuan pinjaman lunak yang menjerat seumur hidup, atau memaksakan penggunaan produk-produk mereka.

Keempat, membuat aliansi-aliansi ekonomi seperti Bank Dunia, IMF yang setiap saat diperlukan dapat menekan dengan ancaman embargo ekonomi, jika dirasa suatu negara *mbalelo*, tidak menuruti sang dominator.

Dominasi ekonomi melalui sistem perekonomian dunia tersebut pad akhirnya tidak menciptakan kesejahteraan dunia. Justru memperlebar jurang antara kelompok negara-negara miskin dengan kelompok kecil negara-negara kaya. Jurang itu, bagaimana pun, menyebabkan penderitaan dan menghantui hidup sehari-hari kelompok negara-negara miskin sebagai pengalaman buruk mereka yang tak kunjung habis..¹⁸

Kalaulah kita cukup cermat meneliti sistem kapitalis, yang telah dibangun selama 500 tahun dan berhasil eksist diseluruh penjuru dunia, maka akan ditemukan berbagai paradigma baru akibat hegomoni sistem, termasuk dalam peran Negara dalam membela kepentingan umum.

Nampaknya sejarah panjang, tradisi eksploitasi negara maju (*western Countries*) terhadap negara timur (*eastern Countries*) melalui sistem kapitalis: stabilitas politik dengan tekanan dan budaya materiel terus berlanjut sampai akhir masa. Peran negara mulai dibatasi, atau dengan kata lain, negara tidak lagi mampu berperan sebagai lapisan ozon melindungi masyarakat dari sinar sistem kapitalis, dan atau masih belum mampu membawa masyarakat ke ujung/tikungan jalan baru yang menuju masyarakat dunia yang lebih berkesejahteraan umum dan berkeadilan sosial.¹⁹

3. PERUSAHAAN SEBAGAI AKTOR GLOBALISASI: KISAH DARI JAMAN KE JAMAN

Berkaitan dengan perusahaan maka globalisasi dapat diartikan adanya keterkaitan antara perusahaan-perusahaan diseluruh dunia. Sejak sepuluh tahun terakhir, gejala globalisasi semakin menguat. Muncul perusahaan-perusahaan multinasional sebagai aktor utama globalisasi. Perusahaan-perusahaan ini tidak mengenal batas negara. Pada tahun 2000 terdapat 63.000 perusahaan multinasional (Multi National Corporation/MNC) dengan 220 negara pemodal. Merekalah aktor utama dari skenario²⁰.

MNC memang berbeda dari perusahaan biasa yang didirikan oleh sekelompok orang, entah karena hubungan kekerabatan atau karena perkawanan. Dalam korporasi, digabungkan modal dari banyak orang yang tidak kenal satu sama lain, lewat penjualan saham. Di situ dengan jelas dipisahkan antara kepemilikan (*ownership*) dan pengelolaan (*management*). Korporasi memang mempunyai keunggulan dibandingkan bentuk perusahaan lain, karena ia mampu menggalang dana yang tak terbatas dari masyarakat. Tidak heran jika “korporasi” menarik banyak pengusaha yang ingin mengadakan ekspansi dalam usahanya.²¹

Dalam sejarahnya, korporasi bukanlah hal yang baru. Ia telah dikenal sejak abad ke-16. Pada 1564, misalnya, didirikan Bank Medici di Florence pada abad ke-16, The Company of the Mines Royal, yang dibiayai dengan 24 helai saham yang dijual £1.200 per lembarnya. Pada tahun 1688, di Inggris terdapat 15 korporasi dan jumlah ini terus meningkat pada abad ke-17.

Pada tahun 1825 bermunculan korporasi dalam jumlah besar di Amerika Serikat, setelah memisahkan diri dari Inggris. Antara 1781 dan 1790 jumlah korporasi meningkat 10 kali lipat, dari 33 menjadi 328.

Sejak abad ke-16 hingga abad ke-18 dikenal adanya perusahaan dagang seperti East Indian Trading Company didirikan pada tahun 1600 oleh Queen Elizabeth; The African Company didirikan tahun 1619; The South Sea Company didirikan tahun 1711; The Virginia Company didirikan tahun 1609; The Massachusetts Bay Company didirikan tahun 1629²². Di benua Asia, *East India Company* pada tahun 1615 didirikan di India²³.

Pada tahun 1602, berdiri *Verenigde Oostindische Compagnie The Dutch East*

Indian Company atau VOC.²⁴

Sementara itu ada kenaikan dramatis jumlah MNC di dunia. Pada abad ke-17 ada sekitar 500 MNC (sekurangnya dalam bentuk prototipe), pada abad ke-19 naik menjadi 1.500, memasuki abad ke-20 sudah menjadi 2.500. Di awal Perang Dunia I (1914) terdapat 3.000, selang 55 tahun kemudian melonjak dua kali lipat menjadi 7.258. Seperti diutarakan di atas, tahun 1980-an adalah tahun suburnya MNC. Pada tahun 1988 tercatat 18.500 MNC, belum sampai 10 tahun angka itu sudah melambung menjadi 59.902. Pada tahun 2000 ada 63.000 MNC. Begitu pula dalam hal jumlah negara yang menjadi asal (*home*) atau penerima (*host*) bertambah dari 62 negara pada 1900 menjadi 220 negara pada tahun 2000²⁵.

Mereka beroperasi dalam lingkungan wilayah *empire* dan menjalankan perdagangan ke seluruh dunia. Bahkan mereka juga giat dalam menjalankan produksi. Namun, kesemuanya itu belum diperhitungkan sebagai MNC dalam arti yang kita punyai sekarang, bukan hanya karena faktor kecepatan, tetapi juga kegiatan perdagangan mereka pada umumnya terbatas pada produk-produk mewah dan merupakan bagian kecil dari kegiatan ekonomi dunia. Sebagaimana dihitung oleh Kuznets (1967), ekspor dunia pada awal abad ke-19 itu hanya menduduki 1-2 persen dari GDP dunia. Kecuali itu dapat dianggap sebagai prototipe dari MNC (MNC di sini dipahami sebagai korporasi yang tidak hanya terlibat dalam perdagangan di seluruh dunia, tetapi juga investasi di tingkat global. Bahkan tidak hanya memiliki kekayaan (*asset*) di mancanegara, tetapi juga ikut masuk dalam kegiatan yang bersifat *value-added* di mancanegara.²⁶)

Kendati terjadi perkembangan yang sangat pesat, ruang gerak korporasi masih terbatas. Pada umumnya, sampai abad ke-19, korporasi bergerak di bidang pembangunan rel kereta api, sebuah bidang usaha yang amat menjanjikan pada masa itu. Ini terjadi baik di Inggris maupun di Amerika Serikat. Hal ini dapat dimaklumi karena pembangunan rel kereta api membutuhkan modal amat besar yang tidak mungkin dibiayai oleh sekelompok orang saja. Pada akhir abad ke-19, korporasi mengalami mutasi yang luar biasa yang membuatnya semakin perkasa.

Pemicunya adalah persaingan antarnegara bagian di Amerika Serikat. New

Jersey dan Delaware mengambil langkah dramatis dengan menghilangkan berbagai restriksi pada korporasi. Misalnya, dengan dihapuskannya peraturan yang memerintahkan bisnis harus mempunyai tujuan yang didefinisikan secara sempit, hanya boleh hidup untuk jangka waktu tertentu, dan beroperasi di wilayah tertentu. Hapusnya peraturan ini membuat korporasi seakan mendapat tambahan sayap besar dengan jarak jelajah wilayah yang besar dan waktu yang tidak terbatas. Bukan hanya itu, peraturan yang mengatur merger dan akuisisi juga diperlonggar, sehingga memungkinkan terjadinya monopoli²⁷

Perhatian kepada perkembangan korporasi di Eropa dan di Amerika Serikat memang tak terelakkan jika orang ingin mengetahui latar belakang historis pertumbuhan korporasi global karena di dua wilayah bumi inilah korporasi bermula dan kemudian menyebar. Perusahaan-perusahaan Eropa dan Amerika, jauh sebelum mendapat saingan serius dari Jepang, berkembang menjadi besar dan kemudian ke luar dari batas wilayahnya untuk menjelma menjadi *multinational corporations* atau MNC.²⁸

Para sejarawan sepakat bahwa MNC dalam arti di atas muncul pada akhir abad ke-19, terutama di bidang pertambangan dan pertanian. Pada masa yang dikenal dengan sebutan “Gold Standard” (1870-an sampai Perang Dunia I), muncul korporasi-korporasi yang mengumpulkan modal di dalam negeri dan menanamkannya di mancanegara. Pada tahun 1914, Inggris sebagai negara yang paling maju pada waktu itu menyumbang 45 persen dari total penanaman modal asing dunia, disusul oleh Amerika Serikat (14 persen), Jerman (14 persen), Prancis (11 persen), Belanda (5 persen). Umat manusia kemudian terjerumus dalam dua kali perang dunia, dan sekali “depresi besar,” yang menyebabkan kegiatan bisnis internasional amat terganggu.

Tahun 1945 sering dilihat sebagai tahun pembatas, seiring dengan berakhirnya Perang Dunia II. Setelah tahun ini muncul sebuah percepatan luar biasa dalam kegiatan ekonomi internasional, bertepatan dengan bangkitnya ekonomi di seluruh dunia dalam rangka ke luar dari reruntuhan perang. Kalau pada akhir abad ke-19 Inggris menjadi pemimpin dan pelopor dalam hal MNC, maka pada masa sesudah Perang Dunia II peran itu diambil alih oleh Amerika Serikat. Menurut catatan, pada tahun 1967 perusahaan-

Tabel 1. MNC Terkenal dan Tahun Berdirinya

Sebelum Gold Standard		Gold Standard		Sesudah PD II	
Nama	Th	Nama	Th	Nama	Th
English East India Co.	1600	Standard Oil (Exxon)	1870	Wal-Mart	1945
Dutch East India Co.	1602	AT & T	1875	Sony	1946
Hudson's Bay	1670	RJ Reynolds	1879	—	1951
Chase Manhattan	1799	Sears Roebuck	1886	McDonald	1955
Du Pont	1802	Coca Cola	1889	Nike	1964
Jardine Matheson	1832	General Electric	1890	Intel	1968
J.P. Morgan & Co.	1838	Citibank	1900	Microsoft	1975
Philip Morris	1847	Ford Motor	1903	Oracle	1977
American Express	1850	Novartis	1903	Qualcomm	1981
Siemens	1850	UPS	1907	Sun	1982
Aetna	1853	British Petroleum	1908	Dell	1984
HSBC	1865	General Motors	1908	Cisco	1984
Nokia	1865	IBM	1911	AOL	1985
		Disney	1923	Macromedia	1992
		Motorola	1928	Amazon.com	1994
		Toyota Motor	1937	Lucent	1995
		Hewlett-Packard	1939	Yahoo	1996
				Verizon	2000

perusahaan Amerika menguasai lebih dari separo (53,8 persen) dari total penanaman modal asing dunia. Sebagian besar perusahaan Amerika bergerak di bidang pertanian dan pertambangan, terutama industri minyak.

Uraian di atas membeberkan perkembangan MNC menurut ukuran dan menurut wilayah asal usul. Bagaimana dengan perkembangan MNC menurut bidang usaha?

Buku *Global Inc.*, yang memetakan MNC di seluruh dunia membagi gerak MNC dalam tiga kelompok besar: (1) Korporasi di bidang industri, (2) Korporasi di bidang teknologi informasi, (3) Korporasi di bidang jasa. Kelompok-kelompok ini masih dapat dirinci lagi.

Nampak bahwa MNC telah menguasai seluruh bidang kehidupan manusia. Dari kebutuhan rumah tangga hingga kebutuhan kantor, semua dapat dipenuhi oleh MNC yang pada saat ini berjumlah sekitar 63 ribu. Kalau dirinci, maka makanan, pakaian, perumahan, obat-obatan, bahkan hiburan oleh MNC telah dimasukkan dalam cakupan operasi mereka. Begitu juga kebutuhan transportasi dan komunikasi saat ini tidak mungkin melepaskan diri dari MNC.

Tabel 2. MNC yang Berasal dari Negara Sedang Berkembang

AMERIKA LATIN	ASIA BARAT	ASIA TIMUR	ASIA TENGGARA	AFRIKA
Mexico Gruma, S.A. de C.V.	Saudi Arabia Saudi Basic Industries Corp.	Korea Selatan Hyundai Engineering & Construction Co.	Malaysia Sime Derby Berhad	Afrika Selatan Barlow, Limited
Cemex, S.A.		Dong-Ah Construction Ind. Co.	Petroleum Nasional Bhd (PETRONAS)	South African Breweries PLC
Vitro, S.A.		Daewoo Co. LG Electronic Co.		Sappi
Chile Enersis, S.A.	Asia Selatan India Reliance Industries, Ltd.	Samsung Electronic Co. Sunkyong Group	Singapura Keppel Corporation, Ltd.	
Gerner, S.A. Empresas CMPC, S.A. Compañía de Petroleso de Chile			Fraser & Neave, Ltd. Want Want Holdings	
Brazil Souza Cruz, S.A.		Cina China State Construction Engineering Corp. China Harbor Engineering Co.	Singapore Airlines, Ltd.	
Petroleo Brasileiro, S.A. Companhia Vale do Rio Doce Companhia Cervejaria Brahma		China National Chemicals Import and Export Corp. China National Metals & Minerals Import & Export Corp.	Filipina San Miguel Corp.	
ARGENTINA		China National Foreign Trade Transportation Corp. New World Development Co. Ltd.		
YPF, S.A. Perez Companc, S.A.		Jardine Matheson Holdings Ltd. Hutchinson Whampoa, Ltd.		
VENEZUELA Petróleos de Venezuela, S.A.		Guaongdong Investment Ltd. Citic Pacific Ltd. Wing On International Holdings Ltd. First Pacific Co., Ltd Hong Kong & Shanghai Hotels Ltd. Orient Overseas (International) Shougang Corp.		

Namun, kehadiran MNC sendiri juga menimbulkan dampak selain distribusi barang dan jasa, yaitu ekonomi, sosial, maupun politik. Sekurangnya ada tujuh wilayah yang terkena dampak MNC: (1) Gaji dan pekerjaan, (2) Pajak, (3) Teknologi, (4) Modal, (5) Kebudayaan, (6) Lingkungan dan (7) Standardisasi.

Di bidang tenaga kerja, misalnya, MNC dan anak perusahaannya diduga mempekerjakan paling sedikit 90 juta orang, bahkan bisa mencapai 200 juta orang jika memperhitungkan mereka yang dipekerjakan secara tidak langsung²⁹

Meskipun diakui bahwa MNC memberi gaji yang tinggi, tempat kerja yang aman dan juga *benefit* yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan lokal, tapi MNC juga kerap dituduh karena mempekerjakan orang dalam *sweatshops* (tempat kerja yang tidak nyaman dan tidak aman), dengan gaji yang sedemikian kecil sehingga muncul eksploitasi.

Contoh lain, yaitu dampak pada lingkungan. Banyak MNC yang terlibat dalam kegiatan industri yang dapat mencemari lingkungan seperti pertambangan, kehutanan, listrik, dan petrokimia. MNC dipandang sebagai sumber dari limbah beracun dunia (di Amerika Serikat dua pertiga dari limbah beracun berasal dari perusahaan kimia). Karena penambangan kayu gelondong dan penggalian tambang-tambang mereka menyebabkan penggundulan hutan, polusi sungai dan air tanah, mendangkalnya sungai dan penampungan air, dan tentu saja merusak keindahan alam.

Banyak sekali studi telah dilakukan bahwa di samping manfaat yang ditimbulkan oleh MNC, masih lebih banyak dampak negatif yang ditimbulkan. Ketegangan dengan negara-negara yang didatangi oleh MNC (*host country*) pun tidak terelakkan, bahkan juga dengan negara asal (*home country*). Pada banyak kesempatan malah terjadi konflik berkepanjangan. Dalam perkembangannya, MNC tidak hanya masuk dalam hubungan konfliktual dengan negara, tetapi juga dengan organisasi internasional atau International Governmental Organizations seperti PBB serta International Non-governmental Organizations (dalam bahasa Indonesia lebih dikenal Lembaga Swadaya Masyarakat) yang mencoba untuk meredam sepak terjang MNC itu.

Dalam catatan Benjamin C. Fishman ada beberapa MNC yang terlibat kasus Hak Asasi Manusia (HAM) diantaranya³⁰:

- 1) Kelompok Masyarakat Ecuador menuntut Texaco pada tahun 1993.
- 2) Tom Beanal, seorang pemimpin Masyarakat Amungme Papua Barat, pada tahun 1996 menuntut Freeport-McMoRan
- 3) Kasus Chevron yang dituntut oleh warga Nigeria di Niger Delta pada tahun 1999.
- 4) Penghuni Pulau Bougainville di Papua New Guinea (PNG) menuntut Rio Tinto pada tahun 2000.
- 5) The United Steelworkers Union dan the International Labor Rights Fund menuntut the Coca-Cola Company dan dua Perusahaan Botol Amerika Latin- Bebidas y Alimentos dan Panamerican Beverages, Inc. (Panamco)- pada July 2001.
- 6) Pada tahun 2001, sebelas warga desa di Propinsi Aceh menggugat Exxon-Mobil
- 7) April 2007, Wang Xiaoning dan Wang's wife, Yu Ling menuntut Yahoo! Melalui US Federal Court di California.

Namun berbagai macam konflik ini tidak menyurutkan MNC untuk terus beroperasi untuk mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya. Ada dua strategi yang dipakai oleh MNC. Pertama, MNC dapat menggunakan strategi yang dipakai oleh layaknya sebuah kekuatan politik, yaitu ancaman (*threat*). Jika sederetan syarat yang diminta oleh MNC tidak dipenuhi, maka MNC dapat mengancam akan ke luar dari negara atau wilayah tertentu. Hal ini dapat dilakukan karena MNC dapat memindahkan perusahaannya di tempat mana pun di dunia (*foot-loose industries*).

Aspek ekonomi kini telah menggeser perbincangan bidang politik, agama, etika, norma, budaya, nilai-nilai, keluarga dan esetika. Pembicaraan tentang peran negara, kewajiban negara dalam pembangunanpun mulai menyusut. Dominasi kapitalisme global saat ini terbentuk melalui pengorganisasian produksi, pendanaan dan perdagangan modern yang tampak kurang dikuasai oleh bangsa Indonesia dan negara berkembang pada umumnya.³¹

Perkembangan yang luar biasa telah terjadi pada hukum nasional terutama

dalam masalah perdagangan internasional. Pada dasarnya ide harmonisasi atas hukum nasional dan hukum internasional telah terjadi sejak dahulu, namun kemudian dikodifikasi oleh negara-negara eropa di abad 19 dan 20 dalam bentuk kolonialisme. Namun perbedaan yang ada pada hukum nasional terkadang menjadi kendala untuk diadakannya hubungan perdagangan internasional.³²

Para ahli hukum juga sependapat bahwa banyak sekali masalah yang disebabkan oleh kurangnya informasi dan penyatuan aturan hukum yang dapat mengatur perdagangan internasional. Biasanya dalam memformulasikan hukum perdagangan internasional digunakan konvensi-konvensi internasional. Penggunaan konvensi ini dikarenakan mengikat secara alamiah dan hanya memerlukan ratifikasi untuk keseragaman hukum para anggotanya.

Saat ini kita tengah berada di abad kapitalisme. Di seantero jagad dunia ini tidak ada yang terbebas dari cengkeramannya, termasuk Indonesia tentunya. Sesungguhnya setiap manusia yang tinggal di atas muka bumi ini sudah bisa melihat, memahami dan merasakan bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh “ulah” kapitalisme global ini. Tidak perlu dengan kuliah di fakultas ekonomi yang tinggi, mereka yang tidak “melek” huruf-pun akan langsung bisa menjawab ketika ditanya tentang wajah ekonomi yang berlangsung saat ini, walaupun tidak bisa memberikan istilah yang tepat untuknya.

Semua orang langsung dapat “mendeteksi”, bahwa ada ketidakberesan dari tata ekonomi yang berlangsung saat ini. Sangat nampak, bahwa wajah ekonomi saat ini terus berjalan menuju kepada dua kutub yang sangat berlawanan. Satu kutub telah membawa mereka yang kaya menjadi semakin kaya, sedangkan kutub yang lain terus menyeret mereka yang miskin menjadi semakin miskin dengan jumlah yang terus membengkak.³³

4. EKSISTENSI UMKM DALAM GLOBALISASI EKONOMI: PELUANG ATAU ANCAMAN

Tujuan mulia dari globalisasi ekonomi adalah menciptakan kesejahteraan umat manusia didunia dengan saling mencukupi kebutuhan antar bangsa melalui transaksi ekonomi. Keterbatasan sumber daya disuatu wilayah

diharapkan akan mendapa suplai dari wilayah yang memiliki surplus produk, dan begit pula sebaliknya. Namun dibalik itu semua sudah kita sadari bahwa bisnis selalu berorientasi pada pencarian keuntungan, yang kadang dilakukan dengan persaingan yang tidak sehat. Oleh karena itu patut disadari sejak awal bahwa globalisasi ekonomi bisa menjadi peluang dan sekaligus menjadi ancaman.

Menjadi peluang ketika kita mengalami “kemenangan” dalam persaingan dan menjadi “ancaman” ketika kita tertekan dalam kompetisi. Ancaman tersebut bisa datang dari negara maju yang mempunyai modal besar dengan menekan negara berkembang. Bisa pula datang dari perusahaan besar menekan perusahaan kecil yang penuh keterbatasan. Tetapi apapun yang terjadi globalisasi ekonomi telah menjadi keniscayaan sejarah. Tidak mungkin dihindari atau mengisolasi diri. Struktur sosial telah menjadi *open society* yang saling berinteraksi secara cepat dengan dukungan teknologi informasi. *Gelombang sudah pasang, dan layar harus dikembangkan, tak mungkin untuk bersauh kembali kepantai.* Satu satunya jalan adalah dengan memahami pola-pola permainan globalisasi agar “kartu” yang kita mainkan dapat memenangkan pertandingan.

Ada yang menarik dari catatan John Nasibit dalam bukunya *Global Paradox*. Bahwa ketika terjadi proses “Globalisasi” justru memunculkan “Globalisasi”. Teori ini ingin menjelaskan bahwa dalam proses unifikasi global, secara tidak sadar justru menciptakan unit unit kecil yang bersifat lokal³⁴.

Mimpi-mimpi dari korporasi besar untuk menyatukan dunia menciptakan monopoli atau oligopoli justru berhadapan dengan menguatnya UMKM yang berserak dan saling membuat jejaring diantara sesamanya. *Big corporation* mau tidak mau harus menghormati keberadaan UMKM untuk menjaga kelangsungan bisnisnya.

UMKM menjadi aktor global yang perlu diperhitungkan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Seperti dikatakan Antal Szabó, Regional Adviser on Entrepreneurship and SMEs dari UNECE³⁵

“there is a logo for the 3rd Millennium: Think global - Act local. The majority of the SMEs are working within the framework of a local environment. Their consumers are their neighbours and in the vicinity of their village/city /county/

region. This is their strength and opportunity. However, they have to act taking into consideration the influence and external factors of the globalization, the particular stage of internationalisation including challenges of the competitive market players, environment concerns, sustainable economic growth, international standards, and information technology

Ini yang disadari oleh masyarakat dunia yang tergabung dalam WTO dan organisasi ekonomi dunia lainnya untuk memperhatikan keberadaan UMKM secara khusus. UMKM memberikan kontribusi yang signifikan dalam perdagangan dunia. WTO telah memberikan peluang dengan menyediakan *negotiation forum* bagi komunitas UMKM (SMEs) untuk memiliki akses pasar, strategi serta kebijakan untuk mengembangkan diri dalam pasar internasional³⁶.

Pada pertemuan negara-negara anggota United Nations Conference on Trade and Development, yang diselenggarakan di Thailand, pada 12-19 February 2000. Mereka memberi pernyataan³⁷

“Globalization is an ongoing process that presents opportunities; as well as risks and challenges. It has expanded the prospect for technological advances and for effective integration into the international economy. It has increased prosperity and the potential for countries to benefit. However, globalization also raises the risk of marginalization of countries, in particular the poorest countries, and the most vulnerable groups everywhere. Income gaps within and among countries remain wide, and the number of people living in poverty has increased. Asymmetries and imbalances in the international economy have intensified. Instability in the international financial system continues to be a serious problems and requires urgent attention.”

Begitu pula dengan Forum International Ministerial Conference on “Enhancing the Competitiveness of SMEs in Global Economy yang diselenggarakan oleh Organization Of Economic and Cooperation and Development (OECD) yang menghasilkan “Bologna Charter” yang diselenggarakan pada 13-15 Juni 2000 di Bologna, Italy. Forum tersebut mendukung penguatan sektor UMKM dalam globalisasi dengan restrukturisasi ekonomi, karena dianggap memberikan pengaruh yang besar pada struktur ekonomi dunia.

Namun pada kenyataannya ada dua akibat dari proses ini, yang disimpulkan

dalam pertemuan tersebut yaitu³⁸:

In reality the globalisation of economic activity has a dual impact on SMEs. For some it provides new opportunities for expansion and growth by taking advantage of international market possibilities. These are able to adapt and become internationally competitive. For the majority, however, growing economic globalisation is increasing the competition with foreign enterprises and it is an inward process that brings competitive challenges and threats. For those SMEs globalization brings risks that they unlikely survive in their present form without improving quality, cost competitiveness and management practices

Dari berbagai catatan diatas dapat disimpulkan bahwa Globalisasi ekonomi akan memberikan peluang sekaligus tantangan bagi UMKM.

Kekuatan UMKM pada globalisasi ditentukan oleh dua hal; *pertama* kemampuan untuk melakukan ekspor import antar negara. *Kedua* kemampuan UMKM untuk bermitra dengan *big corporation* yang pada prakteknya sangat membutuhkan keberadaan UMKM.

Untuk itu, UMKM harus membuat rencana jangka panjang ekspor atas barang-barang yang ada. Rencana ini membutuhkan bantuan dari pemerintah secara intensif dalam hal menyiapkan ekspor. Persyaratan ini harus menjadikan kerangka rencana dimasa yang akan datang oleh pemerintah juga.

Rencana ekspor jangka panjang harus menyatakan tentang tujuan dari perusahaan, harapan dan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. 3 hal di bawah ini harus dimasukkan dalam pembuatan rencana tersebut. *Pertama*, kemampuan yang tinggi untuk mengetahui kesempatan pasar, *kedua*, pembukaan pasar, yaitu memahami sebuah perusahaan dengan susunan, operasi dan para pemain baru dalam pasar sehingga dapat mengurangi resiko pasar dan, *ketiga*, menerapkan rencana penetrasi pasar.

Ini sangat memungkinkan untuk membuat perbandingan secara lepas antara pasar Amerika dengan Eropa terutama dalam kebijakan ekspor dalam hal mempromosikan produk-produk ekspor dari hasil UMKM.

Namun ada persoalan yang terjadi dengan kasus di Eropa dan Amerika berkaitan dengan ekspor import UMKM. Mereka menekan pihak UMKM untuk mengekspor produk-produknya yang dibutuhkan dunia, dan ini adalah rahmat bagi UMKM di Eropa yang memiliki fondasi yang bagus dalam hal

ekspor dan program pengembangannya. Tetapi mereka kurang memperhatikan kebutuhan dalam negeri, sehingga mengakibatkan mereka tergantung dengan pasar luar negeri. Hal ini agak sedikit berbeda dengan Amerika, yang membuat promosi yang baik terkait dengan produk-produk UMKM tanpa melupakan kebutuhan dalam negeri.

Dengan membandingkan kedua kasus tersebut, terlihat bahwa Amerika dan Eropa mempunyai kebijakan yang pro terhadap proses pengembangan UMKM³⁹.

Lain lagi dengan kisah UMKM di Indonesia yang kadang masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Padahal keberadaannya dirasakan sangat penting dalam membangkitkan kembali ekonomi nasional yang terpuruk akibat krisis. Sebab, pasca krisis melanda negeri ini, hanya sektor UMKM lah yang tetap eksis, bahkan berkembang pesat.

Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki fondasi yang kuat, sehingga mampu mandiri. Tapi dalam kenyataannya, hingga kini UMKM tetap seperti dianaktirikan. Pemerintah belum bisa memberikan solusi bagi pengembangan UMKM, terutama dalam meningkatkan kualitas produknya maupun dalam mengatasi kesulitan permodalan.

Dampaknya, di kancah persaingan ekspor, UMKM di negeri ini belum bisa berbuat banyak. Padahal, di negara-negara lain sektor UMKM mendapat perhatian serius dan juga dibantu secara konkret oleh pemerintahnya.

Misalnya saja, potensi ekportir UMKM membutuhkan dana. Sayangnya anggaran yang telah direncanakan untuk sector UMKM tidak memadai. UMKM membutuhkan tambahan keuangan dan sangatlah sulit untuk memulai kegiatan mengekspornya tanpa bantuan tambahan dana.

Dalam masalah ini, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memberikan kesempatan untuk membantu UMKM terutama dalam mengusahakan tambahan dana.

Pertama, baik para pihak pemegang kepentingan dapat membantu UMKM memperoleh dana secara langsung. *Kedua*, para pengambil kebijakan dapat membuat dan mengesahkan peraturan-peraturan yang mendukung perkembangan UMKM.

Di era perdagangan bebas, semua negara berupaya meningkatkan arus

perdagangan ke berbagai negara lain. Tak heran, persaingan pun menajam, semua negara mengerahkan kemampuannya untuk memasuki pasar internasional. Tidak hanya koorporasi, UMKM di banyak negara digenjut untuk meningkatkan ekspornya. Bahkan UMKM dianggap menjadi salah satu potensi ekspor yang besar..

Hasil produksi UMKM yang diekspor ke luar negeri mengalami peningkatan dari Rp 122,3 triliun pada tahun 2006 menjadi Rp 142,8 triliun pada tahun 2007, namun demikian peranannya terhadap total ekspor nonmigas nasional sedikit menurun dari 20,2 persen pada tahun 2006 menjadi 20,0 persen pada tahun 2007.

Penurunan ini disebabkan peningkatan ekspor dari hasil produksi Usaha Besar seperti hasil industri makanan, minuman dan tembakau, industri tekstil, dan industri bahan kimia industri.

Tabel 6
Nilai Ekspor Nonmigas, 2006-2007

Tahun	Satuan	Ekspor Non Migas				Total
		UK	UM	UKM	UB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2006*	(miliar Rp)	30 365	91 946	122 311	484 775	607 086
	(juta US \$)	3 501	10 602	14 103	55 896	69 998
	(%)	5,00	15,15	20,15	79,85	100,00
2007**	(miliar Rp)	35 508	107 314	142 822	570 594	713 416
	(juta US \$)	4 129	12 479	16 607	66 349	82 957
	(%)	4,98	15,04	20,02	79,98	100,00

* Angka sementara

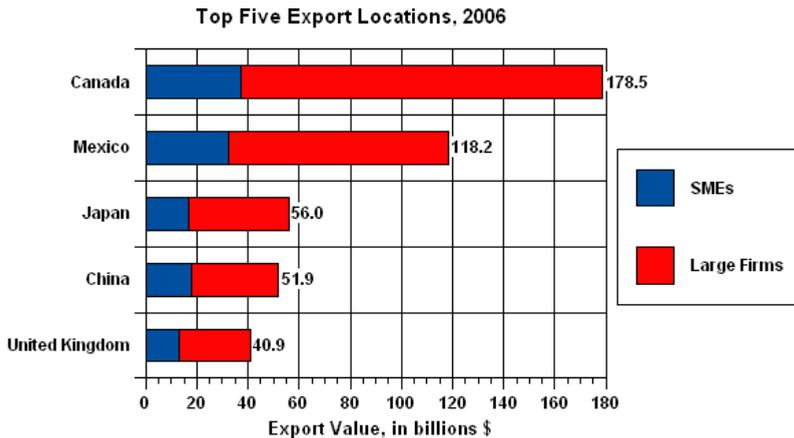
** Angka sangat sementara

Bila dirinci menurut sektor, pada tahun 2007 sebagian besar hasil produksi UMKM yang diekspor yaitu 89 persen berupa komoditi yang dihasilkan sektor industri, diikuti oleh sektor pertanian sebesar 9,8 persen, dan sektor pertambangan sebesar 1,2 persen. Sedangkan pada Usaha Besar peranan komoditi sektor industri sebesar 82,3 persen, diikuti sektor pertambangan sebesar 17,5 persen, dan sektor pertanian 0,2 persen.

Perkembangan eksport UMKM di Indonesia masih agak tertinggal di

bandingkan beberapa negara tetangga. UMKM Malaysia atau India telah mampu menyumbangkan ekspor lebih 30 persen dari total ekspor non migas nasionalnya.

Sebagai pembandingan dapat kita lihat Nilai ekspor yang dilakukan oleh negara-negara “The Top Five “ sebagai berikut

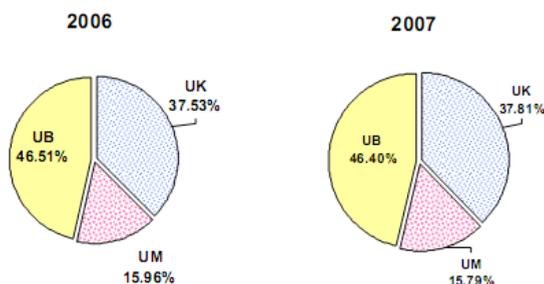


Tetapi ironisnya, pemerintah lebih banyak memberikan perhatian pada industri besar, hanya dengan pertimbangan kuantitatif jumlah nilai ekspor usaha besar lebih tinggi dari nilai ekspor UMKM. Padahal, UMKM di negeri ini telah terbukti menjadi wirausahawan yang tangguh. Ketika krisis ekonomi terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998, UMKM justru mampu menyelamatkan ekonomi dalam negeri dari keambrokan yang lebih parah. Sementara, perusahaan besar sibuk merumahkan karyawan tetapi UMKM menjadi ladang kerja baru. UMKM mampu menampung 99,45 persen dari total tenaga kerja nasional atau 73,24 juta tenaga kerja. Padahal kalau pemerintah mau melihat lebih komprehensif dari data statistik yang ada sesungguhnya UMKM memberikan sumbangan yang lebih baik dari pada usaha besar.

Misalnya pada tahun 2007 nilai PDB UMKM mencapai Rp 2.121,3 triliun meningkat sebesar Rp 335,1 triliun dari tahun 2006. Dari jumlah ini UMKM memberikan kontribusi sebesar 53,6 persen dari total PDB Indonesia, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2006 yang mencapai Rp 1.786,2

triliun atau 53,5 persen. Pada tahun 2007 kontribusi Usaha Kecil (UK) sebesar Rp 1.496,3 triliun (37,8 persen), Usaha Menengah (UM) sebesar Rp 625,1 triliun (15,8 persen), dan Usaha Besar (UB) sebesar Rp 1.836,1 triliun (46,4 persen).

Grafik 1
Peranan PDB Tahun 2006 dan 2007



Seharusnya pemerintah lebih menaruh perhatian pada UMKM untuk mengurangi kendala-kendala yang dihadapi. Banyak kendala yang membuat UMKM sulit bersaing, seperti kemampuan manajerial, kesulitan akses pasar, keterbatasan penguasaan teknologi informasi dan permodalan.

Memang, tidak semua produk UMKM berorientasi ekspor, namun produk-produk andalan ekspor juga terbatas seperti mebel, garmen, produk pangan olahan.

Bahkan untuk buah-buahan nyatanya Indonesia pun tidak mampu bersaing. Impor buah lebih besar dari pada ekspor buah Indonesia. Lihat juga, ekspor garmen yang kini cuma bisa menanti kebangkrutan. Produsen garmen UKM, Suprapti Wahyuni mengatakan, ekspor garmen kini anjlok hingga 70 persen ke negara non kuota. Imbasnya, pabrik-pabrik garmen itu memilih tutup karena kehilangan order. Padahal 60 persen ekspor garmen UMKM adalah negara nonkuota, sedangkan ke negara kuota umumnya garmen usaha kecil tidak mampu bersaing. Pemicunya tak lain ketidakmampuan bersaing dengan kompetitor utama, China. Sebelumnya barang-barang yang masuk ke Timur Tengah melalui Dubai dipasok dari Indonesia sekarang

mereka sudah memindahkannya dari China karena harganya lebih murah. Tadinya pabrik saya beroperasi 300 mesin sekarang yang saya pakai hanya 50 mesin.

Trader tidak lagi mau mengambil dari Indonesia. Sedangkan UMKM tidak bisa berbuat apapun. Soalnya mereka tergantung kepada trader untuk melakukan ekspor. Di samping kemampuan melakukan ekspor sendiri masih rendah, ekspor dalam jumlah kecil juga merugikan di UMKM.

Di dalam negeri pun, pengusaha garmen ini tidak mampu berkompetisi karena sudah dibanjiri barang impor. Produsen garmen kecil ini sekarang hanya mengandalkan order seragam, baik seragam sekolah, sipil, militer atau polisi. Kalau order tidak ada, habislah sudah. Satu-satunya yang masih mampu stabil adalah ekspor ke negara nonkuota untuk produk high fashion seperti Jepang, Hong Kong, Malaysia dan Singapura. Cuma, volume dan nilai produk ini sangat kecil.

Pasar bebas yang selama ini hanya merupakan bayang-bayang yang menimbulkan kekhawatiran terhadap kesiapan dunia bisnis kita mulai terasa menyerang. Banyak pihak meramalkan bidang-bidang bisnis yang selama ini berada dalam balutan proteksi, secara terang-terangan maupun terselubung sudah ditinggalkan dan dicabut proteksi maupun subsidiya. Hal ini akan banyak menimbulkan tantangan.⁴⁰

Para pakar memberikan teori untuk perusahaan melakukan transformasi dalam bertahan dari serangan pasar bebas. Transformasi bisnis adalah seluruh proses perubahan yang diperlukan oleh suatu korporasi untuk memposisikan diri agar lebih baik dalam menyikapi dan menjawab tantangan-tantangan bisnis baru, lingkungan usaha yang berubah secara cepat maupun keinginan-keinginan baru yang muncul dari dalam perusahaan. Perubahan dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan terhadap pola pikir, pola pandang dan pola tindak perusahaan, strategi bisnis, budaya perusahaan maupun perilaku dan kemampuan organisasi.

Perusahaan yang melakukan transformasi bisnis diramalkan akan memperoleh banyak manfaat, antara lain: (1) perusahaan dapat memfokuskan diri kepada bidang bisnis yang lebih menjanjikan (*business repositioning*), menciptakan daya tahan dan daya saing yang lebih besar, (2) meningkatkan

kemampuan organisasi agar dapat memiliki daya dukung yang lebih kuat, menciptakan nilai dan penghasilan finansial yang lebih besar serta berpeluang lebih besar menjadi perusahaan bertaraf kelas dunia.

Kerangka kerja transformasi bisnis meliputi rantai nilai transformasi bisnis, yang berisi tahapan-tahapan yang harus dilakukan agar perubahan yang dilakukan dapat menciptakan nilai, serta proses implementasinya, yang berisi langkah-langkah yang diperlukan dalam melaksanakan bisnis secara terencana dan baik. Terdapat lima tahap utama dalam transformasi bisnis.

- 1) adalah *visioning*, *strategic positioning* dan *corporate strategy development* untuk menetapkan arah dan tujuan perusahaan serta memposisikan diri agar lebih kompetitif.
- 2) peningkatan kemampuan organisasi.
- 3) pengembangan sumberdaya manusia untuk melakukan perubahan mendasar pada pengelolaan dan kesisteman sumberdaya manusia.
- 4) pemantapan budaya perusahaan agar seluruh kekuatan perusahaan dapat 'diikat' menjadi satu dan diarahkan kepada sasaran yang diinginkan.
- 5) adalah tahapan pencapaian sasaran bisnis dan penciptaan nilai.

Adapula tahap dalam transformasi bisnis adalah pemantapan budaya perusahaan, yang merupakan 'jiwa' organisasi. Acapkali dalam rangka pemantapan budaya perusahaan, sekedar memperkuat budaya perusahaan yang telah ada masih dirasakan kurang memadai.

Nilai-nilai yang sudah 'hidup' dalam tubuh organisasi mungkin kurang sesuai dengan strategi baru yang ditetapkan, sehingga nilai-nilai itu ada yang dirubah, ditambahkan, maupun dihilangkan. Namun mesti diingat, perubahan budaya perusahaan menyerap banyak energi.

Dalam tahap awal perubahan budaya perusahaan ini, yang disebut sebagai tahap dekrystalisasi. Energi yang digunakan untuk melakukan perubahan berkisar dari rendah hingga menengah. Pada tahapan ini dilakukan rasionalisasi dan legitimasi dari proses perubahan budaya perusahaan yang direncanakan, sebagai program antisipasi terhadap perubahan.

Tahapan kedua, yang disebut tahap metamorfosis, terjadi konflik yang disebabkan perbedaan interpretasi dan juga dilanjutkan proses pengkayaan menuju penerapan budaya perusahaan yang baru. Tahap yang melibatkan

konfirmasi dan kulminasi ini menguras banyak energi.

Tahap terakhir, proses perubahan budaya organisasi akan tiba pada proses integrasi. Pada tahapan ini, terjadi resolusi terhadap konflik yang terjadi, serta terbentuknya soliditas dari budaya organisasi yang baru terbentuk. Energi yang dibutuhkan berkisar dari menengah hingga rendah. Keseluruhan proses yang terjadi pada tahap ini disebut sebagai tahapan rekristalisasi.⁴¹

Untuk memahami lebih lanjut mengenai budaya organisasi, terdapat beberapa langkah utama yang tidak boleh dilewatkan. Pertama kali yang harus dilakukan adalah menelaah, apakah perubahan budaya perusahaan benar-benar perlu dilakukan?. Kemudian melakukan kajian terhadap nilai-nilai yang sudah ada dalam organisasi saat ini, serta melakukan review terhadap strategi perusahaan yang telah ditetapkan. Kemudian dilakukan *cross check* dengan nilai-nilai yang berlaku dalam organisasi. Maksudnya adalah untuk melihat apakah strategi strateginya sudah sesuai dengan nilai-nilai baru yang akan kita anut. Yang juga tidak boleh dilupakan adalah keselarasan antara pasar dengan budaya organisasi, karena setiap pasar menuntut karakteristik perilaku organisasi yang berbeda.

Penting juga ditelaah apakah ada perbedaan antara nilai-nilai inti dan sub-budaya yang akan diterapkan. Selanjutnya mengembangkan strategi dalam rangka sosialisasi budaya organisasi yang baru. Dan terakhir adalah mengembangkan strategi internalisasi budaya organisasi yang baru untuk diimplementasikan.

Untuk dapat melakukan peralihan pola transaksi bisnis ke arah yang sehat ini diperlukan upaya bisnis atau perusahaan untuk melakukan transformasi budaya perusahaan.

Transformasi budaya berarti menanamkan nilai-nilai dan norma budaya perusahaan yang mengharamkan (1) penggunaan kekuatan uang atau barang untuk memperoleh perlakuan istimewa atau khusus, dan (2) mengalahkan pesaing dengan cara-cara yang tidak sehat. Upaya perusahaan untuk mengurangi biaya-biaya yang tidak memberi nilai tambah dan membebani konsumen termasuk pula dalam upaya transformasi budaya.

Selain hal diatas, guna membangun UMKM pada jaman globalisasi sehingga tangguh dan memiliki daya saing tinggi ke depan, kita tidak boleh lengah

terhadap kecenderungan yang sedang dan akan terjadi di masa mendatang. Tantangan atau kecenderungan yang paling besar yang dihadapi adalah globalisasi dengan kapitalismenya⁴².

Pada sisi lain, kita menyadari akan posisi dan kondisi UMKM yang membutuhkan berbagai dukungan dalam pengembangannya. Pada era demokratisasi ini pihak-pihak terkait mulai dari tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota termasuk Perusahaan Besar untuk turut memberikan perhatian yang lebih besar pada pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Karena disitulah intinya sumber kehidupan dan penghidupan dari sebahagian terbesar rakyat Indonesia. Diperlukan tanggungjawab bersama-sama membangun usaha mikro, kecil dan menengah agar menjadi pelaku ekonomi yang tangguh dan kompetitif di masa depan.

Dengan UMKM yang maju, maka martabat bangsa kita juga akan lebih terhormat ke depan. Kita tidak boleh lagi ketinggalan dari negara-negara lain di dunia bahkan diAsia Tenggara sekalipun.

Tantangan yang paling besar dalam dunia bisnis adalah dunia tanpa kenal batas (*borderless world*) ini tak ubahnya ibarat air mengalir. Dimana lembah kesitulah dia mengalir. Demikian juga halnya arus barang dan jasa yang terjadi dalam era globalisasi ini.⁴³ Barang dan jasa yang memiliki kualitas tinggi dan harga paling murah, pasti akan jadi rebutan pembeli.

Demikian juga aliran dana investasi, dimana ada tempat investasi yang menguntungkan, iklimnya kondusif, prospeknya menjanjikan, maka aliran dana investasi akan mengalir ketempat itu.

Gambaran di atas memberikan ilustrasi bahwa pada era globalisasi ini, ciri utamanya adalah persaingan. Siapapun yang mampu bersaing, tanpa kecuali bagi produk UMKM, dialah yang akan memenangkan persaingan itu. Oleh karena itu, maka kebijakan dan strategi pengembangan UMKM ke depan adalah bagaimana meningkatkan daya saing UMKM.

Tetapi jika melihat data dari kinerja UMKM, seharusnya kita tidak perlu terlalu khawatir. Pada tahun 2006 pertumbuhan ekonomi UK mencapai 5,5 persen, sementara UM 6,3 persen, sehingga secara bersama-sama pertumbuhan UKM 5,7 persen. Pada tahun 2007 akselerasi pertumbuhan UK dan UM menjadi lebih cepat masing-masing sebesar 6,2 persen dan 6,8

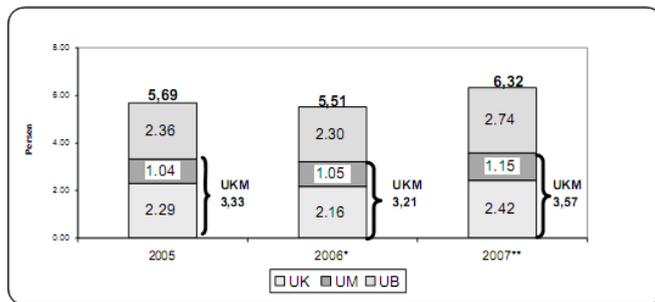
persen terhadap tahun 2006, dan secara bersama-sama percepatan pertumbuhan UKM 6,4 persen. Namun akselerasi pertumbuhan UM yang relatif lebih cepat dari kelompok usaha lain pada beberapa tahun terakhir tidak serta merta menjadikan UM sebagai kelompok yang memberikan sumbangan tertinggi dalam pertumbuhan ekonomi nasional, mengingat peranannya dalam penciptaan nilai tambah secara keseluruhan relatif kecil dibandingkan dengan kelompok usaha yang lain.

Tabel 3
Laju Pertumbuhan PDB UKM, 2005-2007 (persen)

Skala Usaha	2005	2006*	2007**
(1)	(2)	(3)	(4)
Usaha Kecil	5,82	5,50	6,18
Usaha Menengah	6,25	6,27	6,84
U K M	5,95	5,73	6,38
Usaha Besar	5,37	5,23	6,24
Total	5,69	5,51	6,32

* Angka sementara
** Angka sangat sementara

Grafik 3
Sumber Pertumbuhan Ekonomi, 2005-2007



Dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,3 persen di tahun 2007 sumbangan UK terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 2,4 persen dan hanya 1,2 persen saja yang berasal dari UM, sedangkan UB menyumbangkan 2,7 persen. Ini menunjukkan walaupun akselerasi pertumbuhan kelompok UK dan UB pada umumnya tidak secepat UM, namun dengan peranannya yang cukup besar dalam penciptaan nilai tambah

nasional sumbangan kedua kelompok usaha ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi menjadi cukup signifikan peranannya.

Dari kedua data statistik diatas dapat diketahui bahwa, pada jaman globalisasi ekonomi, keberadaan UMKM tetap memberikan pengharapan yang baik bagi ekonomi bangsa ini

Namun demikian, UMKM juga memiliki keterbatasan kemampuan untuk akses kepada sumberdaya produktif, terutama terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar. Dalam hal pendanaan, produk jasa lembaga keuangan sebagian besar masih berupa kredit modal kerja, sedangkan kredit investasi masih sangat terbatas.

Padahal dalam sistem ekonomi kapitalisme, Faktor modal menjadi sangat penting. Siapa kuat modalnya kemungkinan daya saingnya juga semakin kuat.

Bagi UMKM, keadaan ini adalah persoalan klasik yang rumit. Disamping persyaratan pinjamannya yang tidak mudah dipenuhi, seperti jumlah jaminan; serta adanya paradigma pada dunia perbankan yang memandang UMKM sebagai kegiatan yang beresiko tinggi. Tanpa tambahan modal UMKM sulit untuk meningkatkan kapasitas usaha ataupun mengembangkan produk-produk yang mampu bersaing di pasar bebas.

Untuk itu diperlkan perhatian semua pihak, tidak saja pemerintah namun juga pelaku usaha besar dan pihak perbankan atau lembaga keuangan lainnya, untuk mengatasi persoalan klasik tersebut. Walaupun banyak komentar masyarakat dan dunia usaha dalam memberikan pelayanan kepada UMKM belum berkembang, karena pelayanan kepada UMKM masih dipandang kurang menguntungkan.

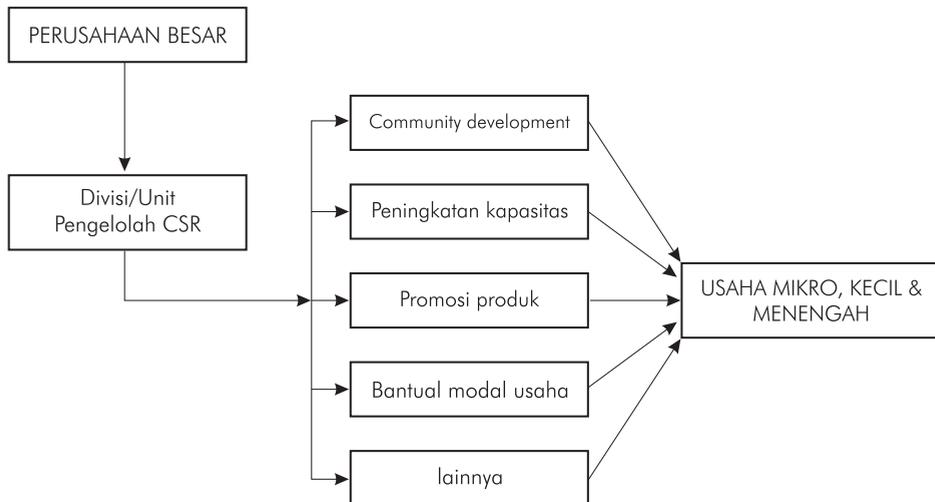
Bersamaan dengan itu, penguasaan teknologi, manajemen, informasi dan pasar masih jauh dari memadai dan relatif memerlukan biaya yang besar untuk dikelola secara mandiri oleh UMKM. Sementara ketersediaan lembaga yang menyediakan jasa di bidang tersebut juga sangat terbatas dan tidak merata ke seluruh daerah.⁴⁴

Pada saat ini sedang digecarkan prgram *corporate social responsibility* yang merupakan peluang bagi UMKM untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan besar. Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan panggilan terhadap perusahaan untuk memperhatikan kondisi sosial

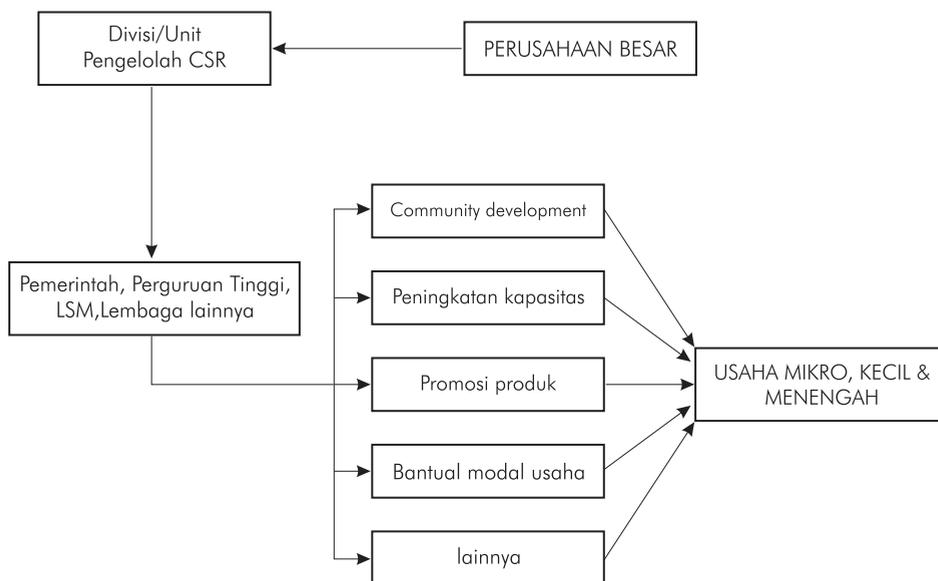
masyarakat sekitarnya serta dalam lingkup lingkungan yang lebih luas. Dengan demikian diharapkan muncul tanggung jawab untuk member_dayakan masyarakat. Perusahaan yang tidak bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya, maka perusahaan itu menciptakan kesenjangan dilingkungannya. Perusahaan itu tidak memiliki makna yang berarti apabila kemajuan yang diraihinya tidak melibatkan masyarakat sekitarnya.

Seperti pendapat Menteri Negara Departemen Koperasi dan UMKM Suryadharma Ali, bahwa melalui program CSR, perusahaan harus mau membantu masyarakat sekitarnya. Masyarakat sekitar perusahaan itu harus diberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses industrialisasi, dengan cara memberikan pelatihan dan bantuan dana yang sifatnya pemberdayaan masyarakat termasuk pengusaha UMKM.⁴⁵

Secara umum pola pengembangan program CSR oleh perusahaan besar dengan UMKM dapat dilakukan dalam beberapa pilihan berikut ini:



Pola Program CSR Yang Ditangani Langsung Perusahaan



Pola Program CSR Yang Dikerjasamakan

CATATAN AKHIR

- ¹ M Albow, *globalizatin knowledge and society*, (london: sage publication, 1990), hal.8
- ² <http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi#Pengertian>
- ³ Damasus Hans Frainald, Rabu, 2008 Mei 28, <http://warbom.blogspot.com/2008/05/teori-dan-sejarah-globalisasi.html>
- ⁴ Rini fidiyani, "Globalisasi Sebagai Sebuah Keniscayaan" (Telaah Tentang Makna Globalisasi dan Kemanfaatannya Bagi Indonesia) [http://www.unsoed.ac.id/newcmsfak/UserFiles/File/HUKUM/AGUS RAHARJO.htm - _ftn1](http://www.unsoed.ac.id/newcmsfak/UserFiles/File/HUKUM/AGUS%20RAHARJO.htm_-_ftn1)
- ⁵ *ibid*, hal.8
- ⁶ Yahya M abdul Aziz, *visi global; antisipasi indonesia memasuki abad ke21*, (yogyakarta: penerbit pustaka pelajar), hal. xv
- ⁷ Sayuti hasibuan, *visi global; antisipasi indonesia memasuki abad ke21*, (yogyakarta: penerbit pustaka pelajar), hal. 82
- ⁸ Manfred B. Steger, *Globalisme Bangkitnya Ideologi Pasar*, (Yogyakarta, penerbit Lafadl Pustaka), hal. 38-39.
- ⁹ Joseph E. Stiglitz, *making globalizaton work*, (bandung, penerbit mizan pustaka, 2006), hal.15
- ¹⁰ Manfred B. Steger, *globalisme bangkitna*

- ideologi pasar, (yogyakarta; lafadl pustaka, 2005), hal.38-39
- ¹¹ Ibid. Hal.43
- ¹² <http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi#Pengertian>, Globalisasi
- ¹³ Globalisasi Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, <http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi>
- ¹⁴ Ibid. Hal. 14
- ¹⁵ Ali Sugihardjanto, “Kekuasaan Negara versus Kekuasaan Perusahaan-perusahaan”, <http://media.isnet.org/islam/Etc/Perusahaan.html>, 31 Maret 2008
- ¹⁶ Ibid.
- ¹⁷ Ibid.
- ¹⁸ Ibid. hal. 5
- ¹⁹ Ibid. hal.3-4
- ²⁰ Ibid.
- ²¹ Wibowo Sejarah Globalisasi Dan Korporasi, 2003, “Globalisasi, Kapitalisme Global dan Matinya Demokrasi” dalam Bre Redana, JB Kristanto, Nirwan Ahmad Arsuka, eds., *Esei-esei 2003 Bentara*, Jakarta: Penerbit Kompas.
- ²² Ibid
- ²³ Ibid
- ²⁴ Ella Gapken Jager, op cit, hlm 48-49.
- ²⁵ Gabel, Medard dan Henry Bruner, 2003, *Global Inc.: An Atlas of the Multinational Corporation*. (Medard Gabel dan Henry Bruner, 2003: hlm. 3).
- ²⁶ Spero, Joan E. dan Jeffrey A. Hart, 2003, *The Politics of International Economic Relations*, Wadsworth: Thomson, hal. 161
- ²⁷ Bakan, Joel, 2004, *The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power*, New York: Free Press), hal. 13-14
- ²⁸ Kecuali istilah “MNC,” juga dikenal istilah “TNC” atau *transnational corporations* yang ditawarkan oleh PBB. Dalam artikel ini sengaja dipilih MNC karena istilah ini tidak hanya lebih mencerminkan realitas, tapi juga karena lebih populer.
- ²⁹ Medard Gabel dan Henry Bruner, 2003: hlm. 122).
- ³⁰ Benjamin C. Fishman, “Binding Corporations To Human Rights Norms Through Public Law Settlement”, *New York University Law Review* (October 2006), hal. 3lihat juga <http://www.globalpolicy.org/intljustice/atca/atcaindx.htm>, Global Policy Forum.
- ³¹ Ibid. hal.12-13
- ³² Sandeep gopaian, “New Treds In The Making Of International Commercial Law”, *Journal Of Law and Commerce*, Spring 2004, hal. 117-118
- ³³ Dwi Condro Triono, Makalah Seminar Setengah Hari dengan tema “Dilema Pembangunan Bidang Keteknikan Dalam Krisis Perekonomian Indonesia” Fakultas Teknik Universitas Janabadra Yogyakarta. Tanggal 15 Agustus 2001.
- ³⁴ John Naisbit, *Global Paradox*.
- ³⁵ Antal Szabó, *SMEs in the Third Millennium, International Conference on “Legal Aspects of SME Development & Best Practice in Simplification of SME Legal Environment” 6-7 April 2000, Maribor*.
- ³⁶ Sunil Bhargava, *World Trade Organisation Regime: Impact On Small And Medium Enterprises (SMEs)*, Committee on Trade Laws and WTO, Institute of Chartered Accountants of India
- ³⁷ Declared on concluding day of the tenth UN Conference on Trade and Development, 19 February 2000
- ³⁸ International Ministerial Conference on “Enhancing the Competitiveness of SMEs in Global Economy yang diselenggarakan

- oleh Organization Of Economic and Cooperation and Development (OECD) pada 13-15 Juni 2000 di Bologna, Italy.
- ³⁹ Melissa A. Boge, Increasing Small Business Exports: Learning To Do The Right Thing, *Journal of Small and Emerging Business Law*, Winter 1997
- ⁴⁰ A.B. Susanto Kanal Transformasi Bisnis & Budaya Perusahaan <http://www.wikimu.com/News/Print.aspx?id=2224>, Senin, 30 April 2007
- ⁴¹ Ibid.
- ⁴² Ali, Suryadharma, (2007). Kembangkan Lembaga Keuangan Mikro dari Dana CSR (Wawancara dalam Majalah Bisnis & CSR: Reference for Decision Maker).
- ⁴³ Mohammad Ikhsan, Usaha kecil menengah (UMKM), kondisi Makro ekonomi dan pemberdayaan melalui mekanisme pasar disampaikan pada seminar Small Medium Enterprises Developmen in Indonesia yang diselenggarakan oleh ADB/BAPENAS/ILO/WB/, LPEM-FEUI, Jakarta, 1999
- ⁴⁴ Ali, Suryadharma, (2007). Kembangkan Lembaga Keuangan Mikro dari Dana CSR (Wawancara dalam Majalah Bisnis & CSR: Reference for Decision Maker).
- ⁴⁵ Suryadharma Ali,, (2007). “Kembangkan Lembaga Keuangan Mikro dari Dana CSR” (Wawancara dalam Majalah Bisnis & CSR: Reference for Decision Maker).

Perlindungan UMKM di Indonesia

1. KARAKTERISTIK UMKM DI INDONESIA: MANIFESTASI AJARAN MARHEINISME SUKARNO DAN CO-OPERATION MUH HATTA

Tidak ada penjelasan sejarah mengenai kelahiran UMKM di Indonesia. Seringkali UMKM hanya diterjemahkan sebagai usaha-usaha yang dilakukan oleh rakyat kecil dengan modal kecil. Tetapi kalau kita mau memahami dengan sikap yang arif dan jernih, tanpa tendensi politis maupun ideologis tertentu, sesungguhnya UMKM adalah manifestasi dari ajaran Marheanisme dari Sukarno dan konsep *Co Operation* dari Muhammad Hatta

Marhaenisme merupakan paham yang dikembangkan dari pemikiran Soekarno. Ajaran ini menggambarkan kehidupan rakyat kecil. Orang kecil yang dimaksud adalah petani dan buruh dan siapa saja yang hidupnya dalam kemiskinan tetapi tidak bergantung pada pihak lain.

Kisah mengenai Marheanisme cukup menarik untuk di simak. Detail ceritanya sebagai berikut:

Pada suatu sore ketika Sukarno bersepeda di pinggiran kota Bandung, Soekarno berhenti dipinggir hamparan sawah. Sambil beristirahat ia mengamati seorang petani yang kurus sedang membajak sawahnya yang kecil dengan sapi-sapinya yang juga kurus. Lalu Soekarno memanggilnya dan mengajaknya bicara.

“wahai bapak tani, siapa pemilik sawah ini “tanya Soekarno, “sawah ini walaupun kecil adalah milik saya dan keluarga”, jawab petani. Lalu Soekarno bertanya lagi, “siapa pemilik sapi-sapi ini” “Sapi ini juga milik saya sendiri”, jawab petani.

“siapa pemilik bajak itu”, dijawab petani, “itu milik saya sendiri”, “juga gubuk yang kecil itu dan juga cangkul dan alat-alat bertani ini, semuanya adalah milik saya dan keluarga, hasil dari sawah ini pun saya gunakan untuk menghidupi keluarga saya.

Lalu Soekarno mengakhiri percakapan ini dengan bertanya, “siapa namamu?. Dijawablah oleh petani tadi, “nama saya Marhein”¹

Dari kejadian sore itu Soekarno merenung. Dalam pikirannya ia mengatakan:

“Banyak sekali rakyat Indonesia yang hidupnya seperti si Marhein. Mereka tidak mengabdikan pada majikan, mereka memiliki modal sendiri walaupun serba kecil dan terbatas. Marhein tidak sama dengan kaum Proletar yang mengabdikan pada kaum Borjuois seperti konsep sosialisme komunis dari ajaran Karl Marx di Eropa. Inilah ciri dari ekonomi bangsa Indonesia.”²

Lalu Soekarno menamakan konsep ekonomi ini dengan “Marheinisme”. Seorang marhein adalah orang yang mempunyai alat-alat sedikit orang kecil dengan milik kecil, dengan alat-alat kecil, sekedar cukup untuk dirinya sendiri. Bangsa kita yang puluhan juta, yang sudah dimelaratkan, bekerja bukan untuk orang lain dan tidak ada orang bekerja untuk dia. Tidak ada penghisapan telaga seseorang oleh orang lain.³

Marhein terdiri dari petani buruk, pegawai, nelayan, tukang gerobak, pegawai kecil-kecil dan pokoknya masyarakat yang miskin namun tidak mengabdikan dirinya pada rang lain.

Marhein bukan buruh yang menjual tenaganya pada suatu perusahaan tetapi tidak ikut memiliki pabriknya, tidak ikut memiliki mesin, tidak ikut memiliki martil-martil dan gergaji-gergaji dalam perusahaan itu. Mereka hanya menjual tenaga yang cocok. Begitu pula dengan insinyur yang pergi dengan mobil yang mengkilap atau dokter yang memiliki rumah mewah atau ahli kimia yang kaya raya tetapi mereka itu tidak ikut memiliki alat produksi dimana mereka bekerja mereka disebut dengan *intellectueel proletar*.

Mereka bukan marhein.

Kaum marhein yang berjumlah jutaan itu menjadi kekuatan ekonomi Indonesia, mereka adalah kekuatan untuk menumbangkan imperialisme untuk itu kaum marhein harus bersatu jadi persatuanlah yang mungkin menjadi dasar gerakan revolusi Indonesia.

Selanjutnya Soekarno berkata bahwa revolusi Indonesia berbeda dengan revolusi di Uni Sovyet, dimana kelas proletar bersatu menumbangkan kelas bourgeois kapitalis revolusi Indonesia juga berbeda dengan revolusi Perancis, berlainan dengan revolusi Amerika. Kita adalah satu gerakan dari seluruh rakyat dengan dasar persatuan. Untuk itu perlu mempersatukan segenap golongan –golongan marhein dengan menghilangkan kepentingan daripada golongan, persoalan rasa daerah, kepentingan agama, atau kepentingan lain. Karena itu sejak mulanya ide mempersatukan marhein menggunakan elemen keaslian Indonesia ialah gotong royong.

Untuk mempersatukan segenap golongan-golongan marhein yang terdiri dari elemen buruh, elemen tani, elemen tukang gerobak, elemen pedagang, elemen nelayan, dan sebagainya dan persoalan-persoalannya, karena nya sejak semula di dalam ide mempersatukan marhein sudah dimasukan, terutama sekali, elemen keaslian indonesia. Ialah gotong royong. Gotong royong yang memang salah satu sendi daripada masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu, dan dianjurkan kepada semua golongan akan bisa menumbangkan imperialisme jika sudah berdiri pada dasar revolusioner dan marhein meliputi semua golongan..

Perkataan marheinisme adalah lambang dari penemuan kembali nasional kita. Pergerakan Indonesia haruslah suatu pergerakan yang mencari tenaganya dari kalangan kaum marhein. Marheinisme itulah gambaran susunan pergaulan hidup bangsa Indonesia yang akan membasmi perusahaan-perusahaan besar lambang imperialisme yang sejak dahulu menghalang-halangi dan membikin kita tidak bisa hidup lebih baik.

Marheinisme adalah sosialisme Indonesia dalam praktek. Sosialisme Indonesia adalah sosialisme yang dikurangi dengan pengertian materialistisnya yang ekstrim, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan sosialisme Indonesia adalah sosialisme yang campuran yang menarik

persamaan politik dari *declaration of independence* dari Amerika, menarik persamaan spiritual dari Islam dan Kristen serta menarik persamaan ilmiah dari Marxisme dan kesemuanya kami masukkan gotong royong yang menjadi jiwa, inti daripada bekerjasama, hidup bersama dan saling membantu. Hasil campuran dari ini semua adalah sosialisme Indonesia⁴

Marhehinisme adalah bentuk atau karakteristik dari sebagian besar rakyat Indonesia, yang hidup sederhana tetapi merdeka dari cengkraman pemilik modal. Selanjutnya Marhaenisme digunakan Soekarno sebagai sebuah faham perlawanan terhadap penjajahan ekonomi kolonialisme yang diilhami dari sosio-demokrasi.⁵ Jadi Marhehinisme bukan semata-mata ideologi politik seperti yang sela ini dipahami banyak orang, tetapi lebih pada ideologi ekonomi yang mencoba mencari jatidiri model ekonomi bangsa Indonesia.

Begitu pula dengan konsep *co-operation* dari Bung Hatta. Mohammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukittinggi.

Pada tahun 1921, Bung Hatta pergi ke Rotterdam, Belanda untuk belajar ilmu perdagangan di Nederland Handelshogeschool (bahasa inggris: Rotterdam School of Commerce, kini menjadi Universitas Erasmus). Di Belanda, ia kemudian tinggal selama 11 tahun.

Pada saat belajar di Belanda tersebut banyak pemikiran Bung Hatta yang dipengaruhi gerakan Sosialisme Demokrat yang kemudian menjadi ilham politik ekonomi *co-operation* yang dibawa pulang ke tanah air.

Dalam pidatonya tanggal 12 Juli 1951, Bung Harra mengatakan bahwa konsep *co-operation* adalah wadah aparat produksi satu-satunya sebagai jawaban positif atas penolakan kita terhadap kapitalisme liberalisme dan penolakan terhadap Marxisme Komunisme.

Bagi Bung Hatta, konsep *co-operation* adalah program penerapan sistem ekonomi jangka panjang, sehingga waktu itu (sekitar tahun 1950-an) keberadaan kapitalisme masih diperbolehkan, sembari memperkokoh sendiri-sendiri koperasi. Untuk jangka panjang, Bung Hatta berharap hanya sistem ekonomi koperasi yang berlaku di Indonesia dan tidak ada lagi sistem kapitalisme di negeri ini.⁶

Namun, apa yang terjadi setelah 63 tahun Indonesia merdeka? Sistem Kapitalisme yang diberlakukan, koperasi, sebagai soko guru sistem ekonomi,

justru ditinggalkan. Kapitalisme mendapat dukungan bukan hanya dalam bentuk intervensi asing, tapi juga berbentuk produk kebijakan politik ekonomi dalam negeri yang memanjakannya. Sebaliknya, koperasi justru dimarginalkan sebatas institusi untuk sekedar ada. Institusionalisasi koperasi tentu berbeda dengan bangunan ekonomi sebagai suatu sistem. Lembaga-lembaga koperasi merupakan bagian ekonomi rakyat, sedang koperasi sebagai bangunan ekonomi tidak lain adalah ekonomi kerakyatan sebagai sistem bangunan ekonomi.

Dalam kekhawatirannya perihal akan tergusurnya koperasi oleh kapitalisme, Bung Hatta juga pernah menyatakan:

“Kolonialisme secara pemerintah jajahan sudah lenyap, sudah kita runtuhkan. Tetapi kapitalisme kolonial sebagai suatu kekuasaan organisasi ekonomi masih kuat duduknya. Kekuasaannya itu hanya dapat dipatahkan dengan membangun perekonomian rakyat di atas dasar koperasi”.

Pada tahun 1933, Bung Hatta menulis kata pengantar dalam majalah *Daulat Rakyat* sebagai berikut:

Tani sendiri tidak berkuasa lagi atas padi yang ditanamnya. Padi masak orang lain yang punya. Produksi tinggal di tangan bangsa kita, tetapi distribusi atau pejualan sudah ditangan bangsa asing. Bertambah banyak perpecahan produksi, bertambah kuasa kaum pembeli dan penjual, semakin terikat ekonomi rakyat⁷

Konsep *co-operation*, yang lebih akrab dengan perpaduan terminologi pertumbuhan dengan pemerataan, daya saing dengan solidaritas, dinilai tidak sesuai dengan semangat “perdagangan bebas”. Karena itu, banyak yang kemudian berpendapat bahwa koperasi harus bisa mengejar atau bersaing dengan konglomerat. Jelas, ini merupakan kesalahan fatal dalam memandang koperasi, sekaligus merupakan kekalahan “kubu” ekonomi kerakyatan dalam perang wacana melawan kapitalisme. konsep *co-operation* berbeda (berlawanan) dengan konglomerasi, baik bentuk, semangat, jiwa maupun tujuannya. Terlebih lagi, konglomerasi merupakan kapitalisme kroni yang secara substansial menyalahi sendi-sendi dasar kapitalisme itu sendiri.⁸

Di tengah dominasi sistem ekonomi neoliberal (kapitalisme global), terminologi keadilan, pemerataan, kesejahteraan dan sejenisnya tidak lagi mendapat tempat. Terminologi tersebut lebih berfungsi sebagai slogan politik

ketimbang agenda pekerjaan. Yang akrab di telinga sekaligus sebagai agenda kerja ekonomi adalah seputar pertumbuhan, daya saing, efisiensi dan lain-lain.⁹

Pada saat ini kedua ajaran tersebut sangat identik dengan bentuk aktifitas ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia yang bergerak dalam usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Sebenarnya dalam banyak literatur, UMKM mempunyai istilah lain yang sering disebut ekonomi kerakyatan. Mubyarto mendefinisikan Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan rakyat. Ekonomi kerakyatan menunjuk pada sila ke-4 Pancasila, yang menekankan pada sifat demokratis sistem ekonomi Indonesia. Dalam demokrasi ekonomi Indonesia produksi tidak hanya dikerjakan oleh sebagian warga tetapi oleh semua warga masyarakat, dan hasilnya dibagikan kepada semua anggota masyarakat secara adil dan merata. Demikian ekonomi rakyat memegang kunci kemajuan ekonomi nasional di masa depan, dan sistem ekonomi Pancasila merupakan “aturan main etik” bagi semua perilaku ekonomi di semua bidang kegiatan ekonomi.¹⁰

Ada pula yang mencoba membedakan terminologi antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi rakyat. Ekonomi kerakyatan dengan ekonomi rakyat sering disalahpahami banyak orang, atau setidaknya mereka rancu memahami dan membedakan di antara keduanya.

Ekonomi Kerakyatan (Demokrasi Ekonomi) adalah suatu sistem ekonomi yang menjamin keterlibatan rakyat sebagai subyek yang mengendalikan jalannya roda ekonomi negara, atau suatu sistem perekonomian yang menjamin dilakukannya “produksi oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau kepemilikan rakyat”. Disebut juga demokrasi ekonomi, karena sistem ini mengacu pada Pasal 33 UUD 1945¹¹.

Sedangkan Ekonomi kerakyatan adalah kancah kegiatan ekonomi orang kecil (wong cilik), yang karena merupakan kegiatan keluarga, tidak merupakan usaha formal berbadan hukum, tidak secara resmi diakui sebagai sektor ekonomi yang berperanan penting dalam perekonomian nasional.¹² Ekonomi rakyat juga sering disebut sektor informal, karena keterbelakangannya dan dalam volume produksi yang sangat kecil serta tidak dilengkapi dengan ijin

usaha secara formal.¹³

Dalam literatur ekonomi pembangunan ini disebut “*underground economy*”, atau “*ekstralegal sector*”.¹⁴

Uraian di atas bisa disederhanakan bahwa inti sistem ekonomi kerakyatan adalah: (a) adanya asas kekeluargaan, yang secara essensial berarti memprioritaskan pemerataan, (b) penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan alam yang menjadi kepentingan hajat hidup masyarakat, (c) semua kekayaan alam tersebut dialokasikan untuk rakyat.

Sistem ekonomi kerakyatan (dalam amandemen ke empat) dijalankan melalui asas demokrasi ekonomi, dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Secara sederhana, ekonomi kerakyatan setidaknya memiliki 5 sasaran penting yang meliputi:

- 1) tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat,
- 2) tersedianya sistem jaminan social bagi rakyat yang benar-benar membutuhkan,
- 3) terlindungi dan terdistribusikannya kepemilikan modal material secara relatif merata di antara anggota masyarakat,
- 4) terselenggarakannya pendidikan bebas biaya bagi setiap anggota masyarakat yang memerlukan,
- 5) terjaminnya hak setiap anggota masyarakat untuk mendirikan serikat-serikat rakyat.

Dalam penerapannya, Ekonomi Kerakyatan mensyaratkan adanya demokratisasi kepemilikan modal oleh rakyat secara merata tanpa kecuali. Demokratisasi modal itu meliputi modal material, modal intelektual dan modal institusional.

Modal material tersebut di antaranya meliputi *land reform* pada sektor pertanian, kepemilikan saham oleh karyawan di sektor dunia usaha. Dalam hal kepemilikan modal material, negara tidak hanya wajib mengakui dan melindungi hak kepemilikan rakyat, tetapi negara juga wajib memastikan bahwa semua anggota masyarakat turut memiliki modal material¹⁵.

Modal intelektual meliputi pemberlakuan program wajib belajar kepada

seluruh rakyat, tanpa kecuali. Konsekuensi program ini berarti negara wajib menyelenggarakan pendidikan tanpa biaya atau pendidikan gratis bagi seluruh rakyatnya. Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, pendidikan bukan merupakan suatu kegiatan yang dikomersialkan.

Modal institusional berarti rakyat memiliki serikat-serikat rakyat yang menjamin adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat. Karena itu, dalam ekonomi kerakyatan ini, negara wajib menjamin eksistensi dan fungsionalisasi serikat buruh, serikat petani, serikat nelayan, serikat pedagang kaki lima, serikat pedagang asongan, serikat kaum miskin kota, dan serikat-serikat rakyat yang lain.

Rasanya tidak lengkap jika membahas Ekonomi Kerakyatan tanpa membuka UUD 1945 Bab XIV tentang “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial” yang berisi Pasal 33 dan 34. Menurut Jimly Asshiddiqie, Bab XIV ini menggambarkan diterimanya pengaruh paham sosialisme dalam rumusan cita-cita kenegaraan kita, di samping prinsip demokrasi liberal.

Hal ini berkaitan dengan diadopsinya konsep “*welfare state*” dalam UUD. Jika negara kapitalis menganggap kemiskinan dan perekonomian merupakan urusan pasar dan karena itu tidak perlu diurus negara (pemerintah). Maka dalam konsep “*welfare state*” negara diharuskan bertanggungjawab untuk mengintervensi pasar, mengurus kemiskinan, dan memelihara orang miskin.

Jika dibandingkan dengan konstitusi negara-negara liberal seperti Amerika, yang tidak mengatur ekonomi rakyat dalam Konstitusi, mengingat hal itu merupakan mekanisme pasar yang tidak perlu diurus negara, dan karena itu tidak perlu dicantumkan dalam konstitusi¹⁶.

Undang Undang Dasar 1945 memberikan dasar yang utama untuk pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil. Hal tersebut tercermin dalam pasal 33 dan penjelasan pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa “*perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*” Pasal tersebut merupakan dasar atas bentuk ekonomi di Indonesia, yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945. sebagai berikut “*dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat, maka kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang perorang.*

Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan....”

Demokrasi ekonomi atau disebut juga dengan ekonomi kerakyatan bisa juga diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang disusun oleh usaha kecil dan menengah yang merupakan mayoritas dari unit usaha dan menyerap sebagian besar tenaga kerja¹⁷

Dalam proses perubahan UUD di MPR beberapa waktu lalu, usul pencoretan “asas kekeluargaan” dari Pasal 33 Ayat (1) sempat menimbulkan kontroversi di antara para ahli. Satu pihak ingin menghapuskan perkataan “asas” itu karena dianggap menjadi salah satu sebab tumbuh suburnya praktek-praktek penyimpangan sejak kemerdekaan dan apalagi di era Orde Baru. “Asas” tersebut terlalu abstrak maknanya sehingga perwujudannya dalam praktek mengundang penafsiran yang memberi pembenaran pada praktek KKN. Karenanya, “asas” itu sering diplesetkan dengan “*family system*” atau asas keluarga. Lagi pula, dalam perekonomian, asas itu sebenarnya dapat lebih tepat dikaitkan dengan prinsip-prinsip seperti efisiensi, pemerataan dan sebagainya yang pengertiannya lebih jelas dan tidak kontroversial.

Kelompok lain berpendapat, Bahwa tidak ada hubungan langsung antara idealitas konsep “kekeluargaan” dengan realitas penyimpangan dalam praktek. Banyak faktor yang menyebabkan tumbuh suburnya KKN, sehingga tidak tepat jika ‘asas kekeluargaan’ dijadikan sebagai kambing hitam. Padahal, dalam kenyataannya, asas kekeluargaan itu selama ini belum cukup didalami makna yang sebenarnya, serta belum pernah diimplementasikan dalam praktek.

Salah satu nilai yang paling hakiki yang terkandung dalam asas kekeluargaan adalah nilai demokrasi ekonomi yang jelas-jelas mencerminkan kreasia intelektual para *the founding father* berkenaan dengan gagasan kedaulatan rakyat.

Penghapusan ‘asas kekeluargaan’ berimplikasi pada penghapusan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Akibatnya perkembangan demokrasi Indonesia hanya akan terarah pada pengertian demokrasi politik yang didasarkan pada paham liberalisme dengan segala kelemahan, kekurangan dan distorsi di dalamnya. Padahal, ‘*the founding fathers*’ sejak sebelum

kemerdekaan sangat mengidealkan upaya kreatif untuk mengadopsi contoh-contoh yang dapat ditarik dari paham demokrasi politik yang liberal di satu pihak, tetapi di pihak lain juga menutupi kelemahannya dengan mengadopsi pelajaran yang dapat ditarik dari paham demokrasi ekonomi yang didasarkan atas paham sosialisme.

Untuk mencari jalan tengah dalam kontroversi itu, akhirnya disepakati bahwa Pasal 33 tersebut ditambah dua ayat baru yang berbunyi (Ayat 4) “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Dengan demikian menjadi jelas, bahwa ekonomi kerakyatan lebih merujuk pada sistem perekonomian yang secara konstitusional (seharusnya) berlaku di Indonesia. Sedang Ekonomi Rakyat adalah sektor-sektor ekonomi yang dihuni oleh pelaku ekonomi yang berukuran kecil, yang keadaannya serba terbelakang. Sektor-sektor ini yang sekarang populer dengan istilah Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM. UMKM meliputi sektor pertanian rakyat, sektor perikanan rakyat, sektor transportasi rakyat, sub-sektor industri kecil dan rumah tangga, termasuk perkreditan rakyat.¹⁸

Menurut Paramitha UMKM yang ada di Indonesia memiliki ciri khas tertentu yang membedakan dengan usaha besar ataupun usaha kecil di negara lain. Ada beberapa karakteristik yang menjadi ciri khas usaha kecil, antara lain¹⁹

- 1) Mempunyai skala usaha yang kecil baik modal, penggunaan tenaga kerja maupun orientasi pasar
- 2) Banyak berlokasi di pedesaan, kota-kota kecil atau daerah pinggiran kota besar
- 3) Status usaha milik pribadi atau keluarga
- 4) Sumber tenaga kerja berasal dari lingkungan sosial budaya (etnis, geografis) yang direkrut melalui pola pemagangan atau melalui pihak ketiga
- 5) Pola kerja seringkali part time atau sebagai usaha sampingan dari kegiatan ekonomi lainnya.
- 6) Memiliki kemampuan terbatas dalam mengadopsi teknologi, pengelolaan

usaha dan administrasinya sederhana

- 7) Struktur permodalan sangat terbatas dan kekurangan modal kerja serta sangat tergantung terhadap sumber modal sendiri dan lingkungan pribadi
- 8) Izin usaha seringkali tidak dimiliki dan persyaratan usaha tidak dipenuhi

Untuk mendukung UMKM, minimal diperlukan tiga agenda yang merupakan pra syarat bagi pelaksanaan ekonomi kerakyatan. *Pertama*, agenda di sektor fiskal, yaitu adanya pembagian pendapatan (*revenue sharing*) antara pemerintah pusat dengan daerah, di sektor perbankan, yaitu adanya penyelenggaraan sistem perbankan regional, sebagai pengganti sistem perbankan yang tersentral. *Kedua*, membangun ekonomi kerakyatan, kita sudah melaksanakannya dalam bentuk slogan, meski belum pada substansi. *Ketiga*, membatasi keserakahan kapitalisme, dalam hal ini baik slogan maupun substansi belum kita mulai.²⁰ Pemenang nobel Joseph E Stiglitz, mengatakan sistem ekonomi hari ini kurang berpihak kepada rakyat miskin karena itu perlu sistem ekonomi alternatif²¹, yaitu ekonomi kerakyatan.

Untuk itu, agenda kita ke depan bukan hanya memperkuat bangunan sistem ekonomi dalam bentuk ekonomi kerakyatan, tapi pada saat yang sama juga harus membatasi keserakahan kapitalisme di Indonesia.

Sistem Ekonomi yang diusung oleh proklamator Indonesia Muhammad Hatta masih cocok dengan kondisi saat ini bahkan bisa menjawab kesejahteraan bagi rakyat kecil. Hal tersebut diungkapkan oleh Anwar Abbas, pengarang buku “Bung Hatta dan Ekonomi Islam, Pergulatan Menangkap Makna Keadilan dan Kesejahteraan”²². Anwar melihat sistem perekonomian global dan Indonesia belum dan semakin tidak berpihak kepada rakyat miskin.

23

Menurut Anwar pemerintah sudah berusaha tapi tidak maksimal sebab apabila pemerintah benar-benar menerapkan sistem perekonomian seperti pada Pasal 27, Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 maka kesejahteraan rakyat bisa tercapai. Pemerintah mempunyai komitmen menyelenggarakan ekonomi berkeadilan dan bisa menyejahterakan rakyat namun belum optimal dilaksanakan.

Fenomena perekonomian saat ini egoistik dan individualistik sehingga keragaman, kebersamaan dan persatuan tidak tercapai. pemikiran ekonomi

Bung Hatta secara substansial dapat dinilai sejalan atau paralel dengan konsep Islam terutama dilihat dari sisi falsafah, tujuan nilai-nilai dasar dan nilai instrumentalnya. Oleh karena itu pemikiran ekonomi Bung Hatta bisa dilihat sebagai salah satu bagian dalam pemikiran ekonomi Islam.

Tetapi hari ini semangat dari tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin ekonomi kita di masa lalu begitu yang memihak kepetingan ekonomi rakyat dan berpikir atau bekerja keras mengangkat derajat orang kecil yang miskin mulai dilupakan. Para ekonom masa kini begitu percaya dan menggantungkan diri pada konsep pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dan begitu mengagung-agungkan persaingan bebas yang dianggap hasilnya pasti akan “menetes ke bawah” (*trickle down effect*). Prinsip demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan, misalnya, yang dirumuskan Hatta dan Sukarno sekarang dianggap tidak relevan lagi dengan prinsip-prinsip globalisasi ekonomi²⁴.

Pihak-pihak yang menentang datang dari kalangan yang merasa dirugikan oleh ekonomi kerakyatan, yaitu para pengusaha atau pemilik modal (kapitalis) yang menjadi pelaku ekonomi neoliberal. Kalangan ini menganggap bahwa ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi sosialis. Sedangkan mereka yang menentang biasanya datang dari kalangan akademisi, ilmuwan atau ekonom yang larut dalam *mainstream* ekonomi neoliberal atau kapitalisme global.

Mereka berargumen bahwa ekonomi kerakyatan hanya jargon politik belaka, karena tidak ada dalam teori-teori (*teksbook*) yang mereka pelajari. Mereka juga meragukan, meskipun menaruh simpatik terhadap gagasan ekonomi kerakyatan, tapi mereka menilai tidak realistis di tengah kuatnya arus kapitalisme global. Menurut kalangan yang pro kapitalis menganggap bahwa kesejahteraan rakyat akan tercipta dengan paradigma *economic growth* (ekonomi pertumbuhan) yang akan memberikan dampak *Trickle Down Effect*. Hasil pembangunan itu bisa mengucur dari atas ke bawah - ke rakyat, dari pusat ke daerah,²⁵

Namun sampai hari ini hal ini tidak terbukti. Kue pembangunan tersebut hanya dinikmati oleh kalangan tertentu saja. Padahal untuk membiayai terciptanya ‘kue pembangunan’ ini telah dikeruk habis-habis kekayaan rakyat seperti minyak, gas, hutan, emas dan lain sebagainya.

Dari pihak yang pro terhadap ekonomi kerakyatan memberikan suatu anggapan bahwa kalangan lapisan atas dengan sengaja berusaha melupakan katakunci 'pemerataan', yang sejak dulu telah merupakan tujuan dari Sila Keadilan Sosial. Sajogyo mengatakan dengan kecewa, bahwa ekonom Indonesia lebih banyak memikirkan masalah-masalah makroekonomi perdagangan dan keuangan internasional (konglomerasi dan globalisasi), dan tidak menyediakan waktu memikirkan ekonomi rakyat atau nasib penduduk miskin yang jumlahnya banyak dan senantiasa meningkat. Sedang pembangunan yang berwujud gedung-gedung tinggi megah, obyek-obyek rekreasi mewah, jalan-jalan aspal halus dan sebagainya, bukanlah prioritas pembangunan yang diperlukan bagi kepentingan puluhan juta orang yang hidup di sekitar garis kemiskinan²⁶. Artinya pertumbuhan ekonomi yang terlihat sekarang tidak sejalan dengan proses pemerataan kesejahteraan dalam masyarakat.

2. PENGERTIAN DAN BERBAGAI BENTUK PERUSAHAAN UMKM DI INDONESIA

a. Pengertian UMKM

Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM) definisi UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini, (UU UMKM nomor 20 tahun 2008). Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, (UU UMKM nomor

- 20 tahun 2008). Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, (UU UMKM nomor 20 tahun 2008). Kriteria Usaha Menengah adalah Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).²⁷

Sebagai pembanding UMKM di beberapa negara disebut dengan *Small Medium Enterprises (SMEs)*. Namun demikian, apa sebenarnya SME ini tergantung pada siapa yang mendefinisikan. Contohnya industri di Kanada, SMEs didefinisikan:

Industry Canada uses the term SME to refer to businesses with fewer than 500 employees, while classifying firms with 500 or more employees as "large" businesses.

Hal yang dimaksud di atas suatu bisnis kecil menengah dengan karyawan kurang dari 500 orang (jika itu bisnis yang menghasilkan barang) dan kurang dari 50 karyawan (jika bisnisnya menghasilkan suatu jasa). Jika suatu perusahaan beranggotakan karyawan lebih dari jumlah tadi tetapi masih kurang dari 500, maka perusahaan tersebut diklasifikasikan sebagai medium-sized business.

Ada pula saat ini istilah *microbusiness* yang diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki karyawan kurang dari 5 (lima) orang. Namun sementara itu suatu riset yang berlangsung di Kanada menghasilkan suatu kesimpulan lain, yaitu mereka mendefinisikkan SME sebagai suatu bisnis apa saja dengan jumlah karyawan dari 0 - 499 dan memiliki pendapatan kotor kurang dari USD\$ 50 juta.

Beda negara beda pula definisi SME. Contohnya di Uni Eropa, definisi SME, yaitu:

*Small to Medium Enterprises is a business with a headcount of fewer than 250 is classified as medium-sized; a business with a headcount of fewer than 50 is classified as small, and a business with a headcount of fewer than 10 is considered a microbusiness. The European system also takes into account a business's turnover rate and its balance sheet*²⁸.

Keterangan diatas yaitu suatu bisnis dengan jumlah karyawan kurang dari 250 orang diklasifikasikan sebagai *medium-sized business*. Jumlah karyawan yang kurang dari 50 disebut sebagai *small business* dan apabila kurang dari 10 maka disebut dengan *microbusiness*. Sistem di Uni Eropa juga memperhitungkan *turnover rate* dari bisnis dan juga *balance sheet*-nya sebagai salah satu patokan untuk mengklasifikasikan jenis bisnis tadi.

Sementara itu di Amerika Serikat sampai saat ini belum ada standar baku mengenai definisi SME ini²⁹.

The definition of small business is set by a government department called the Small Business Administration (SBA) Size Standards Office. The SBA uses the term "size standards" to indicate the largest a concern can be in order to still be considered a small business, and therefore able to benefit from small business targeted funding. The concern cannot be dominant in its field, on a national basis. It must also be independently owned and operated.

Beberapa perusahaan terkadang membuat definisi sendiri mengenai SME. Contohnya adalah Microsoft, mereka memiliki standar yang berhubungan dengan target penjualan produk-produk software mereka di dunia bisnis. Dengan adanya standar yang baku mengenai definisi ukuran SME maka akan membuat proses mendapatkan dan menganalisa informasi statistik menjadi lebih mudah lagi.³⁰ Hal inilah yang membuat penting adanya

standarisasi terkait dengan definisi UMKM di Indonesia.

b. Berbagai Bentuk Perusahaan UMKM

Kajian selanjutnya adalah mengenai bentuk bentuk perusahaan bagi UMKM di Indonesia

Menurut Abdul Kadir Muhammad dan Ridwan Khairandi, ada berbagai bentuk perusahaan di Indonesia yaitu: ³¹

- 1) Perusahaan Perseorangan
- 2) Perusahaan Firma
- 3) Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV)
- 4) Perseroan Terbatas
- 5) Koperasi
- 6) Dan Perusahaan Milik Negara yang terdiri dari Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum).

Jika dilihat dari status hukumnya, perusahaan-perusahaan tersebut dapat diklasifikasi lebih lanjut yaitu:

- 1) Perusahaan Badan Hukum yang terdiri dari (1) Perseroan Terbatas; (2) Koperasi dan; (3) Perusahaan milik negara (BUMN)
- 2) Perusahaan Bukan Badan Hukum terdiri dari; (1) Perusahaan Firma; (2) Perusahaan Persekutuan Komaditer (CV) dan; (3) Perusahaan Perseorangan.

Sementara jika dilihat jumlah kepemilikannya maka kriteria perusahaan adalah

- 1) Perusahaan Perseorangan yaitu perusahaan yang dimiliki dan dijalankan oleh seorang saja. Artinya tanggung jawabnya mutlak ditanggung oleh pemilik sekaligus sebagai pengelola
- 2) Perusahaan Persekutuan yaitu perusahaan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih. Disini ada istilah tanggung jawab renteng untuk perusahaan Firma, tanggung jawab terpisah antara sekutu komanditer dan sekutu komplementer, dan Tanggung jawab terbatas bagi Perseroan Terbatas antara pemegang saham dan dewan direksi serta pembedaan Tanggung jawab bagi pengurus dan anggota pada perusahaan Koperasi.
- 3) Perusahaan Kelompok (Holding Company / Grup / Perusahaan Kelompok)

yaitu kelompok bisnis yang mempunyai banyak perusahaan. Perusahaan jenis ini sesungguhnya tidak ada dimata hukum, karena masing-masing perusahaan dianggap berdiri sendiri, namun mempunyai kesatuan secara ekonomi, khususnya mengeai finansial dan management.³²

Jika bentuk bentuk perusahaan tersebut dikaitkan dengan UMKM, maka akan menjadi sangat beragam bentuk perusahaan yang dapat disandang oleh UMKM.

Hal ini karena UMKM menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 dalam pasal 6 dikriteriakan berdasarkan besarnya jumlah kekayaan yang dimiliki. Sementara bentuk perusahaan yang kita bahas diatas tidak mensyaratkan jumlah kekayaan yang harus dimiliki, kecuali untuk Perusahaan Perseroan Terbatas. Dalam Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam pasal Pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).³³. Artinya jika UMKM memenuhi kepemilikan kekayaan dan modal yang lebih dari yang dipersyarat oleh Undang Undang, maka bentuk perusahaan UMKM dapat berbentuk perusahaan apa saja termasuk Perseroan Terbatas.

Adapun yang perlu menjadi catatan adalah mengenai apakah UMKM dapat berbentuk Perusahaan Koperasi atau tidak?. ada dua pendapat yang berbeda yang perlu dibahas yaitu:

- 1) Secara yuridis UMKM berbicara mengenai bentuk usaha yang dikriteriakan berdasarkan besaran modal dan kekayaan, sementara Koperasi menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian disebutkan; "*Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan*". Dari sini ada perbedaan mendasar yaitu UMKM mengarah pada perkumpulan modal dan kekayaan sementara Koperasi adalah perkumpulan orang atau badan hukum. Jadi secara substansi Koperasi berbeda dengan UMKM
- 2) Tetapi, walaupun Koperasi adalah perkumpulan orang, namun Perusahaan Koperasi juga memiliki modal dan kekayaan, seperti halnya bentuk perusahaan lainnya³⁴ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dalam BAB VII tentang MODAL dalam pasal

Pasal 41

(1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

(2) Modal sendiri dapat berasal dari:

- a. simpanan pokok;
- b. simpanan wajib;
- c. dana cadangan;
- d. hibah.

(3) Modal pinjaman dapat berasal dari:

- a. anggota;
- b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
- c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
- d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;

. Jika argumen ini yang dijadikan dasar maka Koperasi dapat saja menjadi alternatif bentuk perusahaan yang dapat digunakan oleh UMKM, sebatas masuk kriteria yang telah ditentukan.

Dari uraian diatas sesungguhnya tidak perlu diperdebatkan lebih jauh. Sebab justru yang lebih penting kita pikirkan mengenai bentuk perusahaan yang dapat digunakan oleh UMKM disesuaikan saja menurut kebutuhan, dan bidang gerak, serta budaya yang ada didalamnya.

Misalnya apabila bisnis masih relatif kecil dan dapat dijalankan sendiri maka perusahaan perseorangan cukup efektif. Jika bidang usaha UMKM lebih menekankan layanan jasa, maka bisa saja Perusahaan Firma menjadi pilihan. Jika untuk produk barang persekutuan Komanditer (CV) dapat digunakan.³⁵ Tetapi apabila status badan hukum lebih diutamakan maka bentuk Perseroan Terbatas dapat dipilih. Sementara jika pendirian UMKM pada awalnya didahului dengan asas kekeluargaan dengan kerjasama orang orang maka tak ada salahnya jika Koperasi menjadi pilihannya.

Selain hal tersebut diatas, ada persoalan lain yang perlu mendapatkan perhatian berkait dengan bentuk perusahaan dari UMKM, karena banyak

perusahaan UMKM yang tidak mempunyai formalitas dan memenuhi aspek legalitas perusahaan. Mereka sering disebut dengan pengusaha sektor informal.³⁶ Mereka ini seperti pedagang kaki lima, penjual asongan, tukang bakso, pengusaha warung tegal, industri rumah tangga dan lain sebagainya. Bagi mereka formalitas hukum tidak pernah terpikirkan. Tetapi jumlah mereka cukup banyak dan berserakan di setiap pojok jalanan.

Tentunya hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah, sebab bisa saja pada kondisi tertentu mereka berbenturan dengan masalah hukum. Misalnya menimbulkan kerugian bagi konsumen, bentuk badan hukum yang dipersyaratkan untuk mengikuti proses tender atau *outsourcing* persoalan pajak dan masalah hukum lainnya³⁷.

3. Mengapa UMKM Perlu Dilindungi?

Dalam perkembangan UMKM di Indonesia, sudah sejak lama Pemerintah melakukan pembinaan terhadap UMKM. Pembinaan terhadap kelompok usaha ini semenjak kemerdekaan telah mengalami beberapa perubahan.

Dahulu pembinaan terhadap koperasi dipisahkan dengan pembinaan terhadap usaha kecil dan menengah. Yang satu dibina oleh Departemen Koperasi sedangkan yang lain dibina oleh Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan.³⁸ Setelah melalui perubahan beberapa kali maka semenjak beberapa tahun terakhir pembinaan terhadap usaha kecil, menengah dan koperasi dilakukan satu atap di bawah Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah. Dari sini kita bisa melihat adanya upaya-upaya yang serius dari pemerintah untuk memperhatikan UMKM

Namun mengapa UMKM perlu mendapatkan perhatian yang dan mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah?. Setidaknya ada dua hal yang menjadi pokok persoalan, yaitu: (1) besarnya jumlah pengusaha UMKM di Indonesia dan (2) Adanya berbagai kelemahan atau kekurangan UMKM ketika masuk dalam sistem persaingan pasar bebas. Kedua hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

a. *Besarnya Jumlah Pengusaha UMKM di Indonesia*

Perkembangan jumlah UMKM periode 2005-2007 mengalami peningkatan sebesar 6% yaitu dari 47.022.084 unit pada tahun 2005 menjadi

49.845.016 unit pada tahun 2007. Sektor ekonomi UMKM yang memiliki proporsi unit usaha terbesar adalah sektor (1) *Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan*; (2) *Perdagangan, Hotel dan Restoran*; (3) *Industri Pengolahan*; (4) *Pengangkutan dan Komunikasi*; serta (5) *Jasa-jasa* dengan perkembangan masing-masing sektor tercatat sebesar 52,48%, 28,12%, 6,49%, 5,54% dan 4,60%. Sedangkan sektor ekonomi yang memiliki proporsi unit usaha terkecil secara berturut-turut adalah sektor (1) *Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan*; (2) *Pertambangan dan Penggalian*; (3) *Bangunan*; serta (4) *Listrik, Gas dan Air Bersih* dengan perkembangan masing-masing tercatat sebesar 1,87%, 0,53%, 0,35% dan 0,02%.

Hasil pengukuran dan analisa ekonomi tahun 2007 menunjukkan bahwa secara sektoral populasi UMKM banyak bergerak pada unit usaha yang berbasis sumber daya alam. Seperti di sektor *Pertanian*, pada tahun 2007 jumlah UMKM yang bergerak di sektor ini mencapai 26,16 juta unit (52,5% dari total populasi UMKM). Jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2005 dengan jumlah 26,26 juta unit (55,9% dari total populasi UMKM). Namun demikian, tercatat bahwa sebanyak 637 unit usaha mikro dan kecil mengalami kenaikan omset sehingga berpindah kategorinya menjadi usaha menengah.

Dalam kurun waktu 2005-2007, kontribusi UMKM terhadap penciptaan PDB, nilai ekspor, penyerapan tenaga kerja dan investasi menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangannya dapat dilihat pada tabel di samping:

Dari jumlah UMKM pada tahun 2007 yang hampir mencapai 50 Juta unit dan menyerap tenaga kerja hamper 95 juta orang, adalah suatu angka statistik yang signifikan. Jika dibandingkan dengan Usaha Besar yang hanya berjumlah dibawah 5000 unit dan hanya menyerap 2,5 juta tenaga kerja, maka perlu kiranya UMKM mendapat perhatian secara khusus. Dalam hal ini berarti tidak boleh dipandang sebelah mata.

Meski UMKM menjadi harapan hidup masyarakat banyak yang terus tumbuh, namun dalam perkembangannya mempunyai banyak masalah, yaitu

40:
1) Rendahnya jangkauan pasar untuk menjual produk yang dihasilkannya,

Perkembangan Data UMKM³⁹

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN			PERKEM- BANGAN (%)	PANGSA (%)		
			2005	2006 *)	2007 **)		2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Unit Usaha	(Unit)	47.022.084	48.783.549	49.845.016	6,00			
	- Usaha Kecil (UK)	(Unit)	46.911.575	48.664.464	49.720.236	5,99	99,76	99,76	99,75
	- Usaha Menengah(UM)	(Unit)	105.487	114.687	120.253	14,00	0,22	0,24	0,24
	- Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)	(Unit)	47.017.062	48.779.151	49.840.489	6,01	99,99	99,99	99,99
	- Usaha Besar (UB)	(Unit)	5.022	4.398	4.527	(9,86)	0,01	0,01	0,01
2	Tenaga Kerja	(Orang)	6.305.825	91.993.357	94.273.025	9,23			
	- Usaha Kecil (UK)	(Orang)	79.171.294	85.053.069	87.032.313	9,93	91,73	92,46	92,32
	- Usaha Menengah(UM)	(Orang)	4.415.322	4.494.693	4.720.005	6,90	5,12	4,89	5,01
	- Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)	(Orang)	83.586.616	89.547.762	91.752.318	9,77	96,85	97,34	97,33
	- Usaha Besar (UB)	(Orang)	2.719.209	2.445.595	2.520.707	(7,30)	3,15	2,66	2,67
3	PDB ***)	(Rp. Milyar)	2.774.281,2	3.339.479,6	3.957.403,9	42,65			
	- Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	1.049.055,7	1.253.355,6	1.496.254,2	42,63	37,81	37,53	37,81
	- Usaha Menengah(UM)	(Rp. Milyar)	445.576,2	532.862,7	625.055,4	40,28	16,06	15,96	15,79
	- Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)	(Rp. Milyar)	1.494.631,9	1.786.218,3	2.121.309,6	41,93	53,87	53,49	53,60
	- Usaha Besar (UB)	(Rp. Milyar)	1.279.649,4	1.553.261,3	1.836.094,3	43,48	46,13	46,51	46,40
4	Ekspor Non Migas	(Rp. Juta)	544.201.760	607.086.239	713.415.941	31,09			
	- Usaha Kecil (UK)	(Rp. Juta)	28.048.167	30.364.628	35.507.582	26,60	5,15	5,00	4,98
	- Usaha Menengah(UM)	(Rp. Juta)	82.289.898	91.946.232	107.314.265	30,41	15,12	15,15	15,04
	- Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)	(Rp. Juta)	110.338.065	122.310.859	142.821.847	29,44	20,28	20,15	20,02
	- Usaha Besar (UB)	(Rp. Juta)	433.863.695	484.775.379	570.594.095	31,51	79,72	79,85	79,98
5	Investasi ***)	(Rp. Juta)	655.854.258	805.470.310	983.822.763	50,01			
	- Usaha Kecil (UK)	(Rp. Juta)	134.233.362	164.778.036	204.808.961	52,58	20,47	20,46	20,82
	- Usaha Menengah(UM)	(Rp. Juta)	167.170.345	205.848.507	257.202.692	53,86	25,49	25,56	26,14
	- Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)	(Rp. Juta)	301.403.707	370.626.544	462.011.653	53,29	45,96	46,01	46,96
	- Usaha Besar (UB)	(Rp. Juta)	354.450.551	434.843.766	521.811.109	47,22	54,04	53,99	53,04

Keterangan :

*) Angka sementara

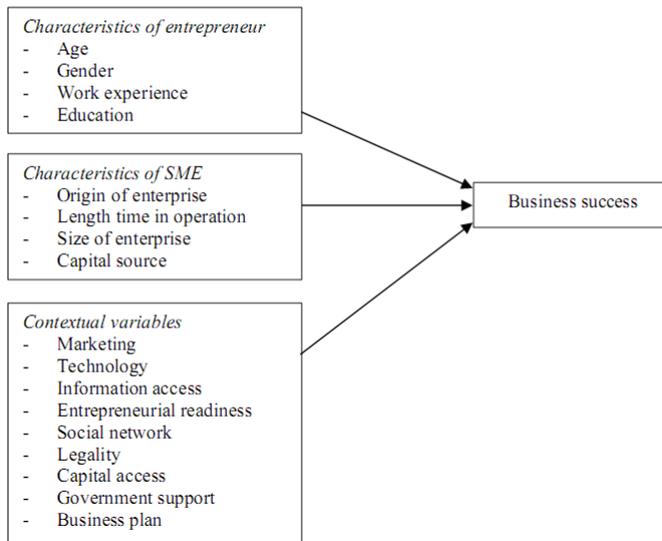
**) Angka sangat sementara

***) Atas dasar harga berlaku

- 2) kurangnya pelayanan dalam bentuk regulasi dan dukungan negara serta aparaturnya,
- 3) keterbatasan kapasitas sumberdaya manusia untuk mengelolanya,
- 4) kurang memadainya kecukupan barang input dan teknologi

5) dan persoalan keterbatasan modal usaha yang tersedia.

Sementara menurut Nurul Indarti dan Marja Langenberg dalam risetnya yang berjudul *Factors Affecting Business Success Among SMEs: Empirical Evidences From Indonesia*, menunjukkan adanya berbagai variable yang diperlukan mendukung suksesnya bisnis UMKM di Indonesia yaitu⁴¹:



Melihat banyaknya variable yang harus dihadapi oleh UMKM untuk sukses, perlukiranya pemerintah harus memberikan perlindungan dan perhatian dengan membuat regulasi yang fasilitatif bagi UMKM.

Neil Gunningham mencatat Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam membuat regulasi untuk memfasilitasi UMKM⁴² yaitu:

Pertama, terkait dengan kebijakan pembiayaan, pemerintah harus memberikan fasilitas pembiayaan yang pembayarannya menggunakan prinsip *win win solution*, antara lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan non bank dengan melihat kemampuan pembayaran UMKM.

Kedua, pemerintah harus mensupport UMKM dalam berkomitment untuk bekerja keras dan menjadi sukses dengan mengadakan kemandirian. Kemandirian yang dimaksud adalah bentuk kedisiplinan dalam *self-inspections* dan *self-audits*.

Ketiga, UMKM harus didorong untuk bersikap professional layanya perusahaan besar dengan cara mengintegrasikan antara tujuan utama perusahaan dengan pambanunan dan pembaharuan budaya kerja UMKM.

Keempat, pemerintah harus memberikan kesempatan dengan memberikan berbagai insentif untuk merangsang kemajuan UMKM.

Kelima, Pemerintah harus melakukan pemeriksaan serta pemantauan agar tidak terjadi penyimpangan dalam bisnis UMKM. Pemantauan tersebut harus bersifat persuasive dan pembinaan.

Keenam, pemerintah harus menyadari bahwa tidak ada kebijakan tunggal yang sempurna. Oleh karena itu perlu meramu berbagai kebijakan secara efektif (*effective policy mix*), yang disesuaikan dengan arah pembangunan dan kondisi situasi bisnis UMKM.

Selanjutnya terdapat tiga alasan yang mendasari negara berkembang termasuk Indonesia belakangan ini memandang penting keberadaan UMKM⁴³.

- 1) Karena kinerja UMKM cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif.
- 2) Sebagai bagian dari dinamikanya, UMKM sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi.
- 3) Karena sering diyakini bahwa UMKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas ketimbang usaha besar. Bahwa usaha kecil dan usaha rumah tangga di Indonesia telah memainkan peran penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha dan mendukung pendapatan rumah tangga.⁴⁴

Untuk membangun UMKM, selain permodalan, juga memerlukan perlindungan. Di beberapa negara, seperti Jepang dan Amerika Serikat yang memberikan perlindungan terhadap ekonomi rakyat, apalagi di Australia beroperasi supermarket di sana dibatasi sampai pukul 16.00. Selain itu ada hari-hari tertentu, Sabtu dan Minggu ada semacam *Sunday* atau *Saturday Market* untuk pengusaha kecil menengah dengan menutup jalan-jalan tertentu⁴⁵.

UMKM yang kecil harus diberi perlindungan dan jangan menganggap perlindungan itu sebagai pemborosan, karena perlindungan merupakan

investasi sumber daya manusia di masa depan⁴⁶.

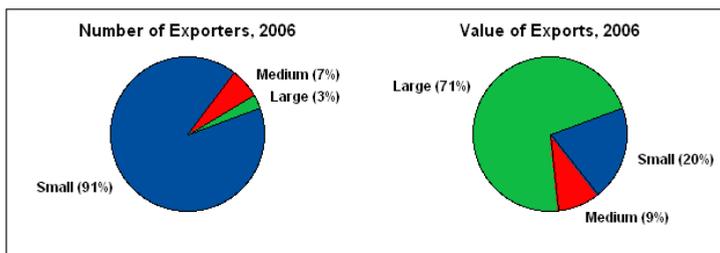
Menurut Marissa Haque, pemerintah seharusnya bertindak tegas dalam perlindungan terhadap UMKM agar tidak dikuasai pelaku bisnis padat modal. Menurut Marissa, selama ini pemerintah belum memberikan perlindungan terhadap usaha masyarakat, justru berorientasi pada pasar dan pemodal besar. Dengan adanya perindungannya maka ketika UMKM mulai berkembang akan dilirik pelaku bisnis padat modal.⁴⁷

b. Berbagai Tekanan Dalam Sistem Persaingan Pasar Bebas bagi UMKM

Dalam perdagangan internasional WTO menegaskan bahwa UMKM adalah pelaku bisnis yang perlu diberi akses lebih besar. Karena akan memberikan sumbangan bagi perekonomian bagi negara maju maupun berkembang. Seperti dikatakan Melissa A. Boge⁴⁸:

Small and Medium Enterprises (S.M.E's) are an indispensable component of any economy, be it developed or developing. SME's are the lifeblood of an economy and they are playing an increasing role on a global basis, managers that are taking off the blinkers and seeking innovative ways to establish cross cultural relationships are becoming the leaders and positioning themselves for future opportunities in the growth markets of the world.....

Secara umum dapat kita lihat prosentase nilai ekspor UMKM dalam pasar global yang cukup menjanjikan melalui grafik berikut ini:



Untuk itu perlu diberi ruang yang lebih luas bagi UMKM. tidak saja pada pasar domestic tetapi juga pasar Internasional. Oleh karena itu perlu dihilangkan berbagai hambatan perdagangan. *Given their size and diversity of sectors in which they function, SMEs are highly adaptable between the developed*

*and developing economies, provided that trade barriers are negated.*⁴⁹

Dalam hal ini direkomendasikan bagi setiap pemerintah untuk mendukung program tersebut. *Recognizing the pivotal role of S.M.E's, governments in all economies also have been vigorously seeking ways and means to promote and develop them.*⁵⁰

Dari sudut pandang ini, tentunya menjadi suatu yang sangat baik dan perlu didukung. Internasionalisasi UMKM adalah eluang yang menjanjikan untuk peningkatan ekonomi nasional maupun global.

Tetapi jika kita belajar dari pengalaman bahwa system pasar bebas yang menghilangkan berbagai hambatan seringkali justru jadi boomerang bagi Negara berkemabang ketika berhadapan dengan Negara maju.

Sebab dengan ikutnya Indonesia dalam berbagai organisasi ekonomi Internasional, khususnya World Trade Organization (WTO), mau tidak mau persaingan bebas harus dilaksanakan.

Bagi Negara maju seperti Amerika, dalam decade terakhir menunjukkan bahwa Reguasi WTO tentang UMKM justru mengangkat perumbuhan UMKM di sana⁵¹. Mungkin karena struktur dan infrastruktur dalam mekanisme pasar bebas sudah mereka kuasai.

Di negara maju seperti Amerika dan Eropa UMKM mendapatkan perhatian khusus dalam hal perlindungan eksportnya Pemerintah Amerika dengan gigih melakukan upaya peningkatan eksport produk UMKM dengan cara menggalakkan promosi, menyediakan informasi, pemberian bantuan pendanaan⁵².

Semenara Uni Eropa mempunyai kebijakan eksport UMKM yang sedikit berbeda yaitu⁵³:

- 1) Membuat system administrasi aturan bisnis yang sederhana;
- 2) Memperbaiki system keuangan yang mendukung lingkungan bisnis UMKM
- 3) Membantu strategi UMKM untuk Eropanisasi dan internasionalisasi dengan memberikan layanan informasi yang ebih baik;
- 4) Meningkatkan daya saing UMKM dan memperbaiki berbagai akses yang diperlukan, serta membantu dalam riset, pengembangan serta pelatian;
- 5) Membimbing *entrepreneurship* dan mendukung secara khusus terhadap

target-target dari kelompok bisnis

Begitu pula dengan lembaga OECD, dalam 2nd OECD Conference Of Ministers Responsible For Small And Medium-Sized Enterprises (SMEs): Promoting Entrepreneurship And Innovative Smes In A Global Economy: Towards A More Responsible And Inclusive Globalisation di Istanbul, Turkey 3-5 Juni 2004, menegaskan bagi setiap anggotana untuk mendukung proses internasionalisasi UMKM karena peluang mereka melihat adanya peluang yang cukup baik.

Membuka pasar Internasional untuk produk UMKM setidaknya ada dua alasan yaitu⁵⁴:

- 1) *On the one hand they open up opportunities. For example, SMEs which can grow quickly, which are niche exporters, or which are able to tie in with global supply chains are all able to take advantage of opportunities created by globalisation.*
- 2) *On the other hand, globalisation poses an increased threat for SMEs which are unable or unwilling to compete. Given that labour is still less "globalised" than other factors, this poses political and social challenges for governments*

Tetapi tidak selalu demikian dengan negara berkembang seperti Indonesia. System pasar bebas justru menjadi ancaman dari keberlanjutan UMKM. Pemerintah kurang memberikan proteksi terhadap masuknya produk-produk dari program internasionalisasi UMKM Negara-negara maju. Padahal dari sisi kualitas tidak jauh berbeda. Persoalan yang menjadi problema adalah:

- 1) Birokrasi dan administrasi ekspor yang masih rumit
- 2) Sulitnya mendapatkan bantuan pendanaan untuk ekspor
- 3) Kurangnya layanan informasi mengenai kebutuhan produk dari pasar internasional dan
- 4) Tidak adanya perlindungan bagi UMKM yang mengalami sengketa dengan mitra bisnis asing.

4. Regulasi UMKM Dipersimpangan Jalan

Dalam berbagai kebijakan yang berbentuk peraturan perundang-undangan maupun program-program kerja, Pemerintah saat ini telah cukup banyak memfasilitasi untuk memajukan UMKM di Indonesia.

Beberapa yang bisa kita lihat misalnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah dalam BAB V Pasal 7 sampai pasal 15 mengenai Penumbuhan Iklim Usaha disebutkan bahwa pemerintah akan memberikan dukungan dalam persoalan a. pendanaan; b. sarana dan prasarana; c. informasi usaha; d. kemitraan; e. perizinan usaha; f. kesempatan berusaha; g. promosi dagang; dan h. dukungan kelembagaan.

Dalam pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah juga secara tegas menyebutkan

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.
- 2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ada juga peraturan pemerintah lainnya khusus mengenai UMKM juga dikeluarkan oleh Presiden dan Menteri Negara Koperasi dan UMKM. Beberapa diantaranya:

- 1). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 Tentang pemberdayaan Usaha Menengah
- 2). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2002 Tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil, Dan Menengah
- 3). Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 23/PER/M.KUKM/X/2005 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 32/KEP/M.KUKM/ IV/2003 Tentang Pedoman Penumbuhan Dan Pengembangan Sentra Usaha Kecil Dan Menengah;
- 4). Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 13 /PER/M.KUKM/VII/2006 Tentang

- Pedoman Teknis Program Sekuritisasi Aset Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah (KUKM)
- 5). Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 13.1/PER/M.KUKM/VII/2006 Tentang Petunjuk Teknis Skim Pendanaan Komoditas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
 - 6). Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/PER/M.KUKM/VII/2006 Tentang Petunjuk Teknis Dana Penjaminan Kredit Dan Pembiayaan Untuk Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
 - 7). Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: /PER/M.KUKM/VIII/2006 Tentang Pedoman Teknis Bantuan Untuk Teknologi Tepat Guna Kepada Usaha Kecil Dan Menengah Di Sentra
 - 8). Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/PER/M.KUKMI/I/2007 Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah
 - 9). Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 08/PER/M.KUKM/II/2007 Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional

Serta masih banyak lagi peraturan khusus mengenai UMKM, yang kesemuanya adalah upaya-upaya pemerintah dalam mendukung keajuan UMKM di Inonesia.

Sealin itu ada beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak secara khusus mengatur mengenai UMKM tetapi mendukung upaya pemerinah tersebut. Misalnya dalam pasal 18 Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menegaskan akan memberikan fasilitas tertentu bagi penanam modal yang bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi;

Begitu pula Dalam Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan

“BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN”

Namun demikian banyak juga kendala-kendala yang timbul akibat dari peraturan perundang-undangan yang justru pada implementasinya tidak mendukung pemberdayaan UMKM. Seperti halnya ketika Indonesia meratifikasi *General Agreement On Tariff and Trade* (GATT) atau pernyataan keikutsertaan dalam *World Trade Organization*.

Ratifikasi tersebut disahkan melalui Undang undang No 7 Tahun 1994. Dengan meratifikasi undang-undang tersebut maka pemerintah tidak lagi akan memberikan proteksi bagi semua perusahaan dalam negeri untuk bersaing dengan perusahaan asing.

Misalnya beberapa prinsip ekonomi internasional dalam WTO maupun yang mendukung terciptanya persaingan bebas adalah⁵⁵:

1). *National Treatment*

Prinsip ini mensyaratkan suatu negara untuk memberlakukan hukum yang sama bagi barang, jasa dan investor asing dengan barang, jasa dan investor dalam negeri sesama anggota WTO.

2). *Most Favoured Nation (MFN)*

Pada pokoknya prinsip MFN adalah bentuk pengejawantahan prinsip non diskriminasi diantara negara negara anggota WTO. setiap negara tidak boleh membeda bedakan perlakuan diantara negara-negara dalam transaksi perdagangan maupun investasi.

Dari kedua prinsip diatas, pada prakteknya akan membahayakan bagi pelaku UMKM, khususnya klusula *National Treatment*. Sebab produk barang jasa, dan perusahaan UMKM harus diperlakukan sama dengan produk barang jasa, dan perusahaan asing. Tanpa adanya perlindungan dari pihak pemerintah dapat dipastikan bahwa UMKM akan dilibas oleh pesaing asing yang mempunyai modal, management, teknologi serta sumber daya manusia yang lebih handal dan kuat.

Selain itu ratifikasi tersebut juga memuat mengenai klausula *Trade Relation on Intellectual Property Right* (TRIPs).

Sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO (*World Trade Organization*) mengharuskan Indonesia menyesuaikan segala

peraturan perundangannya di bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan standar TRIP's (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) atau hak kekayaan Intelektual seperti hak cipta, dan hak kekayaan industrial (Paten, Merk, desain Industri dan sebagainya)⁵⁶.

Ketentuan tersebut segera di wujudkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai HAKI yang dimulai sejak tahun 1997 dan diperbaharui kemudian pada tahun 2000 dan tahun 2001.

Hal ini juga akibat dari telah diratifikasinya konvensi-konvensi internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan juga telah menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diharuskan yaitu Undang-undang tentang Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Paten dan Merek.

Kaitan antara UKM dan hak kekayaan intelektual telah pula dibahas dalam beberapa forum internasional misalnya: The WIPO ASEAN Sub Regional Policy Forum tanggal 25-27 Juli 2000 di Bali dan paling akhir adalah hasil bahasan dari WIPO General Assemblies tanggal 24 September di Jenewa. Sementara itu dari WIPO Forum Intellectual Property and Small and Medium-Sized Enterprises tanggal 9-10 Februari 2001 yang dilaksanakan di Milan dikeluarkan pula rekomendasi yang mendukung program kaitan antara SME dan hak kekayaan intelektual.⁵⁷ Regulasi ini sering menjadi kendala, sehingga banyak produk ekspor UMKM kita ditolak karena dianggap tidak mematuhi ketentuan tersebut.

Sementara bagi UMKM, menaati hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual bukan persoalan mudah. Contoh misal; untuk mendapatkan merek dagang perusahaan UMKM harus mendatarkan agar mendapat sertifikat merek. Pada prakteknya pengurusan merek tersebut memakan waktu 18 bulan, dan 36 bahkan 60 bulan bagi pendaftaran Paten. Lebih dari itu biaya yang dikelurakan untuk mendapatkan hak tersebut relatif mahal bagi pengusaha UMKM termasuk pembayaran tahunannya.

Begitu pula dengan konvensi Internasional mengenai lingkungan hidup yang diterapkan di negara maju yang mengakibatkan banyaknya produk-produk furniture yang ditolak karena tidak mempunyai sertifikasi *eco labelling*⁵⁸.

Belum lagi mengenai persoalan hukum tentang perijinan usaha, perpa-

jakan, retribusi, wajib daftar pendafaran yang dinilai banyak pihak justru menjadi hambatan pengembangan UMKM di Indonesia.

Inti dari pembahasan diatas menandakan bahwa ada regulasi yang saling berbenturan atau konflik normatif, yaitu antara sesama aturan domestik serta antara aturan domestik dengan aturan asing.

Oleh karena itu perlu dikaji ulang berbagai kebijakan secara komprehensif dan tidak parsial, agar didapat formula kebijakan yang senafas dan searah untuk memajukan UMKM di Indonesia.

CATATAN AKHIR

- ¹ Cindy Adam, Bung Karno: penyambung lidah rakyat.....
- ² Ibid ... Lihat juga Dibawah bendera revolusi
- ³ Pataniari S., *Kumpulan Tulisan Terpilih Bung Karno Api Perjuangan Rakyat*, (Penerbit: Lembaga Kajian Ekonomi Politik, Kekal Indonesia) hal. 116
- ⁴ Op.Cit. hal 119
- ⁵ <http://marhaenisme.wordpress.com/2008/03/02/bung-karno-adalah-orang-besar-di-skala-internasional/>
- ⁶ Mubyarto, "ekonomi rakyat dan program IDT", (Yogyakarta, Penerbit Aditya Media, 1996), hal.13
- ⁷ M Hatta, Kolektivisme Tua dan Baru, *Daulat Rakyat*, No 25, 10 Oktober 1933
- ⁸ Bung Hatta, demokrasi kita; idealisme & realitas serta unsure yang memperkuatnya (Jakarta: Balaipustaka, 2004), hal.63
- ⁹ TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia), dari Buku Makam Bung Hatta 1982 dan berbagai sumber) Diposkan oleh komunitas dwikora nunukan di 11/24/2008 02:48:00 PM <http://komunitasdwikora.blogspot.com/2008/11/bung-hatta-bapak-koperasi-indonesia.html>
- ¹⁰ Prof. Dr. Mubyarto: Ekonomi Kerakyatan, Makalah disampaikan pada Pertemuan I Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat, YAE Bina Swadaya di Finacial Club Jakarta 22 Januari 2002
- ¹¹ Sritua Arif, *Ekonomi Kerakyatan Indonesia; Mengenang Bung Hatta Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia*, (Jawa Tengah, Penerbit Muhammadiyah University Press) hal. 153.
- ¹²
- ¹³
- ¹⁴ Alfred Marshall, *Principles of Ecoomics*, Macmillan, 1948,op.cit. hal 14
- ¹⁵
- ¹⁶
- ¹⁷ Paramita Prananingtyas, "Kajian Peraturan Perundang-undangan tentang Pengembangan Usaha Kecil Menengah" Makalah Seminar Tentang Korprasi dan UMKM pada tanggal 26 Juli 2001 di Jakarta, Indonesia, yang disponsori oleh Proyek Partnership for Economic Growth (PEG)
- ¹⁸ Gunawan Sumodiningrat, Pemberdayaan masyarakat dan jaring pengaman sosial,

- penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- ¹⁹ Paramita Prananingtyas, “Kajian Peraturan Perundang-undangan tentang Pengembangan Usaha Kecil Menengah” Makalah Seminar Tentang Korprasi dan UMKM pada tanggal 26 Juli 2001 di Jakarta, Indonesia, yang disponsori oleh Proyek Partnership for Economic Growth (PEG).
- ²⁰ Ekonomi Kerakyatan (Sebuah Gerakan Perlawanan Rakyat) <http://www.banten.go.id/forum/index.php?topic=184.0>
- ²¹ Joseph E Stiglitz, *Making Globalization Work*.
- ²³ <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0108/13/nasional/wapr06.htm> “Wapres: Hatta Layak Disebut Bapak Koperasi” Senin, 24 November 2008
- ²⁶ Menurut Sajogyo dan Widjojo Nitisastro dalam sebuah artikel ilmiah populer pada tahun 1978 di harian Kompas berjudul *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan*, Sajogyo, yang sosiolog, “mengambil oper” peranan pakar ekonomi
- ²⁷ <http://infoUMKM.wordpress.com>, UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, /2008/08/
- ²⁸ <http://sbinfocanada.about.com/od/businessinfo/g/SME.htm>, More Business Terms Glossary.
- ²⁹ <http://www.lib.strath.ac.uk/busweb/guides/smedefine.htm#3>, SME stands for Small to Medium Enterprise
- ³⁰ Pratiwi Mileniawati, www.sbinfocanada.about.com, “Apa Itu SME (Small to Medium Enterprise)”, 09 Januari 2006.
- ³¹ Abdul Kadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan di Indonesia* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991), hal 54- 97... lihat juga Ridwan Khairandi, *Pengantar Hukum Dagang*, (FH UII Press, 2006) hal 23- 79.
- ³² Emi Pangaribuan, *Perusahaan Kelompok*.
- ³³ Lebih lengkapnya Lihat Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam BAB III mengenai Modal dan Saham
- ³⁴ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dalam BAB VII tentang MODAL dalam pasal Pasal 41 (1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
(2) Modal sendiri dapat berasal dari:
a. simpanan pokok;
b. simpanan wajib;
c. dana cadangan;
d. hibah.
(3) Modal pinjaman dapat berasal dari:
a. anggota;
b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
e. sumber lain yang sah.
- ³⁵ Hal ini tidak dipersyaratkan oleh Kitab Undang Undang Hukum Dagang, hanya menjadi kebiasaan di dalam prakteknya
- ³⁸ <http://www.mail-archive.com/singawang@yahogroups.com/msg04867.html>
- ³⁹ SUMBER Data DEP KOP
- ⁴⁰ <http://www.sony-k.com/ads/adclick.php?bannerid=138&zoneid=0&source=toptextlink&dest=mailto%3Aadhyta%40judisia.co.id>
- ⁴¹ Nurul Indarti dan Marja Langenberg, “Factors Affecting Business Success Among SMES: Empirical Evidences From

- Indonesia”, *Small and Medium Enterprises Development Center (SMEDC)*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, Indonesia bekerjasama dengan *Langenberg Advies bv, Den Haag, The Netherlands*, CICAT, Delft University of Technology, The Netherlands
- ⁴² Neil Gunningham, “Regulating Small And Medium Sized Enterprises” *Journal of Environmental Law*, 2002
- ⁴³ Berry, A., E. Rodriquez, dan H. Sandeem, 2001, “Small and Medium Enterprises Dynamics in Indonesia.” *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 37 (3): 363-384.
- ⁴⁴ Kuncoro, M., , *Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*. (Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2002.) hal 78
- ⁴⁵ Erlangga Djumena, “Selain Butuh Modal, UMKM Perlu Dilindungi Laporan”, <http://www2.kompas.com/utama/news/0204/24/035328.htm>,
- ⁴⁶ Syafiuddin, <http://www2.kompas.com/utama/news/0204/24/035328.htm>
- ⁴⁷ Marissa Haque, “UMKM Harus Dilindungi” *Harian Rakyat* 14 Juni 2008. <http://jamil.niriah.com/2008/07/21/marissa-haque-UMKM-harus-dilindungi/>,
- ⁴⁸ Melissa A. Boge, “Increasing Small Business Exports: Learning To Do The Right Thing” *Journal of Small and Emerging Business Law*, Winter 1997
- ⁴⁹ *Ibid*
- ⁵⁰ *ibid*
- ⁵¹ Sunil Bhargava, *World Trade Organisation Regime: Impact On Small And Medium Enterprises (SMEs)*, Committee on Trade Laws and WTO, Institute of Chartered Accountants of India
- ⁵² Melissa A. Boge, “Increasing Small Business Exports: Learning To Do The Right Thing” *Journal of Small and Emerging Business Law*, Winter 1997
- ⁵³ *Ibid*
- ⁵⁴ OECD, 2nd Conference Of Ministers Responsible For Small And Medium-Sized Enterprises (SMEs), promoting entrepreneurship and innovative SMEs In A Global Economy: Towards A More Responsible And Inclusive Globalisation, Istanbul, Turkey, 3-5 June 2004
- ⁵⁵ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional; Suatu Pengantar*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005), hlm 29-31
- ⁵⁶ Insan Budi Maulana, Hak kekayaan Intelektual di Indonesia.....
- ⁵⁷ A. Zen Umar Purba, “Sistem Hak Kekayaan Intelektual Dan Kaitannya Dengan UKM” Disampaikan pada acara Peresmian SME Center dan Panel Diskusi, Jakarta, 7 November 2001.

Krisis Ekonomi Global dan Eksistensi UMKM

1. KRISIS EKONOMI GLOBAL: SIKLUS PENYAKIT DALAM KAPITALISME

Sejarah telah mengatakan sistem ekonomi pasar selalu mengalami pasang surut yang dapat digambarkan dalam sebuah kurva konjungtur ekonomi. Kurva tersebut terdiri dari beberapa bagian, antara lain: masa pertumbuhan, masa puncak kemakmuran (*peak of wealth*), masa kemunduran, masa keterpurukan (*peak of crises*). Setelah krisis dapat teratasi, maka akan disambung dengan masa pemulihan (*recovery*), pertumbuhan, dan seterusnya hingga membentuk seperti gelombang *sinus*.¹

Ditinjau dari periode waktunya, masing-masing babak memiliki durasi yang hampir konsisten, yaitu membentuk siklus waktu yang relatif tidak jauh berbeda antara gelombang satu dengan lainnya. Oleh karena itu, gabungan dari gelombang-gelombang siklus ekonomi tersebut dapat ditarik menjadi kesimpulan yang dikenal dengan konjungtur perekonomian.

Dalam konteks ekonomi dunia, krisis ekonomi telah terjadi berulang kali secara periodik. Berikut adalah daftar krisis ekonomi yang terjadi di dunia sepanjang sejarah².

1). Kepanikan 1797

Krisis ekonomi berlangsung selama 3 tahun dari 1797 hingga 1800. Akibat dari deflasi Bank of England yang menyebar hingga lautan Atlantik dan

Amerika Utara dan menyebabkan hancurnya perdagangan dan pemasaran real estate di Amerika Serikat dan sekitar Karibia. Ekonomi Inggris terpengaruh akibat adanya pembalikan deflasi selama perang dengan Perancis saat terjadinya revolusi Perancis.

2). Depresi 1807

Depresi terjadi selama tujuh tahun sejak 1807 hingga 1814. Undang-undang embargo Amerika Serikat 1807 pada saat itu diluluskan oleh kongres Amerika saat presiden Thomas Jefferson memimpin. Hal ini menghancurkan industri yang terkait dengan pengapalan. Kaum federal berusaha melawan embargo ini dan berusaha melakukan penyelundupan di New England.

3). Kepanikan 1819

Krisis terjadi selama 5 tahun dari 1819 hingga 1824. Ini adalah krisis finansial pertama yang mempengaruhi keuangan Amerika Serikat secara besar-besaran, bank-bank berjatuh, munculnya pengangguran, dan merosotnya pertanian dan industri manufaktur. Ini juga menandakan berakhirnya ekspansi ekonomi yang mengikuti Perang 1812.

4). Kepanikan 1837

Berlangsung antara 1837 hingga 1843. Ekonomi Amerika jatuh secara tajam disebabkan kegagalan bank dan kurangnya keyakinan pada uang kertas. Spekulasi pasar menyebabkan bank di Amerika berhenti bertransaksi dalam bentuk koin emas dan perak.

5). Kepanikan 1857

Terjadi selama tiga tahun hingga tahun 1860. Kejatuhan Perusahaan Asuransi Hidup dan Kepercayaan Ohio menimbulkan ledakan spekulasi di sektor transportasi Amerika Serikat. Lebih dari 5000 bisnis gagal kurang dari setahun sejak terjadinya kepanikan dan kaum pengangguran melakukan protes di kawasan urban.

6). Kepanikan 1873

Terjadi selama enam tahun disebabkan masalah ekonomi di Eropa mengakibatkan jatuhnya Jay Cooke & Company, bank terbesar di Amerika Serikat. Hal ini juga menimbulkan spekulasi terhadap perang saudara di Amerika. Undang-undang koin 1873 juga memberikan

kontribusi dalam jatuhnya harga perak yang menghancurkan industri pertambangan Amerika Utara.

7). Depresi Berkepanjangan

Sesuai namanya, depresi ini menelan waktu 23 tahun sejak 1873 hingga 1896. Runtuhnya Bursa Efek Vienna menyebabkan depresi ekonomi yang menyebar ke seluruh dunia. Ini sangat penting dicatat dimana pada periode ini, produksi industri global meningkat pesat. Di Amerika Serikat misalnya, pertumbuhan produksi mencapai empat kali lipat.

8). Kepanikan 1893

Terjadi selama tiga tahun hingga 1896. Terjadi akibat kegagalan Reading Railroad Amerika Serikat dan penarikan investor Eropa terhadap pasar saham serta jatuhnya bank-bank.

9). Resesi Perang Dunia I

Terjadi selama tiga tahun hingga 1921. Terjadinya hyper inflasi di Eropa menyebabkan kelebihan produksi besar-besaran di Amerika Utara.

10). Depresi Besar 1929

Depresi yang paling besar dan dikenang sepanjang sejarah. Terjadi selama 10 tahun sejak 1929 hingga 1939. Pasar saham di seluruh dunia saat itu berjatuh dan bank-bank di Amerika Serikat mengalami kebangkrutan. Jutaan pengangguran bermunculan dan kemiskinan merajalela.

11). Resesi 1953

Terjadi selama satu tahun. Setelah periode inflasi perang Korea berakhir, banyak uang yang ditransferkan untuk keamanan nasional Amerika Serikat. Berubahnya kebijakan The Fed yang lebih membatasi tahun 1952 menyebabkan terjadinya inflasi yang lebih lanjut.

12). Krisis Minyak 1973

Terjadi selama dua tahun hingga 1975. Naiknya harga minyak yang ditetapkan oleh OPEC dan tingginya biaya yang dikeluarkan Amerika Serikat pada Perang Vietnam menyebabkan terjadinya stagflasi di Amerika Serikat.

13). Resesi Awal 1980

Terjadi di awal tahun 1980 selama dua tahun, revolusi Iran membuat melonjaknya harga minyak dan munculnya krisis energi 1979. Pergantian

rezim di Iran menyebabkan menurunnya pasokan minyak sehingga harga minyak melambung. Ketatnya kebijakan moneter di Amerika Serikat untuk mengontrol inflasi menyebabkan terjadi resesi lainnya.

14). Resensi Awal 1990

Terjadi selama satu tahun dimana perdagangan produk industri dan manufaktur menurun.

15). Resesi Awal 2000

Terjadi selama dua tahun dari 2001 hingga 2003. Keruntuhan bisnis dot-com, serangan 11 September, dan skandal pembukuan menyebabkan krisis di sekitar Amerika Utara.

16). Depresi Ekonomi 2008

Depresi yang saat ini tengah melanda dunia. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya naiknya harga minyak yang menyebabkan naiknya harga makanan di seluruh dunia, krisis kredit dan bangkrutnya berbagai investor bank, meningkatnya pengangguran sehingga menyebabkan inflasi global. Bursa saham di beberapa negara terpaksa ditutup beberapa hari termasuk di Indonesia, harga-harga saham juga turut anjlok. Seperti yang diprediksi banyak pihak, bahwa tsunami krisis global akan berkepanjangan.

Virus krisis yang awalnya terjadi di Amerika dianggap tidak akan menular ke Eropa, ternyata telah merebak hingga ke Asia, Amerika latin dan mulai menjalar ke seantero jagad. Berbagai resep dalam bentuk suntikan dana terbukti tidak ampuh lagi untuk menyembuhkannya. Korporasi besar dunia, satu per satu mulai kolap dan bangkrut. Mendadak jutaan orang menjadi kehilangan pekerjaan (*jobless*). Menurut Diane Swonk, Chief Economist Finacial Mesirow, ini adalah gelombang PHK masal yang tercepat yang pernah terjadi sejak beberapa dekade yang lalu. Wakil DPR Amerika Dana Perino juga berteriak agar pemerintah AS segera mengintervensi pasar melalui kebijakan emergency. Tapi sepertinya kanker tersebut telah menjalar ke seluruh lini bisnis. “*Benang terlajur kusut*”.³

Dari uraian diatas, kita bisa sepakat dengan pendapat Karl Mark, yang dibahasakan oleh Frans Magnis Suseno, bahwa ada “kanker dalam jantung kapitalisme, yang setiap saat akan menghasilkan kehancurannya sendiri”⁴.

Namun siklus krisis ekonomi dunia yang paling parah adalah terjadi ada tahun 1929an yang dikenal dengan istilah *Great Depression* (zaman malaise). Khususnya di Amerika Serikat pada tahun 1930. Kekacauan ekonomi yang disebabkan perang dunia telah menimbulkan dampak jutaan orang menganggur. Antrian panjang orang mendapatkan roti adalah pemandangan sehari hari, dan syair...”*Bung.. bisa bagi recehan...?*” adalah bait lagu yang paling populer dinyanyikan sebagai gambaran susahny kehidupan⁵.

Tetapi, selain disebabkan karena perang dunia, banyak ekonom yang berpendapat bahwa *malaise* ekonomi ini disebabkan oleh sistem ekonomi kapitalisme *laissez faire* (perekonomian tanpa campur tangan pemerintah).

Dalam sistem ekonomi yang bebas dari intervensi pemerintah tersebut, korporasi cenderung tidak memperhatikan nasib pekerja dan tidak peduli pada kepentingan masyarakat. Korporasi hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri. Pada waktu itu dikenal istilah “*The Business of business is Business*”.⁶

Ekonomi kapitalisme didefinisikan sebagai: *An economic system that depends on the private ownership of the mean of production and on competitive forces to determine what is produce*⁷. Cara bekerja sistem ini secara sederhana dapat dijelaskan sebagai:

individu maupun kelompok (korporasi) yang dapat bertindak sebagai suatu badan tertentu, yang dapat memiliki maupun melakukan perdagangan benda milik pribadi, terutama barang modal seperti tanah dan tenaga manusia, pada sebuah pasar bebas di mana harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran demi menghasilkan keuntungan. Status hukumnya dilindungi oleh negara melalui hak pemilikan serta tunduk kepada hukum negara atau kepada pihak yang sudah terikat kontrak⁸

Sistem ini mulai terinstitusi di Eropa pada masa abad ke-16 hingga abad ke-19. Tetapi, sejak runtuhnya tembok Berlin, sebagai tanda berakhirnya kompetisi politik antara kapitalisme dan komunisme yang berlangsung lebih dari satu abad, kapitalisme akhirnya berdiri sendiri sebagai satu satunya jalan keluar rasional untuk mengorganisasikan ekonomi modern⁹.

Inggris sampai tahun 1875, merupakan negara kapitalis terbesar dan termaju. Tetapi pada perempat akhir abad ke-19 muncul Amerika Serikat

dan Jerman. Menyusul Jepang setelah perang dunia ke-2.

Pada tahun 1932 di Inggris, negara mulai langsung melakukan campur tangan secara basar-besaran. Di Amerika, campur tangan negara mulai ditingkatkan sejak tahun 1933. Di Jerman, campur tangan negara dimulai sejak Hitler. Tujuannya tidak lain hanyalah memelihara kesinambungan kapitalisme.

Kapitalisme mulai berorientasi kepada perbaikan sektoral disebabkan munculnya kaum buruh sebagai kekuatan produktif di negara-negara demokrasi, tekanan dari komite hak-hak azasi manusia dan untuk membendung ekspansi komunisme yang berpura-pura menolong kaum buruh dan mengklaim sebagai pembelanya.

Tujuan mencari keuntungan dalam sistem kapitalisme menurut Kent Greenfield dan Peter C. Kostant sudah menjadi pandangan para ekonom klasik. Dijelaskannya bahwa: *Much of economic theory is driven by the belief that individuals make rational decisions based on maximizing their individual utility. Nothing in conventional economics strictly requires defining self-interest so narrowly that "other-regarding preferences" must be ignored*¹⁰

Menurut Teori Keuntungan (*Profit Theory*) para ekonom klasik, setidaknya ada tiga elemen yang harus diperhatikan para pengusaha kapitalis tentang perlunya mencari keuntungan yaitu: (1) *a payment for the use of capital*, (2) *a payment to the entrepreneur for management service rendered*, and (3) *a payment that compensated for the risks of business activity*¹¹.

Pencarian keuntungan oleh korporasi selain merupakan dasar bisnis kapitalisme juga merupakan konsekuensi logis dari bisnis yang selalu berhadapan dengan kondisi ketidakpastian (*uncertainty business environment*) dan ancaman keniscayaan kerugian. *There problem of profit in distributive theory: The primary attribute of competition, universally recognized and evident at a glance, is the "tendency" to eliminate profit or loss*¹²

Perusahaan sebagai organisasi bisnis, dalam sistem ini diciptakan oleh para pemodal dengan maksud memaksimalkan keuntungan. Konsep ini merupakan salah satu penjelasan bahwa keuntungan sebagai hak normarif yang muncul karena adanya kewajiban menanggung (kemungkinan) kerugian (*risk*) dari ketidakpastian (*Uncertainty*) bisnis itu sendiri. *Profit is the reward for*

risk taking..... profit is due to the assumption of risk ¹³. Ditambahkan oleh Frank Knight mengenai perlunya keuntungan yang dihubungkan dengan sistem pasar sebagai berikut: “*Profits exist because there are uncertainties in the market that are not insurable. These arise from dynamic changes in the market. However, if we drop the assumption of perfect competition, profits may arise for a number the most important of reasons,*”¹⁴

Sebagian ahli ekonomi mengatakan bahwa resiko sama dengan ketidakpastian itu sendiri. Sementara Bramantyo memberikan penjelasan hubungan antara resiko dan ketidakpastian dalam bisnis yaitu sebagai berikut:

- 1) Ketidakpastian adalah resiko yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected*), sedangkan istilah resiko sendiri mengacu pada ancaman yang dapat diperkirakan (*expected*)
- 2) Ketidakpastian diartikan dengan keadaan dimana ada beberapa kemungkinan, dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda. Sedangkan resiko muncul karena ketidakpastian informasi yang didapat¹⁵.

Tetapi, inti dari kesemua uraian tersebut menjelaskan bahwa bisnis selalu berhadapan dengan peluang baik untuk mendapatkan keuntungan dan kemungkinan kerugian karena resiko atas ketidakpastian yang muncul. Untuk itu, keuntungan merupakan hasil dari kemampuan mengatasi resiko bisnis.

Frank H Knight menguraikan secara lebih rinci pengertian dan kegunaan *business profit* sebagai berikut:¹⁶

- (1) *payment for certain risks, especially changes in values and the chance of failure of the whole enterprise, which cannot be insured against, and*
- (2) *the extra productivity of the manager's labor due to the fact that he is working for himself, his "sleepless nights" when he is planning for the business.*

Selain itu H v Mongoldt mencelaskan profit sebagai berikut ¹⁷:

- (1) *a premium on those risks which are of such a nature that he cannot shift them by insurance;*
- (2) *entrepreneur interest and wages, including only payments for special forms of capital or productive effort which do not admit of exploitation by any other than their owner;*

- (3) *entrepreneur rents*. These last again fall into four subdivisions:
- a. *capital rents*,
 - b. *wage rents*,
 - c. *large enterprise rent*, and
 - d. “*entrepreneur rent in the narrower sense*.”

Dari relativitas makna keuntungan, menempatkan berbagai bagian yang penting dan saling terkait dengan aspek-aspek operasional korporasi. Tetapi, yang pasti, mencari keuntungan tidak bisa dimaknai hanya untuk menumpulkan harta semata. Keuntungan harus dimaknai sebagai upaya mengatasi berbagai masalah dari kelangsungan bisnis jangka panjang (*corporate sustainability*)¹⁸

Pencarian keuntungan dalam ekonomi kapitalisme selalu dikaitkan dengan paham liberalisme dan sistem pasar. Kebebasan (liberalisme) terhadap hak kepemilikan dan mendayagunakan dalam kompetisi pasar bebas diyakini para kapitalis akan menciptakan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan.¹⁹

Sistem pasar bebas menghedaki minimnya campur tangan pemerintah terhadap transaksi bisnis. Semboyan dari sistem ekonomi ini adalah *laissez faire* (“biar saja berjalan sendiri”). Tugas pokok Negara dilukiskan sebagai *nightwacht state* (negara jaga malam). Segala kegiatan ekonomi menurut Adam Smith biarlah diatur oleh *invisible hands* yang akan menciptakan keseimbangan antara permintaan dan penawaran secara kompetitif²⁰.

Proses ini menuntut kondisi kompetisi sebagai cara yang efisien untuk mewujudkan kebebasan di bidang ekonomi. Efisiensi adalah kata kunci dalam konteks pasar bebas yaitu kemampuan untuk menghasilkan barang atau jasa yang terbanyak dan berkualitas dengan biaya terendah²¹.

Intervensi Negara justru akan menciptakan inefisiensi dan hambatan hambatan. Pemerintah hanya diperlukan untuk menjaga kompetisi dalam pasar bebas berjalan secara *fair*, dengan mencegah monopoly serta melakukan privatisasi terhadap perusahaan-perusahaan negara atau bidang-bidang usaha yang selama ini dikuasai negara²².

Dengan sistem pasar, diharapkan konsumen akan mendapatkan produk berkualitas dengan harga murah sehingga tercipta kesejahteraan dalam masyarakat²³. Untuk mencapai kondisi tersebut, diperlukan adanya hak kebebasan

yang seluas luasnya (liberalisme) pada setiap individu atau kelompok, khususnya dalam hal kepemilikan.

Hak milik (*property right*) harus di jamin sepenuhnya oleh hukum negara sebagai sesuatu yang sakral (*the sacred rights of private property*)²⁴. Sehingga setiap individu maupun kelompok (korporasi) dapat secara bebas mendayagunakan dalam proses produksi untuk mendapatkan keuntungan, atas harta kekayaan yang di investasikan dalam bentuk modal kedalam perusahaan (kapitalisasi).

Profit yang didapat merupakan nilai tambah dari kapital dalam aktivitas bisnis.²⁵ Dalam bahasa yang lebih sederhana dapat dikatakan bahwa profit sebagai nilai tambah (*added value*) adalah prisp dasar dan tujuan sistem ekonomi kapitalisme. Hal ini dicontohkan oleh Webber dalam uraian yang panjang berikut ini²⁶:

“Ingatlah, waktu adalah uang, mereka yang dapat memperoleh penghasilan 10 Shilling setiap hari dengan jerih payah pekerjaannya dan pergi keluar negeri atau duduk bermalasan, walaupun dia hanya membelanjakan 6 Pence selama menikmati masa bersenang senang atau bermalas-malasan, seharusnya tidak boleh hanya memperhatikan pengeluaran itu saja. Ia sebetulnya telah membelanjakan atau malahan membuang 5 Shilling”

“Jika seseorang membiarkan uangnya tetap dalam genggam tangan saya, pada saat akan dikembalikan maka ia telah kehilangan bunga yang seharusnya dia dapatkan dari saya atau sejumlah yang bisa saya manfaatkan, selama waktu peminjaman itu. Ini bisa berarti sejumlah uang yang cukup kalau seseorang mempunyai kredit yang bagus dan banyak dan berhasil memanfaatkannya.”

“Ingatlah, uang mempunyai sifat dapat berkembang dengan sangat cepat. Uang dapat beranak uang dan anak-anaknya menghasilkan anak dan seterusnya. 5 Shilling diputar menjadi 6, kemudian menjadi 7 dan selanjutnya menjadi 100 Pounds. Semakin banyak uangnya semakin banyak yang dihasilkan pada setiap putaran, sehingga keuntungannya akan terus meningkat lebih cepat dan cepat. Mereka yang membunuh seekor induk babi biakan berarti membunuh seluruh anak cucu sampai generasi yang ke seribu.... Ingatlah pepatah: *pembayar gaji yang baik adalah tuan dari dompet orang lain*²⁷

Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa ekonomi kapitalisme

menghendaki adanya penambahan nilai atas kekayaan dengan meningkatkan produktifitas barang atau jasa melalui kerja industrialisasi.

Tetapi konsep ekonomi kapitalisme tersebut tidak berjalan mulus dalam sejarahnya, tetapi juga menuai kritik dari para ekonom yang beraliran sosialis atau komunis. Karena pencarian keuntungan secara bebas demi kepentingan diri pribadi atau kelompok justru menimbulkan ketimpangan sosial yang parah²⁸.

Kapitalisme menjadi “jalan raya” (*highway*) yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan multi nasional (MNC) untuk melakukan ekspansi besar-besaran ke berbagai belahan dunia, khususnya negara-negara dunia ketiga. Ekspansi tersebut dilakukan tidak memberikan kesejahteraan. MNC justru mencari keuntungan sebesar besarnya demi kepentingan pribadi, tanpa memperhatikan hak-hak (ekonomi) masyarakat lokal.²⁹

Dominasi korporasi dalam ekonomi pasar bebas mendapat kritik dari John Maynard Keynes (1883-1946). Ia adalah seorang ahli ekonomi Inggris³⁰ yang mengatakan bahwa fungsi negara sebagai regulator dalam sistem pasar harus dikuatkan. Negara harus diberi otoritas penuh sebagai wasit dalam pasar bebas dan pengawas distribusi barang jasa.

Pemikiran ini telah mengilhami Presiden Franklin D Roosevelt melakukan reformasi ekonomi Amerika yang terkenal dengan istilah *New Deals* dalam proses menyembuhkan *Great Depression*³¹.

Reformasi ekonomi ditandai dengan banyaknya peraturan perundangan yang dibuat pemerintah Amerika Serikat. Aturan tersebut lebih mengarah pada pemberian perlindungan buruh dan masyarakat luas dan memberi batasan-batasan bagi para pelaku bisnis.

Franklin D Roosevelt mengumandangkan *New Deal* dengan mengatur pasar melalui *Anti Trust Law 1936 (Robinson Patman Act)* untuk menghilangkan monopoli korporasi besar³². Campur tangan negara ini terutama dalam bidang perhubungan, pengajaran dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara dan masa peraturan yang bersifat sosial seperti asuransi sosial dan orang-orang jompo, pengangguran, orang lemah, pemeliharaan kesehatan, perbaikan pelayanan dan peningkatan taraf hidup.

Pemerintah kembali mengambil alih kekuatan pasar dengan mengatur korporasi untuk memperhatikan upah buruh dan penentuan harga-harga³³. Pasar dan Industri diatur dengan *National Industrial Recovery Act 1933* (NIRA), Buruh dilindungi dengan *National Labor Relation Act 1935* (NLRA), Para petani mendapatkan perlindungan dan subsidi melalui *Agricultural Adjustment Act 1933* (AAA), dan yang terpenting adalah diundangkannya *Social Security Act 1935* (Undang-undang Jaminan Social)³⁴.

Begitupun di Indonesia. Berdasarkan pengalaman sejarah Indonesia sejak era kemerdekaan sampai sekarang, krisis ekonomi dapat dikategorikan dalam gelombang jangka pendek (tujuh tahunan) dan gelombang jangka panjang (35 tahunan). Gelombang jangka pendek tujuh tahunan dapat diringkas sebagai berikut.³⁵

- 1) 1945 - 1952 Ekonomi Perang
- 2) 1952 - 1959 Pembangunan Ekonomi Nasional
- 3) 1959 - 1966 Ekonomi Komando
- 4) 1966 - 1973 Demokrasi Ekonomi
- 5) 1973 - 1980 Ekonomi Minyak
- 6) 1980 - 1987 Ekonomi Keprihatinan
- 7) 1987 - 1994 Ekonomi Konglomerasi
- 8) 1994 - 2001 Ekonomi Kerakyatan

Masing-masing tahap dalam siklus tersebut telah ditandai dengan ciri-ciri khusus yang tidak terdapat pada periode sebelum dan sesudahnya. Misalnya, pada periode Ekonomi Konglomerasi, periode ini dipicu oleh liberalisasi sektor perbankan, yang disusul dengan tumbuhnya imperium usaha konglomerasi yang bermunculan seperti cendawan di musim hujan.

Pada periode tersebut ditandai dengan pembangunan ekonomi bersifat sentralistis, rezim penguasa yang otoriter, serta birokrasi yang korup. Pembangunan yang “kebablasan” tersebut akhirnya mengantar bangsa besar ini ke arah periode krisis yang menyakitkan. Salah satu dampak positif yang ditimbulkan dari krisis ekonomi adalah tumbuhnya kesadaran akan kekeliruan strategi pembangunan yang dilakukan selama ini.

Oleh karena itu, periode ini segera disambung dengan babak baru yang lebih membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan

ekonominya secara mandiri, dengan didukung oleh iklim dan perhatian negara yang memadai. Era ini dikenal dengan era ekonomi kerakyatan³⁶.

Tetapi Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya pernah dihajar gelombang krisis ekonomi (krisis moneter) pada tahun 1997 - 1998, yang hingga sekarang belum pulih sepenuhnya.

Krisis finansial Asia adalah krisis finansial yang dimulai pada Juli 1997 di Thailand, dan mempengaruhi mata uang, bursa saham dan harga aset lainnya di beberapa negara Asia, sebagian Macan Asia Timur. Peristiwa ini juga sering disebut krisis moneter (“krismon”) di Indonesia.³⁷

Indonesia, Korea Selatan dan Thailand adalah negara yang paling parah terkena dampak krisis ini. Hong Kong, Malaysia dan Filipina juga terpengaruh. Daratan Tiongkok, Taiwan dan Singapura hampir tidak terpengaruh. Jepang tidak terpengaruh banyak tapi mengalami kesulitan ekonomi jangka panjang.

Krisis Asia dimulai pada pertengahan 1997 dan mempengaruhi mata uang, pasar bursa dan harga aset beberapa ekonomi Asia Tenggara. Dimulai dari kejadian di Amerika Selatan, investor Barat kehilangan kepercayaan dalam keamanan di Asia Timur dan memulai menarik uangnya, menimbulkan efek bola salju.

Banyak pelaku ekonomi, termasuk Joseph Stiglitz dan Jeffrey Sachs, telah meremehkan peran ekonomi nyata dalam krisis dibanding dengan pasar finansial yang diakibatkan kecepatan krisis. Kecepatan krisis ini telah membuat Sachs dan lainnya untuk membandingkan dengan pelarian bank klasik yang disebabkan oleh shock resiko yang tiba-tiba. Sach menunjuk ke kebijakan keuangan dan fiskal yang ketat yang diterapkan oleh pemerintah pada saat krisis dimulai, sedangkan Frederic Mishkin menunjuk ke peranan informasi asimetrik dalam pasar finansial yang menuju ke “*mental herd*” diantara investor yang memperbesar resiko yang relatif kecil dalam ekonomi nyata. Krisis ini telah menimbulkan keinginan dari pelaksana ekonomi perilaku tertarik di psikologi pasar.³⁸

Indonesia terlihat jauh dari krisis. Tidak seperti Thailand, Indonesia memiliki inflasi yang rendah, perdagangan surplus lebih dari 900 juta dolar, persediaan mata uang luar yang besar, lebih dari 20 milyar dolar, dan sektor

bank yang baik.

Tapi banyak perusahaan Indonesia banyak meminjam dolar AS. Di tahun berikut, ketika rupiah menguat terhadap dolar, praktisi ini telah bekerja baik untuk perusahaan tersebut – level efektifitas hutang mereka dan biaya finansial telah berkurang pada saat harga mata uang lokal meningkat.

Pada Juli, Thailand megembangkan baht, Otoritas Moneter Indonesia melebarkan jalur perdagangan dari 8 persen ke 12 persen. Rupiah mulai terserang kuat di Agustus. Pada 14 Agustus 1997, pertukaran floating teratur ditukar dengan pertukaran floating-bebas. Rupiah jatuh lebih dalam. IMF datang dengan paket bantuan 23 milyar dolar, tapi rupiah jatuh lebih dalam lagi karena ketakutan dari hutang perusahaan, penjualan rupiah, permintaan dolar yang kuat. Rupiah dan Bursa Saham Jakarta menyentuh titik terendah pada bulan Septemer. Moody's menurunkan hutang jangka panjang Indonesia menjadi "*junk bond*".³⁹

Meskipun krisis rupiah dimulai pada Juli dan Agustus, krisis ini menguat pada November ketika efek dari devaluasi di musim panas muncul di neraca perusahaan. Perusahaan yang meminjam dalam dolar harus menghadapi biaya yang lebih besar yang disebabkan oleh penurunan rupiah, dan banyak yang bereaksi dengan membeli dolar, yaitu: menjual rupiah, menurunkan harga rupiah lebih jauh lagi⁴⁰.

Inflasi rupiah dan peningkatan besar harga bahan makanan menimbulkan kekacauan di negara ini. Pada Februari 1998, Presiden Suharto memecat Gubernur Bank Indonesia, tapi ini tidak cukup. Presiden Suharto pun akhirnya dipaksa mundur pada pertengahan 1998.

Pada saat krisis ekonomi global saat ini, yang dipicu oleh krisis finansial di Amerika banyak pengamat mengatakan ada persamaan dan ada pula perbedaannya⁴¹.

1) **Persamaan**

Banyak analis mengatakan, krisis 1997 yang diawali dari terjun bebasnya nilai tukar bath (Thailand), kemudian merembet ke Indonesia, Korea Selatan, Filipina, dan Malaysia merupakan krisis moneter tipe baru yang dapat melahirkan teori baru pula. Karena, faktor-faktor penyebab krisis tidak relevan dengan teori yang ada.

Berdasarkan model klasik Krugman (1979), yang berbasis pada krisis ekonomi di Meksiko tahun 1976, serta Argentina, Brazil, Peru, dan Meksiko pada awal tahun 1980, krisis moneter terjadi karena defisit anggaran yang terus membesar, sehingga mengurangi cadangan devisa dan kegagalan *exchange rate*. Sepanjang 1990-1996, baik Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Korea Selatan telah melaksanakan kebijakan fiskal dan moneter yang cukup hati-hati, sehingga kinerja keuangannya menunjukkan perkembangan positif.

Diantaranya defisit anggaran tergolong moderat (bahkan khusus 1996, Indonesia, Korea dan Thailand tidak defisit), perbandingan utang publik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga rendah, tingkat inflasi terjaga dan rendah, serta cadangan devisa terus meningkat.

Karena itu, pada awal jatuhnya nilai tukar bath, Menteri Keuangan (saat itu Mar'ie Muhammad) berulang kali mengatakan kepada media bahwa fundamental ekonomi kita kuat, sehingga tidak akan terpengaruh oleh krisis Thailand. Namun pada akhirnya, Indonesia justru merasakan dampak krisis Thailand yang paling parah ketimbang empat negara lainnya. Sekarang, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur BI Budiono mengatakan hal yang hampir sama secara substansial dengan apa yang dikatakan Mar'ie Muhammad. Setidaknya, kinerja ekonomi nasional saat ini adalah yang terbaik setelah 10 tahun krisis moneter. Kinerja ekspor nonmigas sudah menembus angka 50 miliar dolar AS, serta selalu surplus setiap bulan. Cadangan devisa per Agustus 2008 mencapai 59,6 miliar dolar AS. Pertumbuhan ekonomi sampai akhir 2008 diperkirakan melampaui 6 persen, dan tingkat inflasi diharapkan tidak lebih dari 11,5 persen. Tingginya tingkat inflasi tahun ini lebih banyak disebabkan *cost push inflation*, akibat naiknya harga BBM bulan Mei lalu.

Dari data tersebut, setidaknya kita meyakini satu hal, bahwa tanpa adanya gejala-gejala krisis bukan berarti Indonesia akan terhindar dari krisis. Krisis 1997 memberi pelajaran berharga agar kita lebih waspada. Lalu, patutkah kita lebih optimistis untuk mengatakan

bahwa kita sekarang sudah lebih dewasa dan lebih mampu mengelola krisis?

2) Perbedaan

Pengaruh krisis finansial AS sudah pasti akan dirasakan Indonesia; tinggal menghitung tingkat kesakitannya, apakah sama atau berbeda dengan tahun 1997. Andai kondisi ekonomi Indonesia, baik sistem maupun strukturnya, masih mengikuti pola sebelum 1997, mungkin saja akan lahir efek *contagion* jilid dua, yang akan membawa kembali negeri ini ke dalam nestapa krisis moneter. Tetapi yang diyakini, dan harus didukung kuat oleh masyarakat Indonesia, kebijakan ekonomi Indonesia sudah berbeda dengan masa lalu. *Pertama*, nilai tukar rupiah sudah diserahkan pada mekanisme pasar (*floating rate*), tidak lagi menganut nilai tukar mengambang terkendali yang membuat BI harus terus melakukan intervensi pasar guna menjaga agar nilai tukar rupiah tetap berada pada kisaran yang sudah ditetapkan. Sesuai dengan Undang-Undang, Bank Indonesia berkewajiban menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, namun tidak dipaksa menjaga pada nilai tukar tertentu, sehingga BI tidak harus bolak-balik intervensi ke pasar uang.

Kedua, tingkat cadangan devisa Indonesia sudah sangat memadai. Jika akhir 2007 masih 17 dolar AS, per Agustus 2008 sudah mencapai 59,6 miliar dolar AS. Cadangan devisa negara membantu pemerintah mengelola risiko yang harus dihadapi, dan memperkuat keyakinan

terhadap negara maupun mata uangnya. Makin besar cadangan devisa negara, kian kuat pula negara dalam mengelola risiko yang sedang dihadapinya. *Ketiga*, sistem perbankan nasional dewasa ini sudah dibentengi dengan berbagai aturan. Belajar dari banyaknya *moral hazard* yang terjadi sebelum krisis moneter 1997, BI telah menerbitkan berbagai aturan dalam pengelolaan bank. Dengan demikian, kecil peluangnya bagi pemilik untuk menggunakan dana masyarakat bagi kepentingan bisnisnya. Pemilik pun tidak bisa semau gue dalam menentukan pengurus bank. Pengawasan oleh BI terhadap operasional bank

terbilang sangat ketat, sehingga kecurangan-kecurangan yang dilakukan manajemen bank cepat terdeteksi. Adanya Sistem Informasi Debitur (SID) yang memungkinkan BI mengetahui identitas debitur seluruh bank dan memungkinkan bagi manajemen bank untuk tidak dikelabui debitur, sangat membantu dan mendorong semakin mantapnya perbankan nasional. Hanya

saja yang membedakan dengan krisis 1997 adalah bahwa hubungan dagang Indonesia dan Thailand sangat kecil, sedangkan hubungan dagang Indonesia dan AS sangat besar.

Menurut teori, saat terjadi krisis dari salah satu negara jelas akan berdampak besar pada perekonomian negara yang menjadi mitra dagangnya. Tampaknya, teori ini tak akan terbukti kalau seluruh masyarakat mempercayai kebijakan yang diambil pemerintah. Sebab, saat krisis 1997 mendera ekonomi nasional, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem ekonomi nasional sangat rendah.

Saat Menteri Keuangan meminta masyarakat untuk tenang, justru direspon masyarakat dengan berlomba-lomba menukar rupiahnya dengan dolar AS.

Meski demikian, krisis ekonomi dunia saat ini bukan untuk ditangani. Tetapi adalah peluang bagi bangsa-bangsa di dunia untuk memilih, runtuh bersama imperilisme Amerika Serikat atau merebut kemerdekaan ekonominya dari cengkeraman negara adidaya tersebut.

Sekjen Badan Pekerja Dewan Ketahanan Ekonomi Bangsa (Wantambang) Haris Moti menjelaskan bahwa krisis internasional saat ini sebenarnya bermula dari meningkatnya kebutuhan minyak dunia yang tidak bisa dipenuhi oleh industri perminyakan.

“Tidak terlepas dari krisis minyak itu kemudian diikuti oleh tindak korupsi di Bank Assosiated General Prancis yang mendorong krisis lebih luas lagi pada negara-negara berkembang dan miskin. Negara-negara maju menyiapkan kebijakan global warming yang mengesahkan penggunaan biofuel menggantikan minyak untuk menutupi kebutuhan minyak dunia.”

Selanjutnya, keruntuhan perbankan dunia menyebabkan kaum spekulan melakukan ekspansi ke bidang komoditas.

“Hal ini mengikuti keruntuhan pasar real estate di Amerika. Situasi ekonomi dunia seperti inilah yang kemudian menyebabkan gejala ekonomi dunia yang semula sangat ditentukan oleh bursa saham komoditas, yang melakukan jual beli saham, bukan berdasarkan harga pasar barang riil tetapi spekulasi harga yang semakin memperparah kondisi ekonomi dunia,”

Namun Haris Rusli Moti mengingatkan:

*“Berhentilah menyalah-nyalahkan bangsa sendiri, karena saatnya sekarang mencari jalan keluar bagi kemerdekaan ekonomi dan politik secara nyata bagi Indonesia yang sejak 1966 telah berada dalam cengkeraman kepentingan kapitalisme internasional,”*⁴²

Tetapi, sejak runtuhnya ekonomi sosialis komunis yang ditandai hancurnya negara Uni Soviet, adalah bukti bahwa hanya sistem ekonomi kapitalis adalah satu satunya pilihan?. Pertanyaan ini tidak begitu mudah untuk dijawab. Ada beragam argumentasi dan teori yang saling bertentangan. Secara fakta, kapitalisme menunjukkan gemerlanya ekonomi sebuah bangsa, tetapi pada saat yang sama kapitalisme mempunyai kelemahan-kelemahan yang secara berkala datang dalam bentuk krisis ekonomi.

Menurut negara-negara barat (*western countries*) menganggap bahwa sistem liberal dengan ideologi kapitalisme adalah satu-satunya pilihan. Francis Fukuyama bahkan mengatakan bahwa sistem liberal dengan ideologi kapitalisme adalah akhir dari sejarah (*the end of history*) ekonomi dunia.⁴³ Kapitalisme adalah satu satunya instrumen ekonomi global untuk menciptakan kesejahteraan umat manusia di muka bumi.

Banyak ekonom dan kritisi yang memandang bahwa globalisasi merupakan keniscayaan sejarah dan terjangan arusnya tak mungkin dapat dibendung lagi. Pandangan semacam ini muncul sebagai reaksi atas pendapat sebagian ekonom yang justru prihatin terhadap kecenderungan perkembangan ekonomi dunia yang kian tak menentu dan sangat rentan dengan gejolak. Terutama akibat dari arus finansial global yang semakin “liar”. Padahal, kita semua tahu bahwa tidak semua negara memiliki daya saing (dan daya tahan) yang cukup untuk terlibat langsung dalam kancah lalu-lintas finansial global, yang tak lagi mengenal batas-batas teritorial negara, dan cenderung semakin sulit untuk dikontrol oleh pemerintah sebuah negara yang berdaulat.

Globalisasi juga dikhawatirkan akan memunculkan suatu bentuk eksploitasi baru, yaitu eksploitasi oleh financial-driven economies terhadap good-producing economies. Kelompok pertama memiliki keleluasaan yang sangat besar dalam merekayasa bentuk-bentuk transaksi keuangan yang sifatnya “semu”. Artinya, transaksi yang mereka lakukan sebenarnya tidak

memberikan kontribusi produktif bagi peningkatan kesejahteraan riil masyarakat. Ini semua terjadi karena “uang” dan “aset finansial” lainnya saling diperdagangkan sebagaimana halnya sebuah komoditas.⁴⁴

Bagaimanapun juga, sektor finansial tidak pernah terlepas kaitannya dengan sektor riil. Keberadaan sektor finansial, dengan segala bentuk kerumitan instrumen dan berbagai lembaga keuangan yang menopangnya, tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Sehebat dan secanggih apa pun sektor finansial itu, pada intinya mereka tetap merupakan fasilitator bagi eksistensi sektor riil.

Dalam kenyataannya kini makin nampak bahwa kedua sektor ini telah mengalami lepas kaitan (*decoupling*), maka masyarakat tinggal menunggu waktu akan datangnya kehancuran peradaban. Atau minimal bersiap-siap untuk hidup dalam kegemerlapan artifisial dengan segala konsekuensinya. Oleh karena itu, tidak ada cara lain bagi kita untuk sungguh-sungguh mengupayakan terbentuknya suatu tatanan baru, yang menempatkan kembali sektor finansial pada fungsinya yang hakiki. Sayangnya, dewasa ini kita hidup dalam alam realitas yang sudah terlanjur menempatkan uang dan perangkat finansial lainnya sebagai suatu komoditas. Telah banyak negara yang tersungkur dan terseret oleh arus permainan kapitalisme finansial yang berperilaku semakin “buas”. Suatu perekonomian yang menapaki tahap demi tahap perkembangan, yang telah ditumbuhkan oleh peluh keringat berjuta-juta rakyatnya, tiba-tiba saja bisa diluluh-lantakkan dalam sekejap dengan cara mengguncang nilai mata uangnya hingga tersungkur tanpa kekuatan untuk membela diri.⁴⁵

Sebetulnya, kesadaran akan bahaya kapitalisme dengan sosok seperti sekarang ini sudah mulai tumbuh. Di antaranya justru datang dari kalangan pemikir Barat sendiri, termasuk para pemikir di lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia.

Anehnya, justru kesadaran seperti itulah yang saat ini kurang muncul di negara kita dan negara berkembang pada umumnya sehingga secara “sukarela” mereka mau menerjunkan diri ke dalam ajang permainan yang sangat “buas” ini.

Pemikiran-pemikiran alternatif sebagaimana sudah sangat sering

dilontarkan oleh ekonom seperti. Mubyarto atau juga oleh para “ekonom kontemporer” lain seperti Hartojo Wignjowijoto, atau Sritua Arief, nampaknya perlu diwartakan dan ditawarkan kepada masyarakat dunia, untuk benar-benar menciptakan tatanan ekonomi yang lebih sehat. Tentu saja, gagasan bagi terbentuknya tatanan baru itu membutuhkan waktu dan pengkajian yang cermat. Target awal yang paling penting dari semua itu adalah memunculnya kesadaran masyarakat akan rapuh dan rentannya sistem yang berlaku sekarang ini. Untuk itu diperlukan beberapa pemikiran sebagai berikut ⁴⁶:

Pertama, atas krisis struktural fungsi Negara, mengharuskan akal dan budi kita bertanya akankah ada jalan keluar ekonomi untuk globalisasi sistem kapitalis? jawaban atas pertanyaan tadi tentu saja menghasilkan banyak kesangsian:

Kedua, tergantung bagaimana maksimalisasi peran Negara dapat eksist dan atau berfungsi, dengan seluruh institusi kepentingan yang mungkin menuju transisi demokrasi riil (de-akumulasi kekuasaan).

Ketiga, arus besar mazab ekonomi tidak memiliki jalan keluar alternatif, selain menyerahkan terutama pada usaha menyusun sistem sosial yang sosialis dan mengharamkan liberalisasi ekonomi, mekanisme pasar dan krisis-krisis yang lain.

Keempat, oleh karena kompleksitas masyarakat sekarang, sudah seharusnya ilmu ekonomi meningkatkan diri menjadi meta ekonomi, dalam artian sebagai ilmu ia harus berdiri pada keempat elemen yaitu; empirisme, rationalisme, imaginasi dan verifikasi, bukan hanya salah satu elemen saja.

Kelima, perubahan dalam masyarakat ternyata merupakan hasil interaksi institusi-institusi disertai kepentingan masing-masing, sedangkan hasil interaksi itu sangat berbau kekebetulan sosial. Agar dapat menghadapi fenomena masyarakat ini, maka sudah saatnya penyusunan Konsep Negara Ideal, meningkatkan metode analisisnya yang merupakan implikasi dari konfrontasi dan tukar menukar metode, dalam sudut pandang diantara berbagai disiplin ilmu (metoda interdisipliner).

Keenam, kompleksitas hubungan-hubungan fenomena Negara yang berkait dengan Norma semisal: keadilan sosial, dalam artian luas

mengharuskan Negara memasuki dimensi-dimensi: kemanusiaan, sosial budaya dan ekologi.

Ketuju,, Konsep Negara Ideal paling tidak harus mengandung kemampuan untuk melakukan relasi-regulasi terhadap Pasar Modal. dengan alasan ketika sistem Kapitalis menjadi Megakapitalis (sistem Kapitalis Global), maka sudah sepantasnya Negara membangun politik regulasi dalam tingkat yang sangat tinggi, untuk mengimbangnya.

Akhirnya pencarian paradigma baru tentang sistem ekonomi yang ideal digunakan oleh sebuah Negara harus berkait dengan usaha-usaha yang arif dan serius, seperti: memberikan dimensi sosiologis, politik dan budaya dalam kerangka interdisipliner, meta ekonomi dan menghindari dogmatisme akan kemampuan mekanisme pasar. Maka sebagai jalan keluar krisis aktual Negara, proposisinya sebaiknya berakar juga dari keharusan menemukan sebuah cara memerintah baru beserta realita kondisi kehidupan kesadaran warga untuk memperjuangkan kepentingannya.⁴⁷

Di tengah dinamika ekonomi global yang terus-menerus berubah dengan akselerasi yang semakin tinggi sebagaimana digambarkan di atas, Indonesia mengalami terpaan badai krisis yang intensitasnya telah sampai pada keadaan yang nyaris menuju kebangkrutan ekonomi.

Krisis ekonomi - yang dipicu oleh krisis moneter pada tahun 1997/1998 yang lalu, paling tidak telah memberikan indikasi yang kuat terhadap tiga hal, yaitu ⁴⁸:

- 1) kredibilitas pemerintah telah sampai pada titik nadir. Penyebab utamanya adalah karena langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam merenspons krisis selama ini lebih bersifat “tambal-sulam”, *ad-hoc*, dan cenderung menempuh jalan yang berputar-putar. Selain itu, seluruh sumber daya yang dimiliki negeri ini dicurahkan sepenuhnya untuk menyelamatkan sektor modern dari titik kehancuran. Sementara itu, sektor tradisional, sektor informal, dan ekonomi rakyat, yang juga memiliki eksistensi di negeri ini seakan-akan dilupakan dari wacana penyelamatan perekonomian yang tengah menggema.
- 2) rezim Orde Baru yang selalu mengedepankan pertumbuhan (*growth*) ekonomi telah menghasilkan *crony capitalism* yang telah membuat struktur

perekonomian menjadi sangat rapuh terhadap gejolak-gejolak eksternal. Industri manufaktur yang sempat dibanggakan itu ternyata sangat bergantung pada bahan baku impor dan tak memiliki daya tahan. Sementara itu, akibat “dianak-tirikan”, sektor pertanian pun juga tak kunjung *mature* sebagai penopang laju industrialisasi. Yang saat itu terjadi adalah derap industrialisasi melalui serangkaian kebijakan yang cenderung merugikan sektor pertanian. Akibatnya, sektor pertanian tak mampu berkembang secara sehat dalam merespons perubahan pola konsumsi masyarakat dan memperkuat *competitive advantage* produk-produk ekspor Indonesia. Salah satu faktor terpenting yang bisa menjelaskan kecenderungan di atas adalah karena proses penyesuaian ekonomi dan politik (*economic and political adjustment*) tidak berlangsung secara mulus dan alamiah. *Soeharto-style state-assisted capitalism* nyata-nyata telah merusak dan merapuhkan tatanan perekonomian. Memang di satu sisi pertumbuhan ekonomi yang telah dihasilkan cukup tinggi, namun mengakibatkan eksekse yang ujung-ujungnya justru *counter productive* bagi pertumbuhan yang berkelanjutan.

- 3) rezim yang sangat korup telah membuat sendi-sendi perekonomian mengalami kerapuhan. Secara umum, segala bentuk korupsi akan mengakibatkan arah alokasi sumber daya perekonomian menjurus pada kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan tidak memberikan hasil optimum. Dalam kondisi seperti ini pertumbuhan ekonomi memang sangat mungkin terus berlangsung, bahkan pada intensitas yang relatif tinggi. Namun demikian, sampai pada batas tertentu pasti akan mengakibatkan melemahnya basis pertumbuhan.

Selanjutnya, praktik-praktik korupsi secara perlahan tapi pasti telah merusak tatanan ekonomi dan pembusukan politik yang disebabkan oleh perilaku penguasa, elit politik, dan jajaran birokrasi. Keadaan semakin parah ketika jajaran angkatan bersenjata dan aparat penegak hukum pun ternyata juga turut terseret ke dalam jaringan praktik-praktik korupsi itu.⁴⁹

Hancurnya kredibilitas pemerintah yang dibarengi dengan tingginya ketidakpastian itu telah menyebabkan terkikisnya kepercayaan (*trust*). Yang

terjadi dewasa ini tidak hanya sekadar pudarnya *trust* masyarakat terhadap pemerintah dan sebaliknya, melainkan juga antara pihak luar negeri dengan pemerintah, serta di antara sesama kelompok masyarakat. Yang terakhir disebutkan itu tercermin dengan sangat jelas dari keberingasan massa terhadap simbol-simbol kekuasaan serta kemewahan dan terhadap kelompok etnis Cina, seperti yang dikenal dengan peristiwa Mei 1998.

Sementara itu, krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat dilihat dari respons masyarakat yang kerap kali berlawanan dengan tujuan kebijakan yang ditempuh pemerintah. Misalnya, kebijakan pemerintah yang seharusnya berupaya menggiring ekspektasi masyarakat ke arah kanan, justru telah menimbulkan respons masyarakat menuju ke arah kiri, dan sebaliknya. Faktor lainnya adalah semakin timpangnya distribusi pendapatan dan kekayaan, sehingga mengakibatkan lunturnya solidaritas sosial.⁵⁰

Sistem ekonomi yang berlaku sekarang ini nyata-nyata telah mendorong perilaku konsumtif masyarakat dan telah menyeret begitu jauh perekonomian nasional untuk tumbuh secara *instant*. Hanya negara-negara kaya dengan perangkat kelembagaan ekonomi politik yang mantaplah yang bisa mengeliminasi dampak-dampak negatif dari gelombang pergerakan finansial global ini.

Negara-negara yang kuat tidak perlu lagi bergelimangan peluh untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan rakyatnya. Mereka cukup melakukan rekayasa finansial yang menghasilkan kemelimpahan dana untuk membeli berbagai macam kebutuhan fisiknya. Sebaliknya, negara-negara yang menghasilkan produk riil (barang) tidak pernah bisa menikmati hasil yang layak. Sebelum peluh mereka mengering, nilai uang riil yang dihasilkan itu telah disedot oleh gejolak kurs dan tercekik oleh tingginya suku bunga.

Perilaku ekonomi yang “tidak wajar” seperti itu tidak hanya dilakukan oleh para aktor pasar finansial internasional seperti George Soros, tetapi juga telah meracuni para pelaku bisnis di Indonesia. Hampir semua imperium bisnis di Indonesia telah melakukan beragam rekayasa finansial, sehingga memungkinkan mereka menjelma dalam bentuk gurita konglomerasi secara *instant*. Langkah mereka semakin mulus setelah disangga oleh sistem politik

yang otoriter dan birokrasi yang korup.⁵¹

Sesungguhnya ada beberapa segi-segi negatif dari system kapitalisme yaitu:⁵²

- 1) Sistem kapitalisme adalah buatan manusia yang mempunyai sifat dasar tamak. Sekelompok kecil pribadi mendominasi pasar untuk mencapai kepentingan sendiri tanpa menghargai kebutuhan masyarakat dan menghormati kepentingan umum.
- 2) Egoistik. Dalam sistem kapitalisme, individu dan sekelompok kecil pribadi mendominasi pasar untuk mencapai kepentingan sendiri tanpa menghargai kebutuhan masyarakat dan menghormati kepentingan umum.
- 3) Monopolistik. Dalam sistem kapitalisme, seorang kapitalis memonopoli komoditas dan menimbunnya. Apabila barang tersebut habis di pasar, ia mengeluarkannya untuk dijual dengan harga mahal yang berlipat ganda, mencekik konsumen dan orang-orang lemah.
- 4) Terlalu berpihak kepada hak milik pribadi. Kapitalisme terlalu mengagungkan hak milik pribadi. Sedangkan komunisme malah menghilangkan hak milik pribadi.
- 5) Persaingan. Sistem dasar kapitalisme membuat kehidupan menjadi arena perlombaan harga. Semua orang berlomba mencari kemenangan. Sehingga kehidupan dalam sistem kapitalisme berubah menjadi riba, di mana yang kuat menerkam yang lemah. Hal ini sering menimbulkan kebangkrutan pabrik atau perusahaan tertentu.
- 6) Perampasan tenaga produktif. Kapitalisme membuat para tenaga kerja sebagai barang komoditas yang harus tunduk kepada hukum permintaan dan kebutuhan yang menjadikan dia sebagai barang yang dapat ditawarkan setiap saat. Pekerja ini bisa jadi sewaktu-waktu diganti dengan orang lain yang upahnya lebih rendah dan mampu bekerja lebih banyak dan pengabdianya lebih baik.
- 7) Pengangguran. Suatu fenomena umum dalam masyarakat kapitalis ialah munculnya pengangguran yang mendorong pemilik perusahaan untuk menambah tenaga yang akan memberatkannya.
- 8) Kehidupan yang penuh gejolak. Ini adalah akibat logis dari persaingan yang berlangsung antara dua kelas. Yang satu mementingkan pengum-

pulan uang dengan segala cara. Sedangkan yang satu lagi tidak diberi kesempatan mencari sendiri kebutuhan pokok hidupnya, tanpa kenal belas kasihan.

- 9) Penjajahan. Karena didorong mencari bahan baku dan mencari pasar baru untuk memasarkan hasil produksinya, kapitalisme memasuki pe-tualangan penjajahan terhadap semua bangsa. Pada mulanya dalam bentuk penjajahan ekonomi, pola pikir, politik dan kebudayaan. Kemudian memperbudak semua bangsa dan mengeksploitasi tenaga-tenaga produktif demi kepentingan penjajahan.
- 10) Peperangan dan malapetaka. Ummat manusia telah menyaksikan berbagai bentuk pembunuhan dan pembantaian luar biasa biadabnya. Itu terjadi sebagai akibat logis dari sebuah penjajahan yang menimpa ummat manusia di bumi yang melahirkan bencana paling keji dan kejam.
- 11) Didominasi hawa nafsu. Orang kapitalisme berpegang kepada prinsip demokrasi politik dan pemerintahan. Pada umumnya demokrasi yang mereka gambar-gemborkan dibarengi dengan hawa nafsu yang mendominasi dan jauh dari kebenaran dan keadilan.
- 12) Riba. Sistem kapitalisme tegak di atas landasan riba. Sedangkan riba merupakan akar penyakit yang membuat seluruh dunia menderita.
- 13) Tidak bermoral. Kapitalisme memandang manusia sebagai benda materi. Karena itu manusia dijauhkan dari kecenderungan ruhani dan akhlnaknya. Bahkan dalam sistem kapitalisme antara ekonomi dan moral dipisahkan jauh-jauh.
- 14) Kejam. Kapitalisme sering memusnahkan begitu saja komoditas yang lebih, dengan cara dibakar atau dibuang ke laut karena khawatir harga akan jatuh disebabkan banyaknya penawaran. Mereka berani melakukan itu padahal masih banyak bangsa-bangsa yang menjerit kelaparean.
- 15) Boros. Orang-orang kapitalisme memproduksi barang-barang mewah disertai iklan besar-besaran, tanpa peduli kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat. Sebab yang mereka cari keuntungan belaka.
- 16) Tidak berperikemanusiaan. Orang kapitalis sering mengusir begitu saja seorang buruh karena alasan tenaganya kurang produktif. Tetapi kekejaman ini mulai diperingan akhir-akhir ini dengan adanya perbaikan

dalam tubuh kapitalisme.

Untuk memahami apakah sebuah negara itu bercorak kapitalisme ataukah sebaliknya yaitu sosialisme, maka indikator yang paling mudah untuk digunakan adalah dengan melihat seberapa besar pihak-pihak yang menguasai sektor ekonominya. Jika sektor-sektor ekonomi lebih banyak dikuasai oleh swasta, maka negara tersebut cenderung bercorak kapitalisme dan sebaliknya, jika ekonomi lebih banyak dikendalikan oleh negara, maka lebih bercorak sosialisme.⁵³

Dengan menggunakan tolok ukur di atas, kita dapat menelusuri sejauh mana cengkeraman kapitalisme telah menjalar ke Indonesia. Sesungguhnya jejak kapitalisme di Indonesia dapat ditelusuri ketika Indonesia mulai memasuki era pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru dimulai sejak Bulan Maret 1966. Orientasi pemerintahan Orba sangat bertolak belakang dengan era sebelumnya. Kebijakan Orba lebih berpihak kepada Barat dan menjahui ideologi komunis.

Dengan membaiknya politik Indonesia dengan negara-negara Barat, maka arus modal asing mulai masuk ke Indonesia, khususnya PMA dan hutang luar negeri mulai meningkat. Menjelang awal tahun 1970-an atas kerja sama dengan Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Pembangunan Asia (ADB) dibentuk suatu konsorsium *Inter-Government Group on Indonesia* (IGGI) yang terdiri atas sejumlah negara industri maju termasuk Jepang untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Saat itulah Indonesia dianggap telah menggeser sistem ekonominya dari sosialisme lebih ke arah *semikapitalisme*.⁵⁴

Memasuki periode akhir 1980-an dan awal 1990-an sistem ekonomi di Indonesia terus mengalami pergeseran. Menilik kebijakan yang banyak ditempuh pemerintah, kita dapat menilai bahwa ada sebuah *mainstream* sistem ekonomi telah dipilih atau telah 'dipaksakan' kepada negara kita. Isu-isu ekonomi politik banyak dibawa ke arah libelarisasi ekonomi, baik libelarisasi sektor keuangan, sektor industri maupun sektor perdagangan. Sektor swasta diharapkan berperan lebih besar karena pemerintah dianggap telah gagal dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi, baik yang berasal dari eksploitasi sumberdaya alam maupun hutang luar negeri.⁵⁵

Pasca krisis moneter, memasuki era reformasi, ternyata kebijakan perekonomian Indonesia tidak bergeser sedikitpun dari pola sebelumnya. Bahkan semakin liberal. Dengan mengikuti garis-garis yang telah ditentukan oleh IMF, Indonesia benar-benar telah menuju libelarisasi ekonomi. Hal itu paling tidak dapat diukur dari beberapa indikator utama, yaitu Privatisasi BUMN. Salah satu ciri ekonomi yang liberal adalah semakin kecilnya peran pemerintah dalam bidang ekonomi, termasuk didalamnya adalah kepemilikan asset-asset produksi. Dengan “dijualnya” BUMN kepada pihak swasta, baik swasta nasional maupun asing, berarti perekonomian Indonesia semakin liberal.⁵⁶

Peran serta pemerintah Indonesia dalam kancah WTO dan perjanjian GATT. Dengan masuknya Indonesia dalam tata perdagangan dunia tersebut, semakin memperjelas komitmen Indonesia untuk masuk “kubangan” libelarisasi ekonomi dunia atau kapitalisme global

5. SISTEM EKONOMI PASAR BEBAS DAN KEKUATAN MODAL

a. *Invisible Hand* Mengatur Pasar Bebas

Pemikiran ekonomi modern biasanya dinyatakan dimulai dari terbitnya Adam Smith's *The Wealth of Nations*, pada 1776, walaupun pemikir lainnya yang lebih dulu juga memberikan kontribusi yang tidak sedikit.

Ide utama yang diajukan oleh Smith adalah kompetisi antara berbagai penyedia barang dan pembeli akan menghasilkan kemungkinan terbaik dalam distribusi barang dan jasa karena hal itu akan mendorong setiap orang untuk melakukan spesialisasi dan peningkatan modalnya sehingga akan menghasilkan nilai lebih dengan tenaga kerja yang tetap.

Thesis Smith berkeyakinan bahwa sebuah sistem pasar akan mengatur dirinya sendiri dengan menjalankan aktivits-aktivitas masing-masing bagiannya sendiri-sendiri tanpa harus mendapatkan arahan tertentu. Hal ini yang biasa disebut sebagai “*invisible hand*” dan masih menjadi pusat gagasan dari ekonomi pasar dan capitalism itu sendiri.

Pemikiran Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry Into The Nature and Couses of The Wealth of Nation* mengenai *Invisible Hand*, atau tangan yang tak terlihat akan mengatur pasar dengan menciptakan kesejahteraan sosial

karena keseimbangan antara *supply dan demand*. Definisi *invisible hand* adalah terminology yang digunakan oleh Adam Smith untuk menjelaskan:

*“the natural force that guides free market capitalism through competition for scarce resources. According to Adam Smith, in a free market each participant will try to maximize self-interest, and the interaction of market participants, leading to exchange of goods and services, enables each participant to be better off than when simply producing for himself/herself. He further said that in a free market, no regulation of any type would be needed to ensure that the mutually beneficial exchange of goods and services took place, since this “invisible hand” would guide market participants to trade in the most mutually beneficial way.”*⁵⁷.

Invisible Hand menurut ensiklopedia, secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut⁵⁸:

The invisible hand is a metaphor coined by the economist Adam Smith. In The Wealth of Nations and other writings, Smith claims that, in a free market, an individual pursuing his own self-interest tends to also promote the good of his community as a whole through a principle that he called “the invisible hand”. He argued that each individual maximizing revenue for himself maximizes the total revenue of society as a whole, as this is identical with the sum total of individual revenues.

Namun apa yang diprediksi oleh Adam Smith tersebut tidak selamanya benar. Dewasa ini *Invisible Hand* telah berubah menjadi *impossible hand* dalam mengatur pasar, sehingga tidak tercipta keseimbangan, tetapi justru ketimpangan social ekonomi yang parah⁵⁹.

Hal ini bukan karena semata-mata kesalahan teoritis, namun banyak variabel yang tidak digunakan sebagai pertimbangan oleh Adam Smith. Mungkin karena Adam Smith melihat sistem ekonomi di Eropa pada Abad 16, dimana kondisi negara-negara di Eropa relatif seimbang, sehingga perdagangan dapat dilakukan secara *egaliter* dan lebih *fair*⁶⁰. Tentu saja karena dimensi waktu yang berbeda jauh dan ketidaksetaraan perdagangan dengan sistem ekonomi kapitalisme antara negara maju dan negara berkembang pada milenium ini, membuat teori ini mengalami bias yang menyimpang jauh⁶¹.

Sebenarnya teori tersebut dapat berjalan baik apabila terpenuhi beberapa persyaratan. Aliran naturalisme yang merupakan dasar kapitalisme ini

sebenarnya menyerukan hal-hal sebagai berikut⁶²:

- 1) Kehidupan ekonomi yang tunduk kepada sistem *nature* yang bukan buatan manusia. Dengan sifat seperti itu akan mampu mewujudkan pengembangan hidup dan kemajuan secara simultan.
- 2) Tidak ada campur tangan negara dalam kehidupan ekonomi dan membatasi tugasnya hanya untuk melindungi pribadi-pribadi dan kekayaan serta menjaga keamanan dan membela negara.
- 3) Kebebasan ekonomi bagi setiap individu, di mana ia mempunyai hak untuk menekuni dan memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemauannya. Tentang kebebasan seperti ini diungkapkan dalam sebuah prinsip yang sangat masyur dengan semboyan, "Biarkan ia bekerja dan biarkan ia berlalu.
- 4) Kepercayaan kapitalisme terhadap kebebasan yang tiada batas telah membawa kekacauan keyakinan dan perilaku. Ini melahirkan berbagai konflik di Barat yang kemudian melanda dunia sebagai akibat dari kehampaan pemikiran dan kekosongan ruhani.
- 5) Rendahnya upah dan tuntutan yang tinggi mendorong setiap anggota keluarga bekerja. Akibatnya tali kekeluargaan putus dan sendi-sendi sosial di kalangan mereka runtuh.
- 6) Pendapat Adam Smith yang paling penting ialah tentang ketergantungan peningkatan perekonomian, kemajuan dan kemakmuran kepada kebebasan ekonomi, yang tercermin pada:
 - a). Kebebasan individu yang memberikan seseorang bebas memilih pekerjaannya, sesuai dengan kemampuannya yang dapat mewujudkan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan dirinya.
 - b). Kebebasan berdagang, di mana produktivitas, peredaran produksi dan distribusinya berlangsung dalam iklim persaingan bebas.
 - c). Kaum kapitalis memandang, kebebasan adalah suatu kebutuhan bagi individu untuk menciptakan keserasian antara dirinya dan masyarakat. Sebab kebebasan itu adalah suatu kekuatan pendorong bagi produksi karena ia benar-benar menjadi hak manusia yang menggambarkan kehormatan kemanusiaan.⁶³

Hasil dari proses tersebut adalah Revolusi Industrial. Pada abad ke 19 di

Eropa. Karl Marx menggabungkan berbagai aliran pemikiran meliputi distribusi sosial dari sumber daya, mencakup karya Adam Smith, juga pemikiran sosialisme dan egalitarianisme.

Dengan menggunakan pendekatan sistematis pada logika yang diambil dari George W Friedrich Hegel, Marx menghasilkan karya klasiknya *Das Kapital*. Ajarannya banyak dianut oleh mereka yang mengkritik ekonomi pasar selama abad 19 dan 20.

Ekonomi Marxist berlandaskan pada *labor theory of value* yang dasarnya ditanamkan oleh *classical economists* (termasuk Adam Smith) dan kemudian dikembangkan oleh Marx. Pemikiran Marxist beranggapan bahwa kapitalisme adalah berlandaskan pada eksploitasi kelas pekerja. Pendapatan yang diterima kaum buruh selalu lebih rendah dari nilai pekerjaan yang dihasilkannya, dan selisih itu diambil oleh kapitalis dalam bentuk profit.

Akhir abad 19 dan awal abad 20 kapitalisme apitalism juga disebutkan sebagai era *monopoly capitalism*, ditandai oleh pergerakan dari *laissez-faire phase of capitalism* menjadi *the concentration of capital* hingga mencapai *large monopolistic* atau *oligopolistic holdings* oleh *banks and financiers*, dan dicirikan oleh pertumbuhan korporasi dan pembagian pekerja terpisah dari *shareholders, owners, dan managers*.

Area perkembangan yang paling pesat kemudian adalah studi tentang informasi dan keputusan. Contoh pemikiran ini seperti yang dikemukakan oleh Joseph Stiglitz. Masalah-masalah ketidakseimbangan informasi dan kejahatan moral dibahas disini seperti karena mempengaruhi ekonomi modern dan menghasilkan dilema-dilema seperti *executive stock options, insurance markets, dan Third-World debt relief*.⁶⁴

Namun, Hari ini kita bisa saksikan bahwa, system kapitalisme telah mencengkeram Negara-negara berkembang. Melalui kekuatan ekonomi pada jaman globalisasi kapital dan/atau “sistem sosial liberal modern”, keprihatinan timbul, karena ketika kelompok negara-negara selatan termasuk Indonesia mengenal dan “dipaksa” menerima kapitalisme global, serta sejenisnya sebagai model tunggal pembangunan dunia, sistem produksi tadi justru sedang menuju pada posisi anti-klimaks kejayaannya. Sehingga, bila di awal pertumbuhannya, sistem Kapitalis memberi kesejahteraan berlimpah

kepada kelompok negara-negara utara, maka di usia senjanya, “sistem ekonomi tunggal dunia” tadi telah menimbulkan ketimpangan sosial, dominasi sistem teknik, menghapuskan kesempatan kerja dan bahkan pengucilan, yang semuanya bermuara pada eksplotasi ekonomi⁶⁵.

Kesedihan yang lain, sampai sekarang belum ada kritik yang benar-benar mendasar terhadap Sistem Kapitalis, yang telah menjadi kenyataan riil sistem ekonomi dunia yang *expansioniste* dan *productiviste* bersama motor-motornya: ekonomi pasar, masyarakat konsumsi, beserta hubungan kekuasaan dengan pengeksploatasan. Dengan demikian, kita lantas membayangkan betapa berat tugas-tugas yang harus dihadapi oleh para pembela mazhab kontinental untuk menemukan alternatif atas Konsep Negara sebagai lapisan ozon, yang melindungi masyarakat banyak terhadap kekejaman sinar infra merah.

b. Akumulasi Modal adalah Kekuatan Kapitalisme Pasar Bebas

Kapitalisme secara etimologis berasal dari kata *caput*, yang artinya kepala, kehidupan dan kesejahteraan. Makna modal dalam kapital seharusnya diinterpretasikan sebagai titik kesejahteraan. Dengan makna kesejahteraan, definisi kapital mulai dikembangkan dengan arti akumulasi keuntungan yang diperoleh dalam setiap transaksi ekonomi. Oleh sebab itu, interpretasi awal dari kapitalisme adalah proses pengusahaan kesejahteraan untuk bisa memenuhi kebutuhan. Dalam definisi ini, sebetulnya kapitalisme mempunyai definisi yang konstruktif-manusiawi. Pasti setiap orang mempunyai keinginan dasar untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam hidup sehari-hari.

Masalahnya dalam perkembangan selanjutnya, terutama dalam era revolusi industri, kapitalisme didefinisikan sebagai paham yang mau melihat serta memahami proses pengambilan dan pengumpulan modal balik (tentu saja yang sudah dikumpulkan secara akumulatif) yang diperoleh dari setiap transaksi komoditas ekonomi. Pada saat itu pula, kapitalisme tidak hanya dilihat sebagai ideologi teoritis tapi berkembang menjadi paham yang mempengaruhi perilaku ekonomi manusia.

Ada beberapa tahap perkembangan kapitalisme yaitu:

(1) Kapitalisme Purba

Kapitalisme purba adalah tahapan awal pembentukan kapitalisme yang

ditemukan dalam bibit-bibit pemikiran masyarakat feodal yang berkembang di Babilonia, Mesir, Yunani dan Kekaisaran Roma. Para ahli ilmu sosial menamai tahapan kapitalisme purba ini dengan sebutan *commercial capitalism*. Kapitalisme komersial berkembang ketika pada jaman itu perdagangan lintas suku dan kekaisaran sudah berkembang dan membutuhkan sistem hukum ekonomi untuk menjamin *fairness* perdagangan ekonomi yang dilakukan oleh para pedagang, tuan tanah, kaum rohaniwan.

Bahkan Max Weber pernah menyatakan bahwa akar kapitalisme berawal dari sistem *Codex Iuris Romae* sebagai aturan main ekonomi yang kurang lebih universal dipakai oleh kaum pedagang di Eropa, Asia Barat serta Asia Timur Jauh dan Afrika Utara. Aturan main ekonomi ini sebetulnya dimanfaatkan untuk memapankan sistem pertanian feodal. Dari aturan ini pula muncul istilah *bourgeois* yang mengelompokkan sistem feodalisme yang disempurnakan dengan sistem hukum ekonomi itu. Kelompok *bourgeois* dipakai untuk menyebut golongan tuan tanah - bangsawan dan kaum rohaniwan yang biasa mendiami biara yang luas dan besar.

Perkembangan selanjutnya adalah perkembangan kapitalisme yang dikenal sebagai tata cara dan “kode etik” yang dipakai oleh kaum merkantilis. Kaum pedagang yang banyak berkumpul di bilangan pelabuhan Genoa, Venice dan Pisa. Kaum merkantilis memakai kapitalisme sebagai tahap lanjutan sistem sosial ekonomi yang dibentuk. Tatanan ekonomi dan politik yang berkembang memerlukan hukum dan etika yang disusun dengan relatif mapan. Hal ini disebabkan terjadi perkembangan kompetisi dalam sistem pasar, keuangan, tata cara barter serta perdagangan yang dianut oleh para merkantilis abad pertengahan. Para merkantilis mulai membuka wacana baru tentang pasar. Ketika mereka berbicara tentang pasar dan perdagangan, mau tidak mau mereka mulai bicara tentang barang dagang (komoditas) dan nilai lebih yang nantinya akan banyak disebut sebagai *the surplus value* (nilai lebih). Dari akar penyebutan inilah, wacana tentang keuntungan dan profit menjadi bagian integral dalam kapitalisme sampai abad pertengahan.

(2) *Kapitalisme Industri*

Pandangan merkantilis dan perkembangan pasar berikut sistem keuangan

telah mengubah cara ekonomi feodal yang semata-mata bisa dimonopoli oleh para tuan tanah, bangsawan dan kaum rohaniawan. Ekonomi mulai bergerak menjadi bagian dari perjuangan kelas menengah dan mulai menampakkan pengaruh pentingnya. Ditambah lagi, rasionalisasi filosofis abad modern yang dimulai dengan era renaissance dan humanisme mulai menjalari bidang ekonomi juga.

Setidaknya penulis akan menyebut tiga tokoh atau ikon ilmuwan filsafat sosial yang cukup memberikan pengaruh yang dramatis terhadap perkembangan kapitalisme industri modern. Mereka adalah Thomas Hobbes dengan pandangan egoisme etisnya, yang pada intinya meletakkan sisi ajaran bahwa setiap orang secara alamiah pasti akan mencari pemenuhan kebutuhan dirinya. Yang lain adalah John Locke. Dia menekankan sisi liberalisme etis, di mana salah satu adagiumnya berbunyi bahwa manusia harus dihargai hak kepemilikan personalnya. Tokoh lainnya adalah Adam Smith dan David Ricardo yang mencoba menukikkan pandangan dua tokoh sebelumnya dengan filsafat *laissez faire* dalam prinsip pasar dan ekonomi. Pandangan klasik Adam Smith menganjurkan permainan bebas pasar yang memiliki aturannya sendiri. Persaingan, pekerjaan dari *invisible hands* akan menaikkan harga kepada tingkat alamiah dan mendorong tenaga kerja dan modal beralih dari perusahaan yang kurang menguntungkan kepada yang lebih menguntungkan.

Tiga tokoh kapitalisme Hobbes, Locke dan Adam Smith mendapatkan legitimasi rasionalnya. Akselerasi perkembangan kapitalisme rasional ini memicu analisa dan praktek ekonomi selanjutnya. Akselerasi kapitalisme semakin terpicu dengan timbulnya “revolusi industri”.

Kapitalisme mendapatkan piranti kerasnya dalam pencapaian tujuan utamanya, yaitu akumulasi kapital (modal). Industrialisasi di Inggris dan Perancis mendorong adalah industri-industri raksasa. Perkembangan raksasa industri mekanis modern ini memicu kolonialisme dan imperialisme ekonomi. Tidak mengherankan apabila dalam konteks ini terjadi *exploitation l’homme par l’homme*. Situasi penindasan yang ada menimbulkan reaksi alamiah dari orang-orang yang kebetulan mempunyai kepedulian sosial – kolektif yang mengalami *trade-off* dalam era industri. Salah satu orang itu

adalah Karl Marx. Dia mereaksi ada sistem yang tidak beres dalam kapitalisme yang cenderung menafikkan individu dalam konteks sosial.

Meski sosialisme sudah menjadi “budaya tanding” tetap saja kapitalisme maju dan semakin mapan dalam percaturan kehidupan manusia. Max Weber menganalisa bahwa kemapanan kapitalisme selain didukung dengan faktor sekular juga mendapatkan legitimasi religiusnya. Weber beranggapan bahwa ada kaitan antara bangkitnya kapitalisme dengan Protestanisme. Kapitalisme merupakan bentuk sekular dari penekanan Protestanisme pada individualisme dan keharusan mengusahakan keselamatannya sendiri. Nilai-nilai religi Kristiani terutama Aliran Calvinisme memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam perkembangannya

(3) Kapitalisme Lanjut

Kapitalisme lanjut merupakan fase lanjutan dari kapitalisme industri. Kapitalisme industri memicu agregasi akumulasi modal bersama yang dikumpulkan melalui pembaruan perusahaan nasional dan multinasional. Dalam fase ini, kapitalisme bukan semata lagi hanya mengakumulasi modal tapi lebih dari itu, yaitu investasi. Dalam arti ini, kapitalisme tidak hanya bermakna konsumsi dan produksi belaka, tapi menabung dan menanam modal sehingga mendapatkan keuntungan berlipat dari sebuah usaha adalah usaha yang terus ditumbuhkan. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya didasarkan pada soal faktor produksi tapi juga faktor jasa dan kestabilan sistem sosial masyarakat. Oleh sebab itu, kapitalisme lanjut dengan refleksi sosialnya terus mengembangkan bagaimana mereka tetap berkembang mendapatkan keuntungan tapi tetap menyediakan lahan pendapatan yang cukup bagi para konsumen sebagai sekaligus faktor utama pasarnya.

Kapitalisme tahap ini mencapai puncak aktualisasinya melalui proses kewirausahaan ekonomi yang mencoba mengkombinasikan kembali peran pasar bebas dalam bidang ekonomi dengan intervensi negara dalam bidang politik.

Faktor modernisasi dalam wacana kapitalisme lanjut ini tidak terjebak pada dikotomi kapitalis sebagai pemilik modal dan buruh sebagai faktor produksi melainkan berlanjut pada wacana bagaimana akhirnya pekerja

dihadapkan pada masalah kepemilikan bersama (*share holder*) dalam sebuah proses kapitalisasi yang tetap saja memberikan ruang pada keuntungan dan proses akumulasi investasi.

Debat pembangunan kapitalisme dalam konteks sistem dunia juga menambah kompleksitas proses kapitalisme sebagai raksasa ekonomi yang tak terelakkan. Debat lanjutan kapitalisme dalam konteks globalisme tidak cenderung menempatkan pada kekuatan sosialisme dan kapitalisme belaka melainkan relasi interdependen antar pelaku ekonomi yang justru meluas. Bahkan Anthony Giddens pernah menyatakan bahwa dinamika kapitalisme sebagai *resultante* yang saling terhubung dan tersinergi dalam kapitalisme itu sendiri, industrialisasi, pengawasan dan kekuatan militer.

Kapitalisme yang dijiwai oleh semangat mencari untung menjadi sumber dinamisme luar biasa, dan ketika bergandengan dengan industrialisme menghasilkan tahap global sekarang ini. Dunia yang kita huni sekarang juga dalam pengawasan yang terus-menerus, mulai di tempat kerja dan merambat pada masyarakat. Negara meniru pabrik. Gugus institusi ini masih ditambah dengan munculnya kekuatan militer sebagai penjamin stabilitas ekonomi sebagai syarat mutlak pasar yang bebas dan tenang. Kapitalisme lanjut semakin matang dengan kemajuan teknologi informasi yang semakin merangsek kekuatan-kekuatan konvensional pasar tradisional yang ada

Inti dari semua model kapitalisme diatas adalah kekuatan modal. Kepemilikan modal menjadi paling utama dan akumulasi modal adalah salah satu jurus ampuh untuk memenangkan kompetisi dalam pasar bebas.

Dari sini hak kepemilikan menjadi suatu yang sangat penting untuk dipertahankan dan dilindungi. Tanpa hak kepemilikan maka status modal menjadi tidak berarti bagi si empunya. Untuk itu, seperti yang kita ketahui, para buruh yang bekerja pada majikannya, para petani penggarap sawah juragan tanah dan lainnya tidak akan lebih baik nasibnya dibanding dengan si juragan pemilik modal.

Seperti yang dikatakan Simonde de Simondi, seorang ekonom Swiss di abad 19, bahwa kapital *adalah sebuah nilai tetap yang berkembang biak dan tak akan binasa*. Begitu pula yang dikatakan Adam Smith bahwa kapital adalah sejumlah aset yang diakumulasikan untuk tujuan produktif. Pengusaha dapat

menggunakan akumulasi sumber daya mereka untuk mendorong bekerjanya perusahaan dalam memproduksi barang-barang dan mereka jual belikan. Semakin banyak modal yang terakumulasi, semakin besar pula tingkat produktifitas masyarakat⁶⁶.

Dengan kata lain Semakin banyak modal yang dimiliki maka semakin banyak pula kemungkinan keuntungan yang akan didapat. Semakin kecil modal semakin kecil keuntungan.

c. UMKM dan Permodalan: Sebuah Persoalan Klasik

1) Bantuan Pendanaan untuk UMKM

Berkait dengan objek kajian tersebut, ada persoalan yang mendasar ketika UMKM dihadapkan dengan sistem kapitalisme yang mengandalkan kekuatan modal. Dan ini adalah persoalan klasik dari jaman ke jaman yang menuntut adanya solusi efektif dalam globalisasi ekonomi dewasa ini.

Kendala utama yang dihadapi pengusaha kelas UMKM adalah permodalan. Walaupun kehadirannya menjanjikan, tetapi masih banyak lembaga keuangan khususnya perbankan masih melirik sebelah mata.⁶⁷

Persoalan lainnya adalah perhatian dari dunia perbankan yang tidak begitu tertarik dengan aktifitas UMKM. Pada masa Orde Baru, UMKM ini dianaktirikan. Pemberian kredit perbankan lebih diutamakan pada industri usaha besar. Sebab sektor perbankan juga tidak mau memikul risiko kredit macet.

Pengamat perbankan Dradjad H Wibowo mengatakan, berkurangnya kredit untuk UMKM mencerminkan kurang tertarik perbankan mengucurkan kredit ke usaha kecil.⁶⁸ *“Bank tidak lagi menganggap usaha kecil sebagai sektor yang bisa memberikan keuntungan memadai. Di samping itu, bank melihat ada sektor lain yang relatif lebih menguntungkan,”*

Menurut Dradjad, saat ini perbankan relatif lebih tertarik mengucurkan kredit konsumsi dan properti untuk investasi dan modal kerja ketimbang ke usaha kecil. Karena dianggap lebih menarik, bank pun akhirnya banyak mengalokasikan kredit ke sektor properti dan konsumsi. Perbankan lebih tertarik ke sektor properti karena pinjamannya umumnya besar-besar. Itu membuat biaya administrasi dan waktu yang dibutuhkan lebih sedikit.

Akibat minimnya kredit yang disediakan, usaha kecil diperkirakan akan semakin terpuruk. Saat ini saja, keterpurukan usaha kecil sudah terlihat. Sektor-sektor seperti tekstil, kerajinan, furnitur yang dikerjakan usaha kecil jumlahnya semakin menyusut dan kinerjanya terus⁶⁹

Kondisi tersebut, ujar Dradjad, jelas tidak bisa dibiarkan. Meski demikian, kesalahan pun tidak bisa ditimpakan sepenuhnya kepada pihak perbankan. Sangat beralasan dan wajar bila bank lebih mementingkan profit.

Di samping itu, pengusaha kecil juga masih banyak yang dinilai belum layak mendapatkan kredit karena tidak memiliki agunan. “Karena itu, fungsi lembaga penjaminan kredit yang ada sekarang perlu didorong lagi. Dengan adanya jaminan, perbankan akan berani mengucurkan kredit ke usaha kecil,” kata Dradjad⁷⁰. Perusahaan besar juga biasanya mempunyai fasilitas yang dapat dipinjam oleh pemerintah daerah pada waktu-waktu tertentu. Selain itu, perusahaan besar merupakan “donor” tetap dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sudah jelas bahwa pemerintah daerah tidak bisa mengharapkan kontribusi-kontribusi seperti di atas dari usaha kecil dan menengah. Jarang, misalnya, ada pemerintah daerah yang memandang perusahaan besar sebagai penyedia lapangan kerja bagi penduduknya, atau yang memandang perusahaan besar sebagai pasar bagi produk-produk dari usaha kecil dan menengah yang ada di wilayah itu.

Oleh karena itu, dapat dimengerti apabila kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini lebih banyak tertuju pada upaya untuk mendorong investasi perusahaan besar, terutama dari luar daerah dan dari luar negeri (PMA dan PMDN), daripada upaya untuk mendorong tumbuhnya usaha menengah dan kecil di wilayahnya.

Namun, sebenarnya kontribusi yang diberikan oleh UMKM kepada pemerintah dengan menciptakan lapangan kerja tidak kalah besarnya dari kontribusi usaha besar. Selain PBB, maka pajak-pajak lain yang disetorkan ke negara oleh usaha besar merupakan pendapatan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Sedangkan kebanyakan pajak dan retribusi yang dihasilkan oleh usaha kecil dan menengah merupakan pendapatan asli daerah, baik yang dihasilkan oleh operasi usaha kecil dan menengah itu sendiri maupun yang dihasilkan oleh lapangan kerja yang ditimbulkannya.

UMKM juga membayar PBB atas tanah dan bangunan yang ditempatinya.

Selain itu, semakin banyak lapangan kerja tercipta oleh usaha kecil dan menengah, semakin banyak penduduknya yang bekerja dan menghasilkan penghasilan. Akhirnya merekalah yang akan menyumbang pada pendapatan pemerintah. Dengan bekerja dan mempunyai penghasilan, penduduk dapat membangun rumahnya sendiri dan kemudian membayar PBB. Dengan mempunyai penghasilan, mereka dapat menikmati sarana hiburan dan membayar pajak tontonan. Dengan penghasilan mereka, mereka dapat memiliki kendaraan dan penggunaannya memaksa mereka untuk membayar retribusi parkir.⁷¹

Oleh karena itu Krisni Murti, Ketua Dewan Pengurus Yayasan Dana Bakti Astra, mengatakan, bank lebih baik memprioritaskan pengucuran kredit ke usaha kecil. Alasan Krisni, usaha kecil selama ini terbukti menjadi fondasi perekonomian dan selamat dari terpaan krisis. Apalagi, kata Krisni, sekitar 29 persen pertumbuhan ekspor disumbangkan usaha kecil. Selama ini usaha kecil dan menengah juga menyerap 99,44 persen tenaga kerja di Indonesia.⁷²

Sejumlah organisasi pengusaha kecil dan menengah mendesak pemerintah agar segera melakukan restrukturisasi permodalan bagi usaha kecil dan menengah (UMKM). Sebab selain terancam eksekusi “hukuman mati” (penyitaan aset) karena kredit macetnya di bank swasta dan pemerintah, ratusan ribu kelompok usaha kecil dan menengah itu kini juga dalam proses kebangkrutan⁷³

Sebenarnya Pemerintah telah melakukan bantuan pendanaan terhadap UMKM. Ada dua skema untuk pemberdayaan koperasi dan UMKM, yakni kredit usaha rakyat (KUR) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Realisasi KUR Per tanggal pemuktahiran data tanggal 31 Oktober 2008, sebesar Rp.11.590,8 milyar untuk 1.463.541 debitur atau rata-rata kredit per debitur Rp. 7,9 juta. Sedangkan realisasi KUR per 30 September 2008 sebesar Rp. 10.961,4 milyar untuk 1.329.251 debitur. Artinya rata-rata kredit per debitur Rp. 8,2 juta. Realisasi kredit meningkat sebesar Rp. 629,4 milyar (5,74%) dan debitur meningkat sebanyak 134.290 (10,10%).

Lebih detailnya penyaluran KUR dapat dilihat dari tabel Perkembangan Realisasi Penyaluran KUR, Sept -31 Oktober 2008 berikut ini ⁷⁴.

Bank	Kredit (Rp Milyar)			Debitur (Unit)			Rata2 (Juta)		
	Sept	Okt	%(+/-)	Sept	Okt	(%+/-)	Sept	Okt	(%+/-)
BNI	1,156,1	1,177,6	1.86	8,856	8,936	0.90	130,5	131.8	0.95
BRI	7,609,0	8,189,0	7,62	1,276,516	1,407,503	10.26	5,9	5,8	(2.39)
Mandiri	1,095,7	1,120,3	2.25	33,685	36,913	9.58	32,5	30,3	(6.70)
BTN	137,7	148,3	7.71	889	936	5.29	154,8	158,4	2,30
Bukopin	628,3	628,5	0.03	2,960	2,957	(0.10)	212,2	212,5	0.13
BSM	334,6	327,1	(2.25)	6,345	6,296	(0.077)	52,7	52,0	(1.49)
Total	10,961,4	11,590,8	5,74	1,329,251	1,463,541	10.10	8,2	7,9	(3,96)

Adapun PNPM Mandiri di bawah koordinasi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat juga ikut mendorong penciptaan wirausaha baru. Namun misinya dititikberatkan pada pemberdayaan perekonomian masyarakat desa.

Di samping permodalan, masalah lain yang dihadapi sektor UMKM adalah Pengelolaan Keuangan/Perencanaan Keuangan. Perencanaan Keuangan UMKM Sangat Penting Seringkali kita mendengar ada UMKM setelah menerima kredit dari Lembaga Keuangan/Perbankan yang katanya untuk mengembangkan usaha, kenyataannya di lapangan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga ketika uang tersebut habis usahapun tidak jalan/bangkrut.

Perencanaan Keuangan untuk Pengusaha Kecil Menengah tersebut harus meliputi:

1) *Cash Flow Positif.*

Berbicara mengenai suatu usaha adalah mengenai untung dan rugi. Kalau hasil penjualan dikurangi biaya produksi dan biaya-biaya perusahaan adalah positif maka perusahaan tersebut untung, dan kalau hasil negatif maka rugi. Untuk membuat perencanaan keuangan perusahaan, maka Cash Flow harus positif, sehingga merencanakan keuangan selanjutnya lebih mudah. Bagaimana kalau Cash Flow perusahaan tersebut Negatif / rugi? Yang harus dilakukan adalah menekan biaya produksi/biaya yang lain lebih kecil dari pemasukan

2) *Dana Darurat / Emergency Fund.*

Keberadaan Dana Darurat / Emergency Fund sangat penting bagi Usaha Kecil Menengah. Dana darurat ini untuk mengantisipasi apabila dalam beberapa hari/bulan tidak mendapatkan order; ada karyawan yang masuk rumah sakit karena kecelakaan, ada order yang cukup besar.

3) *Proteksi Pendapatan (Asuransi Jiwa).*

Proteksi terhadap pendapatan atau dengan kata lain proteksi terhadap pengusaha yang menjadi sumber penghasilan keluarga adalah suatu hal yang perlu direncanakan terlebih dahulu, sebelum kita masuk kepada perencanaan kebutuhan keuangan lainnya. Seperti halnya dana darurat, asuransi jiwa adalah merupakan sebuah cara yang perlu dipersiapkan dalam mengantisipasi resiko kehilangan sumber penghasilan yang disebabkan oleh kematian atau terjadinya ketidakmampuan total akibat kecelakaan atau sakit pengusaha tersebut yang menjadi sumber penghasilan utama dalam keluarga. Apalagi kalau pengusaha tersebut mempunyai banyak ide yang berguna dalam usahanya, harus diasuransikan.

4) *Proteksi Terhadap Tempat Usaha.*

Pelimpahan resiko kepada pihak perusahaan asuransi terhadap tempat usaha juga sangat penting sekali. Ini mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadi pencurian, kebakaran dan huru hara. Jangan sampai terjadi setelah kebakaran yang menghabiskan seluruh tempat usaha, stok barang dan barang jadi pengusaha tersebut jadi bangkrut. Ini harus dihindari.

5) *Dana Pensiun*

Mempersiapkan dana pensiun dalam perencanaan keuangan Usaha Kecil Menengah juga merupakan salah satu hal penting yang perlu direncanakan sejak awal. Karena sebagai pengusaha tidak ingin terus menerus bekerja, harus ada regenerasi. Beberapa alasan pentingnya perencanaan keuangan dana pensiun adalah:

- a) Ketidakpastian fisik di masa yang akan datang.
- b) Ketidakpastian ekonomi di masa yang akan datang
- c) Tingginya biaya hidup nanti
- d) Ekspektasi kehidupan lebih panjang dari saat ini
- e) Diversifikasi Usaha

Apabila semua perencanaan di atas sudah dilaksanakan, maka perluasan usaha/penambahan usaha boleh dilakukan. Meskipun lambat yang penting aman. Dengan demikian perencanaan keuangan Usaha Kecil tersebut kuat, sehingga, kalau terjadi resiko terhadap usaha tersebut, enggak terlalu panik

Persoalan keuangan UMKM lainnya sebenarnya adalah kedisiplinan pelaku usaha untuk mengelola dan membedakan antara keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan. Keuangan untuk kebutuhan hidup sehari hari dengan keuangan untuk usaha harus dipisahkan, meskipun usaha tersebut dijalankan di rumah⁷⁵.

Ada contoh seorang pengusaha sablon, usahanya dikerjakan di rumah. Setiap pemasukan dan pengeluaran, tidak pernah dicatatnya, hanya diingat-ingat di kepala dan uang yang masuk disimpan di laci. Membayar tagihan listrik ambil uang dari laci, belanja rumah tangga ambil uang dari laci. Anaknya ingin jajan ambil uang di laci. Giliran untuk membeli bahan-bahan sablon/membayar gaji karyawan, uang tersebut tidak cukup/kurang, akhirnya kelabakan dan cari pinjaman sana sini. Sebenarnya sih pengusaha itu untung, tetapi karena tidak pernah dicatat dan pengambilan uangnya sembarangan bukannya untung yang didapat, melainkan rugi. Kalau kejadian tersebut berulang-ulang, bulan demi bulan, maka dipastikan usaha tersebut tidak akan berkembang bahkan akan mengalami kebangkrutan.

Dalam persoalan ermodalan UMKM tersebut alangkah baiknya kita pelajari hasil penelitian dari Hernando de Soto. Hernando de Soto, seorang ilmuwan Peru yang pernah melakukan riset panjang mengenai persoalan modal di negara berkembang. Hasil riset dipublikasikan dalam bukunya yang klasik *The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs the West and Fils Everywhere Else*.⁷⁶

Dalam risetnya yang dilakukan di lima benua tersebut, Hernando de Soto menemukan beberapa hal menarik untuk di kaji, berkait dengan persoalan permodalan dinegara berkembang khususnya bidang UMKM.

Pertama, sesungguhnya sangat banyak modal atau capital Negara berkembang namun kebanyakan adalah capital yang mati yang dimaksud disini adalah terbengkalainya aset-aset produksi sehingga tidak mempunyai nilai tambah. Hal ni terjadi karena adanya “informasi yang hilang” dinegara

berkembang atas perkembangan kapitalisme di Negara maju seperti analog yang dikatakan Marx *adanya ayam betina yang menghasilkan telur-telur emas yang belum tersentuh*, namun tidak seorangpun tahu dimana ayam tersebut bersembunyi. Seperti halnya capital, bagaimana ia diproduksi dan bagaimana ia dihasilkan nilai tambah atau uang. Hernando de Soto melihat jutaan hektar tanah dinegara berkembang yang bersembunyi dibalik kemiskinan. Mereka tidak tahu bila tanah- tanah tersebut diolah akan menjadi “ayam betina yang tertelur emas”.

Kedua, adanya persoalan legalitas dalam pengembangan usaha. Misalnya, di Peru: sesuai peraturan hukum yang berlaku membutuhkan 289 hari untuk membuat unit usaha pakaian, dengan biaya pendaftaran mencapai US dollar 1.231 atau 31 kali lipat upah bulanan minimal. Untuk mendapatkan ijin legal membangun sebuah rumah ditanah milik Negara diperlukan 207 tahap administratif di 52 kantor di pemerintah. Seorang sopir bus oplet atau taksi yang ingin mendapatkan status resmi rutenya harus menghadapi birokrasi yang berbelit selama 26 bulan. Kasus di Haiti hampir sama: untuk mendapatkan ijin sewa selama 5 tahun membutuhkan 65 tahap birokrasi dan memakan waktu 2 tahun.

Kedua hal tersebut mengakibatkan banyaknya nilai capital yang mati. Seperti di Mesir dan Haiti 68% penduduk kota dan 97% penduduk desa tinggal diperumahan yang tidak memiliki sertifikat legal. Khusus di Haiti saja nilainya bisa mencapai US dollar 5,2 millyard atau sama dengan 4 kali total semua asset perusahaan legal yang beroperasi atau 9 kali nilai semua aset milik pemerintah, dan 158 kali nilai investasi langsung pada tahun 1995. Nilai tanah pedesaan dan perkotaan tidak legal bernilai US dollar 74 millyard, atau sama dengan 11 kali lebih besar dari nilai perusahaan-perusahaan dan 5 kali nilai bursa saham di Lima. Nilai tanah tidak legal mencapai US dollar 133 millyard atau 7 kali total simpanan di bank-bank Negara, sama dengan 14 kali nilai semua investasi asing atau 4 kali kapitalisasi 216 perusahaan domestik yang tercantum dalam bursa saham Pilipina.

Jika ditotal nilai tanah yang dimiliki orang miskin secara illegal dinegara-negara berkembang hampir US dollar 9,3 trillyun. Ini adalah sebuah angka yang patut dipikirkan karena hamper sama dengan 2 kali total persediaan

Amerika Serikat yang terserkulasi diseluruh dunia. Ini hampir mendekati nilai total semua perusahaan yang tercantum pada bursa saham utama di 20 negara maju seperti New York, Tokyo, London, Paris, dan lainnya. Ini hampir sama dengan 46 kali jumlah pinjaman bank dunia kepada negara berkembang. Dari sinilah sebenarnya kita bisa berpikir apabila tanah atau aset-aset terbengkalai di Indonesia diberi status legal dan kemudahan pengurusan birokrasi maka para petani akan dapat mudah mendapatkan bantuan pendanaan dari bank, para pedagang kaki lima tidak perlu digusur-gusur dan pengusaha home industri akan lebih mudah melakukan transaksi ekspor impor karena mempunyai jaminan. Kalaupun hari ini yang terjadi adalah sebaliknya dimana pengusaha UMKM selalu kesulitan modal kita bisa merenungkan kisah dari Russell Comewell yang bercerita tentang seorang Indian yang telah dijanjikan oleh seorang peramal bahwa dia akan menjadi kaya raya jika dia mendapat harta karunnya. Alkisah Indian itu berkeliling dunia hingga umurnya sampai tua dan akhirnya kembali kerumah dengan sedih dan terkalahkan. Ketika dia memasuki kembali rumahnya dia merasa haus dan perlu minum seteguk air. Namun umur dirumahnya telah tertimbun lumpur. Dengan lelah ia mengambil skopnya dan menggali sumur, tanpa diduga-duga ia menemukan tambang berlian diatas tanahnya. Harta karun yang selama ini ia cari diseluruh dunia.

Pesan Comewell sangat berguna bagi para pemimpin negara-negara berkembang yang tidak perlu mengikuti instruksi dari institusi-institusi asing dengan tanpa arah untuk mencari keberuntungan mereka sendiri. Di pusat lingkungan termiskin mereka terhampar berhektar-hektar berlian dan trilyunan dollar. Semuanya siap digunakan hanya jika kita dapat menyikap misteri merubah aset-aset ini menjadi kapital yang hidup.

2) Kerjasama dan Jaringan Bisnis Sebagai Solusi Pendanaan UMKM

Namun untuk mengatasi persolan permodalan, ada alternatif yang bersifat *symbiosis mutualism*, yaitu kerja sama UMKM dengan usaha besar

UMKM tersebut perlu diarahkan untuk dapat mengembangkan industri pendukung. Misalnya, industri otomotif membutuhkan banyak produk komponen yang dibuat oleh industri pendukung dari IKM. Pengembangan

IKM ini akan terus menjadi menjadi fokus Depperin, akan menjadi konsep utama karena IKM tidak hanya bermanfaat bagi pengentasan kemiskinan dan pengangguran, melainkan juga keseimbangan pelaku-pelaku di dunia usaha,” ujar Andung. Untuk itu, pihaknya juga tetap mempertahankan Direktorat Jenderal (Ditjen) Industri Kecil dan Menengah.

Kerjasama UMKM dengan Perusahaan besar dapat dilihat dari contoh berikut ini. Tiga perusahaan besar, PT Astra Internasional Tbk., PT Bank Central Asia Tbk., dan PT Pertamina (Persero), membangun lembaga pengembangan bisnis bagi usaha kecil menengah (UMKM) di Indonesia.⁷⁷ Kerjasama pengembangan UMKM itu akan berlangsung selama tiga tahun dengan total dana yang dialokasi sebesar Rp 5 miliar.

Direktur PT Astra International (Astra) Johnny Darmawan mengatakan kontribusi Astra untuk membangun lembaga itu sebesar 20 persen dari total dana, sementara BCA dan Pertamina masing-masing memberikan kontribusi sebesar 40 persen. Dana itu diambil dari alokasi untuk program sosial perusahaan. Dijelaskan bahwa lembaga itu akan dibangun di lima kota yang pemilihannya didasarkan atas jangkauan wilayah pengelolaan UMKM dari masing-masing perusahaan, yaitu di Palembang, Semarang, Sidoarjo, Makassar, dan Balikpapan. UMKM akan diberikan fasilitas pembiayaan dan promosi melalui lembaga tersebut. Para pengusaha kecil menengah juga akan diberikan pelatihan manajerial, penguatan mentalitas wirausaha, dan temu usaha.

Direktur Keuangan Pertamina Frederick ST. Siahaan mengemukakan, kolaborasi tiga perusahaan ini tidak mematok target UMKM yang akan dibantu selama tiga tahun mendatang. Jumlah UMKM yang akan dibantu tergantung dari masing-masing wilayah operasi lembaga itu. Saat ini, lanjutnya, lembaga pengembangan bisnis sedang mensurvei jumlah UMKM yang ada di lima kota itu dan juga tengah mengkaji bentuk bantuan utama yang akan diberikan.

Pinjaman dana akan diberikan setelah UMKM yang akan dibantu diberikan pelatihan manajerial. Pertamina sendiri, lanjut dia, sekarang sudah mengelola 33 ribu UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Astra sudah membantu pengembangan dua ribu UMKM melalui Yayasan dharma hakti Astra.

UMKM yang dikelola yayasan Astra itu memasok kebutuhan industri otomotif di Indonesia senilai triliunan rupiah. Untuk pasokan ke Astra Grup sendiri senilai Rp 2,1 triliun.

Sementara itu, Direktur BCA Suwignyo Budiman mengatakan bahwa pada 2007 BCA telah menyalurkan kredit untuk UMKM sekitar Rp 26 triliun atau 40 persen dari total penyaluran kredit BCA. Melalui kerjasama pembentukan lembaga pengembangan bisnis ini, BCA ingin meningkatkan porsi pendanaan untuk UMKM. Pada 2008 penyaluran kredit BCA termasuk UMKM diharapkan tumbuh 18-20 persen.⁷⁸

Dari kisah diatas merupakan pengalaman tentang tanggung jawab sosial perusahaan, khususnya bagaimana mengembangkan sektor usaha kecil menengah (UMKM).⁷⁹ Dimana ketiga perusahaan tersebut akhirnya sepakat berkolaborasi membangun Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) bagi UMKM di Indonesia.

Lembaga ini berfungsi memberikan perkuatan UMKM melalui berbagai pelatihan, diantaranya basic mentality, pendampingan, temu usaha, fasilitas pembiayaan dan promosi. "LPB bisa memberikan peran bagi UMKM di negeri ini," ungkap Suwignyo. Menurut Johnny, melalui kerja sama ini diharapkan sektor UMKM dapat tumbuh dan berkembang menjadi unit usaha yang mandiri, profesional dan andal sehingga mampu bersaing di pasar global.

Dalam LPB, masing-masing pihak memberikan kontribusi, yakni Astra (20 persen), Pertamina (40 persen), dan BCA (40 persen). Untuk tahap awal lembaga ini akan didirikan di lima kota yaitu di Sumatera (Palembang), Kalimantan (Balikpapan), Sulawesi (Makassar), Jawa (Semarang dan Sidoarjo). Alasan pemilihan kota-kota tersebut, sebut Johnny, semata-mata karena jangkauan wilayah.

Selama ini, baik BCA, Astra, maupun Pertamina memiliki program CSR untuk memberdayakan UMKM dan sudah berjalan bertahun-tahun. Ketiganya menilai bahwa visi mereka sama tentang CSR terutama bagaimana mengembangkan sektor UMKM. Astra memiliki pengalaman dengan 2.000 UMKM binaan yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) yang menyuplai kebutuhan industri perusahaan otomotif untuk Grup Astra, dimana pada semester I tahun 2007 transaksi mencapai Rp 1,2 triliun.

Demikian halnya dengan Pertamina yang melakukan pembinaan terhadap 33.000 UMKM yang tersebar di seluruh wilayah operasi Pertamina. Selama ini Pertamina memiliki pengalaman bermitra dengan UMKM dan memberikan hasil positif,” kata Frederick. Dia melanjutkan, Pertamina akan melihat dalam 1 tahun atau 2 tahun ke depan hasil dari kerja sama ini. “Kerja sama ini sangat baik, sama-sama mengembangkan visi,” sambungnya.

Sebelum ketiga perusahaan ini sepakat berkolaborasi mendirikan LPB, masing-masing perusahaan telah menjalin kerja sama satu sama lain. Misalnya: Astra dan BCA menerbitkan Astra World bagi pemilik mobil Astra seperti Toyota, Daihatsu, Isuzu, Peugeot. BCA dan Pertamina menerbitkan Gaz Card untuk pembayaran di SPBU Pertamina. Selanjutnya Pertamina dan Astra kerja sama dalam penjualan suku cadang mobil di SPBU Pertamina.⁸⁰

Sektor UMKM memang membutuhkan bimbingan, pembinaan serta modal dari perusahaan-perusahaan besar sehingga UMKM bisa mandiri, makin berkembang dan memiliki daya saing. Kalau melihat misi LPB, tentunya prospek UMKM di Indonesia sangat menjanjikan dan mampu berkiprah di pasar global. Pasalnya, misi LPB yang didirikan BCA, Astra, dan Pertamina ini yaitu menjadi mitra pembinaan dan pendampingan UMKM di sekitar wilayah kerja Astra, Pertamina dan BCA menuju UMKM mandiri yang memiliki daya saing serta *quality, cost, delivery & innovation* (QCIDI) yang terus meningkat.

Sekitar 100 perusahaan manufaktur dan teknologi informasi Amerika Serikat menawarkan kerja sama dengan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Jawa Timur yang dinilai relatif paling tahan di masa krisis ketimbang daerah lain.⁸¹ Tawaran itu diungkapkan Atase Perdagangan Kedutaan Besar AS, Rajendra Deer dalam presentasi profil perusahaan-perusahaan sesuai membuka Pameran Dagang AS yang digelar Kedubes AS di Surabaya. Di pameran ini, kami menawarkan perusahaan baru terutama *small medium enterprise* (UMKM) di AS yang kini mencapai sekitar 32 ribu jenis waralaba dari berbagai jenis usaha mulai *fast food* hingga salon rambut.

Untuk lebih meningkatkan daya saing UMKM memasuki pasar global tersebut, pengembangan jaringan usaha antara UKM, atau antara UMKM dengan usaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri perlu terus

dikembangkan. Upaya pengembangan jaringan usaha ini sangat penting dan strategi terutama untuk meningkatkan skop ekonomi, efisiensi, pengelolaan bisnis yang efisien, dan memperluas pangsa pasar. Dengan demikian UMKM akan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing adalah pengembangan jaringan usaha. Melalui jaringan usaha ini akan terjadi penguatan posisi tawar para pelaku bisnis dalam mengembangkan bisnisnya.

Keberhasilan pengembangan UMKM di beberapa negara maju diantaranya karena jaringan usahanya (*business networks*) berkembang dengan baik. Ambil contoh di Taiwan, misalnya, ada dua konsep yang dikembangkan, yaitu: (a) untuk sektor industri dikenal dengan “*satellite factory system*” dan (b) untuk sektor non industri jaringan usaha yang dikembangkan disebut “*cooperative exchange program*”. Konsep *satellite factory system* (John C. I NI, 1997) mengungkapkan identik dengan pola sub kontrak sebagaimana berkembang pada industri otomotif di Jepang. Industri-industri besar melakukan sub kontrak beberapa komponen yang dikerjakan oleh industri kecil dan menengah. Dalam kaitan ini, industri besar hanya memproduksi bagian-bagian penting dan merakit produk yang dihasilkan. Di Taiwan, industri-industri yang mengembangkan sistem setelit antara lain industri perakitan mobil, industri elektronik (ACER, SONY, Motorola, dll), dan industri mesin pesawat (*Thunder Tiger*).

Konsep *cooperative exchange program*, merupakan forum kerjasama informasi dan pengalaman dalam pengembangan usaha. Jaringan usaha seperti ini dilakukan secara multi sektoral. Misalnya, UMKM yang bergerak di sektor pertanian melakukan kerjasama dengan sektor perdagangan dan jasa. Kerjasama usaha ketiga sektor ini bermanfaat untuk memperoleh informasi harga atau informasi komoditi yang memiliki prospek cerah ke depan. Di samping tentunya untuk memasarkan produk yang dihasilkan.

Di Australia mengungkapkan pengalaman pengembangan jaringan usaha yang dirintis melalui proyek program *network* antara tahun 1991 dan 1993. Pilot proyek jaringan usaha di Australia dilaksanakan oleh “*the National Industry Extension Service (NIES)*” yaitu suatu *joint venture* antara

pemerintah commonwealth dengan delapan negara bagian teritori⁸². Dari pilot proyek tersebut, menurut John Dean dapat diklasifikasikan dua konsepsi jaringan usaha yang berkembang, yaitu “hard” dan “soft” networks. Hard networks merupakan jaringan usaha yang betul-betul terjadi secara solid dalam mengembangkan usaha. Sedangkan soft networks lebih kearah jaringan usaha informal yang pada dasarnya untuk saling tukar-menukar informasi. Lebih jauh John Dean mengungkapkan bahwa jaringan usaha hendaknya jangan dipaksakan, tetapi pemerintah tetap memberikan arahan dan para pelaku bisnis diberikan kesempatan untuk melakukan kerjasama usaha atas prakarsanya sendiri.

Beberapa contoh pengembangan jaringan usaha yang berhasil di Australia adalah:

Asia Pacific Design Group. Jaringan usaha ini dibentuk oleh 11 perusahaan yang bergerak dalam jasa konsultasi untuk seluruh aspek bangunan dan konstruksi

- 1). ATVC adalah Automotive Trim and Upholstrey Contractors Network. Dimana 8 perusahaan membentuk jaringan usaha untuk memenangkan kontrak-kontrak tender pemasangan rel untuk Trim, dimana yang selama ini selalu dimenangkan oleh Bridgestone dari Jepang atau Amerika Utara.
- 2). Daplar merupakan jaringan kerjasama dari 4 perusahaan pembuat kabinet dan penyambungan yang memproduksi kitchen set dan kamar mandi. Jaringan usaha ini mampu memproduksi rangka-rangka rumah yang “knocked down”.
- 3). Ambulances to Asia. Jaringan ini menyediakan paket ambulances siap pakai untuk layanan medis guna memenuhi permintaan di pasaran Asia.
- 4). Oz Electronics Manufacturing. Jaringan tersebut adalah kerjasama usaha antara 3 (tiga) perusahaan elektronik kecil dimana menghadapi masalah yang sama yaitu biaya komponen perusahaan tersebut yang tinggi yang dibutuhkan. Tanpa jaringan ini tampaknya mereka tidak mungkin bisa bertahan dalam menghadapi biaya tinggi tersebut.

Selain konsepsi jaringan usaha tersebut diatas, menurut pendapat C. Richard Hatch dalam makalah yang disampaikan pada lokakarya di Manila yaitu “The ADB/OECD Workshop on SME Financing in Asia”

mengemukakan beberapa konsep jaringan usaha, yang secara umum terdapat 4 type jaringan yang berbeda, antara lain.⁸³

- 1). Jaringan yang berkonfigurasi kembali agar rantai perusahaan bermakna, untuk membuat scope bisnis yang ekonomis. Beberapa contoh jaringan usaha ini adalah di Denmark, 11 pembuat pakaian jadi membentuk Christian Dior Line (CD-Line) untuk menggali kemampuan mereka dalam memenuhi perlengkapan untuk memproduksi jas, baju, asesoris dan retsleting. Sehingga perusahaan-perusahaan yang membentuk jaringan tersebut mampu membangun “image clothing” bagi perusahaan besar Eropa.
- 2). Jaringan yang meningkatkan efisiensi internal, memampukan UMKM akan menyadari pentingnya skala ekonomi. Salah satu contoh yang berhasil mengenai hal ini adalah proyek perusahaan penghasil alat-alat pertanian di bagian Utara Argentina dekat Propinsi Mato Grasso di Brasilia. Jaringan tersebut dibentuk oleh karena adanya kondisi lahan yang mampu, mereka ingin mengembangkan pertanian yang efektif. Mereka mengembangkan konsep pemasaran bersama dan percobaan rekayasa desain untuk mengurangi integrasi vertical agar proses produksi lebih efisien. Jaringan ini secara perlahan berhasil menjadi spesialisasi manufaktur yang besar, meningkatkan sub-kontrak dan harga yang kompetitif.
- 3). Jaringan untuk mengembangkan pengelolaan yang ekonomis. Secara teori ekonomi, usaha besar akan memperoleh keuntungan dengan pengelolaan yang ekonomis – adanya kemampuan menyebarkan biaya tinggi dari administrasi yang canggih, pembiayaan, dan aktivitas pemasaran melalui volume transaksi bisnis yang besar. Sementara itu produksi barang dan jasa yang didesentralisasi dapat menjadi efisien, manajer sekaligus pemilik yang terisolasi akan sama efektifnya dengan team pengelolaan yang tersebar. Beberapa contoh dari konsep ini adalah industri-industri kecil di Utara-Tengah Italia melakukan kerjasama dalam membiayai layanan “Business Development Services”
- 4). Jaringan untuk meningkatkan posisi tawar UMKM membantu akses pasar. Jelas sekali akan terjadi perluasan karena adanya peningkatan skala usaha. Jaringan yang luas berarti pemasaran juga meningkat.

Membangkitkan UMKM agar mau membangun jaringan usaha bukanlah pekerjaan yang mudah. Di Utara-Tengah Italia, yang merupakan epicentrum gerakan jaringan, telah merintisnya sejak awal tahun 1980 an. Sejak saat itulah awal bertumbuhnya jaringan usaha yang sukses di Emilia Romagna dan daerah sekitarnya. Keberhasilan tersebut telah memberikan perhatian bagi para cendekiawan dari kawasan Eropa dan Amerika.

Keberhasilan pengembangan jaringan usaha di Italia telah mempengaruhi beberapa negara di dalam pengembangan UMKM melalui kerjasama antar perusahaan. Pertama yang mempraktekannya adalah Amerika Serikat, namun proyek yang paling sukses dan mungkin terbaik adalah “the Danish National Network Project”, yang dikembangkan oleh Denmark tahun 1989.

Apa yang dapat dipetik dari pengalaman negara-negara maju dalam mengembangkan jaringan usaha adalah mengawalinya tidaklah mudah. Namun demikian, sekali berhasil akan mudah sekali untuk menularkannya. Sebagai langkah awal yang perlu dilakukan adalah merubah kultur bisnis (*changing business culture*). Inilah yang tidak mudah dilakukan yaitu merubah budaya berbisnis. Bukan saja UKM, usaha besarpun ada kecenderungan ingin melakukan monopoli dalam bisnisnya. Terlebih lagi kalau mereka betul-betul sudah menikmati hasil yang besar dan semakin besar dari kegiatan bisnis yang dilakukan. Adanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat akan menjadi pembatas untuk mewujudkan persaingan bisnis yang lebih sehat. Undang-Undang ini akan menjadi salah satu aturan yang mendorong terjadinya kerjasama usaha antara pelaku usaha.

Guna lebih mempercepat proses terjadinya jaringan usaha antara UMKM dan antar UMKM dengan usaha besar, baik di dalam dan di luar negeri maka perlu ada media khusus untuk mengkampanyekan hal tersebut. Sebagaimana juga dilakukan negara-negara maju, proses untuk mendorong jaringan usaha harus dipromosikan lewat media cetak maupun elektronik. Melalui media inilah diinformasikan konsep jaringan usaha dan apa manfaatnya. Disamping itu juga perlu ada talk shows melalui televisi atau radio, presentasi pada asosiasi-asosiasi perdagangan, surat-menyurat langsung

kepada UKM. Sebagai pembicara harus diambil orang-orang yang terkenal atau pengusaha yang sudah sukses.

Setelah sosialisasi tersebut berhasil dan telah tumbuh kesadaran para UMKM untuk melakukan kerjasama maka perlu dipikirkan mengenai pialangnya (brokers). Para pialang ini bisa dari kantor pemerintah, konsultan, pensiunan, atau sukarelawan pengusaha. Namun demikian akan lebih baik kalau ada layanan pengembangan bisnis (BDS) di tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten/kota, baik milik pemerintah, swasta, ataupun semi pemerintah. Konsultan konsultan BDS ini sebaiknya juga mendapatkan pelatihan khusus mengenai pengembangan jaringan usaha. Di dalam pelatihan tersebut mereka diberikan studi kasus mengenai struktur dan fungsi jaringan, teknik berorganisasi, resolusi konflik, perencanaan strategi kelompok, dan pengembangan pasar. Disamping itu juga perlu diberikan kesempatan kerja lapangan untuk mencoba mempraktekkan teori melalui pengembangan jaringan rintisan.

Menghadapi tantangan globalisasi, UMKM harus diberdayakan agar mampu bersaing dengan pelaku bisnis lainnya baik dari dalam maupun luar negeri-salah upaya penguatan daya saing UMKM adalah melalui pembentukan jaringan usaha (business networks). Di samping untuk penguatan daya saing, jaringan usaha juga bermanfaat untuk meningkatkan skop ekonomi, efisiensi, pengelolaan bisnis yang efisien, dan memperluas pangsa pasar.

Untuk mendorong tumbuh kembangkan jaringan usaha ini, sebagai langkah awal yang perlu dilakukan adalah merubah budaya bisnis (business culture). Setelah tumbuh kesadaran untuk melakukan kerjasama, maka perlu disiapkan para pialang (brockers) yang nantinya menyematani pihak-pihak yang akan melakukan kerjasama usaha. Guna memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi para pialang, maka pelatihan dengan praktek lapang harus menjadi pendukung upaya penguatan tersebut.⁸⁴

3. Ketahanan UMKM Menghadapi Krisis Ekonomi

Ekses lanjutan krisis finansial di Amerika Serikat (AS) yang terjadi menjelang akhir 2008 belum bisa dipastikan, terutama pengaruhnya terhadap sektor usaha kecil dan menengah di Indonesia.

Tetapi dari pelajaran krisis tahun 1997 dapat dilihat tumbangannya imperium konglomerasi membuat indikasi di atas semakin kuat. Bahwa sosok kerajaan bisnis yang dibangun di atas fondasi semu dan tumpukan utang, menjadi tidak berdaya menghadapi krisis ekonomi. Sampai titik ini pun, pemerintah nampaknya belum juga bangkit kesadarannya, bahwa menyelamatkan sektor modern dengan cara “habis-habisan” (*all out* dan *at all cost*) seperti yang terus dilakukan selama ini mengandung konsekuensi yang teramat riskan. Pemerintah masih terobsesi dan selalu disugesti seakan-akan hanya dengan sektor modern itulah bangsa berdaulat ini dapat kembali bangkit dari keterpurukannya.

Di luar semua itu, sesungguhnya terdapat kekuatan yang luar biasa yang justru telah menyelamatkan negeri ini dari kebangkrutannya, yaitu ekonomi rakyat. Di atas kertas, perekonomian bangsa ini seharusnya sudah “gulung tikar” sejak angka-angka statistik ekonomi pada periode krisis (1997-1999) menunjukkan kecenderungan yang terus memburuk. Nyatanya, kondisi “sekarat” itu hanya terjadi pada sektor-sektor yang memang mampu tercatat dan terefleksikan dalam angka-angka statistik itu. Di luar angka-angka itu, yang tidak mampu dicatat oleh sistem statistik yang ada, sesungguhnya masih menyimpan potensi, kekuatan, dan daya tahan yang sangat besar.

Akankah pemerintah masih terus-menerus menutup mata terhadap eksistensi ekonomi rakyat? Atau akan terus-menerus meyakini wacana yang selalu digembar-gemborkan oleh para ekonom Neo Klasik bahwa pertumbuhan yang terjadi saat ini adalah karena sumbangan konsumsi (*driven consumption*) orang-orang berduit?. Kiranya sejarah telah membuktikan, bahwa memuja dan memanjakan sektor modern secara “membabi-butu” hanya akan menghasilkan konklusi akhir yang menyedihkan, yang rasa pahitnya tidak hanya dikecap oleh sekelompok orang, tetapi seluruh komponen bangsa ini akan turut merasakannya..⁸⁵

Pelaku UMKM memang tangguh menghadapi krisis 10 tahun lalu. Sektor ini mampu menempatkan diri sebagai katup pengaman bagi perekonomian nasional. Noer Soetrisno mempunyai catatan mengenai jumlah UMKM sebelum dan perkembangannya sesudahnya

Comparison of SE And ME Before And After Crisis⁸⁶

	Group	1997	2001*
No Establishment	SE	39.70 million	40.13 million
	ME	64,50 thousand	57.70 thousand
Share in GDP	SE	40.45 %	39.40 %
	ME	17.40 %	15.34 %
Share in Labour	SE	87.62 %	88.69 %
	ME	11.78 %	10.85 %
Value Added/ Enterprise	SE	Rp. 6.40 million	Rp. 13.70 million
	ME	Rp. 1.81 billion	Rp. 3.55 billion
	BE	Rp. 126.13 billion	Rp. 288.67 billion
Share in Export	SE	2.17 %	3.37 %
	ME	23.82 %	10.93 %

Source: CBS

Note: (SE) for Small Enterprises
(ME) for Medium Enterprises
(BE) for Big Enterprises

Data-data tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa UMKM memiliki kemampuan untuk menjadi pilar penting bagi perekonomian masyarakat dalam menghadapi terpaan krisis ekonomi. Hal ini tidak lepas dari kemampuan UMKM untuk merespon krisis ekonomi secara cepat dan fleksibel dibandingkan kemampuan usaha besar⁸⁷

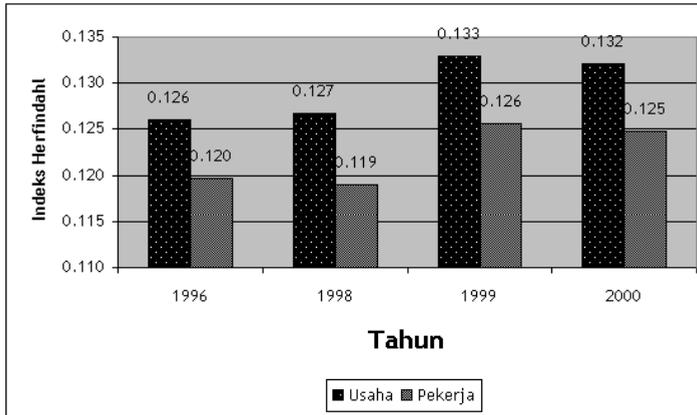
Meski gejala ekonomi tahun ini tidak di kawasan regional, dampaknya tetap sama.. Krisis ekonomi, apalagi yang sangat parah, tentu telah menyulitkan masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam hal ini bukanlah hal yang mengejutkan kalau pengangguran, hilangnya penghasilan serta kesulitan memenuhi kebutuhan pokok merupakan persoalan-persoalan sosial yang sangat dirasakan masyarakat sebagai akibat dari krisis ekonomi.⁸⁸

Sejak terjadi krisis ekonomi 1997, UMKM memainkan peran dalam mengatasi persoalan pengangguran (ketenagakerjaan). Data yang ada menunjukkan bahwa peran tersebut cukup penting. Dalam tulisan ini dapat diamati perkembangan UMKM dengan penyerapan tenaga kerja pada saat krisis 1997

Data yang digunakan adalah indeks Herfindahl yang diterapkan baik

terhadap data unit usaha maupun jumlah pekerja UMKM. Hasil perhitungan indeks Herfindahl tersebut disajikan berikut ini

Gambar 3. Tingkat Konsentrasi Spasial UKM (Indeks Herfindahl), 1996-2000



Sebelum krisis, tingkat konsentrasi spasial unit usaha UMKM adalah 0,126. Sebagai perbandingan, indeks Herfindahl industri manufaktur Indonesia tahun 1996 adalah 0,190 (Sjöberg dan Sjöholm, 2002). Hal ini tidak berubah banyak pada satu tahun setelah terjadi krisis ekonomi. Namun pada tahun 1999 konsentrasi spasial unit usaha UMKM mengalami peningkatan cukup tinggi dan belum menurun secara berarti pada tahun 2000. Namun jika dilihat dari tenaga kerja, setelah krisis justru terjadi penurunan tingkat konsentrasi spasial kendati relatif kecil. Tahun 1999 dan 2000, indeks Herfindahl pekerja UMKM meningkat menjadi lebih dari 0,12.

Sementara itu, banyak diungkapkan bahwa UMKM memiliki peran penting bagi masyarakat di tengah krisis ekonomi. Dengan memupuk UMKM diyakini pula akan dapat dicapai pemulihan ekonomi⁸⁹. Hal serupa juga berlaku bagi sektor informal. Usaha kecil sendiri pada dasarnya sebagian besar bersifat informal dan karena itu relatif mudah untuk dimasuki oleh pelaku-pelaku usaha yang baru. Pendapat mengenai peran UMKM atau sektor informal tersebut ada benarnya setidaknya bila dikaitkan dengan perannya dalam meminimalkan dampak sosial dari krisis ekonomi khususnya persoalan pengangguran dan hilangnya penghasilan masyarakat.

UMKM boleh dikatakan merupakan salah satu solusi masyarakat untuk tetap bertahan dalam menghadapi krisis yakni dengan melibatkan diri dalam aktivitas usaha kecil terutama yang berkarakteristik informal. Dengan hal ini maka persoalan pengangguran sedikit banyak dapat tertolong dan implikasinya adalah juga dalam hal pendapatan. Bagaimana dengan anjloknya pendapatan masyarakat yang tentu saja mengurangi daya beli masyarakat terhadap produk-produk yang sebelumnya banyak disuplai oleh usaha berskala besar? Bukan tidak mungkin produk-produk UMKM justru menjadi substitusi bagi produk-produk usaha besar yang mengalami kebangkrutan atau setidaknya masa-masa sulit akibat krisis ekonomi. Jika demikian halnya maka kecenderungan tersebut sekaligus juga merupakan respon terhadap merosotnya daya beli masyarakat.

Secara akal sehat memandang kondisi ini tentunya ada sesuatu yang salah dalam mengurus negara. Karena manusia dengan segala kelebihan yang dimilikinya merupakan objek yang harus bertanggung jawab terhadap hal ini. Setiap orang berpotensi untuk menjadi kaya, kenapa? Karena kekayaan sudah ada pada diri kita, mungkin ini yang pertama harus kita syukuri. Namun, ketika kita melihat dengan kaca mata dunia bahwa kaya itu adalah terpenuhinya segala kebutuhan hidup. Setuju atau tidak atas definisi ini tidaklah begitu penting untuk diperdebatkan, tapi yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana mengubah yang masih miskin menjadi kaya.

Kalaulah di Bangladesh ada Grammen Bank sebagai solusi, yang didirikan oleh Muhammad Yunus, seorang penerima hadiah nobel perdamaian dunia karena telah berhasil mengurangi jumlah kemiskinan di negaranya Maka di Indonesia jawabannya tidak lain adalah dengan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

UMKM memang menjadi dasar pengembangan perekonomian baik secara mikro maupun makro. Karena bisa dilatar belakangi oleh berkurangnya jumlah lahan pertanian, menyempitnya lapangan usaha, ketatnya persaingan hidup, dan lain-lain. Dari ketidakmampuan berbagai sektor perekonomian lainnya sehingga peluang ini mampu diisi oleh UMKM. Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah membuat empat kelompok bidang usaha yang ada pada UMKM yaitu: perdagangan, industri pertanian, industri non

pertanian dan aneka jasa.⁹⁰

Pembangunan ekonomi yang bertumpu pada segelintir orang atau kelompok untuk mengejar pertumbuhan yang tinggi dengan harapan terjadinya penyesuaian ke bawah tidak pernah terwujud. Justru sebaliknya yang terjadi, kemiskinan dan tingkat pengangguran bertambah terus setiap tahun. Sektor usaha kecil dan menengah yang diakui dunia mampu menjadi penopang ekonomi nasional tidak diperhatikan selama ini dan semakin tersisih dalam persaingan. Untung saja terjadi krisis yang menimpa bangsa ini pada pertengahan tahun 1997, membuat kita beralih memberikan perhatian pada UMKM. Pertanyaannya sudahkah kita betul-betul memberikan perhatian yang penuh pada UMKM?. Inilah yang harus diwujudkan terlebih lagi menghadapi tantangan yang semakin berat ke depan dalam era globalisasi dan otonomi daerah. Usaha kecil dan menengah harus mampu bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya, baik di dalam dan luar negeri.

Harus disadari bahwa keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa diabaikan. Krisis moneter yang berawal pada pertengahan Juli 1997 dan merembet pada Krisis ekonomi, politik dan sosial atau lebih dikenal dengan nama krisis multidimensi telah membawa berkah tersendiri bagi kehidupan UMKM. Kalau di masa lalu - baca jaman Orde Baru - kehadiran UMKM sering dipinggirkan, kini telah diakui oleh semua pihak, khususnya pemerintah, untuk mendapatkan perhatian khusus. Kebijakan masa lalu yang berorientasi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan pemerataan hasil-hasil pembangunan telah dirasakan keliru. Orientasi pada pertumbuhan tersebut, ternyata tidak berhasil mengurangi jurang kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin, antara wilayah barat dengan wilayah timur atau antara pelaku bisnis kecil - baca pengusaha kecil dan menengah dengan pelaku bisnis besar - baca konglomerat.

Kisah masa lalu dan krisis multidimensi yang terjadi selama ini telah membawa perubahan mendasar pada paradigma pembangunan nasional. Pemusatan ekonomi tidak lagi menjadi prioritas; justru sebaliknya kesempatan yang seluas-luasnya harus diberikan kepada semuanya tanpa harus mendorong suku, agama, ras, dan golongan. Ini berarti kesempatan bagi berkembangnya

UMKM semakin terbuka. UMKM yang menguasai 99,99% dari seluruh usaha nasional harus diberdayakan agar mampu berperan lebih nasional harus diberdayakan agar mampu berperan lebih besar dalam perekonomian nasional. Mereka, yang kini jumlahnya besar tersebut mampu menyerap lebih dari 99% angkatan kerja saat ini harus mampu memberikan kontribusi yang besar juga dalam ekspor dan Produk Domestik Bruto (PDB). Saat ini mereka masih menyumbang tidak lebih dari 20% dalam ekspor dan 59.36% dalam PDB. Kalau dilihat dari perjalanan negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Italia dan Taiwan yang sebagian besar ekonominya di dukung oleh UKM, maka kita harus berupaya mengembangkan UMKM agar mampu berkiprah lebih besar dalam perekonomian nasional.

Pada negara-negara maju tersebut diatas, peran UMKMNya sudah melebihi peran Usaha Besar. Dalam ekspor, misalnya sudah lebih dari 55% merupakan kontribusi UMKM di negara-negara tersebut. Bahkan di Italia, peran UMKM dalam ekspor sudah mencapai lebih dari 75%.

Pertanyaan yang mungkin muncul adalah apakah hal ini bisa dilakukan oleh UMKM Indonesia? untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus optimis karena kita memiliki potensi sangat besar untuk dikembangkan oleh UMKM. UMKM harus didorong mengembangkan usahanya dengan berdasarkan sumberdaya lokal dan berorientasi ekspor. Dengan strategi pengembangan usaha berorientasi ekspor dengan menggali dari potensi sumberdaya lokal yang tersedia, khususnya pada sektor agrobisnis/agroindustri ini berarti kita telah mengembangkan “*comparative advantage*” untuk dikembangkan menjadi “*competitive advantage*”. Kalau hal ini berhasil diwujudkan, maka UMKM kita akan mampu bersaing menghadapi pasar dan investasi bebas pada era global mendatang.

4. Penguatan UMKM dalam Gempuran Krisis Global

Dalam menghadapi krisis kapitalisme global yang secara periodik akan selalu hadir, UMKM sebagai salah satu pelaku ekonomi perlu menyiapkan diri dan mendapatkan perhatian dari semua pihak. Tidak hanya pemerintah, namun juga pelaku usaha besar, masyarakat secara umum dan pelaku UMKM sendiri. Sinergi ini sangat diperlukan untuk menguatkan eksistensi UMKM

dalam gempuan krisis global baik sekarang maupun yang nanti (pasti) akan datang. Untuk itu kita perlu menggali berbagai potensi dan keunikan dari UMKM di Indonesia, agar dalam merumuskan berbagai kebijakan atau program dapat menunjang UMKM secara optimal.

a. Strategi Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan UMKM merupakan pekerjaan yang sangat besar dan rumit, oleh sebab itu apa-apa yang dilakukan pemerintah melalui pelaksanaan berbagai program langsung adalah bersifat stimulan untuk mendorong UMKM agar secara mandiri dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi. Dari masalah pokok yang dihadapi oleh UMKM di atas, juga tidak mungkin semuanya dimasuki oleh pemerintah, karena pemerintah sebagai unsur penyeimbang hanya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pada hakekatnya dapat mendorong pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara optimal. Banyak hal-hal yang menjadi kendala dalam pemberdayaan UMKM tetapi berada di luar jangkauan kewenangan pemerintah, atau pemerintah juga perlu mempertimbangkan unsur-unsur lainnya dalam mengeluarkan kebijakan untuk mendorong UMKM dari aspek tersebut. Sejalan dengan uraian di atas dapat dikemukakan konsepsi Strategi Pemberdayaan UMKM untuk mengantisipasi iklim usaha yang tidak kondusif seperti Bagan 1 di samping:⁹¹

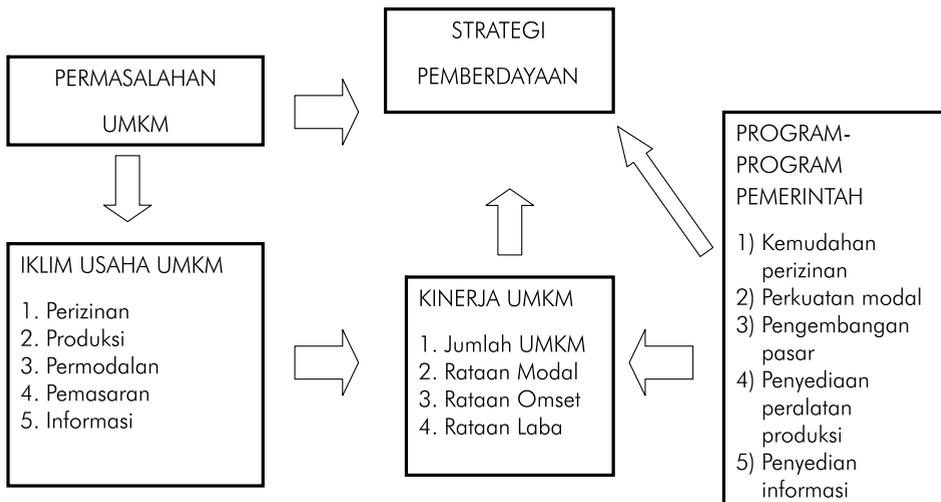
Menyadari akan posisi penting dan strategisnya usaha kecil dan menengah (UKM) termasuk usaha mikro berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintahan. Kabinet Indonesia Bersatu telah menetapkan Pembangunan UKM termasuk koperasi sebagai program prioritas dan telah diformalkan dalam bentuk Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 2005 tentang “Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2004-2009”.⁹²

Pada Bagian 1V dari Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, yakni Bab 20 secara khusus memuat “Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,” yang menjadi acuan pemerintah untuk pemberdayaan koperasi dan usaha Mikro, kecil dan menengah selama 5 tahun ke depan.⁹³

Bagaimana penjabaran dari Bab 20 tersebut, khususnya menyangkut

strategi penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui kerjasama kemitraan akan diuraikan pada bagian berikut ini:⁹⁴

Sebagaimana telah diketahui bersama, sejak krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 dan telah berkembang menjadi krisis ekonomi dan multi dimensi, pertumbuhan ekonomi nasional relatif masih rendah, yang mengakibatkan masalah-masalah sosial mendasar belum terpecahkan.



Bagan Strategi Pemberdayaan UMKM

Permasalahan utama yang dihadapi adalah meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Pada tahun 2004, jumlah pengangguran terbuka mencapai 9,5 juta jiwa atau 9,5 persen dan setiap tahunnya jumlah angkatan kerja baru bertambah sekitar 2,5 juta orang sehingga pada tahun 2006 jumlah pengangguran semakin bertambah menjadi 10,9 juta atau 10,3% dari angkatan kerja yang ada. Demikian juga halnya masalah kemiskinan, jumlah penduduk miskin pada tahun 2004 sebesar 16,6% atau sekitar 36,1 juta jiwa dan telah bertambah menjadi 39,05 juta atau 17,75% pada tahun 2006.

Kedua permasalahan ini, secara bertahap harus mampu kita kurangi guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana amanat UUD 1945. Oleh karena itu, selama 5 tahun ke depan agenda prioritas pembangunan nasional ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, serta

meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk tujuan yang terakhir ini, maka proses pembangunan ke depan diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat secara luas yang berdasarkan pada semangat kerakyatan, kemartabatan, dan kemandirian.

Dalam kaitan ini, upaya pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah menjadi sangat penting dalam mengusung proses perubahan. Ke depan, khususnya dalam menanggulangi masalah pengangguran dan kemiskinan.

Pemerintahan Indonesia Bersatu telah sepakat akan berusaha untuk menurunkan tingkat pengangguran menjadi 5,1% dan tingkat kemiskinan penduduk menjadi 8,2% pada tahun 2009. Kemiskinan dan pengangguran diatasi dengan strategi pembangunan ekonomi yang mendorong pertumbuhan yang berkualitas dan berdimensi pemerataan melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat.⁹⁵

Makna yang tersirat dan tersurat dalam arah kebijakan pemerintah dalam pengembangan UMKM tersebut pada intinya ditujukan untuk (1) mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, (2) penyerapan tenaga kerja, (3) peningkatan daya saing dan (4) penanggulangan kemiskinan.

Oleh karena itu, strategi pengembangan UMKM ditujukan dalam rangka mewujudkan keempat hal tersebut diperlukan beberapa langkah, yaitu:⁹⁶

Pertama, menumbuhkan iklim usaha yang kondusif. Penumbuhan iklim usaha yang kondusif ditujukan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan perlu usaha dalam mengembangkan usahanya, termasuk akses kepada sumberdaya produktif. Dalam kaitan ini, tidak ada perbedaan perlakuan antara usaha besar dan UMKM semuanya diperlakukan sama secara proporsional. Penumbuhan iklim usaha kondusif ini lebih banyak ditujukan dalam aspek regulasi dan deregulasi. Pengaturan yang memang diperlukan diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Demikian juga, kalau ada peraturan yang menghambat akan disempurnakan atau barangkali ditiadakan/deregulasi. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dipandang masih dibutuhkan untuk pengembangan UMKM, antara lain: UU tentang UMKM, UU Lembaga Keuangan Mikro, UU Penjaminan Kredit dan peraturan yang menyangkut pengembangan Sistem

Pelayanan Perizinan Satu Pintu. Sedangkan beberapa peraturan yang dipandang menghambat perkembangan UMKM umumnya lebih banyak di daerah dalam bentuk Perda setelah otonomi daerah diterapkan, seperti Perda Perdagangan Antar Pulau untuk kelapa dan kayu yang menghambat berkembangnya UMKM. Peraturan daerah ini sering membebani UMKM sehingga daya saingnya menurun.

Kedua, meningkatkan akses pada sumberdaya financial. Masalah financial merupakan masalah klasik bagi UMKM. Kalau ada 100 Pelaku usaha mikro dan kecil khususnya ditanya masalahnya, barang kali 70-80 orang dari mereka menjawab permodalan. Padahal, kalau ditelaah secara mendalam masalah utamanya bukanlah permodalan dan bahkan sering akar masalahnya akses pasar. Karena pasarnya tidak ada, maka barang yang diproduksi tidak terjual.

Akibatnya, para pelaku bisnis UMKM ini merasa modalnya kurang. Untuk meningkatkan akses pada sumberdaya financial ini, pemerintah bersama dengan Bank Indonesia mendorong pihak perbankan agar menyusun rencana bisnisnya setiap tahun. Sejak empat tahun terakhir, melalui peran BI, Perbankan selalu menyampaikan rencana kerja tahunannya untuk pembiayaan UMKM. Pada tahun 2003, rencananya bisnis perbankan yang ditujukan bagi UMKM Sebesar Rp. 42,4 trilyun dan yang berhasil di serap oleh UMKM hanya sebesar Rp. 27 trilyun atau 63,82% Karena penyerapan kecil pada tahun 2003, maka pada tahun 2004 rencana bisnis perbankan untuk UMKM hanya Rp.38,5 trilyun dan dari plafon ini ternyata realisasinya sebesar 72,03 trilyun atau 187%. Adapun untuk tahun 2005, rencana bisnis perbankan untuk UMKM adalah sebesar Rp.60,4trilyun dan tahun 2006, sebesar RP.68,1 trilyun dengan realisasi Rp 58,02trilyun untuk tahun 2007,rencana bisnis perbankan untuk UKM adalah sebesar Rp87,8 trilyun. Dalam rangka peningkatan akses pada financial ini. Selain melalui perbankan, pemerintah juga mendorong pengoptimalan pemanfaatan laba 1-3% BUMN. Di samping itu, pemerintah juga mengalokasikan sebagai APBN untuk perkuatan KSP/USP guna meningkatkan kemampuannya dalam melayani kebutuhan pendanaan bagi usaha mikro dan kecil anggotanya antara lain melalui program PERKASSA (Perempuan keluarga sehat dan

Sejahtera) dan P3KUM (Program Pmbiyayan Produktif Koperasi dan Usaha mikro).

Ketiga, meningkatkan akses pasar. Secara umum, UMKM biasanya selalu sanggup memproduksi berbagai produk. Namun, Kualitas, desain dan harga semakin kurang cocok untuk selera dan kemampuan konsumen. Masalah ini berdampak pada kurang lakunya produk UMKM, baik dipasar domestik dan internasional. Untuk mengatasi hal ini, maka perlu ada pelatihan keterampilan dan manajemen untuk meningkatkan kemampuan UMKM dalam memproduksi produk yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Disamping pelatihan temu bisnis dan eksebisi di dalam dan luar negeri perlu terus digalakan dalam rangka memperkenalkan produk yang dihasilkan oleh UMKM. Pada sisi lain, pengembangan lembaga pendukung pemasaran produk seperti *trading house* atau rumah dagang dan pusat-pusat pemasaran produk UMKM lainnya seperti *trading board* perlu terus dikembangkan, mulai dari tingkat kabupaten / kota, propinsi, pusat dan luar negeri.

Keempat, meningkatkan kewirausahaan dan kemampuan UMKM. Jiwa dan semangat kewirausahaan yang dimiliki oleh UMKM Indonesia secara umum masih rendah. Rendahnya kewirausahaan UMKM dapat dilihat dari kurangnya kreativitas dan inovasi serta keberanian dalam pengambilan keputusan. Secara umum, UMKM Indonesia besar karena ketergantungan dari program pemerintahan. hal ini tampak sebelum Indonesia terkena krisis multi dimensi. Ketika itu, tampak sekali, banyak usaha menengah dan besar tidak mampu meneruskan bisnisnya karena terlilit hutang luar negeri. Baik hutang modal dan bahan baku impor. Oleh karena itu kedepan kita harus mampu mengembangkan wirausaha-wirausaha yang berbasis pada sumber daya lokal atau *resource based*. Untuk pengembangan usaha ini pemerintah harus mampu mengembangkan kewirausahaan ini, pemerintah sudah dan akan terus mendorong pengembangan incubator bisnis, baik di perguruan tinggi maupun dunia bisnis, selain itu pengembangan modal ventura juga harus digalakkan agar para pengusaha dapat memperoleh akses permodalan awal melalui modal ventura.

Kelima, pemberdayaan usaha skala mikro. Program ini ditujukan untuk

meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi sector informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin dalam rangka memperoleh pendapatan yang tetap, melalui upaya peningkatan kapasitas usaha, sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan siap untuk tumbuh serta bersaing. Program ini mencakup:

- 1) Penyediaan kemudahan dan pembinaan dalam mulai usaha, termasuk dalam perizinan, lokasi usaha, dan perlindungan usaha dari pungutan informal;
- 2) Penyediaan skim-skim pembiayaan alternative tanpa mendistorsi pasar, seperti sistem bagi hasil dari dana bergulir, sistem tanggung renteng, atau jaminan tokoh masyarakat setempat sebagai pengganti anggunan;
- 3) Penyelenggaraan dukungan teknis dan pendanaan yang bersumber dari berbagai instansi pusat, daerah, dan BUMN yang lebih terkoordinasi, professional dan institusional;
- 4) Penyediaan dukungan terhadap upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan (LKM);
- 5) Penyelenggaraan pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, serta bimbingan teknis manajemen usaha;
- 6) Penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung bagi usaha mikro serta kemitraan usaha;
- 7) Fasilitas dan pemberian dukungan untuk pembentukan wadah organisasi bersama antara usaha mikro, termasuk pedagang kaki lima, baik dalam bentuk koperasi maupun asosiasi usaha lainnya, dalam rangka meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha;
- 8) Penyediaan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan perajin melalui pendekatan pembinaan sentra-sentra produksi/klaster disertai dukungan penyediaan infrastruktur yang makin memadai; dan
- 9) Penyediaan dukungan dan kemudahan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif bagi usaha mikro/sector informal dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi pedesaan, terutama di daerah tertinggal dan kantong kantong kemiskinan.

Salah satu sinergitas yang telah banyak dilakukan diluar negeri, adalah

kerjasama atau kemitraan antara UMKM dengan usaha besar. Kemitraan yang ideal dilandasi adanya keterkaitan usaha, melalui prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, saling menguntungkan. Praktek ini telah banyak dikembangkan, baik dalam pola sub-kontrak, wara laba, inti-plasma, dan pola-pola kemitraa lainnya. Persahaan besar yang bergerak di sector otomatis seperti Toyota, Honda, disektor elektronik seperti sony, Panasonic merupakan beberapa contoh dalam penerapan pola-pola kemitraan.

Melalui pola kemitraan ini, diharapkan terjadinya alih teknologi dan mangemen dari perusahaan besar kepada yang lebih kecil. Di samping itu, pola kemitraan akan mendorong adanya peningkatan daya saing UMKM. Kemitraan akan membangun adanya kepastian pasokan produk, karenanya diatur dalam kesepakatan dalam bentuk kontrak.

Selain kemitraan yang didasarkan pada inter-relasi atau keterkaitan usaha, di banyak Negara juga dikembangkan program kemitraan yang di dorong kerana kepedulian perusahaan besar untuk membina perusahaan kecil, khususnya usaha mikro dan kecil. Pola kepedulian perusahaan besar dalam bentuk social seperti yang sering disebut corporate social responsibility telah banyak dikembangkan. CSR sebagai salah satu solusi kemitraan dapat memperkuat daya saing UMKM. Kemitraan kuat akan mendorong UMKM kuat.

b. Keunikan Budaya Sebagai Kekuatan UMKM

Ada berbagai analisis tentang hubungan antara perilaku ekonomi dan budaya, yang sering terlihat mengenai kemampuan ekonomi kelompok etnis-etnis tertentu dalam berbisnis.

Dalam literatur tentang Jawa misalnya, terdapat asumsi tersembunyi mengenai perilaku bisnis para pengusaha Jawa. Kelompok-kelompok orang Jawa yang berdagang di pasar, di antara mereka adalah pedagang ikan asin di Semarang, Pengrajin perhiasan emas di Kota Gede, pedagang batik dari Solo, dan pedagang tembakau dari Magelang dan Madura.⁹⁷

Bagi masyarakat Jawa, bahwa setiap orang menginginkan kemajuan material atau ekonomik, seperti makan yang lebih enak, rumah yang lebih baik, kendaraan yang lebih cepat, tampak jelas dan melekat pada setiap orang

sehingga tidak perlu dibuktikan atau dipikirkan lagi.

Menginginkan kemajuan material, tidak mendapatkan penilaian yang tinggi dan kadang-kadang dinilai rendah. Menolong seseorang dikaitkan dengan pamrih (termasuk pahala), bekerja yang dikaitkan dengan pamrih (termasuk upah), hadiah dan lain-lain kontra prestasi) di nilai rendah, cinta yang dikaitkan dengan pamrih dan lebih-lebih materi yang dapat dikuantifikasi dinilai rendah.⁹⁸

Ada yang mengatakan bahwa budaya Jawa hanya sesuai untuk menjadi pedagang tetapi tidak untuk menjadi kapitalis. Jennifer Alexander ketika mengamati nilai-nilai budaya Jawa dalam hubungannya dengan kewirausahaan dari pendekatan historis. Pemahamannya bahwa nilai-nilai Jawa membuat orang Jawa hanya bisa berdagang, tapi tidak bisa mengakumulasikan modal, atau dengan kata lain, orang Jawa hanya bisa menjadi pengusaha tapi tidak bisa menjadi kapitalis, dia nisbikan sendiri dengan mengajukan pertanyaan mengenai faktor-faktor apa lagi yang menyebabkan orang Jawa sulit melakukan akumulasi modal.⁹⁹

“if we accept the claim that Javanese traders operate in markets in disembodied, entrepreneurial fashion, it might be argued that they are not entrepreneurs because their business do not expand and seldom survive over generations. In other words, Javanese are engaged in commerce but not in capital accumulation; they are entrepreneurs, perhaps, but not capitalist. Although this argument is technically correct, in my view it misses mark. The main reason Javanese, by and large, remained mired in petty commerce until very recently appropriating the finance and labor of others. In other words, the markets within which they operated were not structured to facilitate capitalist accumulation; their subordinate position in the colonial and immediate postcolonial economic made it difficult for them to construct “modern” forms of economic organization, and their social organization lacked templates for hierarchical, extractive, economic relationship”¹⁰⁰.

Namun esensi dari kesimpulan ini masih dipertanyakan kembali. Kemungkinanpun menjadi terbuka. Menjadi tidak jelas apa yang akan terjadi apabila hambatan pasar tersebut bisa dihilangkan, apakah orang Jawa bisa menjadi kapitalis atau tetap sebagai pengusaha.¹⁰¹

Yang pasti ada latar belakang kebudayaan orang Jawa yang menjunjung

prinsip ekonomi dan rasionalitasnya lebih tinggi. Sifat rasional atau efisien tersebut digunakan masyarakat Jawa dalam berbisnis. Misanya sebagai contoh ada kata kata:

- 1) Ora ilok
- 2) Kuwalat
- 3) Bukak Dhasar
- 4) Tuna Satak Bathi Sanak
- 5) Ora lumrahe,

Kata-kata diatas sering kali menjadi dasar filosofis etia bisnis orang Jawa. Orang Jawa tidak mau menipu karena tak *kuwalat* (balasan dosa). Mereka tidak mau mengambil keuntungan terlalu berlebihan karena *ora ilok* (tidak pantas). Ketekunan mengawali usaha sering menggunakan kata *bukak dhasar* yang artinya harus dilakukan dengan sabar dan tekun. Begitu pula ketaatan dalam penggunaan hukum kebiasaan dengan menjaga perilaku tidak *ora lumrahe*. Atau untuk menjaga hubungan dengan relasi bisnis sering kali orang Jawa tidak mengambil untung banyak agar pelanggan tetap setia, istilah ini adalah *Tuna Satak Bathi Sanak*.

Disamping menggunakan akal, penggunaan perasaan dalam masyarakat Jawa mendapatkan penilaian yang tinggi. Orang yang telah dewasa dan orang pintar adalah orang yang dalam pertimbangan maupun dalam melakukan pekerjaan penggunaan perasaannya sangat menonjol. *Tanggap rasa, lantip ing prangaita, sinamuning samudera sesadoning adunmanis, nutupi babahan nawa sanga* dan lain-lain sekedar beberapa contoh penggunaan perasaan di samping harus digunakan akal. Pengaruh kebudayaan barat akan mendapat penilaian negatif apabila mengesampingkan penggunaan perasaan. Meskipun telah menggunakan akal lebih baik dan lebih cermat.¹⁰² Untuk mempelajari dan melaksanakannya dibutuhkan persyaratan atau laku tertentu seperti: *tapa brata, nglakoni, cegah dhahar lawan guling* dan lain-lain.¹⁰³

Hal ini telah dibuktikan bahwa keberhasilan para pengusaha ini bertahan diakibatkan adanya nilai-nilai budaya yang dianut dan diimplementasikan dalam bisnis mereka. Fenomena ini sering tercermin dalam hubungan bisnis antara pengusaha dengan mitra kerja atau karyawannya.

Beberapa Pengusaha UMKM di Jogja yang berada di sentra industri

Gerabah Kasongan atau sentra kerajinan perak di Kota Gede memberi beberapa kisah, diantaranya dapat disimak berikut ini

- 1). Pengusaha UMKM dalam menjalin hubungan bisnis dengan mitra usaha baik lokal maupun asing didasarkan atas *Roso*, (*feeling*). Mereka tidak langsung saja menandatangani kontrak kerjasama atau jual beli sebelum mereka mengenal betul secara batiniah bahwa partner ini adalah rekan yang cocok atau tidak. Persoalan kontrak yang sering langsung disodorkan oleh mitra asing kadang tidak menjadi perhatian, walaupun nilainya besar. Mereka akan menandatangani kontrak kalau hatinya merasa cocok. Apabila sudah cocok secara batiniah maka hubungan bisnis menjadi hubungan budaya antar manusia. Saling hormat dan fair dalam bisnis. Perihal ini menjadi sebuah kekuatan yang unik. Contoh misal ketika sentra gerabah Kasongan ini diluluh lantakan oleh gempa bumi pada tahun 2006. Partner asing mereka justru banyak memberikan bantuan
- 2). Hubungan kultural juga dijalin antara juragan (pemilik usaha) dengan karyawan mereka sebagai hubungan lahir batin. Hal-hal yang bersifat yuridis formal kadang tidak menjadi acuan yang pokok. Misalnya mengenai ketentuan upah minimum propinsi, banyak yang tidak diterapkan. Jaminan sosial, uang pensiun juga tidak pernah ada dalam kontrak kerja di antara mereka. Namun demikian apabila sang buruh membutuhkan biaya sekolah untuk anaknya atau biaya pengobatan maka sang juragan akan segera memberi bantuan dengan sertamerta. Tanpa perhitungan potong gaji atau hutang piutang. Hubungan mereka lebih ditekankan pada hubungan “kekerabatan” dibandingkan dengan hubungan kerja¹⁰⁴.

Berbeda halnya dengan orang China. Respon dari Asia timur untuk memodernisasikan teori-teori konvergensi ke arah budaya barat dipusatkan pada pernyataan bahwa *kunfusianisme*, yang ditafsirkan secara luas, menawarkan sumber-sumber daya budaya yang propandakan penerapan kapitalisme pasar.

Sedangkan pandangan yang berbeda adalah Pasca-confuciansisme, yang menekankan pada hubungan manusia dan keselarasan sosial berdasarkan pada gagasan belas kasih anak, dan paduan antara ketekunan dan fatalisme

yang mendunia. Gambaran umum tentang kebudayaan China berdasarkan ajaran-ajaran barat telah membentuk gagasan-gagasan barat tentang pertumbuhan ekonomi pasar di wilayah itu sepanjang abad ke-20.¹⁰⁵

Dalam kasus orang China Asia Tenggara tentunya benar bahwa sebagian besar mereka lebih berwatak wirausaha dalam kegiatan bisnis mereka dibandingkan penduduk pribumi. Hal ini dikemudian hari lebih diketahui dengan perusahaan keluarga; jaringan legendaris yang menjelajahi asia tenggara, yang saling menjalin berbagai perekonomiannya dan garis keturunan atau perkumpulan sesuku tempat kaum migran awal tergantung untuk saling dukung antar sesamanya.¹⁰⁶

Menurut pengamatan yang dilakukan oleh Benjamin Higinis bahwa ketika sebuah perekonomian berkembang dan banyak terbuka peluang-peluang ekonomi, bakat-bakat kewirausahaan tampaknya bermunculan betapapun tidak menjanjikan sistem nilai yang ada atau tersedianya suatu kerangka budaya.¹⁰⁷

Keberhasilan orang China Asia Tenggara seringkali dihubungkan dengan citra perusahaan yang legendaris, kerja keras, hemat, solidaritas keluarga, pendidikan, dan kebaikan-kebaikan neoconfucius dan kewirausahaan lainnya. Dapat diketahui bahwa orang China adalah pengusaha yang lebih baik dari orang Filipina karena keuntungan-keuntungan yang ada dalam struktur sosial, sosok keberhasilan orang China dalam berdagang tampak sekali terkait dengan budaya mereka.¹⁰⁸

Banyak praktek perdagangan yang dilakukan adalah bentuk-bentuk budaya yang berkembang di China dan disesuaikan dengan situasi kolonial dan imigran, sistem perbankan, siklus pemagangan, amat tergantung pada *xin-yong*. Bentuk-bentuk tertentu kemitraan, dan pinjaman dan berbagai bentuk perkumpulan pedagang adalah gambaran struktur sosial masyarakat China yang memberi keuntungan kompetitif ketika melakukan bisnis dengan orang Filipina, yang tidak memiliki lembaga-lembaga yang sama berkembangnya.¹⁰⁹

Pertanyaan yang ada adalah apakah keberhasilan dagang orang China Asia Tenggara dapat dijelaskan sepenuhnya atau sebagian besar menurut nilai-nilai mereka sendiri dengan apa yang disebut warisan budaya neo-

confucius.

Orang China yang datang ke Asia Tenggara hampir seluruhnya berasal dari kelas-kelas sosial yang telah menyerap budaya konfusius tinggi kelas mandirin di China. Kemanapun orang China perantauan berangkat, sama sekali bukan karena rasa hormat kepada konfusius, mereka membangun kelenteng-kelenteng sebagai persembahan kepada dewi-dewi dan kepada Budha dan bermacam *Bodhisatwa*.¹¹⁰

Bidang pekerjaan mereka menghasilkan nilai-nilai otonomnya sendiri dan bahwa, untuk keberhasilan dagang, mereka lebih membiasakan diri dengan para pedagang luar China daripada dengan kaum cendikiawan China sendiri. Kebiasaan dari pedagang mapan shang yang menyesuaikan diri dengan cara-cara dan sikap-sikap kapitalis modernlah yang membedakan mereka dan menjelaskan keberhasilan ekonomi mereka daripada tentang apa yang mereka terima dari nilai-nilai konfusius.¹¹¹

Dalam pandangan umum, orang China Singapura adalah manusia ekonomi yang paling sempurna, pengusaha alamiah yang cenderung mencari keuntungan pada setiap kesempatan, sebaliknya, orang melayu singapura tidak memiliki kemampuan, atau tidak tertarik, pada usaha-usaha kewirausahaan. Berdasarkan anggapan umum ini, para pejabat negara dan pemimpin masyarakat yang merisaukan persatuan dan kemajuan bangsa menyatakan bahwa jika orang China memiliki budaya bisnis, sedangkan orang melayu sebaliknya.¹¹² Hal ini mungkin karena berkat internasionalisasi nilai-nilai ekonomi seperti hemat, tekun dan perhitungan yang rasional adalah sangat menarik sebagai bukti. Seperti halnya keterlibatan yang luas orang Jawa pada tanah, keuangan, dan pasar tenaga kerja, sebagaimana keterlibatan orang Jawa dalam menjalankan bisnis besar.¹¹³

Masyarakat dengan tingkat solidaritas sosial yang sangat tinggi. Sebagian besar ekonom berasumsi bahwa formasi kelompok tidak tergantung pada kebiasaan etis, tetapi muncul secara alami mengikuti penegakan lembaga-lembaga hukum seperti hak-hak kepemilikan atau hukum kontrak dalam bisnis.¹¹⁴

Dalam literat yang lain Lawrence Friedman mencoba menjelaskan adanya 3 unsur dalam sitem hukum yaitu¹¹⁵:

- (1) *Legal substance*: yaitu sesuatu yang menjadi dasar dan isi dari sebuah hukum seperti norma, asas-asas, kaidah, doktrin, nilai nilai dan aturan perundangan
- (2) *Legal structure*: yaitu intitus yang diperlukan untuk membentuk dan melaksanakan bekerjanya dan penegakan hukum, seperti lembaga peradilan, lembaga legislatif, kepolisian dan birokrasi dan lainnya.
- (3) *Legal culture*: adalah sikap perilaku manusia dalam mengapresiasi keberadaan hukum. Kapan, dimana, bagaimana hukum dilaksanakan atau ditolak oleh masyarakat

Dalam kajian ini, misalnya saja hubungan bisnis yang dijalin antara pelaku UMKM dengan rekanan bisnis, pelanggan, kreditor, maupun pihak-pihak otoritas. Dalam hubungan hukum yang terjadi diantara mereka, apakah karena peraturan perundang-undangan atau hububungan kontraktual seringkali diterapkan berbeda, sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat tersebut. Inilah yang disebut dengan pengaruh budaya hukum.

Contoh kasus yang paling sering adalah mengenai penyelesaian sengketa dalam bisnis antara pengusaha lokal. Dalam kontrak sudah jelas tertulis masing masing hak dan kewajiban para pihak. Secara nrmatif seharusnya mereka akan saling tuntutan. Tetapi karena adanya udaya hukum, bisa saja penyelesaiannya justru di cari jalan keluar dengan negosiasi atau musyawarah yang mendasarkan asas kekeluargaan. Bahkan, kadang sama sekali tidak sesuai dengan kontrak yang mereka buat. Ini bisa terjadi karena masyarakat kita adalah bentuk masyarakat komunal.

Hal ini sangat berbeda dengan perilaku pengusaha asing, khususnya yang dari negara barat yang sifat nya individual. Begitu ada yang tidak beres dengan pelaksanaan perjanjian yang mereka buat, maka mereka segera mengajukan gugatan ke lembaga peradilan.

Sudah menjadi kebiasaan untuk menghindari dari pertimbangan-pertimbangan nilai ketika membandingkan kebudayaan-kebudayaan yang berbeda, tetapi dari sudut pandang ekonomi, kebiasaan-kebiasaan etis tertentu jelas merupakan kebajikan-kebajikan sedangkan kebiasaan etis lainnya tidak. Diantara kebajikan-kebajikan kultural yang mendasari tidak semua kebajikan-kebajikan memberi kontribusi pada pembentukan modal sosial.¹¹⁶

Teori tentang modal sosial menjelaskan adanya potensi sebagai daya aktual untuk mewujudkan hubungan persahabatan yang saling menguntungkan. Definisi tersebut menunjukkan modal sosial yaitu hubungan sosial yang memungkinkan individu untuk mengklaim akses terhadap sumber daya yang dipunyai oleh individu lainnya dalam asosiasi mereka. Prinsip seperti ini sudah dipunyai oleh bangsa Indonesia sejak dahulu yaitu budaya gotong royong¹¹⁷.

Budaya gotong royong menurut Fukuyama diartikan secara modern sebagai kebajikan sosial dalam membentuk saling percaya. Argumen yang kuat bisa diungkapkan bahwa kebajikan-kebajikan sosial adalah prasyarat bagi pengembangan kebajikan-kebajikan individual seperti etika kerja, karena yang kemudian bisa tumbuh subur dengan baik dalam konteks kelompokkelompok yang kuat-keluarga, sekolah, tempat kerja, yang dikembangkan dalam masyarakat¹¹⁸.

Kalau kita kembali pada pembahasan diatas mengenai karakteristik UMKM di Indonesia, maka para *founding fathers* Bangsa Indonesia sudah menekankan bahwa, kita punya kekuatan dalam menghadapi berbagai tekanan kolonialisme dan imperialialisme pada saat itu dengan menggunakan budaya gotong royong.

Pada saat ini pelestarian dan menggunakan budaya gotong royong dirasakan sangat perlu akan sangat efektif bagi UMKM dalam menghadapi gempuran krisis ekomomi baik sekaranag mapun yang akan datang. Inlah keunikan budaya yang menjadi kekuatan tak terlihat UMKM di Indonesia.

CATATAN AKHIR

- ² <http://3goldkoe.blogspot.com/2008/10/krisis-ekonomi-dunia-sepanjang-sejarah.html> “Krisis Ekonomi Dunia Sepanjang Sejarah” Sabtu, 11 Oktober 2008
- ³ Mukti Fajar, Gelombang PHK Massal, Harian Kedaulatan Rakyat, 18 Desember 2008
- ⁴ Frans Magnis Suseno, Pemikiran Karl Marx,..... hal 10
- ⁵ Garis Besar sejarah Amerika, BAB *New Deal dan Perang Dunia*, Buku Tanda Persahabatan Rakyat Amerika, Dep luar negeri Amerika Serikat,2004, hlm 289-292
- ⁶ Lee Drutman, op cit hlm 2
- ⁷ Bryan A Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, hlm 223

- ⁸ <http://id.wikipedia.org/wiki/Kapitalisme>
- ⁹ Hernando de Soto, *The Mystery of Capital*, Penerbit Qalam, hlm 2
- ¹⁰ Kent Greenfield dan Peter C. Kostant George,, "An Experimental Test Of Fairness Under Agency And Profit-maximization Constraints" (With Notes On Implications For Corporate Governance) *Washington Law Review*, November, 2003, hlm 1
- ¹¹ Landreth and Colander, *Profit Theory in Neoclassical Economics* http://economistsview.typepad.com/economistsview/2007/06/profit_theory_i.html
- ¹² Frank Knight,, *Risk, Uncertainty, and Profit*, (Hart, Schaffner & Marx; Houghton Mifflin Company,) 1921, hlm 11
- ¹³ Frank Knight, 1921, *Risk, Uncertainty, and Profit* Ibid, hlm 16
- ¹⁴ Frank H Knight dalam Landreth and Colander, *Profit Theory in Neoclassical Economics* http://economistsview.typepad.com/economistsview/2007/06/profit_theory_i.html
- ¹⁵ Bramantyo Djohanputro, 2006, *Manajemen Resiko korporat Terintegrasi: Memastikan Keamanan dan Kelangngan Perusahaan*, Penerbit PPM, hlm 14-17
- ¹⁶ Frank Knight, 1921, *Risk, Uncertainty, and Profit*, op cit hlm 17
- ¹⁷ Frank Knight, 1921, *Risk, Uncertainty, and Profit*, ibid hlm 17
- ¹⁸ Mengenai topik *corporate sustainability* akan dibahas lebih lanjut dalam bab tersendiri
- ¹⁹ Will Kymlicka, 2004, *Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus atas Teori-Teori Keadilan*,Pustaka Pelajar, Hlm 127-138
- ²⁰ K Berten, Op cit, hlm 120
- ²¹ Richard A Posner, *Economic Analysis of Law*, Fifth Edition, A Wolters Kluwer Company and Aspen Publisher, hlm 13
- ²² Milton Friedman, 1967, *Freedom and Capitalism* University of Chicago Press hlm, 119-132.. Lihat juga K Berten op cit hlm 137 -140
- ²³ Joseph Stiglitz, 2006, *Making Globalization Work: Menyasati Globalisasi Menuju Dunia Yang Lebih Adi*, PT Mizan Pustaka hlm 128-129
- ²⁴ Adam Smith, *An Inquiry into....* Op cit hlm 149
- ²⁵ Larry J. Obhof, Fall, 2003, *Why Globalization? A Look At Global Capitalism And Its Effects*, University of Florida Journal of Law and Public Policy, hlm 34.. Lihat juga Hernando de Soto, *The Mystery of Capital* op cit hlm 9-24 dikatakan oleh de Soto bahwa miskinnya negara negar dunia ketiga dikarenakan asset atau kekayaan yang mereka miliki tidak dikapitalisasikan, sehingga tidak mempunyai nilai tambah bagi perekonomian. Hal ini terjadi karena sulitnya mendapat status legal atas kekayaan tersebut.
- ²⁶ Max Webber, 2006, *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*, Pustaka Pelajar, hlm 21-22
- ²⁷ Yang dimaksud adalah: kemampuan seseorang membayar pinjaman dari hasil memutar uang pinjaman dalam kegiatan bisnis
- ²⁸ Joseph Stiglitz, 2006, *Making Globalization Work: Menyasati Globalisasi Menuju Dunia Yang Lebih Adi*, PT Mizan Pustaka hlm138-145
- ²⁹ Beth Stephens, 2002 *The Amorality Of Profit: Transnational Corporations And Human Rights*, Berkeley Journal of

- International Law, hlm 4-8, ... lihat juga Joseph Stiglitz, *Making Globalization Work* op cit, hlm 275- 286
- ³⁰ *Wikipedia Indonesia, ensiklopedia....* John Maynard Keynes mempunyai Ide yang radikal dan berdampak luas pada ilmu ekonomi modern. Ia terutama menjadi terkenal dengan karyanya; *The General Theory of Employment, Interest and Money* (1936) yang merupakan reaksi terhadap Depresi Besar Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Dalam karyanya Keynes menulis bahwa Pemerintah kadangkala harus menstimulasi pertumbuhan ekonomi, terutama pada saat konjungtur lemah.
- ³¹ Garis Besar sejarah Amerika, op cit, hlm 290-291
- ³² Mukti Fajar, 2005, *Kemiskinan Bangsa....*, op cit hlm 5
- ³³ Lee Drutman, op cit, hlm 2
- ³⁴ Garis Besar sejarah Amerika, op cit, 294-300, setelah ekonomi pulih, beberapa aturan tersebut dicabut dengan alasan tidak sesuai dengan konstitusi Amerika yang cenderung mendukung liberalisme ekonomi dan pasar bebas.
- ³⁵ Mubyarto, "Siklus Tujuh Tahunan Ekonomi Indonesia (1931-1966-2001-2006)", dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 16 No. 3, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- ³⁶ *Ibid.*
- ³⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/Krisis_finansial_Asia Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas "Krisis finansial Asia 1997"
- ³⁸ *Ibid*
- ³⁹ *Ibid*
- ⁴⁰ *Ibid*
- ⁴¹ Ihwan Sudrajat, "Beda Krisis 1997 dari Krisis Global" http://suaramerdeka.com/smcetak/index.php?option=com_content&view=article&id=308
- ⁴² Krisis Kapitalisme Dunia Saatnya Indonesia Bangkit dan Mandiri Jumat (4/4) di Jakarta.
- ⁴³ Francis Fukuyama, *The End Of History*.
- ⁴⁴ Chossudovsky, Michel (1997). *The Globalisation of Poverty: Impacts of IMF and World Bank Reforms*. London & New Jersey: Zed Books. Hal.332.
- ⁴⁵ Friedman, Milton, (1982), *Capitalism and Freedom: The Classic statement of Milton Friedman's Economic Philosophy*, The University of Chicago Press, Chicago. Hal.39
- ⁴⁶ Sumber Sritua Arif, Mubyarto, Hartojo Wignjowijoto
- ⁴⁷ Rawamangun, 20 Mei 2000, Direktur Pusat Studi Ekonomi Internasional, Lahir di Wonosobo, 2 Mei 1947, Sarjana Ekonomi Universitas Gajah Mada, 1973, Sekolah Tinggi Filsafat Drijarkara, Jakarta, 1974-1978.
- ⁵⁰ Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
- ⁵³ http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_teor_i_ekonomi, "Sejarah Teori Ekonomi", 20 september 2007
- ⁵⁴ (Tambunan, 1998).
- ⁵⁵ (Rachbini, 2001).
- ⁵⁶ (Triono, 2001):
- ⁵⁷ http://www.investorwords.com/2633/invisible_hand.html... Lihat secara lebih jelas dalam Adam Smith, 1965, *An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nation* (the Edwin Cannan Edititon), The Modern Library, NewYork,
- ⁵⁸ Dikutip dari http://en.wikipedia.org/wiki/Invisible_hand

- ⁵⁹ Mukti Fajar, "Kerakusan Bisnis", *Harian Kedaulatan Rakyat*, 10 Oktober 2008
- ⁶⁰ Sebagai catatan buku *An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nation* diterbitkan pertama kali pada tahun 1776.
- ⁶³ Sesungguhnya pemikiran Adam Smith tersebut dipengaruhi dan mempengaruhi oleh para ahli misalnya; Hugo de Groot atau Grotius yang pada era Reformation abad 16 memberikan ide tentang perdagangan bebas, yang kemudian diadopsi secara hukum. Kebijakan ekonomi di Europe selama akhir Middle Ages dan awal Renaissance adalah memberlakukan aktivitas ekonomi sebagai barang yang ditarik pajak untuk para bangsawan dan gereja. Pemikir lainnya adalah Niccolò Machiavelli dalam karyanya *The Prince* adalah penulis pertama yang menyusun teori kebijakan ekonomi dalam bentuk nasihat. Dia melakukannya dengan menyatakan bahwa para bangsawan dan republik harus membatasi pengeluarannya, dan mencegah penjarahan oleh kaum yang punya maupun oleh kaum kebanyakan. Dengan cara itu maka negara akan dilihat sebagai "murah hati" karena tidak menjadi beban berat bagi warganya. Selanjutnya Karl Polanyi berpendapat bahwa sebelum siste kapitalism muncul sampai berdirinya *free trade* di Inggris Raya pada 1830an didahului oleh sistem Mercantilism. Yaitu sebuah sistem perdagangan untuk profit, meskipun produksi masih dikerjakan dengan non-capitalist production methods. Tokoh lain dalam periode ini adalah Richard Cantillon, Jaques Turgot, dan Etienne Bonnot de Condillac. Richard Cantillon (1680-1734) oleh beberapa sejarawan

ekonomi dianggap sebagai bapak ekonomi yang sebenarnya. Bukunya *Essay on the Naturof Commerce* ini General (1755, terbit setelah dia wafat) menekankan pada mekanisme otomatis dalam pasar yakni penawaran dan permintaan, peran vital dari kewirausahaan, dan analisis inflasi moneter "pra-Austrian" yang canggih yakni tentang bagaimana inflasi bukan hanya menaikkan harga tetapi juga mengubah pola pengeluaran. Jaques Turgot (1727-81) dengan bukunya *Reflection on the Formation and Distribution of Wealth* adalah pendukung *laissez faire*, pernah menjadi menteri keuangan dalam pemerintahan Louis XVI dan membubarkan serikat kerja (*guild*), menghapus semua larangan perdagangan gandum dan mempertahankan anggaran berimbang. Selanjutnya Etienne Bonnot de Condillac (1714-80) adalah orang yang membela Turgot di saat-saat sulit tahun 1775 ketika dia menghadapi kerusuhan pangan saat menjabat sebagai menteri keuangan. Codillac juga merupakan seorang pendukung perdagangan bebas. Karyanya *Commerce and Government* (terbit sebulan sebelum *The Wealth of Nation*, 1776) mencakup gagasan ekonomi yang sangat maju. Dia mengakui manufaktur sebagai sektor produktif, perdagangan sebagai representasi nilai yang tak seimbang dimana kedua belah pihak bisa mendapat keuntungan, dan mengakui bahwa harga ditentukan oelh nilai guna, bukan nilai kerja. Tokoh lainnya, Anders Chydenius (1729-1803) menulis buku *The National Gain* pada 1765 yang menerangkan ide tentang kemerdekaan dalam perdagangan dan industri dan menyelidiki hubungan antara

- ekonomi dan masyarakat dan meletakkan dasar liberalism.
- ⁶⁴ ["http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_teor_i_ekonomi"](http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_teor_i_ekonomi), "Sejarah Teori Ekonomi", 20 september 2007
- ⁶⁶ Hernando de Soto, *The Mystery of Capital: Rahasia Kejayaan Kapitalisme Barat*, (Penerbit Qalam, 2006), hlm 50-51
- ⁶⁷ Perencanaan Keuangan Bagi Usaha Kecil Menengah (UMKM) Posted January 3rd, 2009 by sanx_bayu Perencanaan Keuangan Bagi Usaha Kecil Menengah (UMKM)
- ⁶⁸ Kompas Jakarta, Sabtu 14 Agustus 2007,
- ⁶⁹ Mudrajad Kuncoro Keragaman Definisi UMKM di Indonesia, September 07, 2008
- ⁷⁰ KCM Selasa, 21 Mei 2002 Kredit Macet UMKM Sulsel Mencapai Rp 8 Trilyun
- ⁷¹ Kamis, 11 Maret 1999 Usaha Kecil-Menengah Bangkrut Massal Jakarta, Kompas
- ⁷⁴ Sumber: Bank Pelaksana (Diolah Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha)
- ⁷⁶ Hernando de Soto, *The Mystery of Capital: Rahasia Kejayaan Kapitalisme Barat*, (Penerbit Qalam, 2006), hlm 15-43
- ⁷⁷ <http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2007/12/22/brk,20071222-114004.id.html>Tiga Perusahaan Besar Kembangkan UMKM Sabtu, 22 Desember 2007 | 22:27 WIB
- ⁷⁸ Eko Nopiansyah BCA, Astra, Pertamina Kolaborasi Berdayakan UMKM
- ⁷⁹ <http://www.google.co.id/search?q=UMKM+dan+Pembula+Sur+TS+UMK+KOMFAKSYAHUM+di/pada+Januari+23,+2008>
- ⁸⁰ <http://pmiikomfaksyahum.wordpress.com/2008/01/23/bca-astra-pertamina-kolaborasi-berdayakan-UMKM/>
- ⁸¹ Perusahaan AS Tawarkan Kerja Sama dengan UMKM <http://sinarharapan.co.id/berita/0207/26/eko09.html>
- ⁸² (John Dean, 1997)
- ⁸³ C. Richard Hatch (2000).....
- ⁸⁴ Membangun Jaringan Usaha Bagi Usaha Kecil Dan Menengah I Wayan Dipta [Http://www.smecda.com/deputi7/file_makalah/jaringan_usaha_ukm.htm](http://www.smecda.com/deputi7/file_makalah/jaringan_usaha_ukm.htm)
- ⁸⁵ Hery Nugroho, Perjalanan Panjang Ekonomi Indonesia: Dari Isu Globalisasi Hingga Krisis Ekonomi adalah mahasiswa Program Magister Ekonomika Pembangunan UGM Angkatan XVI, konsentrasi Pembangunan Daerah. Sejak 1992 bekerja sebagai staf Peneliti pada Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (d/h PAU Studi Ekonomi), Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- ⁸⁶ Noer Soetrisno, Indonesia: Crises, Reform, Globalization And Smes
- ⁸⁷ (Berry dkk, 2001).
- ⁸⁸ Aloysius Gunadi Brata – Lembaga Penelitian Universitas Atmajaya, Yogyakarta (UAJY).
- ⁸⁹ (*Kompas*. 14/12/2001).
- ⁹⁰ http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-makalah-tentang/6perenca25/08/2001_0Effendinaan-keuangan-bagi-usaha-kecil-menengah
- ⁹¹ Teuku Syarif, Pendekatan Dan Strategi Pembangunan Ekonomi Yang Berorientasi Pada Perbaikan Iklim UMKM, media pengkajian koperasi usaha kecil dan menengah, deputi bidang pengkajian sumberdaya UKMK kemenerian negara koperasi dan UMK, INFOKOP VOLUME 16-SEPTEMBER 2008, hlm.41

- ⁹² I Wayan Dipta, strategi penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui kerjasama kemitraan pola CSR, media pengkajian koperasi usaha kecil dan menengah, deputi bidang pengkajian sumberdaya UKM kemenerian negara koperasi dan UMK, INFOKOP VOLUME 16-SEPTEMBER 2008, hlm.63
- ⁹³ Ibid.
- ⁹⁴ Ibid.
- ⁹⁵ Op. Cit. Hlm. 64
- ⁹⁶ Op. Cit. Hlm. 68-73
- ⁹⁷ Janifer Alexander, Wanita Pengusaha Di Pasar-Pasar Jawa; etnitas, gender, dan semangat kewirausahaan
- ⁹⁸ Sutrisno, kapita selekta ekonomi indonesia (suatu studi), (yogyakarta, penerbit andi offset), hal. 32-33
- ⁹⁹ Robert W. Hefner, Budaya pasar Masyarakat dan moralitas dalam kapitalisme asia baru, (Jakarta, Penerbit LP3ES), hal. Xv.
- ¹⁰⁰ Ibid. hal. xvi
- ¹⁰¹ Ibid.. xvi
- ¹⁰² Ibid.
- ¹⁰³ Op.Cit. hal 33-34
- ¹⁰⁵ Ibid. Hal.112
- ¹⁰⁶ Ibid.179-181
- ¹⁰⁷ Ibid. Hal 182
- ¹⁰⁸ Ibid. Ha.185-186
- ¹⁰⁹ Ibid. Hal. 187
- ¹¹⁰ Op.Cit. hal 187-188
- ¹¹¹ Ibid.
- ¹¹² Tania Murray Li, Membangun Budaya Kapitalis Prolem Melayu Singapura Dan Mempertimbangkan Kembali Kewirausahaan.
- ¹¹³ Op.Cit. hal 285-287
- ¹¹⁴ Op.Cit. hal 72
- ¹¹⁵ Lawrence M Friedman, *American Law: An Introduction*, 2nd Edition, Diterjemahkan oleh Whisnu Basuki, (PT Tatanusa Jakarta), 2001 hlm 8-9
- ¹¹⁶ Francis Fukuyama, *Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, (Yogyakarta, penerbit, Qalam), hal.65
- ¹¹⁷ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori dan Strategi*, (Bayu Media Publishing), 2008, Hlm 178-181.
- ¹¹⁸ Francis Fukuyama, *Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, (Yogyakarta, penerbit, Qalam),

UMKM dan Penciptaan Kesejahteraan Bangsa

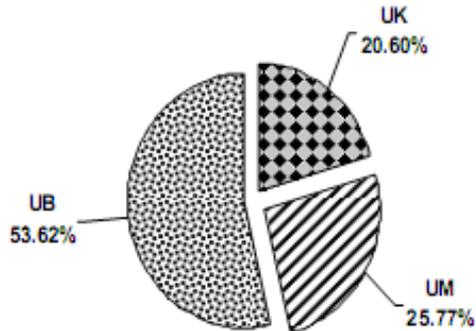
1. UMKM BAGIAN DARI PILAR EKONOMI BANGSA

UMKM adalah bagian integral dari dunia usaha, merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang berlandaskan demokrasi ekonomi. Selain dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Usaha Swasta Besar (USB).

Nilai investasi dari UMKM juga mempunyai jumlah yang perlu diperhitungkan dalam ekonomi nasional. Besaran investasi fisik UMKM seperti yang dinyatakan dengan angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada tahun 2007 sebesar Rp 462,0 triliun atau 47 persen dari total PMTB Indonesia, lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 46,0 persen. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan investasi Usaha Menengah dari 25,6 persen di tahun 2006 menjadi 26,1 persen pada tahun 2007. Begitu juga investasi pada UK mengalami peningkatan dari 20,5 persen di tahun 2006 menjadi 20,8 persen pada tahun 2007. Sementara investasi pada usaha besar mengalami penurunan dari 54 persen di tahun 2006 menjadi 53,0 persen pada tahun 2007.

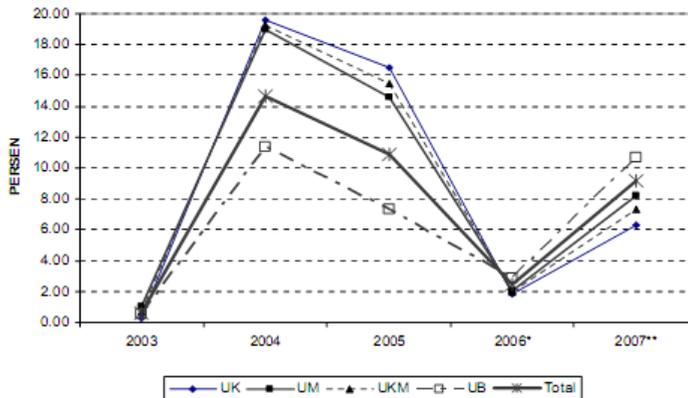
Dari prosentase penyerapan investasi UMKM dan Usaha Besar bisa kita lihat grafik dibawah ini:

GRAFIK 4.
RATA-RATA PENYERAPAN
INVESTASI TAHUN 2005-2007



Disini total UKM mengambil porsi 46,38 % dari total investasi Nasional. Sedangkan laju pertumbuhan investasi UKM dari tahun 2003 hingga 2007 dapat dilihat dalam grafik berikut ini

Grafik 5
Laju Pertumbuhan Investasi UKM, 2003-2007
(persen)



Sedangkan secara detail jumlah investasi UKM dan UB terlihat dibawah ini

Tabel 8
Nilai Investasi, 2006-2007
(miliar Rp)

Skala Usaha	2006*		2007**	
	Nilai	Share (%)	Nilai	Share (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kecil	164 778,04	20,46	204 808,96	20,82
Menengah	205 848,51	25,55	257 202,69	26,14
UKM	370 626,54	46,01	462 011,65	46,96
Besar	434 843,77	53,99	521 811,11	53,04
Total	805 470,31	100,00	983 822,76	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Selain dalam perhitungan investasi, UMKM juga mempunyai kedudukan, peran dan potensi yang strategis dalam mewujudkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan. UMKM yang kokoh dapat menjadi pilar utama bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat luas.

Jadi kalau UMKM kokoh bangsa ini akan makmur Penciptaan iklim usaha yang seluas-luasnya bagi UMKM untuk dapat menjalankan kegiatan usaha dan aspek terpenting dari penciptaan iklim ini adalah terjaminnya *level playing field* bagi semua pihak. Aspek ini meliputi penyempurnaan sistem perundang-undangan dan kebijakan sektoral, dan perlu mendapat dukungan peraturan daerah, penyederhanaan perijinan (pelayanan satu atap) dan upaya penegakan hukum penciptaan iklim usaha juga menuntut peningkatan kemampuan aparaturnya pemerintah agar mampu berperan sebagai fasilitator bagi UMKM.

Bagi perekonomian Indonesia kita perlu mengaitkan dengan konteks Sistem Ekonomi Nasional Indonesia (SENI) dan kedudukan UMKM. Dari sisi produksi pelaku ekonomi di Indonesia terdiri dari Usaha Negara, Usaha Swasta Besar Nasional, Usaha Swasta Asing dan Usaha Ekonomi Rakyat¹.

Sektor Ekonomi Rakyat yang mendominasi unit usaha yang ada di Indonesia terdiri dari usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Bagaimana kontribusi masing-masing sektor dalam produksi nasional, dapat kita lihat dari sudut sumbangan terhadap jumlah unit usaha, sumbangan

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) maupun penyerapan tenaga kerja.²

Dari sisi konsumsi sektor ekonomi rakyat kita secara mudah dapat kita kenali dari sektor rumah tangga yang memegang posisi penting dalam menentukan permintaan domestik karena memegang porsi terbesar (65%) dari pengeluaran agregat. Pengeluaran rumah tangga yang mencerminkan kehidupan sektor ekonomi rakyat kita dapat dilihat dari komposisi rumah tangga berdasarkan pengeluaran di mana secara umum masih didominasi oleh kelompok rumah tangga miskin dan hampir miskin.

Perkembangan Indikator Makro UMKM Tahun 2008, 2554 Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2007 tumbuh sebesar 6,3 persen terhadap tahun 2006. Bila dirinci menurut skala usaha, pertumbuhan PDB Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai 6,4persen dan Usaha Besar (UB) tumbuh 6,2 persen. Dibandingkan tahun 2006 pertumbuhan PDB UMKM hanya 5,7 persen, dan PDB UB hanya 5,2 persen. Pada tahun 2007 total nilai PDB Indonesia mencapai Rp 3.957,4 triliun, dimana UMKM memberikan kontribusi sebesar Rp 2.121,3 triliun atau 53,6 persen dari total PDB Indonesia. Pertumbuhan PDB UMKM tahun 2007 terjadi di semua sektor ekonomi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor bangunan sebesar 9,3 persen, diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran 8,5 persen, dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 7,8 persen. Jumlah populasi UMKM pada tahun 2007 mencapai 49,8 juta unit usaha atau 99,99 persen terhadap total unit usaha di Indonesia, sementara jumlah tenaganya mencapai 91,8 juta orang atau 97,3 persen terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia. Ekspor hasil produksi UMKM selama tahun 2007 mencapai Rp 142,8 triliun atau 20 persen terhadap total ekspor nonmigas nasional sebesar Rp 713,4 triliun. Nilai investasi fisik UMKM yang dinyatakan dengan angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada tahun 2007 mencapai Rp 462,01 triliun atau 46,96 persen terhadap total PMTB Indonesia.³

Tempat dimana sebagian besar usaha UMKM berpayung, mengklaim ada 49,8 juta unit usaha yang sedang berjalan di Indonesia, semuanya terbagi atas mikro, kecil, menengah, dan besar. Saat ini unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk terbesar. Sebab, jumlah terbesar dalam unit usaha ada di sana.

Berdasarkan data yang dihimpun, 95,7% unit usaha mikro memiliki aset antara Rp50-200 juta, 4,05% usaha kecil memiliki aset Rp200 juta-1 miliar. Di samping itu, 0,24% berupa unit usaha menengah memiliki aset usaha sebesar Rp1-50 miliar, dan sisanya 0,01% merupakan unit usaha besar yang memiliki aset di atas Rp50 miliar,” ujarnya. Adi Sasono pun optimistis dengan perkembangan UMKM. Menurutnya, hingga kini pelaku UMKM di Indonesia telah mencapai 99,9% dari seluruh pelaku bisnis dan sebanyak 97% tenaga kerja terserap di sektor ini. Selain itu total PDB Indonesia sebesar Rp 4.300 triliun, sejumlah Rp2.200 triliun di antaranya dikontribusikan oleh UMKM. Kinerja sebagian besar UMKM di Indonesia pun dinilai bagus oleh Bank Indonesia.

Dari 11.000 unit usaha sampel yang diteliti dan tersebar pada 11 wilayah, sebanyak 84,4% mencatat laba usaha di atas 10%. Dari total angka itu, 35% bahkan memiliki profit margin lebih dari 35%. Sampel BI ini menunjukkan kesimpulan berbeda dari pandangan umum bahwa usaha UMKM itu ringkih dan berkinerja buruk.⁴

Perkembangan jumlah UMKM periode 2005-2006 mengalami peningkatan sebesar 3,88 persen yaitu dari 47.102.744 unit pada tahun 2005 menjadi 48.929.636 unit pada tahun 2006. Dan hampir mencapai 50 Jutaan humlahnya pada tahun 2007.

Sementara sebagai pembanding jumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang saat ini mencapai 130an. Dari jumlah yang ada tersebut akan dikurangi hingga tersisa 25 perusahaan. Selebihnya akan dilakukan penggabungan, likuidasi, akuisisi. Belum dipastikan kapan penyusutan itu berlangsung, namun kemungkinan semuanya akan tuntas hingga tahun 2025 nanti. Pengurangan tersebut dilakukan karena terlalu banyak jumlahnya BUMN⁵.

Saat ini jumlah BUMN ada 138, sesuai inpres nomor 5 tahun 2008 harus bisa 89 BUMN tahun ini. Makanya kalau holding-holding bisa kita selesaikan, langsung jumlah BUMN ini berkurang. Menurutnya, penyusutan jumlah BUMN itu dilakukan agar jauh lebih mudah koordinasinya. Tenggat waktu yang tertera dalam inpres nomor 5 tersebut sebenarnya akhir tahun 2008 lalu, namun hingga saat ini belum ada satu pun restrukturisasi BUMN yang

sudah berjalan. Caranya dengan holding itu. Tapi holding banyak implikasinya, seperti implikasi pajak, implikasi macam-macam, untuk itu perlu koordinasi terus⁶.

Dengan pembentukan holding tersebut jumlah BUMN akan menyusut secara signifikan. Jika PT Perkebunan Nusantara I dan XIV digabung maka jumlahnya berkurang menjadi hanya satu. Kemudian BUMN Pupuk menyusut dari 5 menjadi 1 setelah dibuat holding, BUMN Karya yang rencananya menjadi hanya 7 perusahaan dari sebelumnya ada 14. Ditambah dengan beberapa holding lain seperti Holding BUMN Pertambangan, Holding Farmasi, Holding Pupuk, Holding Semen, dan Holding Perbankan. Holding keuangan sedang kita selesaikan, holdingnya gimana, apakah semua akan di satu holding semua atau ada dua.

Sekretaris Kementerian Negara BUMN Muhammad Said Didu mengemukakan bahwa BUMN yang tidak terlalu penting untuk negara akan dihapus, dikurangi dan mungkin lebih baik dikelola oleh swasta.

Sebenarnya banyak BUMN yang mendapatkan keuntungan dari usahanya. Tetapi tahun 2006 lalu ada sekitar 31 perusahaan yang merugi, dan 2007 ini kemungkinan masih ada 15 perusahaan yang masih merugi. Kesemua perusahaan BUMN yang tidak memperoleh keuntungan tersebut, bukan karena tidak layak usaha tetapi disebabkan beban masa lalu.

BUMN yang masih mengalami kerugian adalah pabrik kertas dan yang terkait dengan subsidi PLN, juga KAI (Kereta Api Indonesia), DAMRI, Pelni yang tarifnya terlalu rendah. BUMN itu bukan semata-mata rugi tetapi karena kebijakan pemerintah yang menentukan tarif.

Pemerintah masih memberikan bantuan permodalan untuk mengatasi kesulitan keuangan BUMN, menurut Said ini wajar. Contohnya, Garuda yang harus dibantu pemerintah melalui suntikan dana hingga Rp 1 triliun. Ia menyebut angka ini kecil dibanding uang pemerintah yang keluar Rp 600 triliun untuk kepentingan pengusaha swasta. Beban negara dari kebangkrutan swasta besar sekali.

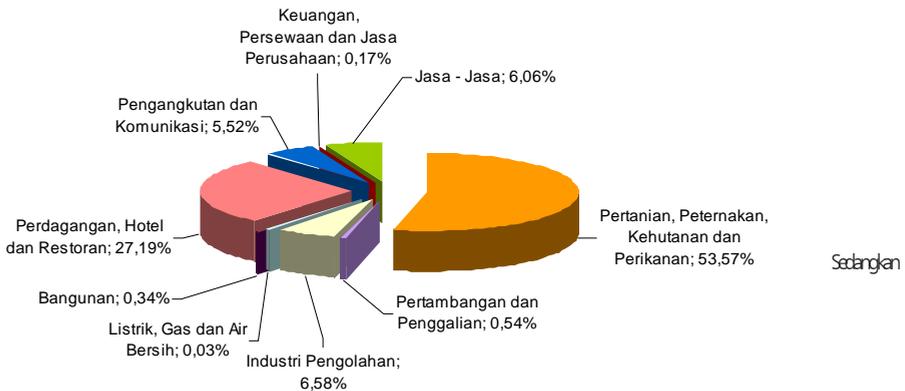
Kalau dipertanyakannya gaji direksi BUMN lebih besar dibanding gaji presiden, gaji presiden Singapura lebih tinggi 20 persen dari swasta. Muhammad Said Didu yang selama dua tahun hingga 1999 pernah menjadi

anggota DPR RI juga mengajak BUMN transparan dan bersih. Termasuk dalam hal penegakan hukum. Jangan karena tekanan pihak tertentu, menjadi takut sehingga ikut menjadi kotor karena mengatas namakan kepentingan lain.

Sementara jumlah perusahaan swasta besar jumlahnya tidak mencapai 5000 unit. Pada tahun 2005 ada 5022 perusahaan besar dan menyusut menjadi 4527 pada tahun 2007. Artinya UMKM memiliki posisi yang signifikan diantara BUMN dan Swasta nasional dan dalam perekonomian di Indonesia.

Sektor ekonomi UMKM yang memiliki proporsi unit usaha terbesar adalah sektor (1) *Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan*; (2) *Perdagangan, Hotel dan Restoran*; (3) *Industri Pengolahan*; (4) *Jasa-jasa*; serta (5) *Pengangkutan dan Komunikasi* dengan perkembangan masing-masing sektor tercatat sebesar 53,57 persen, 27,19 persen, 6,58 persen, 6,06 persen dan 5,52 persen.

Grafik 1. Proporsi Sektor Ekonomi UKM Berdasarkan Jumlah Unit Usaha Tahun 2006



sektor ekonomi yang memiliki proporsi unit usaha terkecil secara berturut-turut adalah sektor (1) *Listrik, Gas dan Air Bersih*; (2) *Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan*; (3) *Bangunan*; serta (4) *Pertambangan dan Peggalian* dengan perkembangan masing-masing tercatat sebesar 0,03 persen, 0,17 persen, 0,34 persen dan 0,54 persen. Gambaran mengenai perkembangan jumlah UMKM dari tahun 2005 - 2006 dapat disajikan tabel.⁷

2. UMKM MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Keberadaan usaha kecil di tanah air kita memang mewakili hampir seluruh

unit usaha di berbagai sektor ekonomi yang hidup dalam perekonomian kita, karena jumlahnya yang amat besar. Sampai saat ini usaha kecil mewakili sekitar 99,85 % dari jumlah unit usaha yang ada, sedangkan usaha menengah sebesar 0,14% saja, sehingga usaha besar hanya merupakan 0,01%. Dengan demikian corak perekonomian kita ditinjau dari subyek hukum pelaku usaha adalah ekonomi rakyat yang terdiri dari usaha kecil di berbagai sektor, terutama sektor pertanian dan perdagangan maupun jasa serta industri pengolahan.

Ditinjau dari posisi dalam mendukung perekonomian, maka usaha kecil menempati posisi sangat strategis karena menyumbang lebih dari 88% penyerapan tenaga kerja. Posisi sangat penting untuk menjamin stabilitas makro, terutama stabilitas sosial yang akhir-akhir ini menjadi sangat kritis sebagai penentu kelangsungan pertumbuhan kita dan investasi baru untuk melangsungkan pertumbuhan. Dari data sumbangan sektor-sektor yang dominan digerakkan ekonomi rakyat, maka jika masalah mendesak kita adalah kesempatan kerja seharusnya secara sungguh-sungguh investasi di bidang itu untuk memelihara pertumbuhan dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja, serta memperkuat posisi ekspor kita di masa depan.

Usaha kecil menengah (UMKM) harus terus ditingkatkan (up grade) dan aktif agar dapat maju dan bersaing dengan perusahaan besar. Jika tidak, UMKM di Indonesia yang berjumlah 225 ribu dan merupakan jantung perekonomian Indonesia tidak akan bisa maju dan berkembang.⁸

Sementara, kemunduran usaha yang sudah maju terjadi akibat tidak adanya transparansi dilakukan oleh pemilik generasi pertama. Kebanyakan pengusaha kecil dan menengah generasi pendiri tidak transparan soal keuangan dan perusahaan kepada generasi berikutnya, sehingga ketika dia meninggal, usaha tersebut tidak terkelola dengan baik karena generasi berikutnya tidak begitu mengenal kondisi perusahaan.

Berdasarkan survei, ditemukan bahwa tingkat produktivitas sektor UMKM yang belum terpakai sekitar 30 persen. Belum terpakainya seluruh produktivitas terjadi karena rendahnya pasar bagi produk usaha kecil menengah. Padahal, semakin besar pasar UMKM otomatis produktivitas juga semakin tinggi.

Berdasarkan kajian Kementerian Koperasi dan UMKM, salah satu

kelemahan usaha kecil dan usaha menengah dibandingkan dengan usaha besar adalah rendahnya produktivitas. Sedangkan Usaha menengah relatif lebih mudah masuk ke sektor modern dan mudah berorientasi ke ekspor.⁹

Bila ditelaah secara sektoral UMKM memiliki keunggulan dalam sektor tersier seperti perdagangan, hotel dan restoran dan bidang usaha yang memanfaatkan sumber daya alam (pertanian tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan dan perikanan). Penciptaan nilai tambah UMKM di masing-masing sektor tersebut masing-masing tercatat rata-rata 96,4 persen dan 95,7 persen selama periode 2006-2007. Sebaliknya UB memiliki keunggulan dalam sektor padat modal seperti listrik, gas dan air bersih serta pertambangan dan penggalan, dan pengolahan lebih lanjut dari produk hasil ekstraksi sumber daya alam (industri pengolahan). Di masing-masing sektor ini peranan UB dalam menciptakan nilai tambah adalah 91,9 persen, 88,6 persen dan 76,1 persen. Detailnya dapat dilihat dari Tabel berikut ini.

Tabel 2
Struktur PDB Usaha Kecil, Menengah, dan Besar
2006-2007 (persen)

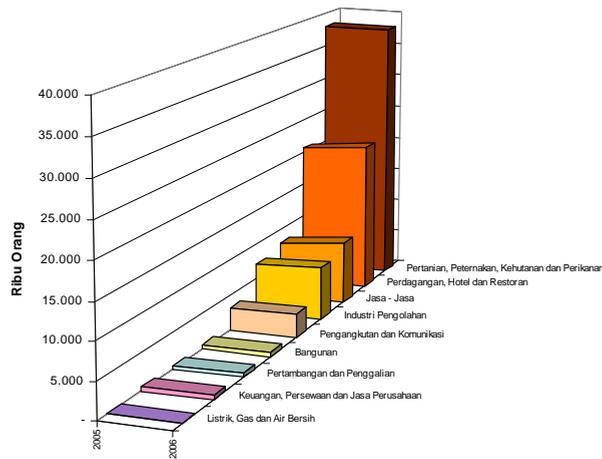
LAPANGAN USAHA	Rata-rata 2006-2007				
	Kecil	Menengah	UKM	Besar	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	86,90	8,85	95,75	4,25	100,00
2. Pertambangan dan Penggalan	8,15	3,26	11,41	88,59	100,00
3. Industri Pengolahan	12,55	11,35	23,90	76,10	100,00
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,53	7,58	8,11	91,89	100,00
5. Bangunan	44,94	21,12	66,06	33,94	100,00
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	74,19	22,26	96,45	3,55	100,00
7. Pengangkutan dan Komunikasi	27,93	25,03	52,96	47,04	100,00
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Persh.	16,56	47,16	63,72	36,28	100,00
9. Jasa-jasa	39,24	7,94	47,18	52,82	100,00
P D B	37,67	15,88	53,55	46,45	100,00
PDB TANPA MIGAS	42,25	17,70	59,95	40,05	100,00

Selama ini, produktivitas usaha besar (UB) bisa 20.000 kali lipat lebih besar dari produktivitas usaha kecil (UK). Bahkan, sekitar 75 sampai 80 persen lebih besar dibandingkan dengan UM. Sementara produktivitas UM, 260 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan UK. Peningkatan produktivitas

bagi UMKM, akan lebih mudah dilakukan karena jumlahnya tidak terlalu besar, sekitar 53.000 hingga 65.000.

Salah satu upaya meningkatkan produktivitas adalah kalangan usaha menengah harus mampu melakukan sendiri dengan mencari pasar baru, sehingga permintaan bisa meningkat tanpa harus menunggu bantuan usaha besar atau usaha menengah dan pihak lain.

Grafik 5a. Jumlah Tenaga Kerja Usaha Kecil Tahun 2005 - 2006

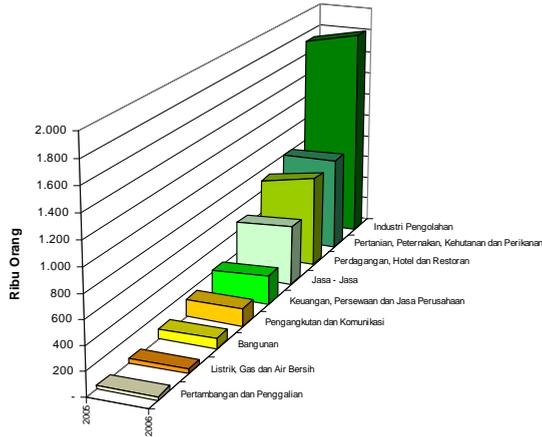


Kelompok UMKM tidak lagi membutuhkan investasi baru untuk meningkatkan produktivitas, yang akan berdampak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi bagi pelaku UMKM, tidak perlu lagi, karena semuanya sudah ada tetapi belum digunakan semaksimal mungkin. Syarat utama adalah pemerintah kabupaten dan kota tidak lagi memikirkan investasi besar, tetapi lebih memfokuskan pemberdayaan UMKM di daerahnya.

Pada tahun 2006, UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 85.416.493 orang atau 96,18 persen dari total penyerapan tenaga kerja yang ada, jumlah ini meningkat sebesar 2,62 persen atau 2.182.700 orang dibandingkan tahun 2005. Kontribusi UK tercatat sebanyak 80.933.384 orang atau 91,14 persen dan UM sebanyak 4.483.109 orang atau 5,05 persen. Untuk UK sektor *Pertanian, Peternakan, Perhutanan dan Perikanan* tercatat memiliki peran terbesar dalam penyerapan tenaga kerja yaitu sebanyak 37.965.878 orang atau 46,91 persen dari total tenaga kerja yang di serap.

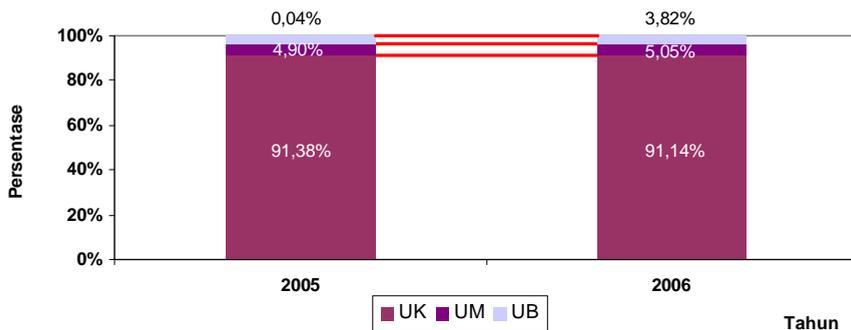
Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 73.403 orang atau 0,19 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan sektor ekonomi yang memiliki penyerapan tenaga kerja terbesar pada UM adalah *sektor Industri Pengolahan* yaitu sebanyak 1.827.073 orang atau 40,75 persen.

Grafik 5b. Jumlah Tenaga Kerja Usaha Menengah Tahun 2005 - 2006

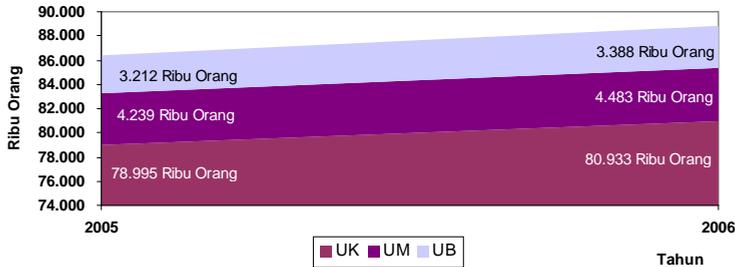


Gambaran mengenai perkembangan penyerapan tenaga kerja UK, UM dan UB tahun 2005 - 2006 disajikan pada *tabel V.1 sampai dengan tabel V.5*.

Grafik 5c. Proporsi Jumlah Tenaga Kerja UKM dan Usaha Besar Tahun 2005 - 2006



**Grafik 5d. Jumlah Tenaga Kerja UKM dan Usaha Besar
Tahun 2005 - 2006**



Namun pada tahun 2007 jumlah populasi UMKM mencapai 49,8 juta unit usaha atau 99,99 persen terhadap total unit usaha di Indonesia yang berjumlah 49,845 juta unit usaha. Sementara jumlah tenaganya mencapai 91,8 juta orang atau 97,3 persen terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia yang berjumlah 94,3 juta pekerja.

**Tabel 4
Jumlah Unit Usaha dan Tenaga Kerja UKM dan UB
2006-2007**

Uraian	2006*		2007**	
	UKM	UB	UKM	UB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Unit usaha (unit)	48 779 151	4 398	49 840 489	4 527
2. Tenaga kerja (orang)	89 547 762	2 445 595	91 752 318	2 520 707

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Bila dilihat secara sektoral, lebih dari separuh (52,5 persen) populasi UMKM di tahun 2007 bergerak di sektor pertanian, diikuti oleh sektor perdagangan sebanyak 28,1 persen, dan sektor industri sebanyak 6,5 persen. Sedangkan pada UB mayoritas bergerak di sektor industri sebesar 42,5 persen, diikuti sektor perdagangan sebanyak 26,9 persen, dan sektor keuangan sebanyak 10,6 persen. Sementara jumlah tenaga kerja pada kelompok UMKM 46,4 persen berada di sektor pertanian, diikuti sektor perdagangan sebanyak

25,2 persen, dan sektor industri sebanyak 11,4 persen. Pada kelompok UB, jumlah tenaga kerja di sektor industri mencapai 73 persen, diikuti sektor perdagangan sebanyak 6,9 persen, dan sektor keuangan sebanyak 6,8 persen.

Tabel 5
Jumlah Unit Usaha dan Tenaga Kerja UMKM & UB menurut Lapangan Usaha 2007

Lapangan Usaha	Jumlah Unit Usaha (unit)						Jumlah Tenaga Kerja (orang)					
	Mikro	Kecil	Mene-nghang	UMKM	Besar	Jumlah	Mikro	Kecil	Mene-nghang	UMKM	Besar	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. Peranian	25149700	4875	2304	25155879	47	25156726	41630816	185016	795343	42571974	35786	42628760
	5482	023	192	5948	104	5948	5402	186	1602	4640	146	4520
2. Pertambangan	249451	13334	570	263256	61	263336	496804	79816	29971	605790	74900	680690
	052	086	047	053	179	053	064	080	082	086	297	072
3. Industri	3043469	171072	16280	3230841	1923	3234764	6847431	1579104	1980972	10417507	1638734	12290241
	638	848	1520	649	4248	649	889	1584	4218	1135	7285	1300
4. LGA	10199	911	516	11626	144	11770	45462	16715	41281	103456	56598	159056
	002	006	043	002	318	002	008	017	087	011	221	017
5. Bangunan	140756	27441	4813	172810	233	173043	432861	238323	99142	734146	31760	765596
	030	136	384	036	516	036	068	209	197	080	126	081
6. Perdagangan	12552882	1388960	75866	14017478	1219	14018697	18388220	3786573	987487	23112280	174596	23289876
	2631	6883	6292	2612	2693	2612	2386	3778	2029	2519	680	2470
7. Pengangkutan	2880329	75717	4066	2760114	264	2760388	3110519	286980	163421	3633320	67770	3621090
	582	375	338	554	561	554	404	270	326	386	348	384
8. Keuangan	666974	63366	6570	900599	460	901079	1790816	427960	416237	2636016	171632	2808647
	180	314	713	187	1060	187	232	429	882	287	681	296
9. Jasa-jasa	2016660	272671	5666	2296007	146	2296233	4319316	3437759	281751	8036826	46942	6067770
	423	1351	471	460	323	460	581	3446	597	876	194	856
Jumlah	47702310	2017966	120263	49940469	4507	49945016	77061866	9970644	4720006	91762316	2320707	94279026
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Keterangan: Angka yang dicetak miring menunjukkan persentase.

Usaha Kecil belum termasuk Usaha Mikro.

Ada suatu hal penting yang belum menjadi perhatian secara khusus dalam persoalan UMKM yaitu perihal peranan dari perempuan dalam keluarga.

Peranan perempuan dan pembangunan beranjak dari satu asumsi dasar bahwa peran atau sumbangan perempuan indonesia dalam pembangunan negara indonesia masih belum memadai. Dari konsepsi ini muncullah konsepsi peranan ganda dari perempuan indonesia, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan anggota masyarakat yang harus mampu dan mau menyumbangkan tenaga dan pikirannya masing-masing.¹⁰ Dengan memaksimalkan keterlibatan ibu rumah tangga di dalam home industri diharapkan akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan dalam keluarga tersebut.

Produktivitas kerja setiap wanita dipengaruhi oleh alasan dan motif-motif yang melatarbelakangi mereka bekerja di industri rumah tangga. Jika alasan

yang dikemukakan adalah untuk pemenuhan pendapatan utama keluarga, hal ini secara asumptif bisa dilihat dari aktivitas dan produktivitas. Semakin tinggi produktivitasnya semakin, hal itu menandakan bahwa industri rumah tangga merupakan pekerjaan wanita.¹¹

Pemberdayaan wanita dan ibu rumah tangga dapat dilakukan dengan pemberian penyuluhan, pelatihan, program pendampingan dan bantuan pemasaran. Apabila peranan wanita ini diberdayakan untuk meningkatkan pendapatan melalui usaha rumah tangga, tentu penciptaan kesejahteraan bangsa akan lebih cepat tercapai. Tentunya ini ada PR (pekerjaan rumah) kita bersama

3. SIKAP POLITIK PEMERINTAH TERHADAP UMKM: TELAHAH UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Pada medio akhir 2008 diterbitkan Undang-undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM). UU UMKM ini adalah bentuk sikap politik pemerintah dalam melakukan penguatan ketahanan ekonomi nasional khususnya dibidang UMKM.

Seperti yang termaktub dalam Konsideran UU UMKM huruf c disebutkan bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan

Selain itu karena, berbagai bahaya dari liberalisassi ekonomi, melalui mekanisme pasar bebas dengan kekuatan modalnya, yang selalu mengancam bagi ekonomi nasional dan khususnya bagi UMKM, telah banyak diantisipasi melalui Undang-Undang tersebut.

Berbagai kelemahan dan potensi dari UMKM sebagai salah satu pilar ekonomi nasional juga telah mendapatkan perhatian yang khusus dari

pemerintah.

Usaha awal yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan Penumbuhan Iklim Usaha seperti yang diatur dalam BAB V pasal 7 Ayat (1), bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah akan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek (a). pendanaan; (b).sarana dan prasarana; (c). informasi usaha; (d). kemitraan; (e). perizinan usaha; (f). kesempatan berusaha; (g). promosi dagang; dan (h). dukungan kelembagaan.

Adapun faktor-faktor yang apat mendukung penumbuhan iklim usaha tersebut akan dilaksanakan secara lebih rinci sebagai berikut:

a. Faktor pendanaan;

Faktor pendanaan untuk penguatan modal yang merupakan kelemahan klasik dari UMKM. Kapitalisme golbal dengan kekuatan modal selama ini dengan mudah melibas UMKM yang terbelit dengan persoalan modal. Oleh karena itu pemerintah memberikan dukungan dengan memperluas sumber pendanaan degan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan selain bank. Selain itu memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif serta jaminan pinjaman yang disediakan oleh Pemerintah.

b. Faktor Sarana Dan Prasarana;

Persoalan sarana dan prasarana seperti tempat usaha, tarif prasarana akan diberikan keringanan dan kemudahan serta perhatian khusus oleh pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini dirasa perlu karena untuk memberikan kepastian tempat usaha, yang selama ini sering digusur-gusur karena menempati wilayah ilegal. Juga mengenai kepastian biaya (tarif) yang dikenakan seperti retribusi yang seringkali dimanfaatkan oleh oknum-oknum dengan menarik biaya tambahan, dapat dieliminir.

c. Informasi Usaha;

Dijaman Globalisasi ekonomi, dimana batas batas wilayah telah pudar (*borderless world*), informasi menjadi sebuah kekuatan yang *powerfull*. Apa yang diperlukan dan dibutuhkan manusia dibelahan dunia lain sebagai *business opportunity* dengan cepat harus dapat diketahui dan dimani-

festasikan dalam bentuk transaksi bisnis. Kesadaran ini yang membuat pemerintah menyediakan berbagai fasilitas bank data dan jaringan informasi bisnis untuk mendukung UMKM.

d. Kemitraan;

Berbagai persoalan bisnis seperti kebutuhan *supply demand*, pembiayaan, dan jaringan kerja (*networking*) dapat diatasi dengan berbagai model kemitraan. Upaya terjadinya kemitraan juga menjadi *concern* pemerintah untuk mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar serta mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bentuk kemitraan ini juga untuk mengantisipasi lahirnya sistem monopoli dan mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat.

e. Perizinan Usaha;

Faktor legalitas yang merupakan salah satu hambatan untuk kemajuan UMKM juga mendapatkan perhatian dari pemerintah. Untuk itu pemerintah mengupayakan penyerahan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu dan berupaya memberikan pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil. Namun demikian Pemerintah khususnya Departemen Kemeterian Negara Koperasi dan UKM harus melakukan koordinasi lebih lanjut dengan berbagai instansi terkait. Tentunya koordinasi tersebut harus didasarkan pada kesadaran, bahwa untuk memajukan ekonomi nasional bukanlah tanggung jawab Departemen Kemeterian Negara Koperasi dan UKM sendiri. Untuk itu harus ada dukungan instansi lain terkait.

f. Kesempatan Berusaha;

Pemerintah berupaya untuk memberikan kebijakan tentang penetapan alokasi wilayah peruntukan tempat usaha seperti pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima dan lainnya. Selain itu pemerintah juga mencadangkan bidang dan jenis kegiatan

usaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Juga yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun. Karena ini bersifat kewilayan dan keunikan daerah, maka diperlukan dukungan dari pemerintah daerah setempat untuk mendukung program tersebut. Pada saat yang sama proteksi juga diperlukan bagi UMKM seperti memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

g. Promosi Dagang

Promosi sebagai salah satu aspek terpenting dari pemasaran produk kadang menjadi kendala bagi UMKM, karena keterbatasan akses pasar dan dana. Oleh karena itu pemerintah akan meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri serta memperluas sumber pendanaan untuk promosi. Dalam hal ini sekaligus pemerintah memberikan insentif bagi UMKM yang dapat melaksanakan promosi secara mandiri dan memfasilitasi pengurusan kepemilikan Hak atas kekayaan intelektual (HAKI)

h. Dukungan Kelembagaan

Faktor pengembangan kelembagaan sangat diperlukan bagi UMKM agar tidak selamanya menjadi pelaku UMKM yang penuh persoalan dan hambatan, Adapun upaya pemerintah adalah dengan memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang

- 1) produksi dan pengolahan seperti meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen. Memberikan kemudahan akses untuk dalam pengadaan sarana dan prasarana, bahan baku, pengemasan dan persoalan teknis lainnya.
- 2) Pemasaran dengan cara menyebarluaskan informasi pasar, kemampuan manajemen dan teknik pemasaran. dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.
- 3) sumber daya manusia dengan meningkatkan keterampilan manajerial

dalam bentuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru

- 4) desain dan teknologi dengan meningkatkan kerjasama dan alih teknologi, pengendalian mutu serta memfasilitasi dalam memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

Hal ini tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah sendiri. Oleh karena itu dunia usaha secara umum dan masyarakat berperan harus terlibat secara aktif mendukung pengembangan UMKM

Namun perlu diingat sekali lagi, Eksistensi UMKM adalah sangat penting dalam menentukan masa depan kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu untuk mencapai kondisi optimal dari UU UMKM tersebut apabila ada dukungan dari semua pihak. Baik antar instansi pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha besar, dan masyarakat secara umum. Tanpa itu semua, impian dari Undang-undang ini tidak akan menjadi kenyataan.

4. MASA DEPAN UMKM DI INDONESIA

UMKM mempunyai posisi strategi dalam situasi normal maupun krisis. Pemberdayaan UMKM hanya akan terjadi secara nyata apabila dapat dijamin kesempatan seluas-luasnya bagi UMKM untuk memasuki kegiatan ekonomi. Dukungan yang diperlukan terutama bantuan peningkatan kemampuan untuk memperoleh akses pasar, teknologi dan permodalan yang dikembangkan melalui bank maupun bukan bank. Pada akhirnya meskipun kemiskinan dapat dikurangi melalui pertumbuhan dengan pemerataan, namun bagi kelompok miskin yang rentan masih memerlukan intervensi ¹²

Banyak ilmuwan Indonesia merasa bisa meramalkan masa depan Indonesia tanpa secara sungguh-sungguh menjelaskan mengapa kita mempunyai masalah yang kita hadapi sekarang. Jika ilmuwan meramal ke depan dan memberikan resep-resep kebijakan agar masa depan itu lebih baik, tanpa menerangkan sejarah terjadinya masalah riil yang kita hadapi sekarang, maka tentulah ilmuwan yang bersangkutan menyusun asumsi-asumsi yang jika, dan hanya jika (asumsi-asumsi terpenuhi), kebijakan-kebijakan yang dianjurkan akan dapat berjalan. Namun, jika ilmuwan menggunakan terlalu banyak asumsi yang tidak realistis, maka berarti ilmuwan yang bersangkutan hanya

berteori (berpikir deduktif), padahal banyak teori-teori ekonomi yang berasal dari Barat ini sering keliru atau tidak tepat bagi Indonesia.

Demikian ilmu ekonomi sebenarnya akan lebih bermanfaat jika dapat “menjelaskan” berbagai sebab-akibat dari fenomena masyarakat, dan dari penjelasan-penjelasan tersebut masyarakat dapat mawas diri dan mengoreksi kekeliruan-kekeliruan yang telah dibuat di masa lalu. Mawas-diri dan mengoreksi merupakan syarat bagi ditemukannya tindakan atau kebijakan yang lebih baik di masa datang. Dianjurkan kepada para cerdik-pandai terutama pakar-pakar ekonomi untuk lebih menahan diri dan tidak terlalu suka “meramalkan” masa depan dengan analisis atau pernyataan-pernyataan *remedial* (dengan resep-resep atau obat-obat) tanpa data-data empirik kenyataan masa lalu dan masa sekarang.

Dalam bidang ekonomi, kesalahan paling mendasar adalah sangat tidak memadainya rasa nasionalisme para pemimpin ekonomi kita. Perwujudan rasa nasionalisme yang rendah (lebih kagum globalisasi) sama dengan rendahnya rasa percaya diri, yang dalam krisis moneter 1997-1998 hampir hilang sama sekali. Maka mengembangkan rasa percaya diri, bahwa bangsa Indonesia akan mempunyai kemampuan mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi dengan upaya sendiri, mutlak diperlukan.

Hernando De Soto dengan menyakinkan menunjuk pada “berlian” di negara-negara berkembang yang tak pernah dikenali oleh pemerintah maupun para perencana pembangunan. Inilah potensi domestik, yaitu kekuatan “ekonomi rakyat” yang telah terbukti tahan-banting dalam situasi krismon, dan telah menyelamatkan ekonomi Indonesia dari kehancuran total. Bahwa ekonomi Indonesia hanya mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) satu tahun saja pada tahun 1998, dan mulai tahun 1999 dan seterusnya sudah tumbuh positif (meskipun kecil), hendaknya dicatat sebagai bukti bahwa sektor ekonomi rakyat dalam waktu pendek telah pulih kembali meskipun ekonomi sektor modern masih menghadapi kesulitan¹³.

Menyusun prospek dalam bidang ekonomi lebih perlu lagi untuk tidak dilakukan secara gegabah karena teori-teori ekonomi yang ada, yang berasal dari Barat, pada umumnya tidak realistis, karena banyak menggunakan asumsi-asumsi yang sulit dipenuhi.

Satu contoh kekeliruan fatal dari teori ekonomi Neoklasik atau Neoliberal dari Barat sudah terjadi yaitu ketika krismon 1997-1998 diramalkan “tidak mungkin terjadi di Indonesia”. Dewasa ini pakar-pakar ekonomi bersilang pendapat tentang bisa tidaknya krisis ekonomi *ala* Argentina menyerang Indonesia. Dalam hal seperti ini kami selalu menolak untuk membuat ramalan. Yang kiranya cukup jelas adalah bahwa para pemimpin ekonomi Indonesia baik dari kalangan pemerintah, dunia bisnis, atau dari kalangan pakar, kami himbau untuk berpikir keras menyusun aturan main atau sistem ekonomi baru yang mengacu pada *sistem sosial* dan *budaya* Indonesia sendiri. Jika Pancasila kita terima sebagai ideologi bangsa, maka kita tidak perlu merasa ragu-ragu mengacu pada Pancasila lengkap dengan lima silanya dalam menyusun sistem ekonomi yang dimaksud.

Sistem Ekonomi Pancasila mencakup kesepakatan “aturan main etik” sebagai berikut:

- 1) Ke-Tuhanan Yang Maha Esa: Perilaku setiap warga Negara digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral;
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab: Ada tekad seluruh bangsa untuk mewujudkan pemerataan nasional;
- 3) Persatuan Indonesia: Nasionalisme ekonomi;
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan: Demokrasi Ekonomi; dan
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

Demikian prospek masa depan ekonomi Indonesia, yang sangat tergantung pada kesediaan untuk menerima dan melaksanakan aturan main etik, sebagai “kontrak sosial”.

Apapun namanya, sebaiknya kita tinggalkan aturan main, atau sistem ekonomi *kapitalis liberal* (atau *Neoliberal*) yang sejauh ini dianggap “tak terelakkan”. Kita harus berani mengelak dari nasehat-nasehat dari luar, atau dari pakar-pakar yang terlalu silau atau terlalu yakin akan kebenaran teori-teori ekonomi dari luar. Indonesia harus percaya diri menyusun aturan main yang paling cocok bagi kepribadian Indonesia.¹⁴

Di masa krisis UMKM dinilai masih mampu bertahan, karena

fleksibilitasnya dan ketidak tergantungannya pada pembiayaan melalui kredit perbankan. Semasa krisis walaupun banyak UMKM yang mengalami kesulitan, tetapi juga masih cukup banyak yang berkembang. Hal ini juga terlihat dari adanya perbaikan posisi usaha kecil dan menengah dalam struktur pembentukan PDB pada saat dan setelah krisis dibanding masa sebelum krisis di mana pangsa UMKM dalam pembentukan PDB mengalami peningkatan.

Namun demikian dalam catatan BPS pada tahun 2000 posisi usaha kecil pernah terancam, karena bangkitnya kembali usaha besar meskipun masih secara perlahan. Peringatan dini ini memerlukan pencermatan secara sungguh-sungguh untuk menghindari kekacauan akibat ketimpangan yang tidak dapat ditolekir lagi di masa datang.

Salah satu usaha yang harus dikerjakan secara serius adalah dengan memusatkan investasi, paling tidak investasi yang komponen dorongan pemerintahnya cukup tinggi pada sektor-sektor yang langsung terkait dengan peningkatan nilai tambah bagi usaha kecil. Sektor kegiatan yang berkaitan dengan perkebunan, perikanan dan industri pengolahan adalah kegiatan yang sangat erat kaitannya dengan penciptaan kekuatan awal bagi usaha ekonomi rakyat untuk mendapatkan pangkalan untuk bergerak di usaha skala besar bernilai tambah tinggi. Hal ini juga akan membangun kesinambungan usaha ekonomi rakyat di sektor primer yang lebih tradisional menjangkau sektor pengolahan yang modern.

Melihat sejarah panjang keberadaan UMKM di Indonesia, Shuj iro Urata mencatat peran utama UMKM yaitu:

- 1) Pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesai,
- 2) Penyedia kesempatan kerja yang menaik,
- 3) Pemain penting dalam pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan masyarakat,
- 4) Pencipta pasar dan inovasi baru melalui fleksibilitas dan sentivitas UMKM serta keterkaitan dinamis antar kegiatan perusahaan, dan
- 5) Pemain dalam perbaikan neraca pembayaran internasional melalui peran yang semakin nyata dalam komposisi ekspor dan penghematan devisa melalui produk-produk substitusi impor yang dikaitkan oleh UMKM.

Lebih jauh Urata memperlihatkan pentingnya industri pengolahan dan

jasa perdagangan sebagai fokus perhatian untuk pemulihan ekonomi.¹⁵ Untuk itu UMKM seharusnya menjadi Prioritas Kebijakan Ekonomi pemerintah kita. Baik dalam bentuk pemberian fasilitas dan proteksi maupun dalam kemudahan akses pada persoalan permodalan dan finansial. Kedua hal tersebut akan dibahas berikt ini.

a. Dukungan Fasilitas Dan Proteksi Pemerintah

Tantangan yang dihadapi UMKM sekarang bukan saja menyangkut faktor internal tetapi juga tantangan eksternal. Berbagai tantangan itu antara lain menyangkut masalah permodalan, pemasaran, dan teknologi yang berakibat pada rendahnya mutu produk dan tidak adanya kontinuitas dalam berproduksi.

Disinilah pentingnya peran intermediasi pemerintah untuk memperkuat kelembagaan UMKM. Dengan meningkatnya peranan pemerintah, diharapkan akan meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perbaikan kondisi perekonomian nasional, antara lain melalui penyerapan tenaga kerja dan pengurangan tingkat pengangguran. Untuk itu perlu dilakukan penguatan secara kelembagaan terhadap UMKM, antara lain:

Pertama, melalui institusional building (membangun institusi). Institusional building sangat penting bagi institusi yang akan mengembangkan diri menjadi lebih kuat dan berkelanjutan. Untuk itu ada beberapa hal prinsip yang dapat dilakukan, antara lain: melakukan strategic planning (perencanaan strategis), internalisasi budaya bisnis dan pengembangan sistem kelembagaan. Melalui proses strategic planning, UMKM akan mengembangkan institusinya sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. Selain itu, core business-nya menjadi semakin fokus, jelas dan terukur. Dalam hal ini core business UMKM akan mengacu pada kemampuan SDM serta peluang yang ada, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan konsumen.

Kedua, networking (penguatan jaringan) UMKM. Data dari Biro Pusat Statistik menyebutkan bahwa terdapat Pada tahun 2007 jumlah populasi UKM mencapai 49,8 juta unit usaha atau 99,99 persen terhadap total unit usaha di Indonesia yang berjumlah 49,845 juta unit usaha. Sementara jumlah tenaga kerjanya mencapai 91,8 juta orang atau 97,3 persen terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia yang berjumlah 94,3 juta pekerja. Hal ini menun-

jukkan bahwa ada peluang bagi UMKM untuk memperkuat jaringannya. Dalam hal ini pemerintah dan swasta harus memfasilitasi jaringan itu, sehingga secara kelembagaan semakin kuat.

Ketiga, capacity building (peningkatan kapasitas) Sumber Daya Manusia. Hal ini dapat dilakukan melalui aktivitas studi banding, pelatihan, asistensi teknis dan lain-lain. Setiap UMKM tentu memiliki kebutuhan dan keunikan tersendiri, sehingga program *capacity building* pun hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing UMKM.

Makin berdayanya UMKM berarti juga keuntungan bagi negara. Berbagai problem kenegaraan seperti: pengangguran, kemiskinan, kebodohan, rendahnya produktifitas dan lain-lain akan segera teratasi. Mampunya UMKM mengatasi problem tersebut akan berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan pendidikan, serta perbaikan tingkat kesehatan. Dampak positif lainnya adalah bakal berkurangnya tingkat kriminalitas. Para pelaku UMKM akan bersemangat dan makin produktif seiring dengan adanya dukungan dari pemerintah. Dukungan yang diharapkan tentu tidak saja dalam bentuk permodalan, namun juga dalam bentuk kebijakan yang memihak serta terbukanya akses informasi. Dengan adanya dukungan tersebut, maka kelembagaan UMKM akan semakin kokoh, berdaya saing, dan menyejahterakan.¹⁶

Selain dukungan dan prioritas kebijakan ekonomi bagi UMKM diatas, masih ada yang perlu diperhatikan pemerintah, khususnya mengenai proteksi terhadap pesaing asing dan pengusaha besar.

Perlakuan yang mempersamakan bagi UMKM dengan pengusaha besar atau investor asing adalah sebuah bentuk ketidakadilan. Jika mengacu pada teori keadilan John Rawls maka perlakuan yang sama bagi UMKM dengan Pelaku Usaha Besar dan Investor asing adalah tndaan yang tidak adil. Prinsip keadilan menurut Rawls dibagi menjadi dua¹⁷;

first: each person is to have an equal right to the most extensive basic liberties compatible with a similar sistem of liberty for all, second: social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) to greatest benefit of the least advantaged and (b) attached to positions and offices open to all under conditions of fair equality of opportunity

Prinsip pertama sering disebut dengan prinsip kesamaan dan prinsip kedua disebut prinsip ketaksamaan. Artinya bagi pihak-pihak yang mempunyai kapasitas sama harus diperlakukan sama sementara bagi pihak yang tidak sama kondisinya harus diperlakukan berbeda, bahkan harus diutamakan bagi pihak yang lemah¹⁸. Dalam sisi praktisnya pemerintah seharusnya memprioritaskan UMKM sebagai pihak yang lemah (*least advantage*) untuk mendapatkan proteksi dan kemudahan dibandingkan dengan pelaku usaha besar dan investor asing.

Pada level Internasional, pemerintah seharusnya mempunyai keberanian untuk melakukan *bargaining* dalam memproteksi UMKM. Walaupun kita telah “terjerat” dengan perjanjian internasional untuk membuka pasar bebas. Tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan Klausula *Safeguard* yang telah ditandatangani dalam WTO pada putaran Uruguay¹⁹.

Sayangnya pemerintah sering kali tidak menggunakan klausula *Safeguard* tersebut yang membolehkan Negara-negara anggota WTO, khususnya Negara berkembang untuk melakukan proteksi demi kepentingan ekonomi nasionalnya. Justru Negara maju seperti Jepang dan beberapa Negara Uni Eropa yang menggunakan klausula *Safeguard* tersebut untuk melindungi para petani dan pelaku UMKM dinegara mereka²⁰.

Argumen yang digunakan, bahwa mereka tidak mau mencabut subsidi pertanian dan produk-produk UMKM, karena jika subsidi dicabut maka akan terjadi kekacauan sosial yang akan berdampak pada ketidakstabilan ekonomi. Hal tersebut akan menjadikan para petani melakukan urbanisasi besar-besaran ke kota, dan hal ini akan mempunyai dampak *social cost* yang lebih tinggi dari pada mencabut subsidi bagi petani mereka²¹.

Hukum dalam arti perjanjian internasional tidak melulu merupakan persoalan yuridis, tetapi justru lebih besar muatan politisnya. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia harus berani melakukan negosiasi politik untuk menentukan kebijakan hukum bagi perlindungan UMKM di kancah transaksi Internasional.

b. Dukungan Dan Kemudahan Akses Finansial.

Di bawah ini beberapa program pembiayaan yang di peruntukkan kepada UMKM oleh departemen koperasi dan Usaha kecil menengah. Adapun pro-

gram-program tersebut adalah:

- 1) Program Pembiayaan Produktif Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM).
Program ini untuk mendukung kebutuhan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil anggota koperasi yang memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan bagi pengembangan usahanya. Program ini juga dimaksudkan untuk membangun lembaga keuangan mikro yang dimiliki dan berada di masyarakat, sebagai alternatif solusi bagi upaya pemerintah dalam mengatasi kesulitan pembiayaan yang dihadapi oleh UMKM.²²

Program ini ditujukan kepada koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam atau usaha jasa keuangan syariah, agar koperasi dapat meningkatkan peran dan fungsinya dalam memberdayakan usaha mikro dan kecil anggota koperasi.

- 2) Program Perempuan Keluarga Sehat Dan Sejahtera (Perkassa)
Program pembiayaan ini untuk memberikan dukungan bagi kelompok-kelompok perempuan yang tergabung dalam kelompok usaha produktif dan terbukti mampu menunjang ekonomi keluarga. Kelompok ini telah berkembang menjadi lembaga yang berbadan hukum koperasi. Atas dasar tersebut kelompok ini perlu diberdayakan dan dikembangkan dalam upaya mengatasi kemiskinan.²³

- 3) Perkuatan Struktur Permodalan KSP Melalui Program Agribisnis atau Sektoral

Program ini diperuntukan sebagai upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah disektor agrobisnis / sektoral sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat, regional dan nasional. Kemunculan program ini dilatarbelakngi oleh adanya kenyataan bahwa, pada masa krisis ekonomi, perekonomian nasional ditopang usaha kecil dan menengah yang dominan disektor pertanian di bandingkan pada sektor-sektor lainnya.²⁴

Program ini bertujuan untuk meningkatkan aktifitas dan pendapatan usaha mikro dan kecil melalui pelayanan simpan pinjam; meningkatkan kemampuan dan jangkauan layanan KSP khususnya di sektor agribisnis; meningkatkan kualitas akses anggota dan calon anggota untuk

memperoleh pelayanan dari KSP.²⁵

4) Kredit Usaha Rumah Tangga (KRISTA)

Skema pembiayaan yang diberikan oleh kementerian koperasi dan UKM bersama Perum pegadaian ini dilaksanakan dengan sistem fidusia yang dikenal dengan kredit usaha rumah tangga (krista). Sumber pembiayaan ini diperoleh dari dana-dana yang murah baik dari pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat di samping dari perum pegadaian itu sendiri, sehingga para perempuan pelaku usaha mikro skala rumah tangga dapat memperoleh kredit dengan bunga yang rendah.²⁶

Ditinjau dari sudut pembiayaan memang sebagian besar usaha kecil lebih mengandalkan modal sendiri, atau hutang dagang yang dibangun atas dasar saling kepercayaan diantara mereka. Pembiayaan dari lembaga keuangan memang sebagian terbesar bersumber dari perbankan terutama kredit komersial (hampir 80%). Rasionalisasi sistem perkreditan bagi program-program sektor bagi UMKM pada dasarnya akan tersedia melalui kredit komersial perbankan. Namun untuk usaha mikro dan usaha kecil peranan lembaga keuangan mikro dan koperasi (USP/KSP) akan menjadi semakin penting.

Pemulihan ekonomi perlahan namun pasti tengah berlangsung, peran intermediasi perbankan sangat diperlukan dalam rangkaian proses tersebut. Perusahaan-perusahaan besar yang pernah menjadi motor penggerak perekonomian nasional, penyerap lapangan kerja dan mengalami kesulitan saat krisis telah menjalani proses restrukturisasi pinjaman baik pada BPPN maupun bank yang membiayai.

Perbankan menjadi semakin selektif dan ketat dalam menerapkan prinsip prudential banking serta mulai melakukan reorientasi strategi bisnis ke sektor ritel. Bank selain aktif membiayai segmen perorangan dan perusahaan menengah yang sedang berkembang (ritel), juga memiliki pengalaman dan kemampuan untuk mendukung pemulihan segmen korporasi melalui Corporate Banking.

Corporate Banking mendukung *transactional activities* nasabah korporasi seperti perusahaan-perusahaan swasta nasional besar yang potensial, multinasional company, BUMN serta PMA. Fokus pembiayaan meliputi diversifikasi usaha pada bidang manufaktur, jasa serta industri lainnya yang

memiliki potensi ekspor, dan kemampuan bertahan selama krisis. Adapun beberapa produk yang terdapat di bank dan dapat diberikan kepada UMKM adalah:

1) Kredit modal kerja

Kredit yang dapat membantu perusahaan memperlancar usaha dalam bentuk modal kerja permanen, kredit modal kerja transaksional dan kredit rekening koran, pembiayaan tagihan (*receivable financing*), pembiayaan distributor (*distributor financing*), dan pembiayaan supplier (*supplier financing*).

2) Pinjaman Investasi

Pinjaman untuk mendukung kegiatan investasi perusahaan, berupa pembangunan, perluasan pabrik, gedung, tempat usaha ataupun pembelian mesin, peralatan, kendaraan, teknologi, sampai pada pembiayaan proyek.

3) Corporate Finance

Membantu merancang struktur pembiayaan yang inovatif dan menawarkan solusi terbaik bagi keperluan pembiayaan nasabah korporasi seperti pembiayaan untuk memperkuat struktur permodalan, pembiayaan proyek melalui pendanaan yang efisien, dan lain-lain

Meskipun aspek pembiayaan disadari bukanlah satu-satunya masalah, namun dukungan penyaluran kredit demi pengembangan UMKM ini masih merupakan aspek yang sangat krusial sifatnya. Permasalahan lainnya adalah belum terdapat hasil kajian yang memuaskan tentang pemetaan dan skema pembiayaan perbankan daerah menurut karakteristik UMKM pada tingkat kabupaten atau kota.²⁷

Persoalan lain yang terkait dengan finansial adalah mengenai insentif pajak. Perlakuan pengenaan pajak bagi UMKM seharusnya dibedakan dengan pelaku usaha besar. Pemerintah dan DPR sesungguhnya telah sepakat menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan UMKM menjadi maksimal 0,75% per bulan dari saat ini yang besarnya 2%. Kesepakatan itu akan dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penghasilan (RUU PPh). Penurunan itu supaya UMKM bisa tumbuh pesat dalam mendorong penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.²⁸

Pada akhirnya, berbagai program, kebijakan, teori, dan sikap politik yang tertuang dalam UU UMKM diatas hanya dapat dicapai apabila seluruh elemen bangsa ini mempunyai komitmen yang sama untuk memajukan bangsa melalui UMKM, demi menciptakan kesejahteraan bangsa Indonesia diantar berbagai ancaman badai dan gempuran Globalisasi Ekonomi yang setiap saat mengedap-endap dan menyergap tanpa kita sadari. Hanya bangsa yang kuat ekonominya secara mandiri yang akan melewati ancaman tersebut.

CATATAN AKHIR

- ¹ Panji Anoraga , BUMN, Swasta Dan Koperasi : 3 Pelaku Ekonomi
- ² Anthony Giddens, *The Third Way*, Jalan, Ketiga”, Pembaharuan Demokrasi Social, Gramedia, 1999, hal. 17
- ³ http://www.depkop.go.id/depkopgoid2008/index.php?com=dum&sewa_view&gl=7&clm=17
- ⁴ http://mustaqim-sirathal.blogspot.com/2008/08/umkm-kokoh-bangsa-makmur_10.html, “UMKM Dana dan Bahan Baku, Persoalan Klasik UMKM”, Sukabumi., 25 Agustus 2001
- ⁵ Supriyantho Khafid, Jumlah BUMN akan Dipangkas Dari 140 ke 125, <http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2007/12/09/brk,20071209-113183,id.htm> Minggu, Jakarta, 09 Desember 2007.
- ⁶ Angga Aliya <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0602/01/eko03.html>, Jumlah BUMN Tersisa 89 Perusahaan di 2009 Demikian hal tersebut dikemukakan oleh Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil di kantornya, Gedung Garuda, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat 30 Januari 2009.
- ⁷ <http://www.depkop.go.id>
- ⁸ www.tempo.com, “Usaha Kecil Menengah Harus Terus Ditingkatkan”, Kamis, 04 Agustus 2005.
- ⁹ Ibid.
- ¹⁰ Loekman Soetrisno, *Kemiskinan, Perempuan, & Pemerdayaan*, (Yogyakarta: penerbit kanisius, 1997), hal. 69
- ¹¹ Alfian miko, pekerja wanita pada industri rumah tangga sandang di propinsi sumatra barat, pusat penelitian kependudukan UGM 1991.
- ¹² Noer Soetrisno, “Posisi dan Peran Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia Proyeksi Menyongsong Era Otonomi dan Perdagangan Bebas”; Makalah yang disampaikan dalam Seminar memperingati Hari Ulang tahun Koperasi Ke 53 Di Jawa Timur, 2000
- ¹⁴ <http://www.pkesinteraktif.com/content/view/1608/33/lang.id/>
- ¹⁵ Shuj iro Urata, “Policy Recommendation

- for SME Promotion in the Republic of Indonesia”, JICA Senior Advisor to Coordination Minister of Economy, Finance and Industri, Jakarta 2000.
- ¹⁶ Efri S. Bahri/Penulis 15 Januari 2004 Membangun Kelembagaan UMKM, <http://www.pkesinteraktif.com/content/view/1608/33/lang,id/>
- ¹⁷ ibid hlm 83, Bandingkan kedua prinsip tersebut dengan gagasan awal Rawls mengenai dua prinsip keadilan, first : each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for other second : social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone’s advantaged, and (b) attached to positions and offices open to all di hlm 60
- ¹⁸ ibid,
- ²² Program pembiayaan bagi koperasi dan usaha kecil dan menengah, kementerian negara koperasi dan usaha kecil menengah(Jakarta, diterbitkan oleh Humas kementerian koperasi dan UKM), hal. 15
- ²³ Ibid. hal 17
- ²⁴ Ibid. hal 18
- ²⁵ Ibid. hal 19
- ²⁶ Ibid. hal 20
- ²⁷ M. Yunus Zain, MA dkk, *Skema Pembiayaan Perbankan Daerah Menurut Karakteristik Umkm Pada Sektor Ekonomi Unggulan Di Sulawesi Selatan ...lihat juga www.kompas.com, “BRI Tetap Berkonsentrasi pada Kredit UMKM”, Jakarta, 15 April 2004*
- ²⁸ Investor Daily, “Pajak UMKM Dipangkas Jadi 0,75%”, Senin 23 Juni 2008

Daftar Pustaka

- A.B. Susanto Kanal Transformasi Bisnis & Budaya Perusahaan <http://www.wikimu.com/News/Print.aspx?id=2224>, Senin, 30 April 2007.
- Abdul Kadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan di Indonesia* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991), lihat juga Ridwan Khairandi, *Pengantar Hukum Dagang*, (FH UII Press, 2006).
- Abdullah Alwi Haji Hassan, 1997, *Sales and Contracts in Early Islamic Commercial Law*, Kitab Bhavan, New Delhi.
- Adam Smith, 1965, *An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nation* (the Edwin Cannan Edititon), The Modern Library, New York.
- Alfan miko, pekerja wanita pada industri rumah tangga sandang di propinsi sumatra barat, pusat penelitian kependudukan UGM 1991.
- Alfan miko, pekerja wanita pada industri rumah tangga sandang di propinsi sumatra barat, pusat penelitian kependudukan UGM 1991.
- Alfred Marshal, *Principles of Economic*, Macmillan, 1948.
- Ali Sugihardjanto^{*} KCM Minggu, 26 Agustus 2001, *Ekonomi Rakyat, Kapitalisme, dan Slogan Politik* <http://media.isnet.org/islam/Etc/Perusahaan.html>
- Ali Sugihardjanto, "Kekuasaan Negara versus Kekuasaan Perusahaan-perusahaan", <http://media.isnet.org/islam/Etc/Perusahaan.html>, 31 Maret 2008
- Ali Syaief, *UMKM-Pembinaan Usaha Kecil Semrawut Pembinaan Usaha Kecil Semrawut, dimuat dalam HUPKian Rakyat, edisi* senin 12 Juli 2004 Republished at <http://www.forumUMKM.com/a3.htm#>
- Ali, Suryadharma, (2007). *Kembangkan Lembaga Keuangan Mikro dari Dana CSR* (Wawancara dalam Majalah *Bisnis & CSR: Reference for Decision Maker*).
- Ali, Suryadharma, (2007). *Kembangkan Lembaga Keuangan Mikro dari Dana CSR* (Wawancara dalam Majalah *Bisnis & CSR: Reference for Decision Maker*).

- Aloysius Gunadi Brata – Lembaga Penelitian Universitas Atmajaya, Yogyakarta (UAJY).
- Angga Aliya, 2009, Jumlah BUMN Tersisa 89 Perusahaan di 2009 Demikian hal tersebut dikemukakan oleh Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil di kantornya, Gedung Garuda, Jalan Medan Merdeka Selatan <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0602/01/eko03.html>, Jakarta, Jumat 30 Januari 2009.
- Anthony Giddens, *The Third Way*, Jalan, Ketiga”, Pembaharuan Demokrasi Social, Gramedia, 1999.
- Aristoteles, 2004, *Republik*, Bentang Budaya.
- Bakan, Joel, 2004, *The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power*, New York: Free Press).
- Bantu UMKM, Perbankan Harus Ubah Paradigma Rabu (14/1), (Kompas, 15 Januari 2004).
- Berry, A., E. Rodriquez, dan H. Sandeem, 2001, “Small and Medium Enterprises Dynamics in Indonesia.” *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 37 (3).
- Beth Stephens, 2002 *The Amoralty Of Profit: Transnational Corporations And Human Rights*, Berkeley Journal of International Law.
- Bruce Brown, 2003, *History of Corporation; What is corporation?*, http://www.astonisher.com/archives/corporation_intro.html.
- Bryan A Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition.
- Bung Hatta, demokrasi kita; idealisme & realitas serta unsure yang memperkuatnya (Jakarta: Balaipustaka, 2004),. Richard Hatch. 2000 Overcoming the limitations of size: Network Strategies for SME in Asia (Paper for the ABD/OECD workshop on SME Financing in Asia).
- Chossudovsky, Michel (1997). *The Globalisation of Poverty: Impacts of IMF and World Bank Reforms*. London & New Jersey: Zed Books.
- Clark, Ian (1997). *Globalization and Fragmentation: International Relations in the Twentieth Century*. Oxford & London: Oxford University Press.
- David C Korten, *When Corporatin Rule The World*, (Earthscan Publication Ltd, London 1999).
- David nelken, “using te concept of legal culture”, forthcoming in the Australian journal of legal philosophy 2004.
- Dwi Condro Triono, Makalah Seminar Setengah Hari dengan tema “Dilema Pembangunan Bidang Keteknikan Dalam Krisis Perekonomian Indonesia” Fakultas Teknik Universitas Janabadra Yogyakarta. Tanggal 15 Agustus 2001.
- Dwi Condro Triono, Makalah Seminar Setengah Hari dengan tema “Dilema Pembangunan Bidang Keteknikan Dalam Krisis Perekonomian Indonesia” Fakultas Teknik Universitas Janabadra Yogyakarta. Tanggal 15 Agustus 2001.
- Efri S. Bahri/Penulis 15 Januari 2004 Membangun Kelembagaan UMKM, <http://www.pkesinteraktif.com/content/view/1608/33/lang.id/>
- Efri S. Bahri/Penulis 15 Januari 2004 Membangun Kelembagaan UMKM, <http://www.pkesinteraktif.com/content/view/1608/33/lang.id/>
- Eko NopiansyahBCA, Astra, Pertamina Kolaborasi Berdayakan UMKM Ekonomi Kerakyatan (Sebuah Gerakan Perlawanan Rakyat) <http://www.banten.go.id/forum/index.php?topic=184.0>
- Ella Gapken Jager, 2005, Verenigde

- Oostindische Compagnie (VOC), The Dutch East Indian Company, Kluwer Legal Publisher.
- Erlangga Djumena, "Selain Butuh Modal, UMKM Perlu Dilindungi Laporan", <http://www2.kompas.com/utama/news/0204/24/035328.htm>,
- F. Antonius Alijoyo, tanpa tahun, *Corporate Code of Conduct*, Forum for Corporate Governance in Indonesia, www.fcgi.or.id
- Francis Fukuyama, *Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, (Yogyakarta, penerbit, Qalam).
- Frank René López, Winter 2004, *Corporate Social Responsibility In A Global Economy After September 11: Profits, Freedom, And Human Rights*, Mercer Law Review.
- Friedman, Milton, (1982), *Capitalism and Freedom: The Classic Statement of Milton Friedman's Economic Philosophy*, The University of Chicago Press, Chicago.
- G. Wu, *Biografi Orang Sukses: Mark & Spencer*, (Grasindo, 2006)
- Gabel, Medard dan Henry Bruner, 2003, *Global Inc.: An Atlas of the Multinational Corporation*. (Medard Gabel dan Henry Bruner, 2003).
- Globalisasi Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, <http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi>
- Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*, penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- H. M. Yunus Zain, MA dkk, *Skema Pembiayaan Perbankan Daerah Menurut Karakteristik Umkm Pada Sektor Ekonomi Unggulan Di Sulawesi Selatan* www.kompas.com, "BRI Tetap Berkonsentrasi pada Kredit UMKM", Jakarta, 15 April 2004
- Hernando de Soto, *The Mystery of Capital*, Penerbit Qalam.
- Hery Nugroho, *Perjalanan Panjang Ekonomi Indonesia: Dari Isu Globalisasi Hingga Krisis Ekonomi adalah mahasiswa Program Magister Ekonomika Pembangunan UGM Angkatan XVI, konsentrasi Pembangunan Daerah. Sejak 1992 bekerja sebagai staf Peneliti pada Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (d/h PAU Studi Ekonomi), Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta* <http://ekawati-nurfadilah.blogspot.com/2007/11/grameen-bank-nya-muhammad-yunus.html> "Grameen Bank-nya Muhammad Yunus". [http://id.wikipedia.org/wiki/Honda Sunday](http://id.wikipedia.org/wiki/Honda_Sunday), October 28, 2007 http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_teoriekonomi, "Sejarah Teori Ekonomi", http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_teoriekonomi, "Sejarah Teori Ekonomi", 20 September 2007 <http://ideas.repec.org/p/uow/depec1/wp01-10.html> "Competition Policy and SMEs in Vietnam" <http://infoUMKM.wordpress.com>, UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, /2008/08/ <http://marhaenisme.wordpress.com/2008/03/02/bung-karno-adalah-orang-besar-diskala-internasional/> http://mustaqim-sirathal.blogspot.com/2008/08/umkm-kokoh-bangsa-makmur_10.html, "UMKM Dana dan Bahan Baku, Persoalan Klasik UMKM", Sukabumi., 25 Agustus 2001 http://mustaqim-sirathal.blogspot.com/2008/08/umkm-kokoh-bangsa-makmur_10.html, "UMKM Dana dan

- Bahan Baku, Persoalan Klasik UMKM”, Sukabumi, 25 Agustus 2001.
- [http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-makalah-tentang/6perenca25/08/2001_0Effendi\)naan-keuangan-bagi-usaha-kecil-menengah](http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-makalah-tentang/6perenca25/08/2001_0Effendi)naan-keuangan-bagi-usaha-kecil-menengah)
- <http://pmiikomfaksyahum.wordpress.com/2008/01/23/bca-astra-pertamina-kolaborasi-berdayakan-UMKM/>
- <http://redeyedevil.wordpress.com/2007/10/23/sejarah-henry-ford-pendiri-ford/>
- <http://sbinfocanada.about.com/od/businessinfo/g/SME.htm>, More Business Terms Glossary.
- <http://www.depkop.go.id>
- http://www.depkop.go.id/depkopgoi2008/index.php?option=com_content&view=category&layout=7&Itemid=17
- <http://www.google.co.id/cse/eh?hl=id&num=UMKM&btnG=Recherche>
- KOMFAKSYAHUM di/pada Januari 23, 2008.
- http://www.investorwords.com/2633/invisible_hand.html... Lihat secara lebih jelas dalam Adam Smith, 1965, *An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nation* (the Edwin Cannan Edititon), The Modern Library, NewYork.
- <http://www.kutaiartanegara.com/news.php?id=1649>
- <http://www.kutaiartanegara.com/news.php?id=1649>, “Pelaku Industri Rumah Tangga Diberi Motivasi dan Pembelajaran”, KutaiKartanegara, 09 September 2007.
- <http://www.lib.strath.ac.uk/busweb/guides/smedefine.htm#3>, SME stands for Small to Medium Enterprise
- <http://www.mail-archive.com/singkawang@yahoogroups.com/msg04867.html>
- <http://www.pkesinteraktif.com/content/view/1608/33/lang.id/>
- <http://www.skripsi-tesis.com>, “kelayakan-industri-rumah-tangga-virgin-coconut-oil-vco-pengrajin-plasma-pt-patria-wiyata-vico”, yogyakarta,
- <http://www.sony-k.com/ads/addclick.php?bannerid=138&zoid=0&source=toptextlink&dest=mailto%3Aadhytia%40judistia.co.id>
- <http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2007/12/22/brk,20071222-114004.id.html>Tiga Perusahaan Besar Kembangkan UMKM Sabtu, 22 Desember 2007 | 22:27 WIB
- http://www.unsoed.ac.id/newcmsfak/UserFiles/File/HUKUM/AGUSRAHARJO.htm_-_ftn1
- <http://www.usembassy-china.org.cn/econ/smes2002.html>, “China’s Small And Medium Enterprises: Room To Grow With WTO”
- <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0108/13/nasional/wapr06.htm> Wapres: Hatta Layak Disebut Bapak Koperasi Senin, 2008 November 24
- Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional; Suatu Pengantar*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005).
- India Global Summit on SMEs, Conference Proceedings, Emerging Challenges and Opportunities, 23-24 Nov. 2004, New Delhi
- Industri dan Home Industri, http://www.sinjai.go.id/baru/index.php?option=com_content&task=view&id=1393&Itemid=101 Friday, 19 December 2008
- Investor Daily, “Pajak UMKM Dipangkas Jadi 0,75%”, Senin 23 Juni 2008
- Isono Sudoko, dkk, *Pengembangan Usaha Kecil Pemihakan Setengah Hati*, Aditya Bakti, Bandung, 1995,

- Janifer Alexander, Wanita Pengusaha Di Pasar-Pasar Jawa; etnitas, gender, dan semangat kewirausahaan
- Jaribah bin Ahmad Al Haritsi, 2006, Fikih Ekonomi Umar bin Al Khathab, Penerbit Khalifah.
- Joel Bakan, the corporation pengejaran patologis terhadap harta dan tahta, penerbit erlangga, 2005.
- Joseph Stiglitz, 2006, *Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia Yang Lebih Adi*, PT Mizan Pustaka
- K Bartens, 2000, *Etika Bisnis*, Penerbit Kanisius.
- Kamis, 11 Maret 1999 Usaha Kecil-Menengah Bangkrut Massal Jakarta, Kompas
- KCM Selasa, 21 Mei 2002 Kredit Macet UMKM Sulsel Mencapai Rp 8 Trilyun
- KCM Senin, 16 Agustus 2004 Lamban, Pertumbuhan Kredit Usaha Kecil
- Keizerina Devi, 2004, Poenale Sanctie: Studi Tentang Globalisasi Ekonomi dan Perubahan Hukum di Sumatera Timur (1870-1950), Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara.
- Kenneth S. Kilimnik, *Lawyers Abroad: New Rules for Practice in a Global Economy*, 12 Dick. J. Int'l L. 269, 276 (1994)
- Kent Greenfield dan Peter C. KostantGeorge, November, 2003, *An Experimental Test Of Fairness Under Agency And Profit-maximization Constraints (With Notes On Implications For Corporate Governance)* Washington Law Review.
- Kompas Jakarta, Sabtu 14 Agustus 2007, Kuncoro, M., , *Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*. (Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2002.) hal 78
- Kwik Kian Gie, 1994. Analisis Ekonomi Politik Indonesia, (Jakarta, Penerbit Gramedia).
- Landreth and Colander, *Profit Theory in Neoclassical Economics*http://economistsview.typepad.com/economistsview/2007/06/profit_theory_i.html
- Larry J. Obhof, Fall, 2003, Why Globalization? A Look At Global Capitalism And Its Effects, University of Florida Journal of Law and Public Policy.
- Lee Drutman, Tanpa tahun, *The History of The Corporation*, Citizen Work Corporate Power Discussion Group.
- Loekman Soetrisno, Kemiskinan, Perempuan, & Pemerdayaan, (Yogyakarta: penerbit kanisius, 1997).
- Loekman Soetrisno, Kemiskinan, Perempuan, & Pemerdayaan, (Yogyakarta: penerbit kanisius, 1997), hlm. 69
- M Albow, *globalization knowledge and society*, (london: sage publication, 1990).
- M. Hatta, kolektivisme tua dan baru, *daulat rakyat*, no.25, 10 oktober 1993
- M. Yunus Zain, MA dkk, *Skema Pembiayaan Perbankan Daerah Menurut Karakteristik Ukm Pada Sektor Ekonomi Unggulan Di Sulawesi Selatan*, 15 April 2004.
- Manfred B. Steger, *Globalisme Bangkitnya Ideologi Pasar*, (Yogyakarta, penerbit Lafadl Pustaka).
- Marissa Haque, "UMKM Harus Dilindungi" *Harian Rakyat* 14 Juni 2008.<http://jamil.niriah.com/2008/07/21/marissa-haque-UMKM-harus-dilindungi/>.
- Max Webber, 2006, *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*, Pustaka Pelajar.
- Max Weber, *Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006).
- Membangun Jaringan Usaha Bagi Usaha

- Kecil Dan Menengah I Wayan Dipta
[Http://www.smeccda.com/deputi7/file_makalah/jaringan_usaha_ukm.htm](http://www.smeccda.com/deputi7/file_makalah/jaringan_usaha_ukm.htm)
- Milton Friedman, 1967, *Freedom and Capitalism* University of Chicago Press
- Mohammad Ikhsan, Usaha kecil menengah (UMKM), kondisi Makro ekonomi dan pemberdayaan melalui mekanisme pasar disampaikan pada seminar Small Medium Enterprises Developmen in Indonesia yang diselenggarakan oleh ADB/BAPENAS/ILO/WB/, LPEM-FEUI, Jakarta, 1999.
- Mubyarto, "Siklus Tujuh Tahunan Ekonomi Indonesia (1931-1966-2001-2036)", dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 16 No. 3, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- , "ekonomi rakyat dan program IDT", (Yogyakarta, Penerbit Aditya Media, 1996). Ekonomi Kerakyatan, makalah disampaikan pada pertemuan I seminar pendalaman ekonomi rakyat, YAE-bina swadaya, financial club, jakarta, 22 januari 2002.
- Ekonomi Kerakyatan, Makalah disampaikan pada Pertemuan I Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat, YAE Bina Swadaya di Finacial Club Jakarta 22 Januari 2002
- Mukti Fajar, "Hukum dan Pembangunan: Kemiskinan Bangsa: Tanggung Jawab Siapa?", *Jurnal Media Inovasi No 1 Th XV/2006*,
- , makalah seminar nasional perlindungan hokum usaha kecil menengah: berteriak di laut luas, disampaikan dalam acara PusHam UII dan dirjen Hukum dan Ham oktober 2006.
- , "Hukum dan Pembangunan: Kemiskinan Bangsa: Tanggung Jawab Siapa?", *Jurnal Media Inovasi No 1 Th XV/2006*.
- Noer Soetrismo, "Posisi dan Peran Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia Proyeksi Menyongsong Era Otonomi dan Perdagangan Bebas"; Makalah yang disampaikan dalam Seminar memperingati Hari Ulang tahun Koperasi Ke 53 Di Jawa Timur, 2000
- , "Sektor UMKM Serap 900.000 Pekerja KCM", www.depkop.go.id, Rabu, 24 Desember 2003.
- O. M. Powers, "History Of Commerce. Chapter I. Ancient Commerce. Origin Of Commerce; Egyptians; Phoenicians; Greeks", <http://chestofbooks.com/finance/economics/Commerce-and-Finance/History-Of-Commerce-Chapter-I-Ancient-Commerce-Origin-Of.html>
- Panji Anoraga, BUMN, Swasta Dan Koperasi: 3 Pelaku EkonoAnthony Giddens, *The Third Way, Jalan, Ketiga*, Pembaharuan Demokrasi Social, Gramedia, 1999, hlm. 17
- Paramita Prananingtyas, "Kajian Peraturan Perundang-undangan tentang Pengembangan Usaha Kecil Menengah" Makalah Seminar Tentang Korprasi dan UMKM pada tanggal 26 Juli 2001 di Jakarta, Indonesia, yang disponsori oleh Proyek Partnership for Economic Growth (PEG).
- Pataniari s., Kumpulan tulisan terpilih bung karno api perjuangan rakyat, (penerbit: lembaga kajian ekonomi politik, kekal indonesia) Perusahaan AS Tawarkan Kerja Sama dengan UMKM <http://sinarharapan.co.id/berita/0207/26/eko09.html>
- Pratiwi Mileniawati, www.sbinfocanada.about.com, "Apa Itu

- SME (Small to Medium Enterprise)", 09 Januari 2006.
- Sritua Arif, ekonomi kerakyatan indonesia, mengenang bung hatta bapak ekonomi kerakyatan indonesia, (jawa tengah, penerbit UMS) hal. 153
- Mudrajad Kuncoro, Ph.D, Keragaman Definisi UMKM di Indonesia, ismadjid on September 07, 2008
- Program on Corporations, Law and Democracy, "Our Hidden History of Corporations in the United States", 2000, http://www.reclaimdemocracy.org/corporate_accountability/history_corporations_us.html
- Revolusi Industri, Ensiklopedia Wikipedia Indonesia http://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi_Industri
- Richard A Posner, *Economic Analysis of Law*, Fifth Edition, A Wolters Kluwer Company and Aspen Publisher.
- Rini fidiyani, "Globalisasi Sebagai Sebuah Keniscayaan" (Telaah Tentang Makna Globalisasi dan Kemanfaatannya Bagi Indonesia)
- Robert W. Hefner, Budaya pasar Masyarakat dan moralitas dalam kapitalisme asia baru, (Jakarta, Penerbit LP3ES).
- Sajogyo dan Widjojo Nitisastro dalam sebuah artikel ilmiah populer pada tahun 1978 di harian Kompas berjudul Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan
- Sandeep gopaian, "New Treds In The Making Of International Commercial Law", Journal Of Law and Commerce, Spring 2004.
- Sayuti hasibuan, visi global;antisipasi indonesia memasuki abad ke21, (yogyakarta: penerbit pustaka pelajar).
- Sejarah Henry Ford (Pendiri Ford) <http://redeyedevil.wordpress.com/2007/10/23/sejarah-henry-ford-pendiri-ford/>
- Shuj iro Urata Ph.D, Policy Recommendation for SME Promotion in the Republic of Indonesia, JICA Senior Advisor to Coordination Minister of Economy, Finance and Industri, Jakarta 2000.
- Shujiro Urata, "Policy Recommendation for SME Promotion in the Republic of Indonesia", JICA Senior Advisor to Coordination Minister of Economy, Finance and Industri, Jakarta 2000.
- Spero, Joan E. dan Jeffrey A. Hart, 2003, *The Politics of International Economic Relations*, Wadsworth: Thomson.
- Sritua Arif, Mubyarto, Hartojo Wignjowijoto Rawamangun, 20 Mei 2000, Direktur Pusat Studi Ekonomi Internasional, Lahir di Wonosobo, 2 Mei 1947, Sarjana Ekonomi Universitas Gajah Mada, 1973, Sekolah Tinggi Filsafat Drijarkara, Jakarta, 1974-1978.
- Steven R Barth, *Corporate Ethics: The Business Code of Conduct for Ethical Employees*, (Aspatore Publisher2003).
- Stiglitz,, *Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia Yang Lebih Adi*, (PT Mizan Pustaka 2006).
- Student, Northwestern School of Law of Lewis & Clark College, J.D. expected 1998; B.S. 1995 (Scientific & Technical Communications), Michigan Technological University.
- Student, Northwestern School of Law of Lewis & Clark College, J.D. expected 1998; B.S. 1995 (Scientific & Technical Communications), Michigan Technological University.
- Sumantoro, 1987, *Kegiatan Perusahaan Multi Nasional: Problema Politik, Hukum dan Ekonomi Dalam Pembangunan Nasional*,

- Penerbit Gramedia.
- Supriyantho Khafid, Jumlah BUMN akan Dipangkas Dari 140 ke 125, <http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2007/12/09/brk,20071209-113183,id.htm> Minggu, Jakarta, 09 Desember 2007.
- Supriyantho Khafid, Jumlah BUMN akan Dipangkas Dari 140 ke 125, <http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2007/12/09/brk,20071209-113183,id.htm> Minggu, Jakarta, 09 Desember 2007.
- Suptrisno, kapita selekta ekonomi indonesia (suatu studi), (yogyakarta, penerbit andi offset).
- Syafiuddin, <http://www2.kompas.com/utama/news/0204/24/035328.htm>
- Tania Murray Li, Membangun Budaya Kapitalis Prolem Melayu Singapura Dan Mempertimbangkan Kembali Kewirausahaan.
- The Silk Road, Wikipedia, Ensiklopedia Kisah Jalur Sutra, Ensiklopedia Wikipedia bahasa Indonesia, http://id.wikipedia.org/wiki/Jalur_Sutra Tokoh Indonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia), dari Buku Makam Bung Hatta 1982 dan berbagai sumber) Diposkan oleh komunitas dwikora nunukan di 11/24/2008 02:48:00 PM <http://komunitasdwikora.blogspot.com/2008/11/bung-hatta-bapak-koperasi-indonesia.html>
- Tony Djogo, 2005, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*, Bertabumi <http://www.beritabumi.or.id/artikel3>.
- Trade Promotion Coordinating Comm., Toward a National Export Strategy 47 (1993) [hereinafter TPCC 1993]. For an overview of the NES, see generally Juan P. Morillo, The Clinton Administration's New National Export Strategy, 25 *Law & Pol'y Int'l Bus.* 1113, 1113 (1994); Vickery, *supra* note 3.
- Trade Promotion Coordinating Comm., Toward The Next American Century: A U.S. Strategic Response to Foreign Competitive Practices 8 (1996).
- U.S. Dept. of Commerce, A Profile of U.S. Exporting Companies, 1992 (last modified Aug. 22, 1997) <http://www.census.gov/foreign-trade/miscedrel.html>
- UMKM hadapi dampak lanjutan krisis global Oleh Mulia Ginting Munthe Wartawan Bisnis Indonesia Selasa, 06/01/2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dalam BAB VII tentang MODAL dalam pasal
- Pasal 41
- Wade Starr, "A History of Commerce: A Practical Course in Miracles" http://www.the7thfire.com/Politics%20and%20History/a_new_beginning/a_history_of_commerce.htm.
- Wibowo Sejarah Globalisasi Dan Korporasi, 2003, "Globalisasi, Kapitalisme Global dan Matinya Demokrasi" dalam Bre Redana, JB Kristanto, Nirwan Ahmad Arsuka, eds., *Esei-esei 2003 Bentara*, Jakarta: Penerbit Kompas.
- Will Kymlicka, 2004, *Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus atas Teori-Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar.
- WS Rendra, "Demokrasi Mensyaratkan adanya Daulat Manusia" *Jurnal Media Inovasi No 1 Th.X Tahun, 2000.*
- www.tempo.com, "Usaha Kecil Menengah

Harus Terus Ditingkatkan”, Kamis, 04
Agustus 2005.

Yahya M Abdul Aziz, visi global; antisipasi
Indonesia memasuki abad ke-21,
(Yogyakarta: penerbit pustaka pelajar).

Yanuar Nugroho (a), 2005, *Mencerna
Kondisi Sosial Dunia*, Uni Sosial Demokrat,
hlm 2 <http://www.unisosdem.org/>).



UMKM & GLOBALISASI EKONOMI

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu aktor ekonomi yang penting di Indonesia. Karena jumlahnya yang signifikan dan menyerap tenaga kerja yang luar biasa banyaknya. Keberadaannya menarik untuk dikaji disetiap tahap perjalanan pembangunan ekonomi bangsa. Sejak kelahirannya yang menjadi konsep pemikiran para founding fathers, hingga peranannya dalam penciptaan kesejahteraan bangsa.

Secara naratif buku ini akan mengkaji dari prespektif hukum ekonomi. Berawal dari kelahiran UMKM sebagai aktivitas kehidupan manusia dalam mencukupi kebutuhannya, keberadaannya dalam globalisasi ekonomi, kemampuan bertahan dalam krisis hingga masa depan UMKM di Indonesia. Baik secara filosofis, teoritis sampai pada dataran praktis. Dalam satu bagian buku ini, penulis akan mengkaji khusus mengenai perlindungan hukum UMKM di Indonesia, baik secara konstitusional, maupun kebijakan ketika harus masuk era pasar bebas.